



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Buku XXXVII
RPIW Provinsi Papua Pegunungan



Recana Pengembangan
Infrastruktur Wilayah 2025-2034

Papua Pegunungan



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilakukan berdasarkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proses penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempertimbangkan masukan teknis dari Unit Organisasi Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta hasil koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 yang selanjutnya disebut RPIW Tahun 2025-2034.

KEDUA : RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. RPIW Provinsi Aceh;
2. RPIW Provinsi Sumatera Utara;

3. RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
 4. RPIW Provinsi Sumatera Barat;
 5. RPIW Provinsi Bengkulu;
 6. RPIW Provinsi Riau;
 7. RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
 8. RPIW Provinsi Jambi;
 9. RPIW Provinsi Lampung;
 10. RPIW Provinsi Bangka Belitung;
 11. RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
 12. RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
 13. RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
 14. RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
 15. RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
 16. RPIW Provinsi Banten;
 17. RPIW Provinsi DKI Jakarta;
 18. RPIW Provinsi Jawa Barat;
 19. RPIW Provinsi Jawa Tengah;
 20. RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 21. RPIW Provinsi Jawa Timur;
 22. RPIW Provinsi Bali;
 23. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 24. RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 25. RPIW Provinsi Gorontalo;
 26. RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
 27. RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
 28. RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
 29. RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
 30. RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
 31. RPIW Provinsi Maluku Utara;
 32. RPIW Provinsi Maluku;
 33. RPIW Provinsi Papua;
 34. RPIW Provinsi Papua Barat;
 35. RPIW Provinsi Papua Tengah;
 36. RPIW Provinsi Papua Selatan;
 37. RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
 38. RPIW Provinsi Papua Barat Daya,
- disusun dalam bentuk buku sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

1. pendahuluan;
2. arah kebijakan;
3. profil wilayah dan potensi daerah;
4. profil dan kinerja infrastruktur;
5. permasalahan dan isu strategis;
6. skenario pengembangan wilayah;
7. analisis kebutuhan infrastruktur;
8. rencana aksi pembangunan infrastruktur; dan
9. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW.

- KEEMPAT : RPIW Tahun 2025-2034 menjadi acuan kewilayahan dan penentuan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan RPIW Tahun 2025-2034 dilakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034.
- KETUJUH : Peninjauan kembali RPIW Tahun 2025-2034 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- KEDELAPAN : Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan oleh pimpinan unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan infrastruktur wilayah.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 817/KPTS/M/2024
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
WILAYAH

RPIW Tahun 2025-2034

Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah 38 (tiga puluh delapan) Provinsi untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2034 disusun dalam bentuk buku yang meliputi:

1. Buku I: RPIW Provinsi Aceh
2. Buku II: RPIW Provinsi Sumatera Utara;
3. Buku III: RPIW Provinsi Sumatera Selatan;
4. Buku IV: RPIW Provinsi Sumatera Barat;
5. Buku V: RPIW Provinsi Bengkulu;
6. Buku VI: RPIW Provinsi Riau;
7. Buku VII: RPIW Provinsi Kepulauan Riau;
8. Buku VIII: RPIW Provinsi Jambi;
9. Buku IX: RPIW Provinsi Lampung;
10. Buku X: RPIW Provinsi Bangka Belitung;
11. Buku XI: RPIW Provinsi Kalimantan Barat;
12. Buku XII: RPIW Provinsi Kalimantan Timur;
13. Buku XIII: RPIW Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Buku XIV: RPIW Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Buku XV: RPIW Provinsi Kalimantan Utara;
16. Buku XVI: RPIW Provinsi Banten;
17. Buku XVII: RPIW Provinsi DKI Jakarta;
18. Buku XVIII: RPIW Provinsi Jawa Barat;
19. Buku XIX: RPIW Provinsi Jawa Tengah;
20. Buku XX: RPIW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
21. Buku XXI: RPIW Provinsi Jawa Timur;
22. Buku XXII: RPIW Provinsi Bali;
23. Buku XXIII: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Buku XXIV: RPIW Provinsi Nusa Tenggara Barat;
25. Buku XXV: RPIW Provinsi Gorontalo;
26. Buku XXVI: RPIW Provinsi Sulawesi Barat;
27. Buku XXVII: RPIW Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Buku XXVIII: RPIW Provinsi Sulawesi Utara;
29. Buku XXIX: RPIW Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Buku XXX: RPIW Provinsi Sulawesi Selatan;
31. Buku XXXI: RPIW Provinsi Maluku Utara;
32. Buku XXXII: RPIW Provinsi Maluku;
33. Buku XXXIII: RPIW Provinsi Papua;
34. Buku XXXIV: RPIW Provinsi Papua Barat;
35. Buku XXXV: RPIW Provinsi Papua Tengah;
36. Buku XXXVI: RPIW Provinsi Papua Selatan;

- 37. Buku XXXVII: RPIW Provinsi Papua Pegunungan; dan
- 38. Buku XXXVIII: RPIW Provinsi Papua Barat Daya;



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. Basuki Hadimuljono
M. BASUKI HADIMULJONO

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menuntaskan penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Tahun 2025-2034. Penyusunan RPIW ini merupakan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR.

RPIW hadir untuk menjawab tantangan pengembangan wilayah 10 tahun ke depan melalui dukungan infrastruktur PUPR. Dalam penyusunannya, saya mengarahkan RPIW melanjutkan arahan pembangunan yang telah dicapai dari RPJMN 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 dengan memperhatikan keberlanjutan manfaat infrastruktur PUPR terbangun.

Saya melihat RPIW ini memiliki peran strategis. Pertama, RPIW merupakan *platform* sinergi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR ke depan sehingga perlu diacu pada setiap rangkaian proses perencanaan dan pemrograman pada unit organisasi teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Kedua, RPIW menjadi masukan arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Renstra Kementerian PUPR. Ketiga, RPIW merupakan inovasi Kementerian PUPR dalam mewujudkan akuntabilitas perencanaan infrastruktur PUPR berbasis kewilayahan.

Melihat peran strategis RPIW, saya menyetujui usulan penetapan RPIW ini melalui Keputusan Menteri. Dengan penetapan ini, RPIW dapat lebih efektif menjadi basis teknokratik untuk koordinasi dan konsolidasi implementasi pembangunan infrastruktur PUPR bersama Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Daerah dalam forum-forum perencanaan dan pemrograman pembangunan setiap tahunnya.

Akhir kata, saya minta BPIW dapat mengawal implementasi RPIW dan memastikan dilaksanakan oleh unit organisasi teknis terkait. Selain itu, agar BPIW secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Jakarta, 17 April 2024

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

M. Basuki Hadimuljono



M. BASUKI HADIMULJONO
Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



YUDHA MEDIAWAN

Kepala Badan Pengembangan
Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur telah menjadi bagian penting pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Peran ini masih menjadi salah satu prioritas pada periode-periode selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 bersama dengan pembangunan sektor lainnya. Demikian pula dengan infrastruktur PUPR yang memiliki peran dan kontribusi dalam mendukung pengembangan konektivitas wilayah, menjaga ketahanan air, mendukung ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas permukiman baik di perkotaan maupun di perdesaan serta mendukung pengembangan sektor-sektor strategis nasional seperti pariwisata dan industri dalam rangka pengembangan wilayah.

Menyongsong RPJMN 2025-2029 dan sesuai amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR, BPIW telah menyelesaikan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Penekanan RPIW lebih kepada upaya mensinergikan program pembangunan infrastruktur PUPR dalam rangka mewujudkan pengembangan wilayah sesuai Rencana Tata Ruang Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan perencanaan pembangunan sektoral lainnya.

Muatan perencanaan yang diatur dalam RPIW telah melalui proses koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan masukan dari Unit Organisasi Teknis Kementerian PUPR. RPIW akan menjadi acuan teknokratis arahan kewilayahan dan arahan kawasan prioritas dalam penyusunan Rencana Strategis PUPR periode mendatang serta memorandum program infrastruktur PUPR yang akan dibahas dalam Forum Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Konsultasi Regional (Konreg), dan forum-forum pemrograman lainnya.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPIW 38 Provinsi ini. Dengan diacunya RPIW, pembangunan infrastruktur PUPR diharapkan dapat melanjutkan kebermanfaatan infrastruktur PUPR terbangun serta lebih memberikan manfaat dan nilai tambah tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan pengembangan wilayah.

Jakarta, 17 April 2024

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah


Yudha Mediawan



Tim Pengarah:

Dr. Ir. Yudha Mediawan, M.Dev.Plg.
Pranoto, S.T., M.Dev.Plg.
Benny Hermawan, S.T., M.Sc.
Ir. Zevi Azzaino, M.Sc., Ph.D.
Boby Ali Azhari, S.T., M.Sc.
Melva Eryani Marpaung, S.T., MUM
Dr. Ir. Manggas Rudy Siahaan, M.Sc.
Ir. Abram Elsajaya Barus, M.Eng.Sc

Tim Penyusun:

Dr. Andie Pramudita Saidhidayat, S.T., M.Si.
Dr. Doedoeng Zenal Arifin, S.T., M.T.
Raden Dady Indratmo, ST, MT
Stephanus Raden Kristianto, ST, M.Eng.Sc
Adito Maulana, ST
Sri Murdiati Rin Permata Sari, ST
Aryowibowo Nurprilianto Nugroho, ST, MT
Ramadhan Tirta Saputra, ST
Balqis Febriyantina Gunari, ST, MPWK
Fanny Septiana, ST
Miko Luhde Sritara Savitri, ST



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR PETA	xx
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang	1-1
1.2 Kedudukan dalam Kebijakan	1-6
1.3 Urgensi Penyusunan.....	1-8
1.4 Muatan RPIW.....	1-8
1.5 Manfaat RPIW	1-10
1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW.....	1-10
BAB II ARAH KEBIJAKAN	2-1
2.1 Kebijakan Penataan Ruang	2-1
2.1.1 Kebijakan penataan Ruang Wilayah Nasional	2-1
2.1.2 Kebijakan Penataan Ruang Pulau Papua	2-2
2.1.3 Rencana Tata Ruang Pulau Papua	2-4
2.2 Kebijakan Sektor	2-6
2.2.1 Kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024 di Pulau Papua.....	2-6
2.2.2 Kebijakan INPRES No. 9 Tahun 2020 bagi Kementerian PUPR di Pulau Papua.....	2-8
2.2.3 Kebijakan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023	2-9
2.2.4 Target Visium Kementerian PUPR 2030.....	2-9
2.2.5 Renstra Kementerian PUPR 2020-2024	2-10
2.2.6 Visi Indonesia Tahun 2045	2-10
2.2.7 Rencana Sektor Pariwisata	2-11
2.2.8 Rencana Sektor Pertanian	2-11

2.2.9 Rencana Sektor Pengelolaan Kawasan	
Perbatasan Negara	2-11
2.3 Kebijakan Pengembangan Kawasan Prioritas	2-12
2.3.1 Kebijakan Pengembangan Kawasan Prioritas	
secara umum	2-12
2.4 Agenda SDGs 2030	2-15
2.5 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	2-18
2.5.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	
Pulau Papua	2-18
2.5.2 Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PUPR	
Prioritas	2-27
BAB III PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH	3-1
3.1 Profil Wilayah Provinsi Papua Pegunungan	3-1
3.2 Profil Demografi Provinsi Papua Pegunungan	3-23
3.3 Profil Ekonomi Provinsi Papua Pegunungan	3-49
3.4 Profil Sosial Budaya Provinsi Papua Pegunungan	3-63
3.5 Interaksi Antar Kawasan di dalam Kawasan Provinsi	
Papua Pegunungan	3-69
BAB IV PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR	4-1
4.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air	4-1
4.1.1 Infrastruktur Bangunan Tampung Air	
(Bendungan, Bendung, dan Embung)	4-1
4.1.2 Infrastruktur Irigasi	4-2
4.1.3 Infrastruktur Air Baku	4-3
4.1.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya	
Air Prioritas	4-5
4.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4-7
4.2.1 Infrastruktur Jaringan Jalan	4-7
4.2.2 Infrastruktur Jembatan	4-11

4.2.3. Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan.....	4-12
4.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman	4-17
4.3.1 Sistem Penyediaan Air Minum	4-17
4.3.2 Sistem Sanitasi Pengolahan Air Limbah Domestik dan Persampahan.....	4-20
4.3.3 Sistem Drainase.....	4-28
4.3.4 Kawasan Kumuh Perkotaan Provinsi Papua Pegunungan.....	4-29
4.3.5 Bangunan Cagar Budaya Nasional	4-30
4.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan	4-31
4.5 Profil dan Kinerja Infrastruktur Non-PUPR.....	4-37
4.5.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan.....	4-37
4.5.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Energi/ Kelistrikan Provinsi Papua Pegunungan.....	4-42
4.5.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Telekomunikasi	4-44
BAB V PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	5-1
5.1 Sektor Pariwisata Sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional	5-1
5.2 Kawasan Perkotaan Provinsi Papua Pegunungan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Kegiatan Wilayah Hinterland.....	5-6
5.3 Kawasan Perbatasan Sebagai Perwujudan Aktivitas Perekonomian yang Inklusif.....	5-11
BAB VI SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH	6-1
6.1 Proyeksi Pertumbuhan.....	6-1
6.1.1 Proyeksi Demografi	6-1
6.1.2 Skenario Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua	

(pra DOB, 2022)	6-5
6.1.3 Keberlanjutan lingkungan.....	6-8
6.2 Visi dan Strategi.....	6-10
6.2.1 Perumusan Visi Wilayah.....	6-10
6.2.2 Analisis Penyusunan Strategi.....	6-12
6.3 Skenario Pengembangan	6-32
BAB VII ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR.....	7-1
7.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah di Provinsi Papua Pegunungan	7-1
7.1.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi Papua Pegunungan.....	7-1
7.1.2 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua Pegunungan.....	7-3
7.1.3 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Permukiman di Provinsi Papua Pegunungan.....	7-6
7.1.4 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Perumahan di Provinsi Papua Pegunungan.....	7-15
7.1.5 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Perhubungan ...	7-17
7.2 Analisis Prioritas Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Pegunungan.....	7-19
7.3 Analisis Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Provinsi Papua Pegunungan.....	7-29
BAB VIII RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	8-1
8.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR Provinsi Papua Pegunungan	8-1
8.1.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	8-1
8.1.2 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.....	8-4

8.1.3 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya.....	8-8
8.1.4 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Perumahan.....	8-14
8.2 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Provinsi Papua Pegunungan.....	8-17
8.2.1 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Pariwisata.....	8-17
8.2.2 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Perbatasan.....	8-21
8.2.3 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Perkotaan	8-24
BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN	
RPIW	9-1
9.1 Latar Belakang	9-1
9.2 Tujuan	9-2
9.3 Jenis Pemantauan dan Evaluasi	9-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Visium Kementerian PUPR 2030.....2-9

Tabel 2.2 Lingkup Wilayah Adat dan Strategi
Pengembangannya2-14

Tabel 2.3 Sintesis Kebijakan Provinsi Papua 2-19

Tabel 2.4 Tabel Infrastruktur Prioritas PUPR.....2-29

Tabel 3.1 Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Pegunungan3-2

Tabel 3.2 Luas Tutupan Lahan di Provinsi Papua
Pegunungan...3-4

Tabel 3.3 Luas Kawasan Lindung di Provinsi Papua
Pegunungan.....3-5

Tabel 3.4 Luas Kawasan Ekoregion di Provinsi
Papua Pegunungan3-10

Tabel 3.5 Nilai Indeks Resiko Provinsi Papua Pegunungan
dari Tahun 2015 Sampai Tahun 2021.....3-12

Tabel 3.6 Profil Fisik dan Kebencanaan Provinsi
Papua Pegunungan3-13

Tabel 3.7 Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan
Air Bersih di Provinsi Papua Pegunungan.....3-18

Tabel 3.8 Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan
Pangan di Provinsi Papua Pegunungan.....3-20

Tabel 3.9 Profil Tutupan Lahan dan Indeks Jasa
Ekosistem Provinsi Papua Pegunungan.....3-21

Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2012-20213-24

Tabel 3.11 Kepadatan Penduduk di Provinsi Papua
Pegunungan Tahun 2012-2021.....3-25

Tabel 3.12 IPM Provinsi Papua Pegunungan Tahun	
2012-2021	3-28
Tabel 3.13 AHH di Provinsi Papua Pegunungan Tahun	
2012-2021	3-31
Tabel 3.14 RLS Provinsi Papua Pegunungan Tahun	
2012-2021	3-32
Tabel 3.15 Pengeluaran Per Kapita Provinsi Papua	
Pegunungan Tahun 2012-2021	3-34
Tabel 3.16 Tingkat Presentase Angkatan Kerja Provinsi	
Papua Pegunungan Tahun 2012-2021	3-36
Tabel 3.17 Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Papua	
Pegunungan Tahun 2012-2021	3-36
Tabel 3.18 Tingkat Persentase Pengangguran Terbuka di	
Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021	3-38
Tabel 3.19 Jumlah Pengangguran Terbuka di	
Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021	3-39
Tabel 3.20 Tingkat Persentase Kemiskinan	
Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021	3-42
Tabel 3.21 Jumlah Penduduk Miskin di	
Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021	3-42
Tabel 3.22 Profil Demografi Provinsi Papua Pegunungan	3-45
Tabel 3.23 Jumlah Penduduk Miskin di	
Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021	3-47
Tabel 3.24 Distribusi Sektor PDRB Provinsi	
Papua Pegunungan Tahun 2012-2021	3-52
Tabel 3.25 Distribusi PDRB Provinsi Papua Pegunungan	
Tahun 2012-2021	3-52
Tabel 3.26 Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi	
Papua Pegunungan Tahun 2012-2021	3-53

Tabel 3.27 Investasi di Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2010-20213-55

Tabel 3.28 Ekonomi Dasar Provinsi Papua Pegunungan 3-56

Tabel 3.29 Komoditas Unggulan Pertanian di Provinsi
Papua Pegunungan..... 3-58

Tabel 3.30 Komoditas Unggulan Industri di Provinsi
Papua Pegunungan.....3-60

Tabel 3.31 Komoditas Unggulan Pariwisata di Provinsi
Papua Pegunungan..... 3-61

Tabel 3.32 Profil Sosial Budaya Provinsi Papua Pegunungan.3-68

Tabel 4.1 Bendung di Provinsi Papua Pegunungan4-1

Tabel 4.2 Embung di Provinsi Papua Pegunungan.....4-2

Tabel 4.3 Daerah Irigasi di Provinsi Papua Pegunungan4-3

Tabel 4.4 Kinerja Sumber Air Baku di Provinsi
Papua Pegunungan 4-4

Tabel 4.5 Tabel Profil dan Kinerja Infrastruktur Air Baku
Sungai Wasi4-5

Tabel 4.6 Tingkat Pelayanan Jalan di Provinsi Papua
Pegunungan4-9

Tabel 4.7 Jumlah dan Kondisi Kemantapan Jembatan di
Provinsi Papua Pegunungan..... 4-11

Tabel 4.8 Profil dan Kinerja Jalan Perbatasan Ruas Towe
Hitam - Oksibil..... 4-12

Tabel 4.9 Profil dan Kinerja Jalan Ruas Wamena-
Usilimo-Passvaley-Elelim-Bts. Provinsi Papua..... 4-15

Tabel 4.10 Presentase Akses Air Minum Layak Di Provinsi
Papua Pegunungan4-18

Tabel 4.11 Persentase Cakupan Pelayanan Sistem
Jaringan Perpipaan di Provinsi Papua

Pegunungan	4-19
Tabel 4.12 Akses Sanitasi Provinsi Papua Pegunungan.....	4-21
Tabel 4.13 Lokasi dan cakupan Pelayanan di TPA di Provinsi Papua Pegunungan.....	4-27
Tabel 4.14 Data Penanganan Drainase Lingkungan di Provinsi Papua Pegunungan.....	4-29
Tabel 4.15 Lokasi dan Luasan Kawasan Kumuh di Provinsi Papua Pegunungan.....	4-29
Tabel 4.16 Persentase Jumlah rumah berdasarkan status penguasaan rumah tinggal di Provinsi Papua Pegunungan.....	4-32
Tabel 4.17 Backlog Pemenuhan Perumahan Provinsi Papua Pegunungan	4-33
Tabel 4.18 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Pegunungan	4-34
Tabel 4.19 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Pegunungan 2017 - 2022	4-35
Tabel 4.20 Terminal di Provinsi Papua Pegunungan.....	4-37
Tabel 4.21 Bandar Udara di Provinsi Papua Pegunungan	4-39
Tabel 4.22 Pergerakan Penumpang di Provinsi Papua Pegunungan	4-41
Tabel 4.23 Kapasitas Pembangkit Listrik Terpasang di Provinsi Papua Pegunungan	4-42
Tabel 4.24 Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik di Provinsi Papua Pegunungan	4-43
Tabel 5.1 Isu Strategis Fokus Pariwisata	5-3
Tabel 5.2 Isu Strategis Fokus Kawasan Perkotaan	5-8
Tabel 5.3 Isu Strategis Fokus Kawasan Perbatasan.....	5-13
Tabel 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Provinsi Papua	

Pegunungan Dengan Skenario Pengembangan Wilayah.....	6-4
Tabel 6.2 Asumsi Multiplier terhadap proyeksi pertumbuhan..	6-6
Tabel 6.3 Kemampuan Penyediaan Pangan Provinsi Papua Pegunungan	6-9
Tabel 6.4 Analisis PESTLE (Makro) Fokus Kawasan Pariwisata	6-12
Tabel 6.5 Analisis PESTLE (Makro) Kawasan Perkotaan	6-14
Tabel 6.6 Analisis PESTLE (Makro) Kawasan Perbatasan.....	6-15
Tabel 6.7 Analisis 5 Force (Meso) Fokus Kawasan Pariwisata ..	6-19
Tabel 6.8 Analisis 5 Force (Meso) Fokus Kawasan Perkotaan .	6-20
Tabel 6.9 Analisis 5 Force (Meso) Fokus Kawasan Perbatasan.....	6-21
Tabel 6.10 Analisis SWOT Fokus Pariwisata	6-23
Tabel 6.11 Analisis SWOT Fokus Kawasan Perkotaan.....	6-26
Tabel 6.12 Analisis SWOT Fokus Perbatasan	6-29
Tabel 6.13 Parameter Penilaian Fokus Pariwisata	6-32
Tabel 6.14 Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Pariwisata	6-33
Tabel 6.15 Parameter Penilaian Fokus Kawasan Perkotaan	6-34
Tabel 6.16 Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Perkotaan	6-34
Tabel 6.17 Parameter Penilaian Fokus Perbatasan.....	6-35
Tabel 6.18 Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Perbatasan..	6-36
Tabel 7.1 Kebutuhan Air Baku di Provinsi Papua Pegunungan	7-2
Tabel 7.2 Daerah Irigasi di Provinsi Papua Pegunungan.....	7-3
Tabel 7.3 Analisis Pembangunan dan Penanganan Jalan di Provinsi Papua Pegunungan	7-3
Tabel 7.4 Jumlah dan Kapasitas SPAM Terpasang di Provinsi Papua Pegunungan	7-6
Tabel 7.5 Kebutuhan Air Minum di Provinsi Papua	

Pegunungan untuk Kegiatan Domestik.....	7-8
Tabel 7.6 Kebutuhan Air Minum di Provinsi Papua Pegunungan Sesuai dengan Rencana Pengembangan Kawasan Tahun 2034.....	7-9
Tabel 7.7 Perhitungan Kebutuhan Penanganan Air Limbah Domestik di Provinsi Papua Pegunungan Sesuai dengan Rencana Pengembangan Kawasan..	7-11
Tabel 7.8 Perhitungan Kebutuhan Penanganan Persampahan Provinsi Papua Pegunungan Sesuai dengan Rencana Pengembangan Kawasan.	7-13
Tabel 7.9 Kebutuhan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Papua Pegunungan.....	7-15
Tabel 7.10 Analisis Kesenjangan Backlog Kepemilikan Rumah di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2019.....	7-16
Tabel 7.11 Kebutuhan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Tahun 2022.....	7-17
Tabel 7.12 Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR di Provinsi Papua Pegunungan.....	7-21
Tabel 7.13 Analisis Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Provinsi Papua Pegunungan	7-30
Tabel 7.14 Analisis Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Prioritas di Provinsi Papua Pegunungan	7-33
Tabel 8.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi Papua Pegunungan.....	8-2
Tabel 8.2 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua Pegunungan	8-4

Tabel 8.3 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Cipta
Karya di Provinsi Papua Pegunungan8-8

Tabel 8.4 Rencana Pengembangan Infrastruktur
Perumahan di Provinsi Papua Pegunungan.....8-14

Tabel 8.5 Rencana Aksi Sektor Pariwisata8-18

Tabel 8.6 Rencana Aksi Sektor Perbatasan 8-22

Tabel 8.7 Rencana Aksi Sektor Perkotaan..... 8-25

Tabel 9.1 Contoh Matriks Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan RPIW 9-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Posisi RPIW dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR	1-7
Gambar 1.2	Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya	1-8
Gambar 1.3	Kerangka Pikir Penyusunan RPIW	1-10
Gambar 2.1	Target Renstra Kementerian PUPR 2020-2024...	2-10
Gambar 2.2	Tujuan TPB/SDGs.....	2-16
Gambar 2.3	Strategi arah kebijakan pengembangan wilayah	2-18
Gambar 3.1	Perkembangan Penduduk Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021	3-23
Gambar 3.2	IPM di Kawasan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012 – 2021	3-26
Gambar 3.3	AHH Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012–2021.....	3-30
Gambar 3.4	RLS Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012 – 2021	3-31
Gambar 3.5	Pengeluaran Per Kapita Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021	3-33
Gambar 3.6	Tingkat Angkatan Kerja di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021	3-35
Gambar 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012 – 2021.....	3-37
Gambar 3.8	Tingkat Kemiskinan Wilayah Provinsi Papua Pegunungan.....	3-41
Gambar 3.9	Tingkat Ketimpangan di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021	3-43

Gambar 3.10 PDRB dan LPE Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021	3-49
Gambar 3.11 PDRB Lapangan Usaha Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2017-2021	3-51
Gambar 3.12 Investasi Masuk Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2010 – 2021	3-55
Gambar 3.13 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan	3-56
Gambar 3.14 Wilayah Adat Laa Pago di Provinsi Papua Pegunungan	3-64
Gambar 3.15 Interaksi Antar Kawasan di Provinsi Papua Pegunungan	3-71
Gambar 4.1 Peta sebaran bangunan tampungan air di Provinsi Papua Pegunungan	4-2
Gambar 4.2 Sistem Jaringan Jalan dan Konektivitasnya Dengan Kawasan Strategis di Provinsi Papua Pegunungan	4-8
Gambar 4.3 Jalur Distribusi Komoditas Unggulan di Provinsi Papua Pegunungan	4-10
Gambar 4.4 Sebaran TPA di Provinsi Papua Pegunungan	4-26
Gambar 4.5 Sebaran Kawasan Kumuh di Provinsi Papua Pegunungan	4-30
Gambar 4.6 Peta Sebaran Bangunan Cagar Budaya Nasional dan Tempat Bersejarah di Provinsi Papua Pegunungan	4-31
Gambar 4.7 Backlog Perumahan di Provinsi Papua Pegunungan	4-34
Gambar 4.8 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2022	4-36

Gambar 4.9 Sistem Transportasi Darat, Laut dan Udara di Provinsi Papua Pegunungan.....	4-41
Gambar 4.10 Peta Rencana Pengembangan Sistem Interkoneksi 150 kV Wamena.....	4-44
Gambar 4.11 Sebaran Cakupan Jaringan Data Seluler Provider Telkomsel di Pulau Papua	4-45
Gambar 4.12 Sebaran Cakupan Jaringan Data Seluler Provider XL Axiata di Pulau Papua.....	4-45
Gambar 4.13 Sebaran Cakupan Jaringan Data Seluler Provider Indosat di Pulau Papua.....	4-46
Gambar 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Provinsi Papua (pra DOB, 2022)	6-1
Gambar 6.2 Proyeksi Pertumbuhan Alamiah Provinsi Papua Pegunungan	6-2
Gambar 6.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Business as Usual.....	6-6
Gambar 6.4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dengan Strategi Pengembangan di Provinsi Papua (pra DOB, 2022)	6-7
Gambar 6.5 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pariwisata	6-25
Gambar 6.6 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Perkotaan	6-28
Gambar 6.7 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Perbatasan.....	6-31
Gambar 7.1 Kebutuhan Pembangunan dan Penanganan Jalan di Provinsi Papua Pegunungan.....	7-5
Gambar 8.1 Peta Keterpaduan Sektor Pariwisata Provinsi Papua Pegunungan	8-17

Gambar 8.2 Peta Keterpaduan Sektor Perbatasan Provinsi
Papua Pegunungan 8-21

Gambar 8.3 Peta Keterpaduan Sektor Perkotaan Provinsi
Papua Pegunungan8-24

Gambar 9.1 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW
Dalam Tahunan9-4

Gambar 9.2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW
Dalam Lima (5) Tahunan9-6

DAFTAR PETA

Peta 3.1 Peta Administrasi Provinsi Papua Pegunungan.....	3-3
Peta 3.2 Peta Curah Hujan Provinsi Papua Pegunungan	3-6
Peta 3.3 Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2015.....	3-7
Peta 3.4 Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Pegunungan.....	3-8
Peta 3.5 Peta Kawasan Lindung Provinsi Papua Pegunungan.....	3-9
Peta 3.6 Peta Ekoregion Provinsi Papua Pegunungan	3-11
Peta 3.7 Peta Potensi Bencana Gempa Bumi di Provinsi Papua Pegunungan.....	3-15
Peta 3.8 Peta Potensi Rawan Bencana Banjir Provinsi Papua Pegunungan.....	3-16
Peta 3.9 Peta Potensi Rawan Bencana Kekeringan Provinsi Papua Pegunungan.....	3-17
Peta 3.10 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Provinsi Papua Pegunungan.....	3-19
Peta 3.11 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Provinsi Papua Pegunungan.....	3-22
Peta 3.12 Tingkat Kepadatan Penduduk di Provinsi Papua Pegunungan	3-27
Peta 3.13 Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua Pegunungan.....	3-29
Peta 3.14 Peta Sebaran TPT di Kawasan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2021.....	3-40
Peta 3.15 Peta Sebaran Tingkat Kemiskinan di Kawasan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012 – 2021.....	3-46
Peta 3.16 Peta Sebaran Tingkat Ketimpangan di Kawasan Provinsi Papua Pegunungan.....	3-48
Peta 3.17 Peta Sebaran Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Pegunungan.....	3-54

Peta 6.1	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Papua	6-8
Peta 6.2	Peta Jasa ekosistem penyediaan air bersih Papua....	6-10



BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup sub bab Latar Belakang, Kedudukan RPIW dalam Kebijakan, Urgensi Penyusunan RPIW, Muatan RPIW, Manfaat RPIW, dan Kerangka Pikir Penyusunan RPIW.

1.1 Latar Belakang

Secara administrasi Provinsi Papua Pegunungan memiliki 8 Kabupaten yang seluruhnya termasuk dalam kawasan strategis prioritas nasional RPJMN 2020-2024 berupa Lokpri Wilayah adat. Pulau Papua dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Pegunungan berlandaskan pendekatan budaya, berbasis ekologis, dan wilayah adat.

Luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan seluas 47.691,88 km² (berdasarkan data BPS tahun 2021), terdiri dari 2.634 kampung. Sekitar 79,68% atau sebanyak 2099 kampung terletak di daerah pegunungan dan sulit diakses, dimana kurang lebih 70% dari seluruh kampung tersebut masih merupakan daerah yang terisolasi dari akses transportasi darat karena faktor kondisi geografis.

Secara nasional Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan dengan koridor pertumbuhan dan pemerataan yang didukung dengan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia akan selaras dengan rencana pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga. Dokumen tersebut merupakan perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sasaran RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh

berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Percepatan pembangunan Wilayah Papua juga diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian yang sangat bergantung pada sumber daya alam ke arah perekonomian wilayah yang lebih maju dengan mendorong pengembangan industri berbasis komoditas lokal pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan; pengembangan ekonomi kemaritiman melalui industri perikanan dan pariwisata bahari; pengembangan pariwisata budaya dan alam; pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi dan tembaga; serta peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon.

Pembangunan wilayah Papua ditargetkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka sehingga pencapaian kesejahteraan secara nasional sesuai dengan perencanaan. Target pembangunan di bidang infrastruktur PUPR tersebut terdiri dari (1) prioritas pembangunan wilayah Provinsi Papua, (2) pengembangan sektor unggulan, (3) pengembangan kawasan strategis, (4) pengembangan kawasan perkotaan, (5) pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi.

Prioritas Pembangunan Wilayah Papua mengutamakan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, serta pendekatan berbasis ekologis dan tujuh wilayah adat: **Laa Pago**, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, dan Domberay sejalan dengan pelaksanaan UU No. 35/2008 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang mengamanatkan penguatan dan pemberdayaan Orang Asli Papua berlandaskan budaya dan adat yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan; pengembangan wilayah adat dalam mendukung perekonomian wilayah; dan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang mengamanatkan tentang: (1) Peningkatan kualitas dan akses pendidikan; (2) Peningkatan kualitas dan akses kesehatan; (3) Jaminan sosial dan kesejahteraan sosial; (4) Permukiman layak, air bersih dan sanitasi; (5) Pengembangan ekonomi lokal; (6) Konektivitas: Trans Papua, perhubungan laut, sungai dan udara, telekomunikasi dan internet; dan (7) Penguatan tata kelola dan kelembagaan.

Selain itu pelaksanaan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Selain berbasis wilayah adat, pembangunan Wilayah Papua akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Pengembangan Sektor Unggulan merupakan dasar pengembangan dan dukungan pembangunan untuk peningkatan perekonomian wilayah, sektor unggulan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Papua Pegunungan yaitu: lada, cengkeh, kakao dan kopi;
- 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang tersebar di Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Pengembangan Kawasan Strategis di Pulau Papua mempertimbangkan posisi geografis yang bersifat strategis memerlukan dukungan infrastruktur dengan rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur sebagai berikut:

- 1) Pembangunan jalan Trans Papua, Bandara Elelim, Bandara Sobaham, dan Bandara Oksibil;
- 2) Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda darat dan udara yang terintegrasi sebagai hub komoditas mentah maupun barang hasil olahan;
- 3) Percepatan pembangunan kawasan perbukitan dan pegunungan untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan pesisir dan pegunungan;
- 4) Peningkatan kualitas SDM khususnya sekolah berpola asrama, pendidikan vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan, pemerataan layanan kesehatan, pelayanan kesehatan bergerak, Balai Latihan Kerja, asrama mahasiswa nusantara, dan afirmasi ASN; dan
- 5) Pengembangan SMK di Provinsi Papua Pegunungan.

Pengembangan Kawasan Perkotaan merupakan titik pusat perekonomian sebagai sentra perniagaan dan layanan pemerintahan dengan prioritas penanganan pada:

- 1) Penguatan keterkaitan desa-kota dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis ekonomi digital.

Sedangkan untuk Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi sebagai kawasan yang menjadi perhatian khusus terutama sebagai kawasan perbatasan sebagai kawasan yang menjadi beranda depan yang berkedaulatan di Negara Republik Indonesia dengan penanganan sebagai berikut:

- 1) Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur termasuk jaringan layanan/akses internet di 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan;
- 2) Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 36 kecamatan lokpri di Wilayah Papua, 7 kecamatan lokpri terdapat di Kab. Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.;
- 3) Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan;
- 4) Percepatan pembangunan desa/kampung secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa/kampung yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, dan pengembangan kampung wisata, kampung digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa/kampung dalam tata kelola pemerintahan, keuangan dan tata kelola aset kampung; pemberdayaan masyarakat kampung adat dan penguatan pendamping kampung khususnya pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas kampung; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam);
- 5) Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama.
- 6) Penanganan stunting dengan lokasi fokus prioritas mencakup seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan;
- 7) Peningkatan alokasi untuk percepatan pemberantasan buta aksara bagi penduduk usia produktif (15-59 tahun) di Provinsi Papua Pegunungan;

Target pembangunan wilayah Provinsi Papua (pra DOB, 2022) dituangkan sebagai Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan Papua dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

“Percepatan Pembangunan Untuk Mengejar Ketertinggalan Berlandaskan Pendekatan Budaya, Berbasis Ekologis dan Wilayah Adat”

Kebijakan ini dapat tercapai melalui strategi pembangunan:

- a. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus, melalui:
 - i. Penguatan dan pemberdayaan Orang Asli Papua berlandaskan budaya dan adat yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan;
 - ii. Pengembangan wilayah adat **La Pago**, dalam mendukung perekonomian wilayah;
 - iii. Penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil dengan mengutamakan pelayanan prima;
 - iv. Optimalisasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua bagi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;
 - v. Peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan manajemen berbasis kinerja; serta
 - vi. Penguatan distrik sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa.
- b. Pengembangan kerja sama antar daerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah dan membangun sentra-sentra ekonomi baru;
- c. Penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis.

Pembangunan Wilayah Papua masih menghadapi permasalahan: (a) belum optimalnya pelaksanaan otonomi khusus Papua, (b) terbatasnya pelayan dasar, belum kuatnya kapasitas pemerintahan daerah, (c) belum berkembangnya wilayah adat dalam mendukung perekonomian wilayah; (d) belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumber daya alam; (e) belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas; dan (f) masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi,

dan abrasi pantai serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan.

Pulau Papua diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi untuk meningkatkan skala ekonomi di Kawasan Timur Indonesia dengan didorong oleh hilirisasi sumber daya alam dan diversifikasi industri pengolahan berbasis perkebunan, pangan, dan perikanan. Penguatan konektivitas juga dilakukan untuk menurunkan disparitas harga komoditas dan biaya logistik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Wilayah Papua diharapkan mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah lainnya.

Dengan uraian sasaran RPJMN 2020-2024, target pembangunan wilayah Provinsi Papua, kebijakan dan strategi, potensi serta kendala di atas, maka diperlukan suatu perencanaan terintegrasi lintas sektor untuk mengoptimalkan peran penting Papua dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya serta memitigasi dampak risiko bencana lingkungan.

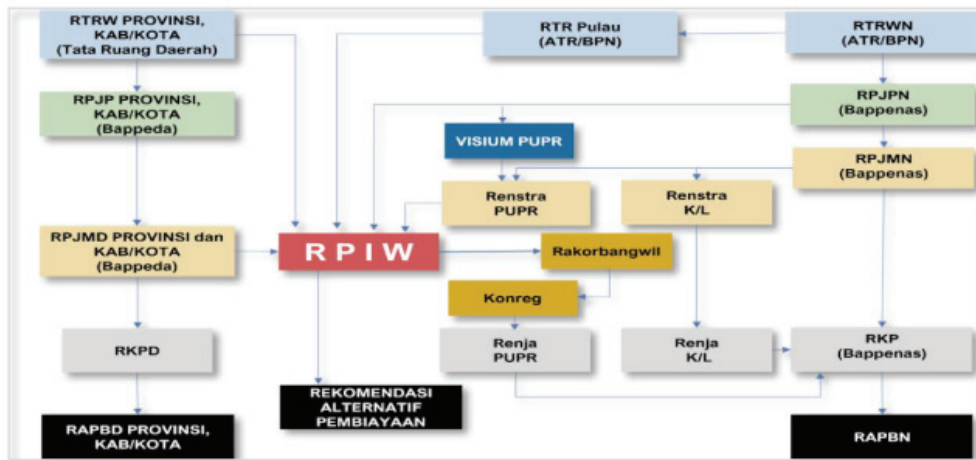
Untuk itu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah III ini melakukan Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW) Provinsi Papua Pegunungan sebagai acuan dalam perencanaan dan pemrograman khususnya infrastruktur PUPR di Papua Pegunungan. Hal ini untuk menyiapkan pengembangan infrastruktur PUPR di DOB Provinsi Papua Pegunungan.

1.2 Kedudukan dalam kebijakan

Bagian kedudukan dalam kebijakan menjelaskan posisi RPIW dalam kerangka perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR serta terhadap dokumen perencanaan lainnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021

1-7



Gambar 1.2 Kedudukan RPIW terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021

1.3 Urgensi Penyusunan

Pembangunan infrastruktur PUPR harus dapat mendorong dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dukungan ini dapat diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur yang sinergi dan terpadu secara internal PUPR dan lintas sektor. Dokumen RPIW merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi dan program pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu lintas sektor pada tingkat nasional dan daerah.

Selain sebagai acuan pembangunan infrastruktur yang terpadu, dokumen RPIW juga dapat menjadi alat untuk memprioritaskan penanganan kawasan dan dukungan program infrastruktur. Hal ini penting dilakukan untuk menjadi salah satu solusi dalam menghadapi keterbatasan pendanaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

1.4 Muatan RPIW

Bagian Muatan RPIW menguraikan hal-hal pokok sebagai berikut:

- Pendahuluan**, meliputi uraian latar belakang, kedudukan dalam kebijakan, urgensi penyusunan, muatan RPIW, manfaat RPIW, dan kerangka pikir penyusunan RPIW;

- b. **Arah Kebijakan**, meliputi sintesis analisis kebijakan serta strategi nasional dan daerah terkait tata ruang, sektoral, serta kawasan prioritas/strategis. Arah kebijakan juga memuat uraian sasaran dan target jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Visium PUPR 2030 serta agenda global;
- c. **Profil Wilayah dan Potensi Daerah**, meliputi kondisi fisik dan kebencanaan, demografi, ekonomi, sosial-budaya, dan interaksi antarkawasan pada wilayah perencanaan;
- d. **Profil dan Kinerja Infrastruktur**, meliputi uraian profil dan kinerja infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan serta infrastruktur permukiman dan perumahan. Bagian ini juga memuat profil dan kinerja infrastruktur non-PUPR;
- e. **Permasalahan dan Isu Strategis**, meliputi potensi yang berupa keunggulan komparatif dan kompetitif, kendala/batasan dan permasalahan daerah, serta limitasi wilayah (daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup);
- f. **Skenario Pengembangan Wilayah**, meliputi proyeksi pertumbuhan, perumusan visi dan strategi pengembangan wilayah, serta skenario pengembangan wilayah (tahapan dan prioritasasi);
- g. **Analisis Kebutuhan Infrastruktur**, meliputi analisis kesenjangan infrastruktur wilayah dan analisis keterpaduan infrastruktur;
- h. **Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur**, meliputi rencana aksi kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR tahunan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun beserta pembagian kewenangan dan sumber pendanaan; dan
- i. **Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW**, memuat mekanisme untuk memastikan agar RPIW yang telah disusun dapat dimonitor dan dievaluasi setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun. Bagian ini akan diatur dengan petunjuk teknis tersendiri.

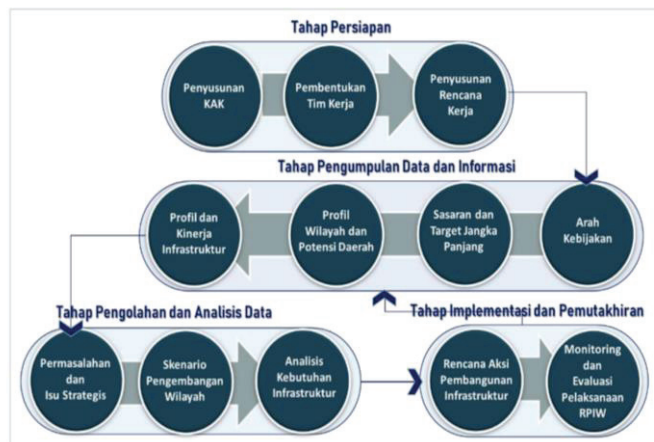
1.5 Manfaat RPIW

Manfaat RPIW adalah sebagai berikut:

- Manfaat RPIW sebagai dasar memadukan kebijakan nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) ke dalam rencana pengembangan wilayah yang dilengkapi dengan Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Manfaat RPIW sebagai acuan pemrograman dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian PUPR melalui mekanisme perencanaan dan pemrograman di lingkungan Kementerian PUPR; dan
- Manfaat RPIW sebagai masukan dalam penyusunan RPJMN, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR, dan dokumen perencanaan PUPR lainnya.

1.6 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Tahapan utama dalam penyusunan RPIW terdiri dari 5 tahapan, yaitu: persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, perumusan skenario pengembangan, dan penyusunan rencana aksi. Secara lengkap, tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.3 Kerangka Pikir Penyusunan RPIW

Sumber: Pedoman Muatan Rencana Pembangunan Infrastruktur Wilayah (RPIW), 2021



BAB 2

ARAH KEBIJAKAN

BAB II ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi uraian kebijakan spasial dan sektoral baik tingkat nasional maupun tingkat daerah yang menjadi acuan perumusan sintesis kebijakan pengembangan Provinsi Papua Pegunungan.

2.1 Kebijakan Penataan Ruang

2.1.1 Kebijakan penataan Ruang Wilayah Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang, dengan jangka waktu selama 20 tahun.

Struktur ruang wilayah nasional mencakup sistem pusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, sistem jaringan telekomunikasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air. Dalam sistem perkotaan nasional, di Wilayah Papua Pegunungan ditetapkan Pusat Kegiatan Wilayah/ PKW (Wamena).

Sistem jaringan transportasi nasional, sistem jaringan energi nasional, dan sistem jaringan sumber daya air yang ditetapkan dalam RTRWN di Pulau Papua adalah sebagai berikut:

- Jaringan Transportasi Nasional terdapat 2 buah Terminal Antara Negara (Skouw dan Entrop), 3 buah Pelabuhan Utama (Depapre, Merauke, dan Jayapura), 11 buah Pelabuhan Pengumpul (Pomako, Nabire, Biak, Demta, Sarmi, Agats, Bade, Amamapare, Korido, Waren, dan Serui), 14 buah Pelabuhan Angkutan Penyebrangan (Dawai, Agats, Waren, Mamberamo, Bade, Kepi, Kaonda, Pomako, Kimaam, Merauke, Mokmer, Kabuena, Nabire, Numfor), 3 buah Bandara Pengumpul Sekunder, dan 3 buah Bandara Pengumpul Tersier.
- Jaringan Energi terdapat 29 Pembangkit Tenaga Listrik, dan
- Jaringan Sumber Daya Air terdapat 2 Jaringan.

Berdasarkan RTRWN ditetapkan beberapa kawasan lindung nasional di Provinsi Papua, yaitu 1 kawasan pelestarian alam, 8 Suaka Margasatwa, 9 Cagar Alam, dan 4 Taman Nasional.

Sedangkan kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang ditetapkan RTRWN di wilayah Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut:

- a. Kawasan Taman Nasional Lorentz (Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah)
- b. Kawasan Perbatasan Negara di Wilayah Papua salah satunya lokasi prioritas perbatasan di Kab. Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.

Arahan dari RTRW Nasional adalah peningkatan akses pelayanan perkotaan, pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki. Serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

2.1.2 Kebijakan Penataan Ruang Pulau Papua

Kebijakan penataan ruang Pulau Papua menitikberatkan pada:

1. Mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis kawasan Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal.
2. Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan.
3. Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan dan pintu gerbang internasional

Wilayah Papua sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk di dalam bumi, maupun sebagai sumberdaya perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana untuk pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua.

Tujuan penataan ruang wilayah Papua, yaitu:

*“Mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman dan produktif
untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan
memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik ekosistem
Papua”*

Sistem jaringan transportasi darat di Provinsi Papua Pegunungan, didukung oleh Jalan nasional (jalan arteri primer) meliputi Jayapura-Elelim-Wamena; Merauke-Tanah Merah-Oksibil; Wamena-Habema-Yuguru-Kenyam; Wamena-Karubaga-Mulia; dan Wamena-Dekai. Selain itu juga didukung dengan Jalan Provinsi (jalan kolektor Primer) meliputi Arso-Oksibil; Wamena-Tiom; Wamena-Kobakma; Merauke-Tanah Merah-Oksibil; dan Dekai-Oksibil.

Pada Provinsi Papua Pegunungan ditetapkan beberapa sistem jaringan energi berupa transmisi tenaga air (Yalimo), diesel, surya, gas, gelombang (pesisir), dan mikro hidro.

Jaringan telekomunikasi Papua terdiri atas: sistem terestrial, menggunakan media transmisi jaringan kabel serat optik dan tembaga dan gelombang mikro di seluruh kabupaten/kota; sistem nirkabel, menggunakan media transmisi satelit di seluruh kabupaten/kota. Sistem jaringan telekomunikasi di atas dimaksudkan untuk mendukung PKW, PKL, perkotaan lain, kawasan permukiman, kawasan perdagangan jasa, industri, dan pertambangan.

Sumber daya air di Provinsi Papua Pegunungan terdiri atas: Jaringan sumber daya air lintas negara; Jaringan air baku ditujukan untuk terpenuhinya penyediaan air minum dari segi kuantitas dan kualitas bagi seluruh rakyat Papua; dan cekungan air tanah. Selain itu didukung juga pengembangan SDA pada wilayah yang potensial untuk pertanian yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Provinsi Papua Pegunungan terbagi atas Kawasan strategis dari aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, Kawasan strategis dari aspek fungsi dan daya tampung serta daya dukung lingkungan hidup, Kawasan strategis dari aspek lainnya.

KSP sosial budaya, ditetapkan pada wilayah Wamena.

KSP fungsi dan daya tampung serta daya dukung lingkungan hidup, ditetapkan di Pegunungan, yang merupakan wilayah rawan bencana dan wilayah bergambut, serta di wilayah Mamberamo-Foja yang merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati.

Kawasan strategis dari aspek lainnya, meliputi Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Yalimo.

2.1.3 Rencana Tata Ruang Pulau Papua

Rencana Tata Ruang Pulau Papua terdapat dalam Perpres No.57 Tahun 2014. Salah satu fungsi perkotaan yang termasuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan perkotaan Wamena di Kab. Jayawijaya. Fungsi layanan di PKW Wamena terdapat 5 fungsi yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pariwisata. Terdapat Operasionalisasi dalam fungsi layanan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKW Wamena sebagai pusat kluster Kawasan Punggung Pulau Papua (Pegunungan Tengah);
- b. Mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKW Wamena sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- c. Mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKW Wamena sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang ramah lingkungan;
- d. Mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKW Wamena sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, Bahari, serta ekowisata berbasis potensi kearifan lokal;
- e. Mengembangkan PKW Wamena berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor dan gerakan tanah;
- f. Mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKW Wamena;
- g. Mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Wamena dengan Bandar Udara Wamena sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Wamena dan sekitarnya;
- h. Mengembangkan dan memantapkan fungsi Bandar Udara Wamena untuk melayani PKW Wamena sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya;

- i. Mengembangkan PLTM Sinagma dan PLTM Walesi untuk melayani Kawasan Perbatasan, Kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adat;
- j. Mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Ilaga – Mulia – Karubaga – Wamena - Sumohai dan Wamena-Elelim untuk melayani PKW Wamena dan Kawasan Andalan Wamena dan sekitarnya;
- k. Mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKW Wamena sebagai pusat kluster Kawasan Punggung Pulau Papua (Pegunungan Tengah);
- l. Mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKW Wamena sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- m. Mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKW Wamena sebagai pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang ramah lingkungan;
- n. Mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKW Wamena sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, Bahari, serta ekowisata berbasis potensi kearifan lokal;
- o. Mengembangkan PKW Wamena berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor dan gerakan tanah;
- p. Mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKW Wamena;
- q. Mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW Wamena dengan Bandar Udara Wamena sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Wamena dan sekitarnya;
- r. Mengembangkan dan memantapkan fungsi Bandar Udara Wamena untuk melayani PKW Wamena sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya;
- s. Mengembangkan PLTM Sinagma dan PLTM Walesi untuk melayani Kawasan Perbatasan, Kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT, dan Kampung Masyarakat Adat;
- t. Mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik Ilaga-Mulia-Karubaga-Wamena-Sumohai dan Wamena-Elelim untuk melayani PKW Wamena dan Kawasan Andalan Wamena dan sekitarnya.

Selain PKW Wamena terdapat infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan PKW Wamena yaitu Bandara Wamena dengan jenis skala pelayanan tersier. dengan strategi operasionalisasi sebagai berikut:

- a. Memantapkan fungsi Bandar Udara Wamena untuk melayani PKW Wamena sebagai pusat pengembangan Kawasan Wamena dan Sekitarnya
- b. Mengembangkan Bandar Udara Wamena yang terpadu dengan jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Papua
- c. Mengembangkan Bandar Udara Wamena yang melayani angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, Kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT dan Kampung Masyarakat Adat
- d. Memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara
- e. Memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas Kawasan kebisingan
- f. Memanfaatkan ruang di sekitar Bandar Udara Wamena sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan
- g. Memanfaatkan Bersama bandar udara Wamena guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

2.2 Kebijakan Sektor

2.2.1 Kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024 di Pulau Papua

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Wilayah Papua

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Papua tahun 2020-2024, proyek prioritas strategis (*Major Project*) adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Kota Baru Sorong;
- b. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional: (a) PKSN Jayapura dan (b) PKSN Merauke;
- c. Pengembangan Wilayah Adat Papua: (a) Domberay dan **(b) Laa Pago;**
- d. Pembangunan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: Sorong;
- e. Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: P. Biak;

- f. Pembangunan Jalan Trans Papua: Merauke-Sorong; dan
- g. Pembangunan Jembatan Udara di Papua (Provinsi Papua: Pembangunan Jembatan Udara di **Bandara Wamena, Bandara Nop Goliath, Bandara Oksibil, Bandara Elelim, Bandara Ilaga, Bandara Mulia, Bandara Mozes Kilangin, Bandara Magellum, dan Bandara Tanah Merah**)

Indikasi program sektoral RPJMN Tahun 2020-2024 di Wilayah Papua yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
- b. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi
- c. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
- d. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
- e. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing
- f. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar
- g. Pembangunan Infrastruktur Ekonomi
- h. Pembangunan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
- i. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Indikasi program sektoral bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan) telah termuat dalam matrik pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan tematik mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan antara lain:

- a. Penyelenggaraan Jalan, Pembangunan Jembatan di Jalan Trans Papua
- b. Penyediaan air baku di kawasan strategi
- c. Penyediaan air baku di kawasan perkotaan
- d. Penyediaan air baku di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal)
- e. Sistem Pengelolaan Drainase
- f. Pembangunan embung dan bangunan air
- g. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Di Daerah Pulau Kecil dan Terluar
- h. Pembangunan SPAM
- i. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- j. SPALD-S Skala Kota (IPLT)

- k. Pembangunan Rumah Khusus
- l. Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN

2.2.2 Kebijakan INPRES No. 9 Tahun 2020 bagi Kementerian PUPR di Pulau Papua

Inpres No. 9 Tahun 2020 mengamanatkan Kementerian PUPR dapat meningkatkan dukungan pelaksanaan Major Project RPJMN 2020– 2024 untuk Papua (**Wilayah Adat Laa Pago**, Wilayah adat Domberay, PKSN Jayapura, dan PKSN Merauke); dan rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan pasca bencana

Kebijakan SDA diarahkan kepada menyediakan dan meningkatkan pengelolaan air tanah dan air baku; dan peningkatan kapasitas daerah irigasi, pembangunan embung, bendung pengendali banjir, tanggul pemecah gelombang, dan revitalisasi danau.

Sektor Bina Marga difokuskan kepada Pembangunan simpul-simpul transportasi udara, laut dan darat. Meningkatkan konektivitas jalan untuk mendorong pengembangan ekonomi wilayah; Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan konektivitas jalan.

Sektor Cipta Karya difokuskan kepada meningkatkan penyediaan akses air minum, meningkatkan penyediaan akses sanitasi; meningkatkan penyediaan permukiman; pengembangan model pengembangan sentra – sentra komoditas dan kawasan perdesaan di Koridor Trans Papua; pembangunan, pengelolaan dan penguatan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua (*Papua Youth Creative Hub*); membangun dan mengelola asrama mahasiswa nusantara.

Kebijakan Sektor Perumahan diarahkan kepada meningkatkan penyediaan perumahan; dan menyediakan rumah yang layak untuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga veteran, guru, paramedis dan petugas lainnya.

Sektor bina konstruksi Kementerian PUPR mendapatkan amanat untuk meningkatkan peran serta pengusaha OAP terkait pengadaan barang/jasa pemerintah; dan meningkatkan peran serta SDM Unggul Papua di lingkungan BUMN terkait PUPR.

2.2.3 Kebijakan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023

RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 disusun guna melaksanakan langkah peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi khusus di Wilayah Papua, sehingga dapat lebih terfokus pada upaya pengurangan ketimpangan (*in-equity*) pembangunan dengan memperkuat aspek kemandirian orang asli Papua dalam kapasitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*). Penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua 2005-2025.

Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Provinsi Papua tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Visi Provinsi Papua (pra DOB, 2022) Tahun 2019-2023, adalah:

“Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan”.

2.2.4 Target Visium Kementerian PUPR 2030

Target yang akan dicapai Visium Kementerian PUPR 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Visium Kementerian PUPR 2030

Infrastruktur	Tahun 2020-2024	Tahun 2025-2030
Bendungan	Kapasitas tampung 68,11 m3/kapita/tahun	Kapasitas tampung 120 m3/kapita/tahun
Jaringan Jalan	- Jalan Mantap 97% - Pembangunan Jalan Tol 1.500 Km - Pembangunan Jalan Baru 2.500 Km - Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 60.000 m	- Jalan Mantap 99% - Pembangunan Jalan Tol 2.000 Km - Pembangunan Jalan Baru 3.000 Km - Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 70.000 m
Air Minum	88% Pelayanan Air Minum - Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha) 85% Pelayanan Sanitasi	100% Pelayanan Air Minum - Menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 0 ha) 100% Pelayanan Sanitasi
Perumahan	- Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit - Pembangunan sebesar 3,9 juta unit	- Zero Backlog rumah bagi MBR 3 juta unit - Pembangunan sebesar 4,88 juta unit

Sumber: Visum Kementerian PUPR 2030

2.2.5 Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Target yang akan dicapai Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, adalah sebagai berikut:

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
58,5 m ³ /kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung	2.500 Km Pembangunan Jalan Tol	100% Akses Air Minum Layak 30% Jaringan Perpipaan	51.340 Unit Rumah Susun
61 Unit Bendungan	3.000 Km Pembangunan Jalan Baru	90% Akses Sanitasi Layak 15% Termasuk Aman	10.000 Unit Rumah Khusus
500 Unit Pembangunan Embung	38.328 m Pembangunan Jembatan	10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh	813.660 Unit Rumah Swadaya
500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi	31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass	100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan	262.345 Unit PSU Perumahan
2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi		5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar	
50 m ³ /detik Ketersediaan Air Baku			
2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai			
			

Gambar 2.1 Target Renstra Kementerian PUPR 2020-2024
Sumber: Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024

2.2.6 Visi Indonesia Tahun 2045

Visi Indonesia Tahun 2045 adalah:

“Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur”

Visi Indonesia Tahun 2045 terdiri dari 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan. Keempat pilar tersebut dibangun di atas Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa bernegara dan konstitusi, dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan Infrastruktur ke depan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan konektivitas fisik dan virtual

2. Mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah
3. Memenuhi prasarana dasar
4. Mendukung pembangunan perkotaan dan perdesaan
5. Antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim, termasuk kenaikan muka air laut.

2.2.7 Rencana Sektor Pariwisata

PP No. 50 Tahun 2011 menetapkan Pulau Papua terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di dalam 4 (empat) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN).

Kawasan strategis sektor pariwisata Papua terbagi menjadi DPN Biak-Numfor dan sekitarnya; **DPN Sentani-Wamena dan sekitarnya**; **DPN Timika-Lorenz dan sekitarnya**; DPN Merauke-Wazur dan sekitarnya.

2.2.8 Rencana Sektor Pertanian

KepMen Pertanian No: 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang RENSTRA Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 menyatakan bahwa di Pulau Papua khususnya **Wilayah Adat Laa Pago** dan Wilayah Adat Domberay diarahkan pada pengembangan potensi pertanian berupa:

- a. ternak sapi,
- b. kopi,
- c. kacang tanah, dan
- d. tanaman hortikultura.

Pulau Papua juga direncanakan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/ Food Estate Berbasis Korporasi Petani. Inisiasi KSPP/Food Estate dilaksanakan di Wilayah Papua dengan meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dengan peran kelembagaan petani yang tumbuh dan berkembang menjadi korporasi petani sebagai pelaku utamanya.

2.2.9 Rencana Sektor Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024, Inpres No. 6 Tahun 2015, Inpres No. 1 Tahun 2019, Inpres No. 1 Tahun 2021, dan Keppres No. 6

Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) menyatakan kawasan perbatasan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional adalah PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke, di dukung dengan 4 Pos Lintas Batas Negara/ PLBN (PLBN Terpadu Skouw, PLBN Terpadu Yetetkun, PLBN Waris, dan PLBN Terpadu Sota) serta ditetapkan 37 Lokasi Prioritas pembangunan kawasan perbatasan dan 12 Pulau-Pulau Kecil Terluar /PPKT(P. Fanildo, P. Bras, P. Befondi, P. Liki, P. Habe, P. Komolom, P. Kolepom, P. Laag, P. Puriri).

2.3 Kebijakan Pengembangan Kawasan Prioritas

Kebijakan pembangunan Wilayah Papua dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat (pra DOB, 2022) berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan berbasis ekologis dan wilayah adat. Percepatan pembangunan Wilayah Papua juga diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian yang sangat bergantung pada sumber daya alam ke arah perekonomian wilayah yang lebih maju dengan mendorong pengembangan industri berbasis komoditas lokal pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan; pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari; pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati; pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi dan tembaga; serta peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon.

2.3.1 Kebijakan Pengembangan Kawasan Prioritas secara umum

Strategi pembangunan Wilayah Papua dalam tahun 2020-2024 mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan dasar, antara lain: (i) peningkatan kualitas SDM; (ii) percepatan pembangunan kawasan

perbukitan dan pegunungan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah antara kawasan pesisir dan pegunungan serta memperhatikan kontekstual Papua; (iii) percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur termasuk jaringan layanan/akses internet; (iv) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya juga dilakukan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (v) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (vi) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa, dan (vii) pelaksanaan pembangunan afirmatif.

- b. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (i) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Papua yaitu sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak dan gas bumi, serta perikanan tangkap; (ii) pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); (iii) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN); (iv) revitalisasi kawasan transmigrasi; (v) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (vi) pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan, pertambangan, perikanan, serta pengolahan pupuk dan petrokimia pada Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus; (vii) pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan pengusaha lokal; (viii) pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah; (ix) pengembangan kawasan perkotaan dan pembangunan kota baru; dan (x) pengembangan Kawasan Potensi Ekonomi (KPE) di 7 wilayah adat (**Laa Pago**, Saireri, Tabi, Mee Pago, Anim Ha, Bomberay, Domberay) dengan memperhatikan zona ekologi dan penyiapan SDM dalam rangka revolusi industri 4.0 melalui hilirisasi potensi ekonomi Papua; dan (xi) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

- c. Penataan pelaksanaan otonomi khusus dilakukan melalui antara lain: (i) pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat kampung; (ii) penguatan lembaga adat dan kampung adat, perlindungan hak-hak masyarakat adat sesuai dengan perundangan yang berlaku termasuk hak atas tanah adat/ulayat; (iii) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah; (iv) pengembangan dan penguatan peran distrik sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (v) pengembangan 7 wilayah adat; (vi) optimalisasi SDM Unggul Orang Asli Papua dalam Badan Usaha Milik Negara dan kementerian/ lembaga; (vii) pengembangan inovasi dan kreativitas kaum muda Asli Papua (Papua Youth Creative Hub); (viii) pemberdayaan pengusaha lokal; dan (ix) penataan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Tabel 2.2 Lingkup Wilayah Adat dan Strategi Pengembangannya

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	Strategi Pengembangan
Laa Pago	Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, Yalimo, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang	Strategi pengembangan ekonomi menjadi bagian dari <i>Major Project</i> Wilayah Adat Laa Pago.

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024

- d. Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain (i) pembangunan jalan, pelabuhan laut, dan udara; dan (ii) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi, khususnya pelabuhan hub komoditas mentah maupun barang hasil olahan.
- e. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (i) peningkatan kapaitas masyarakat dan aparat; (ii) peningkatan ketahanan kawasan pantai utara Pulau Papua;

(iii) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat dengan fokus utama pada peningkatan ketahanan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS); (iv) peningkatan investigasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, serta (v) peningkatan penanganan abrasi pantai di daerah kepulauan, dan konservasi hutan.

- f. Penguatan koordinasi kementerian/lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Tanah Papua.

2.4 Agenda SDGs 2030

Agenda tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for *Sustainable Development Goals* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi

Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Gambar 2.2 Tujuan TPB/SDGs

Empat Pilar SDGs yaitu sebagai berikut:

- a. **Pilar Pembangunan Sosial**
Pembangunan Sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar Pembangunan Sosial meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5.
- b. **Pilar Pembangunan Ekonomi**
Pembangunan Ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pilar Pembangunan Ekonomi meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17.
- c. **Pilar Pembangunan Lingkungan**
Pembangunan Lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.

Pilar Pembangunan Lingkungan meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15.

- d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola meliputi Tujuan 16.

Adapun Agenda TPB/SDGs 2030 yang terkait dengan infrastruktur diantaranya sebagai berikut:

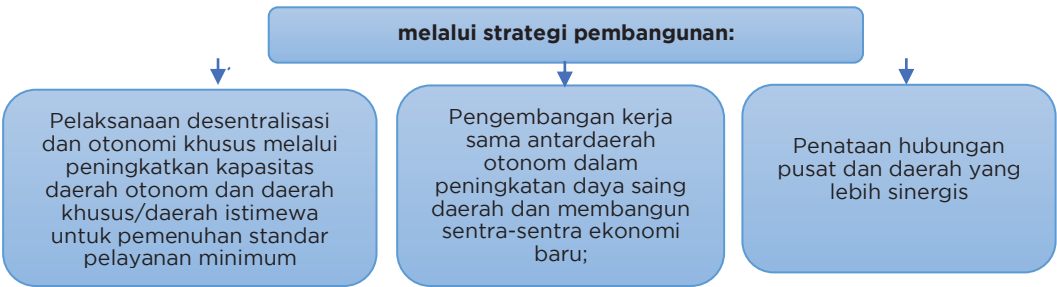
- a. Peningkatan kapasitas air baku baik untuk irigasi maupun air bersih;
- b. Pengelolaan sumber daya air;
- c. Mempercepat pengembangan seluruh kawasan strategis;
- d. Akses terhadap air minum layak, sanitasi layak, dan hunian layak;
- e. Perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh;
- f. Penyelenggaraan infrastruktur untuk mengurangi disparitas antarwilayah; dan
- g. Adaptasi RANMAPI.

2.5 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

2.5.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Pulau Papua

Kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang diarahkan terhadap wilayah Papua adalah sebagai berikut:

“Percepatan Pembangunan Untuk Mengejar Ketertinggalan Berlandaskan Pendekatan Budaya, Berbasis Ekologis dan Wilayah Adat”



Gambar 2.3 Strategi arah kebijakan pengembangan wilayah

Sumber: Hasil analisis,2023

Tabel 2.3 Sintesis Kebijakan Pulau Papua

KEBIJAKAN	DOKUMEN	SINTESA KEBIJAKAN	CORE/SEMANGAT	KONTEKS PERENCANAAN, FOKUS DAN KAWASAN PRIORITAS
Kebijakan Penataan Ruang	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (PP No.13 Tahun 2017)	Pulau Papua: 1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki. 2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional	Pengembangan tata ruang wilayah yang diarahkan untuk mendukung sektor basis di Provinsi Papua, seperti penguatan pertanian sebagai lumbung pangan, perikanan, pengembangan pariwisata skala nasional dan internasional; Perkotaan dan perkotaan mendukung DOB baru	Kawasan Lumbung Pangan Pertanian : 1. Food Estate Keerom 2. MIFEE (Merauke Industrial Food Estate and Energi) 3.Lumbung Pangan Mappi
	RTR Pulau Papua PERPRES No.57 Tahun 2014	1. Mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis kawasan Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal. 2. Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan. 3. Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan dan pintu gerbang internasional		Kawasan Perbatasan : 1. PKSN Jayapura 2. PKSN Tanah Merah 3. PKSN Merauke 4. PKSN Biak 5. Lokpri Perbatasan Kab. Pegunungan Bintang
	RTRW Provinsi Papua 2013-2033 Perda No. 23 Tahun 2013	1. Peningkatan infrastruktur wilayah dalam mendukung peran pusat kegiatan dan pelayanan masyarakat. 2. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan pengelolaannya dari		Kawasan Pariwisata: 1. KSPN Sentani 2. KSPN Biak 3. KSPN Agats – Asmat dsk 4. KSPN Wasur 5. KPPN Wamena

KEBIJAKAN	DOKUMEN	SINTESA KEBIJAKAN	CORE/SEMANGAT	KONTEKS PERENCANAAN, FOKUS DAN KAWASAN PRIORITAS
		sudut pandang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan kawasan lainnya.		6. KPPN Jayawijaya
Kebijakan Sektor Pariwisata	Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Nasional PP No. 50 Tahun 2011	Pembangunan DPN meliputi: a. Perwilayahan Pembangunan DPN; b. Pembangunan Daya Tarik Wisata; c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata; d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum Pariwisata; dan e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.	Mewujudkan pembangunan pada sektor pariwisata, perbatasan, pertanian, perkotaan berbasis wilyayah adat dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.	Kawasan Perkotaan : 1. PKN Merauke 2. Kota Baru Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan 3. PKW Bade 4. Kota Baru Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah 5. PKW Nabire 6. PKN Timika 7. PKW Wamena 8. KotaBaru Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan
Kebijakan Sektoral	RPJMN 2020-2024 Perpres 18/2020	Major Project: 1. Pembangunan Kota Baru Sorong; 2. Pengembangan PKSN Jayapura dan PKSN Merauke; 3. Pengembangan Wilayah Adat Domberay dan Laa Pago ; Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah Papua: KEK Sorong, KI Teluk Bintuni, DPP Raja Ampat, DPP Biak Teluk Cendrawasih, Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi sebagai hub komoditas mentah maupun barang hasil olahan		1. PKW Biak 2. PKN Jayapura 3. Kota Baru Sentani (Usulan Baru) 4. PKW Arso 5. PKW Sarmi 6. Kawasan Perkotaan Kapi (Pusat Pertumbuhan Baru) 7. Perkotaan Waghete (usulan baru) 8. Perkotaan Oksibil (usulan baru) 9. PKW Muting

KEBIJAKAN	DOKUMEN	SINTESA KEBIJAKAN	CORE/SEMANGAT	KONTEKS PERENCANAAN, FOKUS DAN KAWASAN PRIORITAS
		Percepatan pembangunan kawasan perbukitan dan pegunungan untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan pesisir dan pegunungan Pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perdesaan		
	Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat INPRES NO. 9/2020	Secara garis besar Kementerian PUPR ditugaskan untuk meningkatkan Konektivitas, peningkatan infrastruktur permukiman, pembangunan Istana Negara di Kota Jayapura, Papua Youth Creative Hub, Pengelolaan Air tanah dan air baku, penyediaan perumahan, pembinaan penyedia jasa konstruksi untuk OAP, dan Rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan pasca bencana		Kawasan Perikanan/ SKPT: 1. SKPT Merauke 2. SKPT Biak 3. SKPT Timika
	RPJMD Prov. Papua 2019-2023	1. Memantapkan kualitas dan daya saing SDM 2. Memantapkan rasa aman, tentram dan damai serta kehidupan demokrasi memperkuat bingkai NKRI 3. Penguatan tata kelola pemerintahan 4. Penguatan dan percepatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan 5. Percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu		
	UU NO.2/2021	1. Perpanjangan Masa Otonomi Khusus		

KEBIJAKAN	DOKUMEN	SINTESA KEBIJAKAN	CORE/SEMANGAT	KONTEKS PERENCANAAN, FOKUS DAN KAWASAN PRIORITAS
	Tentang Otonomi Khusus	selama 20 tahun kedepan 2. Memfokuskan anggaran untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur		
		1. Strategi SDA: penyediaan air baku, pengembangan daerah irigasi serta pengurangan resiko bencana 2. Strategi BM: Peningkatan konektivitas melalui pembangunan jalan dan jembatan 3. Strategi CK: Memenuhi pelayanan infrastruktur dasar air minum aman dan perpipaan, sanitasi layak dan aman, penanganan persampahan dan pengurangan sampah 4. Strategi Perumahan: Menyediakan Rumah Susun, Rumah Khusus, Rumah Swadaya dan PSU Perumahan		
	Renstra PUPR 2020-2024			
	Visium PUPR 2030	Target Skala Nasional 2025-2030 1. SDA: - Kapasitas tampung 120 m3/kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Tampung 2. BM: - Jalan Mantap 99% - Pembangunan Jalan Tol 2.000 Km - Pembangunan Jalan Baru 3.000 Km - Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 70.000 m 3. CK: - 100% Pelayanan Air Minum - Menurunkan luas permukiman kumuh		

KEBIJAKAN	DOKUMEN	SINTESA KEBIJAKAN	CORE/SEMANGAT	KONTEKS PERENCANAAN, FOKUS DAN KAWASAN PRIORITAS
Kebijakan Sektor Perhubungan		perkotaan 4,4% (menjadi 0 ha) - 100% Pelayanan Sanitasi 4. Perumahan: - Zero Backlog rumah bagi MBR 3 juta unit - Pembangunan sebesar 4,88 juta unit		
	Kebijakan Pelabuhan Kepmen No. 432/2017	Rencana Induk Pelabuhan pada kawasan strategis		
	Kebijakan Bandar Udara Kepmen No. 166/2019	Rencana Induk Pengembangan Bandara pada outlet kawasan strategis		
Kawasan Perbatasan	Inpres No. 6 Tahun 2015	Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan di Provinsi Papua PLBN Skouw.		
	Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024	1. Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan untuk Kawasan Perbatasan, pengelolaan sumber daya pangan, yang difokuskan pada daerah rawan pangan, rentan kelaparan, dan stunting, 2. Membangun Fasilitas PLBN Menuju Smart Border Pos		
	Inpres No. 1	1. Penyusunan Masterplan		

**RPWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034**

KEBIJAKAN	DOKUMEN	SINTESA KEBIJAKAN	CORE/SEMANGAT	KONTEKS PERENCANAAN, FOKUS DAN KAWASAN PRIORITAS
Kebijakan Sektor Perikanan	Tahun 2019	2. Pembangunan gedung, sarana prasarana, perumahan, pasar, rumah ibadah, air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, pengolahan limbah, persampahan 3. Jalan poros dan jalan akses		
	Inpres No. 1/2021	Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Skouw 1. Membangun dan menyediakan infrastruktur sumber daya air di Skouw; 2. Menyelenggarakan jalan nasional dan jalan daerah serta aksesibilitas pada kawasan perbatasan di Skouw; dan 3. Melaksanakan pembangunan sistem penyediaan air minum pada kawasan perbatasan di Skouw.		
	KepMenKP Nomor 13/2019 Penentuan SKPT di Provinsi Papua	Penentuan SKPT di Provinsi Papua adalah 1. SKPT Merauke 2. SKPT Timika 3. SKPT Biak		
	KepMenKP 109/2021 Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional	“Mewujudkan Pelabuhan Perikanan unggul sebagai penggerak ekonomi wilayah, berdaya saing global, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan yang memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya”: di Papua : 1. 2 (dua) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) 2. 6 (enam) Pelabuhan Perikanan		

KEBIJAKAN	DOKUMEN	SINTESA KEBIJAKAN	CORE/SEMANGAT	KONTEKS PERENCANAAN, FOKUS DAN KAWASAN PRIORITAS
Food Estate		Nusantara (PPN) 3. 9 (sembilan) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 4. 4 (empat) Pelabuhan Perikanan (PP) 5. 2 (dua) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).		
	Peraturan Presiden No. 109 tahun 2020 tentang Percepatan PSN	Program peningkatan penyediaan pangan nasional (Food Estate). 5 daerah yang ditetapkan sebagai kawasan strategis pengembangan pangan nasional, diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, NTT, dan Papua		
	Perpres No. 48 Tahun 2014 Lampiran 2 tentang MP3EI	Koridor Ekonomi Papua bahwa MIFEE sebagai kawasan prioritas dalam Koridor Perhatian Investasi		
Agenda Global	SDGs	Indonesia: Percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia	1. Keberlanjutan pembangunan 2. Perlindungan terhadap lingkungan 3. Kerawanan bencana	
	New Urban Agenda	Indonesia: Optimalisasi pembangunan berkelanjutan dan berketahanan bencana		
	Paris Agreement	Provinsi Papua: Papua yang memiliki sektor unggulan pertanian harus memperhatikan tingkat emisi gas rumah kaca dalam pengembangan		

RPIWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

KEBIJAKAN	DOKUMEN	SINTESA KEBIJAKAN	CORE/SEMANGAT	KONTEKS PERENCANAAN, FOKUS DAN KAWASAN PRIORITAS
	Sendai Framework	Provinsi Papua: Mengurangi risiko, menurunkan kerentanan, peningkatan kesiapsiagaan, tanggapan dan pemulihan terhadap bencana. Di Provinsi Papua terdapat kerawanan terhadap bencana tsunami, banjir dari aliran sungai dan banjir rob		
	UNESCO Programme	Provinsi Papua : Perlindungan terhadap situs-situs UNESCO di Provinsi Papua yang memiliki keunikan, keindahan alam, dan nilai budaya yang diakui dunia serta warisan budaya tak benda dari kekayaan empat wilayah adat yang ada di Papua. Taman Nasional Lorentz ditetapkan Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1999 karena menyimpan banyak flora dan fauna khas yang dilindungi.		

Sumber: Hasil analisis,2023

2.5.2 Arah Kebijakan Pemanfaatan Infrastruktur PUPR Prioritas

Kementerian PUPR bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang mendukung target-target nasional dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Major Project RPJMN 2020-2024, sesuai dengan peraturan pemerintah. Infrastruktur PUPR meliputi sektor sumber daya air, konektivitas, permukiman, dan perumahan, yang dibangun di kawasan strategis dan prioritas seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), kawasan metropolitan, kawasan pertanian (Food Estate), kawasan perdesaan, serta daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi yang dapat mendorong lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur PUPR adalah memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Jika infrastruktur yang terbangun belum termanfaatkan secara maksimal. Hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan dana publik, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, antara lain:

Menurunnya kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal cenderung mengalami kerusakan lebih cepat dan lebih parah. Hal ini dapat mengurangi fungsi, keamanan, dan kenyamanan infrastruktur bagi masyarakat. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan biaya pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur di masa depan.

- Menyebabkan ketimpangan pembangunan. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan kesenjangan antara daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai dan daerah-daerah yang masih kekurangan infrastruktur. Hal ini dapat mempengaruhi aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan layanan publik bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar;

- Mengurangi daya saing dan produktivitas ekonomi. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menghambat konektivitas antara kawasan produksi dan pusat distribusi. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan biaya logistik, penurunan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait, serta pengurangan nilai tambah perekonomian rakyat;
- Mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup. Infrastruktur yang tidak termanfaatkan secara optimal dapat menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan hidup, seperti pencemaran air, udara, dan tanah, penurunan kualitas sumber daya air, serta peningkatan risiko bencana alam. Hal ini dapat berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun, seperti meningkatkan konektivitas antarinfrastruktur, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, serta menjadwalkan pemeliharaan secara berkala untuk menjamin kelangsungan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR yang telah terbangun diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, berikut adalah lima poin arah kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan infrastruktur PUPR prioritas dalam 10 tahun ke depan:

- Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi infrastruktur berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat saling mendukung dan memberikan nilai tambah pada pengembangan kawasan.;
- Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur PUPR. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat beroperasi dengan baik, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya yang berada di daerah terpencil dan terluar;
- Meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur PUPR. Hal ini bertujuan untuk

memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan oleh masyarakat. Hal ini juga meliputi peningkatan partisipasi, keterlibatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan infrastruktur;

- Meningkatkan kerjasama dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur PUPR. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif oleh berbagai pihak. Hal ini juga meliputi peningkatan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan, peraturan, dan mekanisme terkait infrastruktur;
- Meningkatkan inovasi dan adaptasi infrastruktur PUPR terhadap perubahan lingkungan dan tantangan masa depan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, bencana alam, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial-ekonomi. Hal ini juga meliputi peningkatan kapabilitas dan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi situasi darurat dan krisis..

Tabel 2.4 Tabel Infrastruktur Prioritas PUPR

No	Sektor	Infrastruktur Prioritas PUPR	Provinsi	Kab/Kota	Dasar Hukum
1	Sumber Daya Air	Pembangunan Air Baku SA Sungai Wasi Wamena Kab.Jayawijaya Tahap II	Papua	Kab. Jayawijaya	MP 2020-2024
2	Jalan dan Jembatan	Jalan Perbatasan Ruas Towe Hitam - Oksibil	Papua	Kab. Keerom - Kab. Pegunungan Bintang	-
3	Jalan dan Jembatan	Jalan Ruas Wamena-Usilimo-Passavaley-Elelim-Bts.Prov Papua	Papua	Kab. Jayawijaya - Kab. Yalimo - Kab. Mambera	MP 2020-2024

No	Sektor	Infrastruktur Prioritas PUPR	Provinsi	Kab/Kota	Dasar Hukum
				mo Tengah	

Sumber: Hasil analisis,2023

Matriks Infrastruktur Prioritas PUPR berdasarkan: Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan Permenko Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.



BAB 3

PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH



BAB III PROFIL WILAYAH DAN POTENSI DAERAH

Bab ini berisi uraian gambaran kondisi geografis, topografis, geologi, klimatologi, hidrologi, kebencanaan, ekonomi, sosial budaya, serta interaksi antar kawasan yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan Provinsi Papua Pegunungan.

3.1 Profil Wilayah Provinsi Papua Pegunungan

Provinsi Papua Pegunungan adalah salah satu provinsi yang berada di pulau papua dengan ibukota provinsi terletak di Kabupaten Jayawijaya.

Provinsi Papua Pegunungan terbentuk sebagai daerah otonom baru yang tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.

Secara administrasi Provinsi Papua Pegunungan mempunyai batas daerah, sebagai berikut:

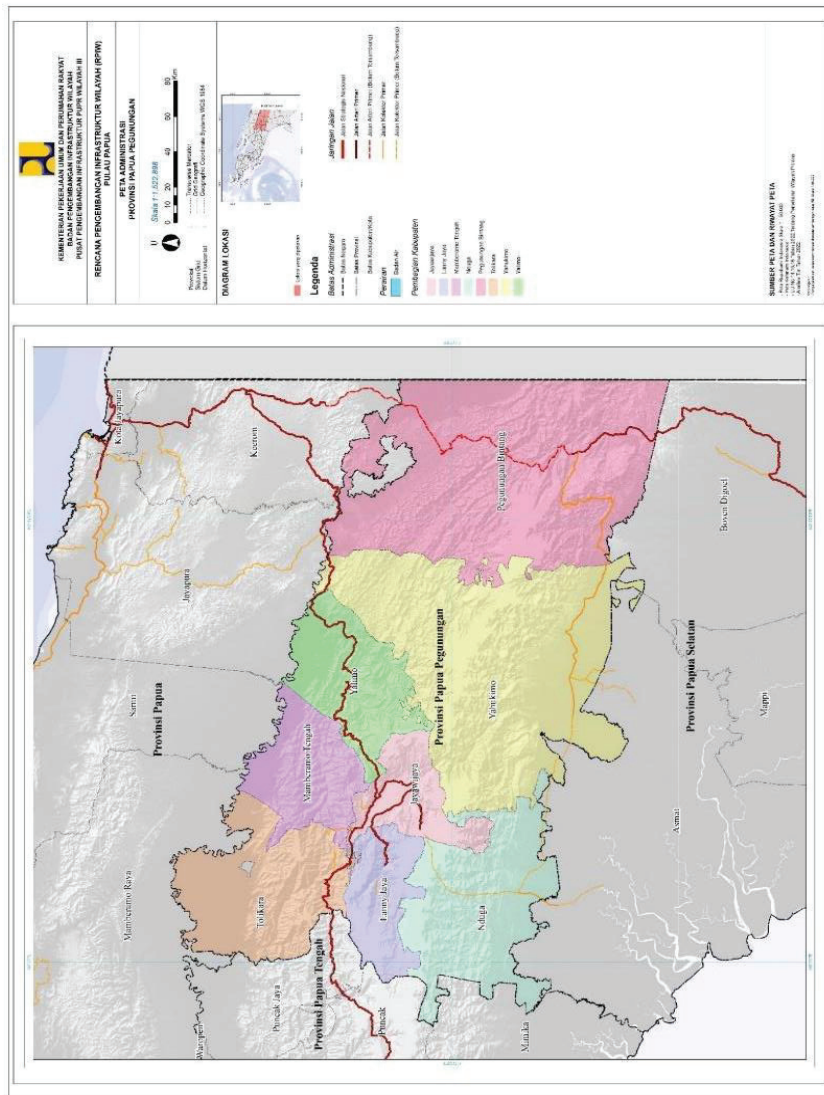
- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerom;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Mimika.

Provinsi Papua Pegunungan juga terbagi atas beberapa Kabupaten/ Kota, yang mana Kabupaten/ Kota yang terluas terdapat di Kabupaten Pegunungan Bintang dengan luas sekitar 1.554.931 Ha dan yang terkecil terdapat di Kabupaten Jayawijaya dengan luas sekitar 254.919 Ha, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel 3.1 Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	Persentase (%)	Kawasan Perkotaan Utama	Kawasan Perkotaan Pendukung
1.	Jayawijaya	254.919	4,58%	Wamena	Tiom, Kobakma, Karubaga
2.	Lanny Jaya	260.951	4,69%	Tiom	Wamena
3.	Mamberamo Tengah	345.503	6,21%	Kobakma	Wamena, Elelim
4.	Nduga	652.008	11,72%	Kenyam	Dekai, Oksibil
5.	Pegunungan Bintang	1.554.931	27,95%	Oksibil	Dekai
6.	Tolikara	586.651	10,54%	Karubaga	Wamena, Kobakma
7.	Yahukimo	1.496.822	26,90%	Dekai	Kenyam
8.	Yalimo	411.778	7,40%	Elelim	Kobakma, Wamena
Jumlah		5.563.561			

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Peta 3.1 Peta Administrasi Provinsi Papua Pegunungan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

A. Kondisi Klimatologi Kawasan Provinsi Papua Pegunungan

Data klimatologi adalah data iklim berdasarkan hasil pengamatan pada stasiun pengamat di wilayah yang bersangkutan dan/atau daerah disekitarnya, meliputi: Curah Hujan, Hari Hujan, Intensitas Hujan, Temperatur rata-rata, Kelembapan Relatif, Kecepatan dan Arah Angin, Lama Penyinaran (durasi) Matahari.

Iklim sebagai unsur lingkungan yang dapat memberikan informasi mengenai potensi suatu kawasan, diantaranya bermanfaat untuk mendukung pengelolaan suatu kawasan kaitannya dengan kebutuhan air, baik untuk pertumbuhan suatu tanaman maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Wilayah Provinsi Papua Pegunungan pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan temperatur berkisar antara 21^o – 24^o Celsius dan maksimal mencapai 36^o Celsius. Intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebal. Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Desember, sedangkan bulan kering/kemarau jatuh pada bulan Juni sampai dengan September. Didominasi untuk Provinsi Papua Pegunungan dengan rata-rata curah hujan sekitar 4000 mm – 7500 mm.

B. Kondisi Tutupan Lahan Kawasan Provinsi Papua Pegunungan

Dalam tutupan lahan saat ini, Provinsi Papua Pegunungan terbagi kedalam beberapa bagian dengan proporsi paling besar yaitu penggunaan lahan untuk hutan lahan kering sebesar 74,32 % sedangkan untuk proporsi paling kecil yaitu penggunaan lahan untuk pertanian lahan basah 0,001%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 3.2 Luas Tutupan Lahan di Provinsi Papua Pegunungan

No	Penggunaan Lahan	Tahun		% Luas (Ha) 2021
		2015	2021	
1	Hutan Lahan Kering	4.104.149	4.157.441	74,32
2	Hutan Mangrove	-	-	
3	Hutan Rawa	421.090	409.537	7,32
4	Hutan Tanaman	-	-	
5	Lahan Terbuka	235.187	124.601	2,23
6	Permukiman dan Tempat Kegiatan	2.393	31.944	0,57
7	Pertanian Lahan Basah	4	27	0,00
8	Pertanian Lahan Kering	440.747	417.313	7,46
9	Rawa	6.770	6.569	0,12

No	Penggunaan Lahan	Tahun		% Luas (Ha) 2021
		2015	2021	
10	Savana/ Padang Rumput	53.609	155.910	2,79
11	Semak Belukar	263.201	230.342	4,12
12	Tubuh Air	66.680	60.142	1,08
	Jumlah	5.593.832	5.593.832	100

Sumber: KLHK dan Hasil Analisis, 2022

C. Kondisi Kawasan Lindung di Kawasan Provinsi Papua Pegunungan

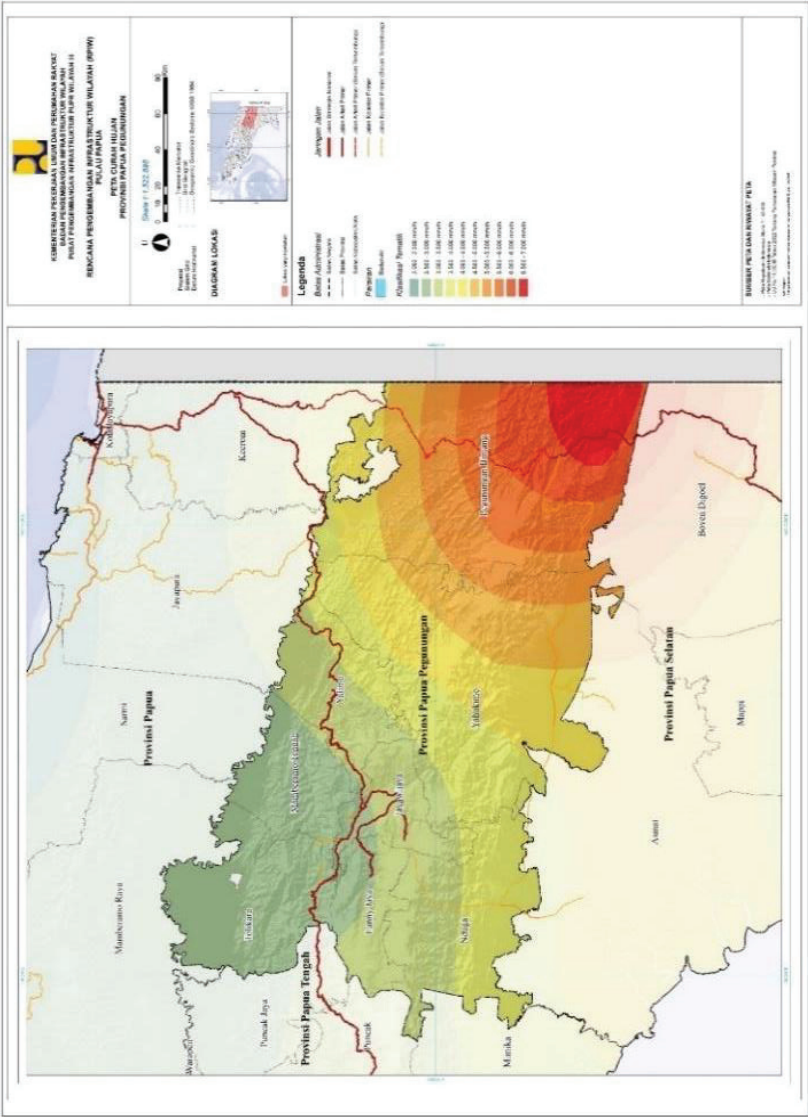
Dalam kawasan lindung tersebar di Provinsi Papua Pegunungan, bagian dengan proporsi paling besar kawasan lindungnya berada di Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar 27,16% sedangkan untuk proporsi paling kecil kawasan lindungnya berada di Kabupaten Jayawijaya sebesar 2,51%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 3.3 Luas Kawasan Lindung di Provinsi Papua Pegunungan

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	%
1	Jayawijaya	104.658	2,51
2	Lanny Jaya	171.714	4,12
3	Mamberamo Tengah	301.495	7,23
4	Nduga	554.656	13,31
5	Pegunungan Bintang	1.132.222	27,16
6	Tolikara	500.002	11,99
7	Yahukimo	1.059.331	25,41
8	Yalimo	344.348	8,26
	Jumlah	4.168.430	100

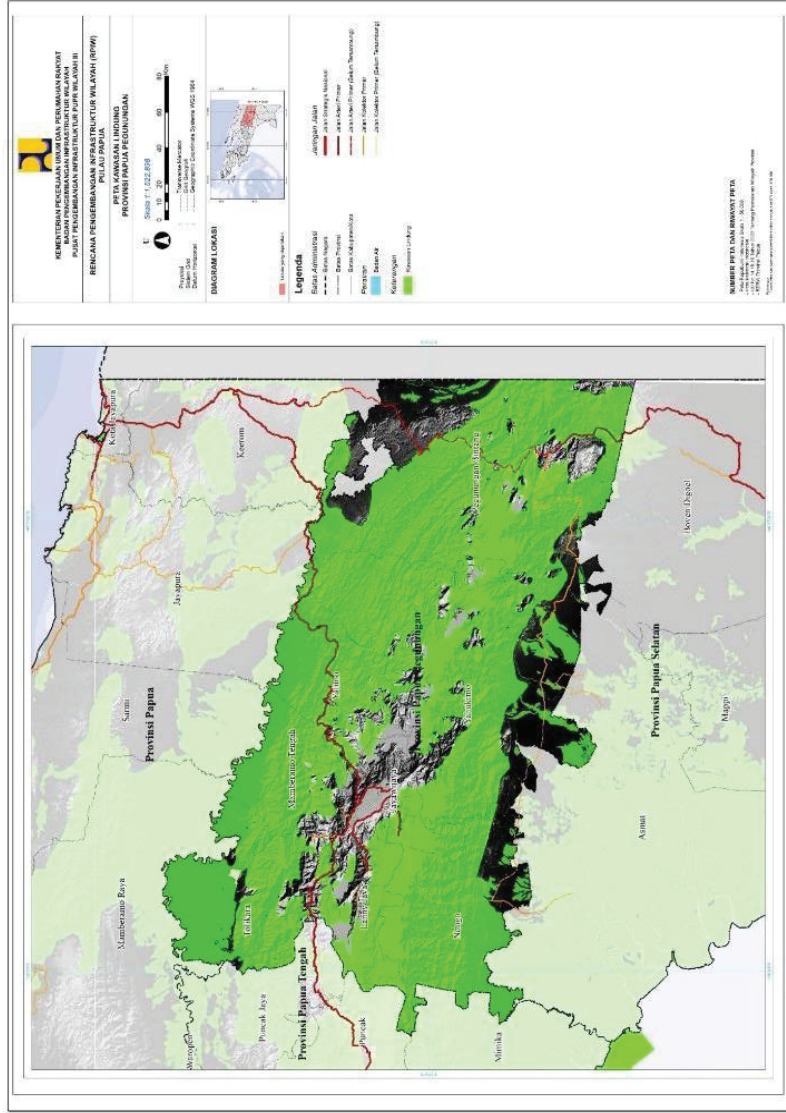
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Terlampir peta curah hujan, peta tutupan lahan tahun 2015, peta tutupan lahan tahun 2021, dan peta kawasan lindung sebagai berikut.



Peta 3.2 Peta Curah Hujan Provinsi Papua Pegunungan
Sumber: Hasil Analisis, 2022





Peta 3.5 Peta Kawasan Lindung Provinsi Papua Pegunungan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

D. Kondisi Ekoregion Kawasan Provinsi Papua Pegunungan

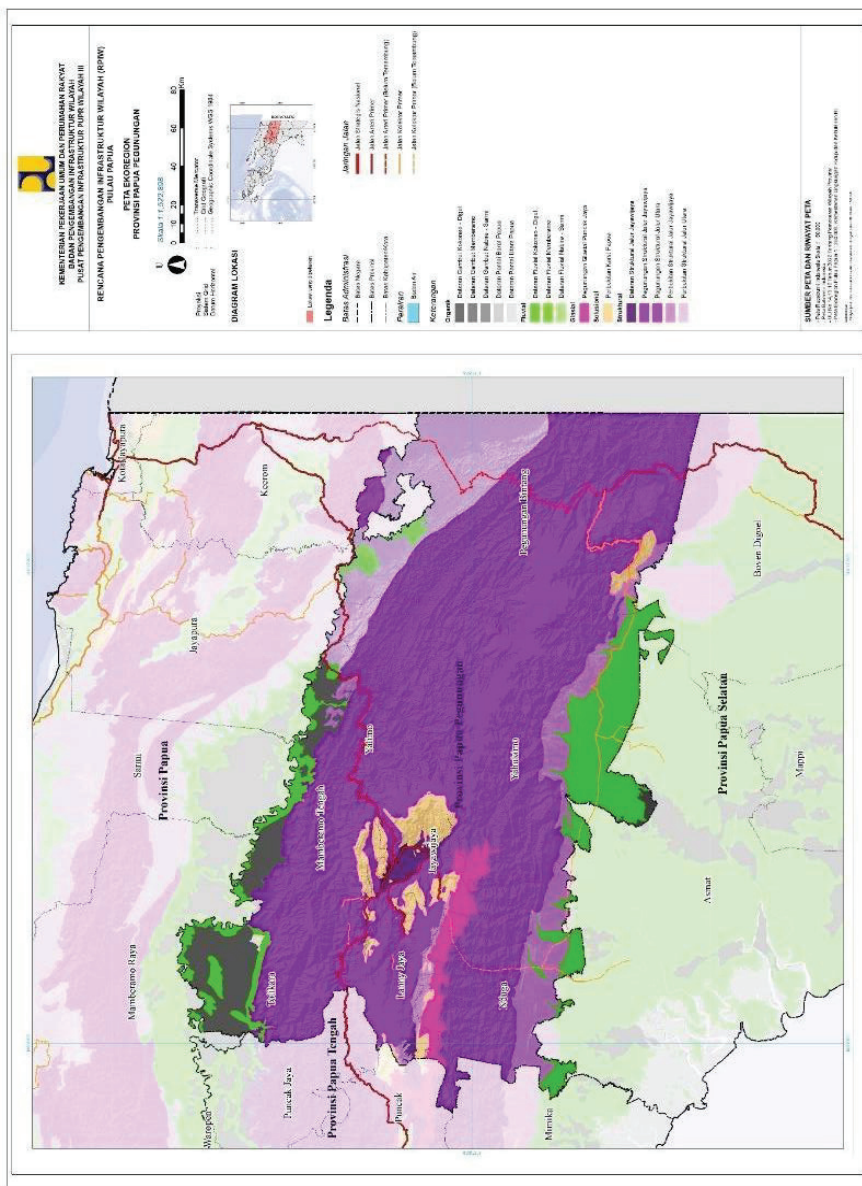
Dalam kawasan ekoregion di Provinsi Papua Pegunungan terbagi kedalam beberapa kategori ekoregion dengan proporsi paling besar yaitu ekoregion untuk Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya sebesar 65,23% sedangkan untuk proporsi paling kecil yaitu ekoregion untuk Dataran Gambut Kokonao - Digul sebesar 0,17%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.4 Luas Kawasan Ekoregion di Provinsi Papua Pegunungan

No	Kategori	Luas (Ha)	%
1	Dataran Struktural Jalur Jayawijaya	45.223	0,81
2	Pegunungan Glasial Puncak Jaya	117.114	2,11
3	Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya	3.627.783	65,23
4	Perbukitan Karst Papua	181.388	3,26
5	Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya	329.736	5,93
6	Dataran Fluvial Memberamo	136.102	2,45
7	Dataran Gambut Memberamo	243.906	4,39
8	Dataran Fluvial Kokonao - Digul	376.998	6,78
9	Dataran Gambut Kokonao - Digul	9.617	0,17
10	Dataran Fluvial Nabire - Sarmi	33.354	0,60
11	Pegunungan Struktural Jalur Utara	26.624	0,48
12	Perbukitan Struktural Jalur Utara	433.496	7,79
	Jumlah	5.561.346	100

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Terlampir peta ekoregion Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut.



Peta 3.6 Peta Ekoregion Provinsi Papua Pegunungan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

E. Kondisi Kebencanaan Banjir, Gempa Bumi, Tanah Longsor dan Tsunami Kawasan Provinsi Papua Pegunungan

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia Provinsi Papua Pegunungan tahun 2020 terdapat kejadian bencana diantaranya adalah banjir, gempa bumi, tanah longsor, puting beliung, dan konflik sosial. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2021 Provinsi Papua Pegunungan memiliki kelas risiko sedang.

Tabel 3.5 Nilai Indeks Risiko Provinsi Papua Pegunungan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kelas Risiko 2021
1	Lanny Jaya	91	91	91	91	91	91	91	Sedang
2	Jayawijaya	115	115	115	115	115	115	115	Sedang
3	Mamberamo Tengah	44	44	44	44	44	44	44	Sedang
4	Nduga	96	96	96	96	96	96	96	Sedang
5	Pegunungan Bintang	126	126	126	126	126	126	126	Sedang
6	Tolikara	114	114	114	114	114	114	114	Sedang
7	Yahukimo	132	132	132	132	132	132	132	Sedang
8	Yalimo	95	95	95	95	95	95	95	Sedang

Sumber : Buku IRBI Tahun 2021

Terlampir peta kondisi kebencanaan di Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut.

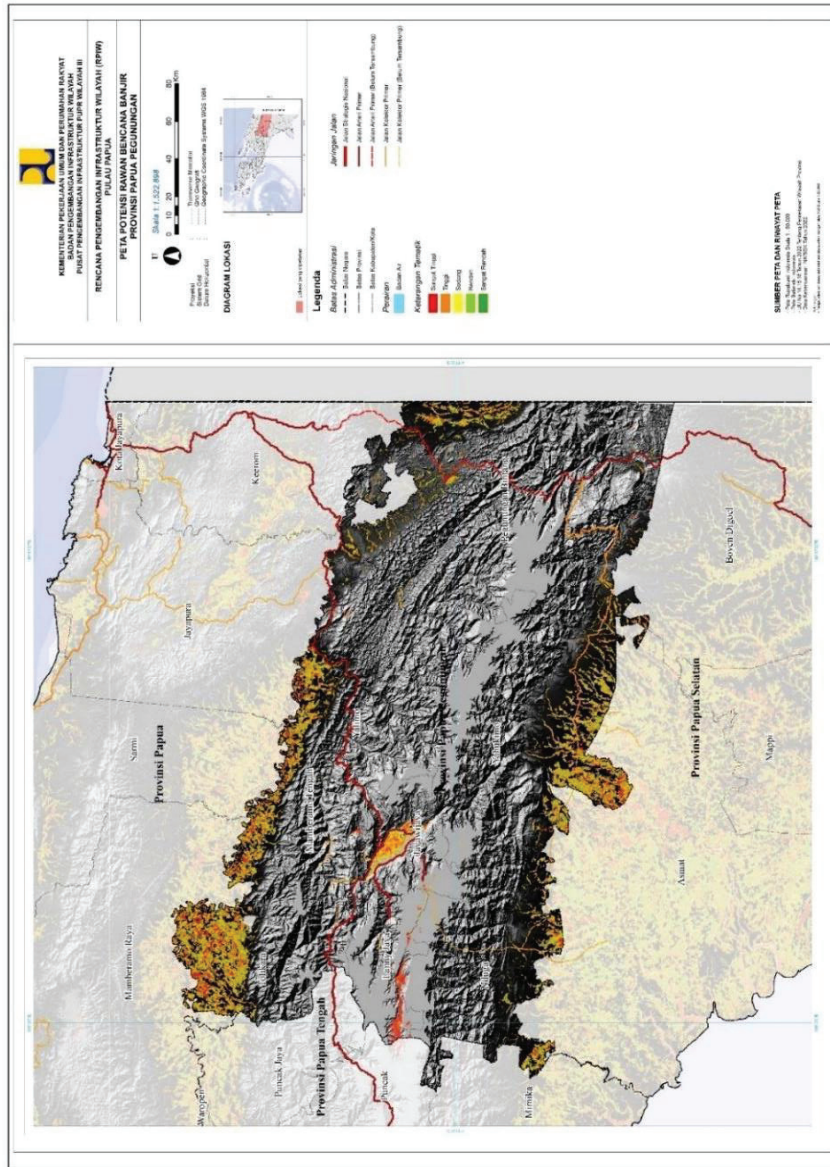
Tabel 3.6 Profil Fisik dan Kebencanaan Provinsi Papua Pegunungan

No	Kabupaten/ Kota	Topografi		Formasi Geologi		Kebencanaan			Iklim	
		Kemiringan Lahan		Jenis Tanah	Jenis Batuan	Jenis Bencana	Tingkat Rawan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Perubahan Curah Hujan	
1	Jayawijaya	N/A		Humic Cambisols, Dystric Cambisols, Rendzinas, Eutric Fluvisols, Lithosols	N/A	Gempa bumi, longsor, kekeringan	Tinggi	Sedang	2.500-3.500 mm/tahun	
2	Lanny Jaya	N/A		Humic Cambisols, Lithosols, Rendzinas, Eutric Fluvisols	N/A	Banjir, Gempa bumi, longsor, kekeringan	Rendah	Sedang	2.500-3.500 mm/tahun	
3	Mamberamo Tengah	N/A		Eutric Histosols, Dystric Cambisols, Humic Cambisols, Lithosols, Rendzinas	N/A	Banjir,	Sedang	Sedang	2.500-3.500 mm/tahun	
4	Nduga	N/A		Humic Cambisols, Rendzinas, Eutric Fluvisols, Lithosols,Ferric Acrisols	N/A	Banjir, Gempa bumi, longsor	Sedang	Sedang	3.000-4.000 mm/tahun	
5	Pegunungan Bintang	N/A		Eutric Fluvisols, Dystric Cambisols,	N/A	Banjir, Gempa bumi, longsor, kekeringan	Sedang	Sedang	4.000 – 7.000 mm/tahun	

**RPIW Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034**

No	Kabupaten/ Kota	Topografi		Formasi Geologi		Kebencanaan			Iklim	
		Kemiringan Lahan		Jenis Tanah	Jenis Batuan	Jenis Bencana	Tingkat Rawan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Perubahan Curah Hujan	
				Humic Cambisols, Rendzinas, Ferric Acrisols, Lithosols, Rendzinas						
6	Tolikara	N/A		Humic Gleysols, Eutric Histosols, Dystric Cambisols, Lithosols,	N/A	Banjir, Gempa bumi, longsor, kekeringan	Sedang	Sedang	2.500-3.000 mm/tahun	
7	Yahukimo	N/A		Eutric Fluvisols, Dystric Cambisols, Humic Cambisols, Rendzinas, Lithosols, Ferric Acrisols	N/A	Banjir, Gempa bumi, longsor, kekeringan	Sedang	Sedang	3.500 – 5.500 mm/tahun	
8	Yalimo	N/A		Eutric Histosols, Eutric Fluvisols,	N/A	Banjir, Gempa bumi, longsor, kekeringan	Sedang	Sedang	3.000 – 4.000 mm/tahun	

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Sumber: INARISK, 2022

**F. Kondisi Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih
Kawasan Provinsi Papua Pegunungan**

Dalam kawasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan air bersih tersebar di Provinsi Papua Pegunungan, bagian dengan kategori sangat tinggi Kawasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan air bersihnya yaitu berada di Kabupaten Yahukimo seluas 205.305 Ha, sedangkan untuk kategori sangat rendah Kawasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan air bersihnya yaitu berada di Kabupaten Mamberamo Tengah seluas 2.039 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 3.7 Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Provinsi Papua Pegunungan

No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
1	Jayawijaya	254.918	5	Pegunungan Bintang	1.552.686
	Rendah	65.903		Rendah	190.576
	Sangat Rendah	18.469		Sangat Rendah	2.786
	Sangat Tinggi	1.034		Sangat Tinggi	34.547
	Sedang	165.647		Sedang	1.308.879
2	Lanny Jaya	260.950		Tinggi	15.896
	Rendah	101.262	6	Tolikara	586.650
	Sangat Rendah	7.092		Rendah	207.845
	Sangat Tinggi	118		Sangat Rendah	10.622
	Sedang	147.900		Sangat Tinggi	20.144
	Tinggi	4.576		Sedang	289.892
3	Mamberamo Tengah	345.503		Tinggi	58.145
	Rendah	63.220	7	Yahukimo	1.496.821
	Sangat Rendah	2.039		Rendah	227.238
	Sangat Tinggi	8.937		Sangat Rendah	40.892
	Sedang	242.529		Sangat Tinggi	205.305
	Tinggi	28.775		Sedang	917.607
4	Nduga	652.007		Tinggi	105.777
	Rendah	25.751	8	Yalimo	411.777
	Sangat Rendah	3.086		Rendah	72.634
	Sangat Tinggi	49.789		Sangat Rendah	2.132
	Sedang	546.643		Sangat Tinggi	11.333
	Tinggi	26.736		Sedang	313.215
				Tinggi	12.461

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Terlampir Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih di Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut.

**G. Kondisi Daya Dukung Jasa ekosistem Penyediaan Pangan
Kawasan Provinsi Papua Pegunungan**

Dalam kawasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan Pangan tersebar di Provinsi Papua Pegunungan, bagian dengan kategori sangat tinggi kawasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan pangan yaitu berada di Kabupaten Yahukimo seluas 208.497 Ha sedangkan untuk Kategori sangat rendah Kawasan daya dukung jasa ekosistem penyediaan Pangannya yaitu berada di Kabupaten Yalimo seluas 7 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 3.8 Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Provinsi Papua Pegunungan

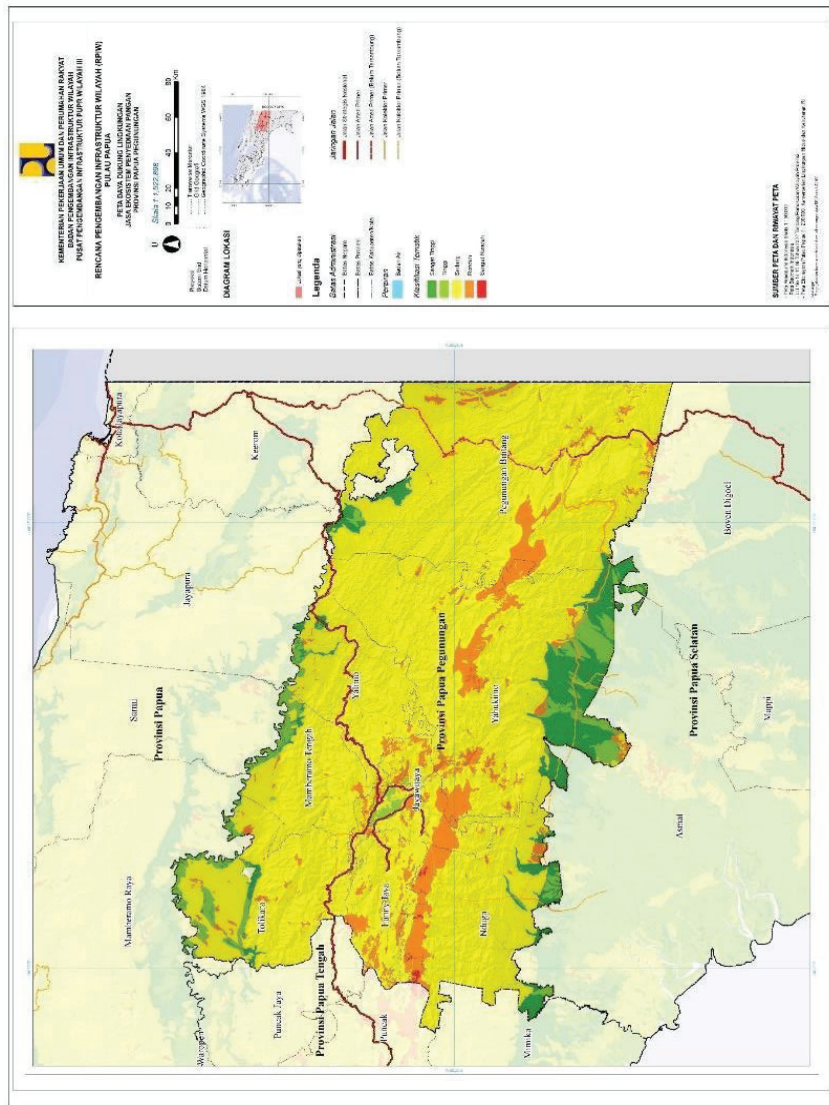
No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)	No	Kabupaten/ Kota	Luas (Ha)
1	Jayawijaya	254.918	5	Pegunungan Bintang	1.552.686
	Rendah	67.671		Rendah	85.972
	Sangat Tinggi	1.036		Sangat Rendah	29
	Sedang	166.726		Sangat Tinggi	34.547
	Tinggi	19.485		Sedang	1.416.195
				Tinggi	15.940
2	Lanny Jaya	260.950	6	Tolikara	586.650,65
	Rendah	57.219		Rendah	16.970,06
	Sangat Rendah	1.337		Sangat Tinggi	21.225,04
	Sangat Tinggi	118		Sedang	490.576,49
	Sedang	199.410		Tinggi	57.879,05
	Tinggi	2.864	7	Yahukimo	1.496.821,51
3	Mamberamo Tengah	345.503		Rendah	147.105,80
	Rendah	6.041		Sangat Rendah	20,51
	Sangat Tinggi	9.029		Sangat Tinggi	208.497,89
	Sedang	300.900		Sedang	1.034.391,44
	Tinggi	29.531		Tinggi	106.805,87
4	Nduga	652.007	8	Yalimo	411.777,91
	Rendah	72.398		Rendah	8.542,83
	Sangat Rendah	2.765		Sangat Rendah	7,10
	Sangat Tinggi	49.794		Sangat Tinggi	11.333,53
	Sedang	508.566		Sedang	378.484,49
	Tinggi	18.482		Tinggi	13.409,95

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 3.9 Profil Tutupan Lahan dan Indeks Jasa Ekosistem Provinsi Papua Pegunungan

No.	Kabupaten/ Kota	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	%	Jenis Ekoregion	Luas (Ha)	%	P1	P2	P3	R1	R2	R3	R4	R5	R6	C1	C2	C3	C4	C5	S1	S2
1	Jayawijaya	Hutan Primer	93289	34,12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Lanny Jaya	Hutan Primer	130908	34,96	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Mamberamo Tengah	Hutan Primer	263259	64,92	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Nduga	Hutan Primer	474073	89,06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Pegunungan Bintang	Hutan Primer	1217843	81,01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Tolikara	Hutan Primer	238316	64,86	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Yahukimo	Hutan Primer	806355	50,75%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Yalimo	Hutan Primer	234208	64,34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Peta 3.11 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Provinsi Papua Pegunungan

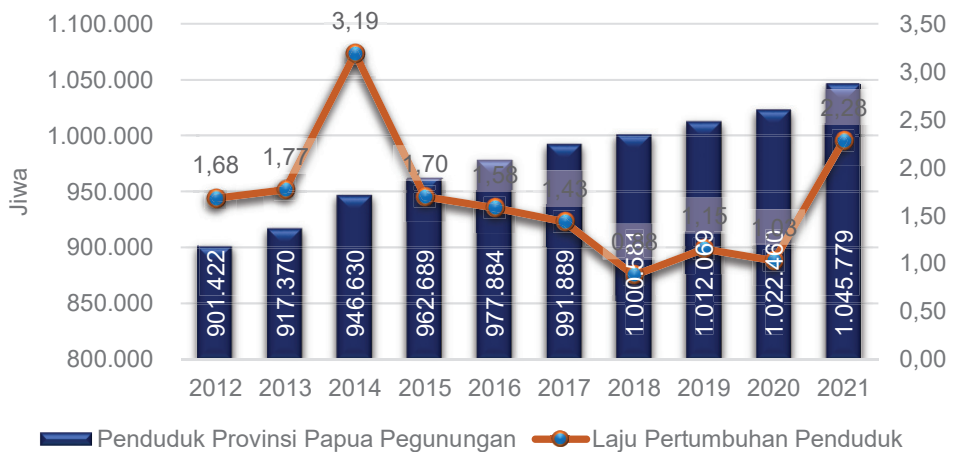
Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.2 Profil Demografi Provinsi Papua Pegunungan

Berikut Penjelasan profil demografi Provinsi Papua Pegunungan.

A. Profil Penduduk Kawasan Provinsi Papua Pegunungan

Wilayah Provinsi Papua Pegunungan memiliki jumlah penduduk pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebesar 1,045 Juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,28 persen. Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan nilai sebesar 3,19 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 3.1 Perkembangan Penduduk Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Penduduk di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan sebagian besar tersebar cukup merata di Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk masing-masing Kota/ Kabupaten sebagai berikut.

Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012 - 2021

Kabupaten	Penduduk Tahun									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jayawijaya	201.098	203.085	204.112	206.320	210.229	212.811	214.994	217.887	220.112	222.465
Yalimo	53.785	54.911	57.585	58.891	59.778	60.822	61.115	62.605	63.789	65.261
Yahukimo	171.620	175.086	178.193	181.326	184.217	187.021	189.092	190.887	192.627	196.585
Pegunungan Bintang	67.920	69.304	70.697	71.710	72.511	73.473	74.396	75.788	76.586	77.760
Tolikara	122.891	125.326	127.526	131.323	133.786	136.576	137.695	139.111	140.413	144.158
Nduga	84.293	85.894	92.530	94.173	95.885	97.012	97.517	98.595	99.817	103.386
Lanny Jaya	157.922	161.077	170.589	172.625	174.782	176.687	177.682	178.995	180.305	185.757
Mamberamo Tengah	41.893	42.687	45.398	46.321	46.696	47.487	48.090	48.201	48.811	50.406

Sumber: BPS Provinsi Papua

Kabupaten Jayawijaya sebagai ibukota Provinsi Papua Pegunungan dengan pusat kota di Kota Wamena memiliki jumlah penduduk yang selalu meningkat tiap tahunnya. Jumlah penduduk terbesar pertama dibandingkan dengan kabupaten lain di Kota Wamena yaitu Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2021 yaitu 222.465 jiwa dan diikuti dengan jumlah penduduk di Yahukimo yaitu 196.585 jiwa, dan jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan wilayah lainnya yaitu di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar 50.406 jiwa.

Selanjutnya berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, Kabupaten Lanny Jaya merupakan wilayah yang paling padat penduduknya sekitar 159 jiwa per km² pada tahun 2021, selengkapnya dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Kepadatan Penduduk Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2012-2021

Kabupaten	Kepadatan Penduduk
	Jiwa/Km2
Jayawijaya	38,9
Lanny Jaya	158,6
Mamberamo Tengah	22,8
Nduga	84,6
Pegunungan Bintang	14
Yalimo	47,7
Tolikara	21,9
Yahukimo	20,7

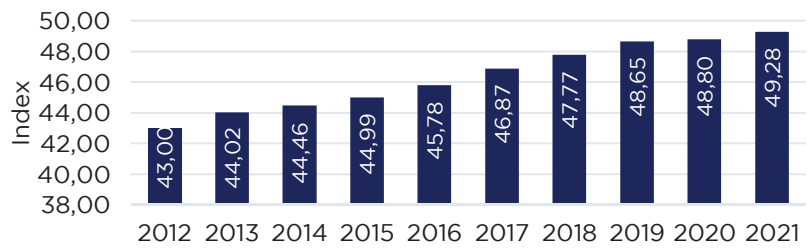
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data diatas kepadatan penduduk Kabupaten Lanny Jaya sangat berbeda jauh dengan kabupaten sekitarnya hal tersebut dapat dilihat dari sebaran penduduk dengan luas wilayah berdasarkan gambar peta berikut

B. Profil Pembangunan Manusia Provinsi Papua Pegunungan

Tingkat pembangunan manusia di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan ditunjukan dengan nilai indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 tercatat memiliki nilai sebesar 72,4, kondisi tersebut mengalami tren relatif menurun sejak tahun 2019. Dimana kondisi 2019 merupakan kondisi sebelum adanya Pandemi Covid-19 dengan nilai IPM 72,63 dan menurun pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai sama. Tren perkembangan IPM wilayah Provinsi Papua Pegunungan dapat dilihat sebagai berikut

RPIWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034



Gambar 3.2 IPM di Kawasan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012 - 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan gambar diatas tahun 2012 hingga tahun 2021 mengalami tren meningkat. Pembangunan manusia pada Provinsi Papua Pegunungan masih sangat rendah. Provinsi Papua Pegunungan Masih tertinggal dari segi pembangunan manusia. Selanjutnya berdasarkan Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Papua Pegunungan didapat sebaran tren nilai IPM sebagai berikut

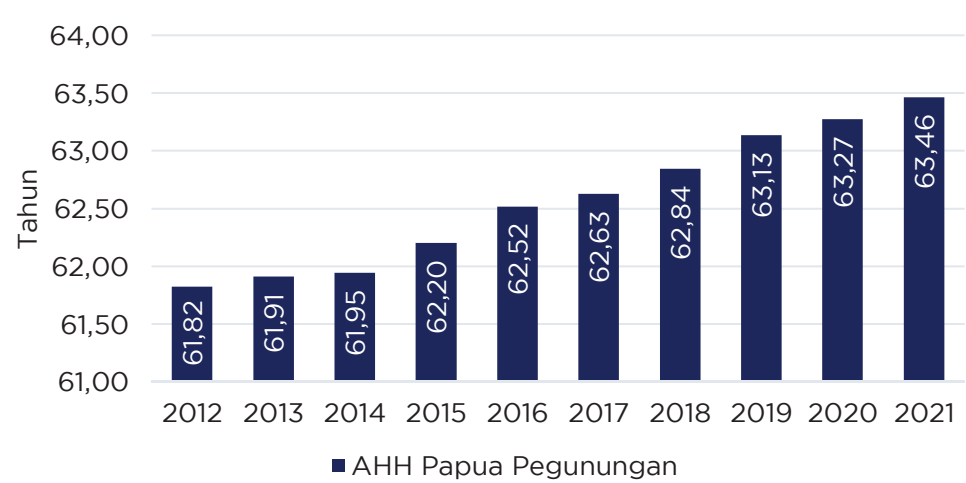
Tabel 3.12 IPM Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012 - 2021

Kabupaten	IPM										Tren
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jayawijaya	52,27	52,94	53,37	54,18	54,96	55,99	56,82	57,79	58,03	58,67	
Lanny Jaya	42,53	43,05	43,28	44,18	45,16	46,49	47,34	48,00	47,86	48,68	
Mamberamo Tengah	41,39	42,43	43,19	43,55	44,15	45,50	46,41	47,23	47,57	48,32	
Nduga	23,07	24,42	25,38	25,47	26,56	27,87	29,42	30,75	31,55	32,84	
Pegunungan Bintang	37,82	38,94	39,68	40,91	41,90	43,24	44,22	45,21	45,44	46,28	
Yalimo	41,84	43,33	44,21	44,32	44,95	46,19	47,13	48,08	48,34	49,01	
Tolikara	44,86	45,68	46,16	46,38	47,11	47,89	48,85	49,68	49,50	49,60	
Yahukimo	43,82	45,63	46,36	46,63	47,13	47,95	48,51	49,25	49,37	49,48	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Jayawijaya merupakan daerah dengan tingkat IPM paling tinggi di wilayah Provinsi Papua Pegunungan dengan nilai 58,67 pada tahun 2021. Sedangkan daerah dengan IPM yang paling rendah pada wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah Kabupaten Nduga dengan IPM sebesar 32,84.

Indeks pembangunan manusia secara detail dibagi tiga penilaian yaitu angka harapan hidup (AHH), rata-rata lama sekolah (RLS) dan Pengeluaran per kapita. Berdasarkan nilai angka harapan hidup Provinsi Papua Pegunungan memiliki nilai 63,46 tahun pada tahun 2021 dengan tren yang meningkat selama sepuluh tahun. Angka harapan hidup menunjukkan total agregat indikator kesehatan pada suatu wilayah. Tren yang positif pada Provinsi Papua Pegunungan menunjukkan adanya peningkatan layanan kesehatan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Tingkat perkembangan AHH selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.3 AHH Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012–2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

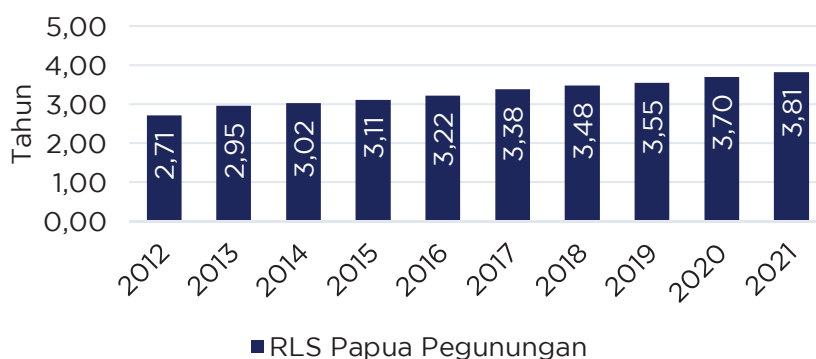
Tren angka harapan hidup yang memiliki tren meningkat dari tahun ke tahun pada Wilayah Provinsi Papua Pegunungan masih dibawah nilai nasional sebesar 71,47. Hal tersebut menunjukkan masih perlu peningkatan kembali layanan infrastruktur dasar dan kesehatan lainnya untuk meningkat hingga memiliki nilai yang sama atau lebih tinggi dari nilai nasional. Berdasarkan sebaran per kota/kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan maka didapat nilai AHH paling tinggi adalah Kabupaten Lanny Jaya dengan angka harapan hidup sebesar 66,11 tahun pada tahun 2021. Selengkapnya pada tabel berikut

Tabel 3.13 AHH Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021

Kabupaten	AHH										Tren
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jayawijaya	57,56	57,71	57,79	58,29	58,48	58,67	58,99	59,39	59,64	59,9	
Lanny Jaya	64,76	64,82	64,85	64,86	65,63	65,65	65,79	66	66,06	66,11	
Mamberamo Tengah	62,53	62,59	62,62	62,72	62,82	62,92	63,14	63,44	63,59	63,75	
Nduga	53,42	53,54	53,6	53,6	54,5	54,6	54,82	55,12	55,27	55,43	
Pegunungan Bintang	63,52	63,56	63,58	63,78	63,84	63,9	64,08	64,34	64,44	64,54	
Yalimo	64,78	64,83	64,85	64,86	64,9	64,94	65,1	65,34	65,42	65,49	
Tolikara	64,59	64,64	64,66	64,86	64,98	65,1	65,3	65,58	65,71	65,83	
Yahukimo	64,49	64,54	64,56	65,06	65,19	65,32	65,52	65,8	65,93	66,05	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel diatas seluruh kabupaten kota memiliki tren positif dalam peningkatan angka harapan hidup. Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan nilai AHH yang paling rendah yaitu 55,43 tahun. Selanjutnya berdasarkan rata-rata lama sekolah (RLS) maka didapat perkembangan nilai RLS Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut.



Gambar 3.4 RLS Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012 - 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

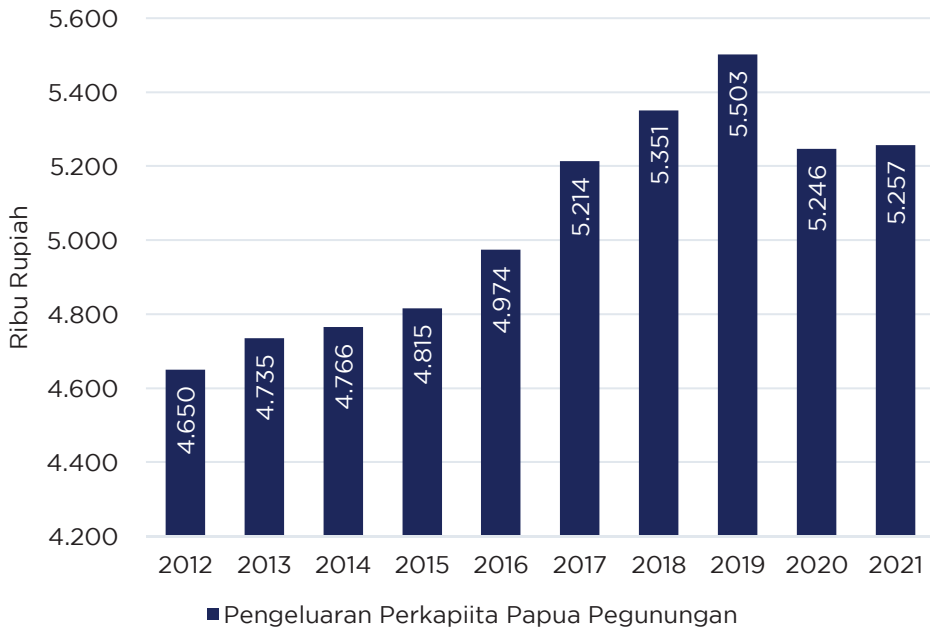
Berdasarkan gambar diatas didapat informasi jika rata-rata lama sekolah penduduk di wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah 10,15 tahun pada tahun 2021. Nilai rata-rata lama sekolah di wilayah Provinsi Papua Pegunungan mengalami tren positif selama 10 tahun terakhir, sempat mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan nilai 10,17 tahun. Berdasarkan sebaran kota/kabupaten didapat nilai RLS adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14 RLS Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021

Kabupaten	Rata-rata Lama Sekolah										Tren
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jayawijaya	4,31	4,36	4,39	4,59	4,74	4,99	5,17	5,3	5,51	5,6	
Lanny Jaya	2,35	2,55	2,6	2,75	2,92	3,17	3,18	3,19	3,2	3,43	
Mamberamo Tengah	2,15	2,18	2,4	2,49	2,57	2,67	2,78	2,9	3,15	3,33	
Nduga	0,49	0,6	0,63	0,64	0,7	0,71	0,85	0,97	1,13	1,42	
Pegunungan Bintang	1,76	1,88	1,97	2,06	2,19	2,32	2,49	2,61	2,81	3,04	
Yalimo	1,78	1,8	2,07	2,08	2,19	2,25	2,44	2,58	2,79	3,01	
Tolikara	2,88	3	3,04	3,06	3,21	3,5	3,62	3,63	3,64	3,65	
Yahukimo	2,94	3,78	3,97	3,98	3,99	4	4,01	4,02	4,26	4,27	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel diatas didapat informasi jika Kabupaten Jayawijaya yang memiliki nilai RLS yang paling tinggi dengan 5,6 tahun dengan tren positif. Sedangkan wilayah yang memiliki nilai RLS paling rendah adalah Kabupaten Nduga dengan 1,42 tahun. Selanjutnya adalah pembangunan manusia dilihat dari pengeluaran perkapita Wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang dijelaskan pada gambar berikut



Gambar 3.5 Pengeluaran Per Kapita Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data didatas didapat informasi jika pengeluaran perkapita di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Tercatat pada tahun 2021 nilai pengeluaran perkapita di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan sebesar 10,6 juta per tahun. Mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 11,08 juta per tahun. Berdasarkan sebaran per kota/ kabupaten maka didapat pengeluaran per kapita pada wilayah Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut.

Tabel 3.15 Pengeluaran perkapita Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2012-2021

Kabupaten	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)										Tren
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jayawijaya	6.628	6.875	6.989	7.068	7.282	7.524	7.637	7.835	7.441	7.545	
Lanny Jaya	3.863	3.882	3.901	3.965	4.106	4.356	4.517	4.569	4.350	4.393	
Mamberamo Tengah	3.921	3.964	3.985	4.051	4.219	4.510	4.609	4.671	4.462	4.487	
Nduga	3.406	3.542	3.607	3.625	3.725	3.972	4.131	4.181	3.975	3.976	
Pegunungan Bintang	5.010	5.052	5.095	5.176	5.289	5.506	5.578	5.633	5.409	5.429	
Yalimo	4.197	4.247	4.298	4.321	4.435	4.702	4.799	4.860	4.647	4.664	
Tolikara	4.356	4.412	4.468	4.518	4.711	4.827	4.946	5.142	4.826	4.841	
Yahukimo	4.055	4.068	4.081	4.109	4.248	4.554	4.737	5.030	4.875	4.895	

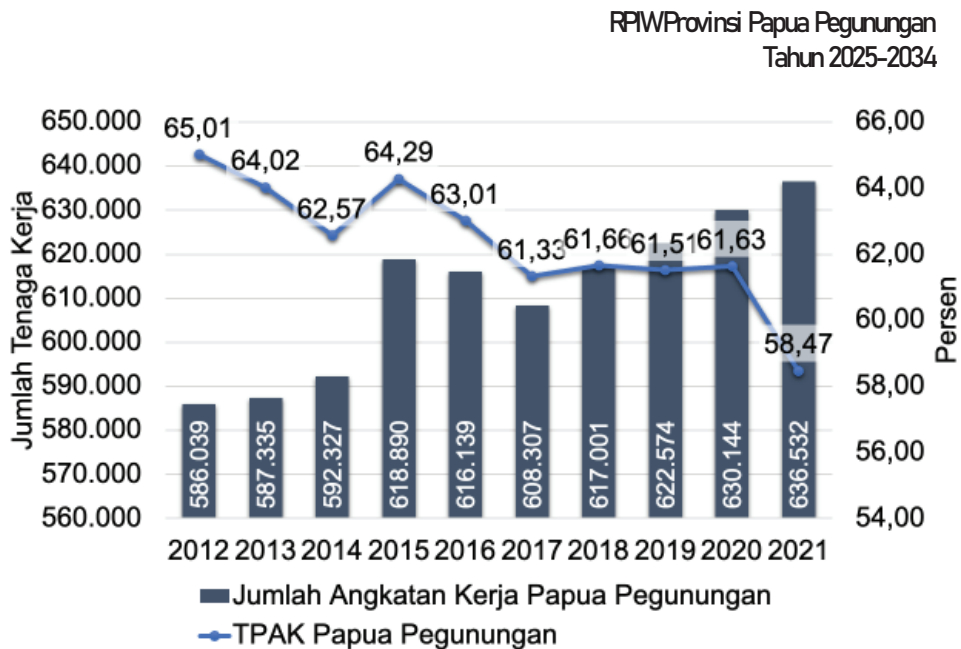
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan jika Kabupaten Jayawijaya memiliki tingkat pengeluaran perkapita paling tinggi dengan 7,54 juta per tahun. Sedangkan pengeluaran per kapita terendah ada pada Kabupaten Nduga dengan 3,96 juta per tahun. Secara keseluruhan tren pengeluaran per kapita mengalami peningkatan hingga tahun 2019, dan mengalami tren menurun setelah tahun 2019 akibat dampak adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan gambaran umum kependudukan dan pembangunan manusia didapat jika Kabupaten Nduga merupakan wilayah yang paling tertinggal dalam pembangunan manusia di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Sedangkan pembangunan yang paling tinggi di Provinsi Papua Pegunungan adalah Kabupaten Jayawijaya.

C. Profil Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Pegunungan

Jumlah tenaga kerja berdasarkan persentase angkatan kerja wilayah Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2021 adalah 58,37 persen atau berjumlah 636 ribu angkatan kerja. Secara persentase mengalami pengurangan, namun secara jumlah angkatan kerja mencatatkan penambahan dari tahun ke tahun. Berikut tren jumlah angkatan kerja di wilayah Provinsi Papua Pegunungan dijelaskan pada gambar berikut



Gambar 3.6 Tingkat Angkatan Kerja di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data diatas dijelaskan jika persentase angkatan kerja di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan mengalami tren persentase yang turun, namun mengalami tren meningkat secara jumlah riil. Pada tahun 2012 TPAK di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan berada pada level 65,01 persen dan mengalami tren menurun hingga mencapai nilai 58,47 akan tetapi pada tahun 2012 TPAK di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan mencapai jumlah riil 586 ribu namun dengan persentase yang lebih sedikit pada tahun 2021 yaitu 58,47, TPAK di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan memiliki TPAK sebesar 635.5. Selanjutnya data angkatan kerja dapat dijelaskan pada masing-masing Kabupaten/ Kota yang ada di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut

Tabel 3.16 Tingkat Presentase Angkatan Kerja Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021

Kabupaten	TPAK										Tren Persentase
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jayawijaya	64,94	66,42	63,49	64,67	63,23	66,21	63,81	62,77	63,27	62,84	
Lanny Jaya	67,07	66,61	63,85	63,67	63,74	64,01	62,53	62,09	62,99	60,63	
Mamberamo Tengah	68,05	67,61	66,67	67,14	68,49	65,34	66,49	63,82	66,40	64,15	
Nduga	62,95	62,67	62,71	63,02	64,48	59,28	58,91	61,97	61,91	58,10	
Pegunungan Bintang	67,18	65,89	64,32	63,62	62,81	60,85	57,40	61,34	58,28	58,25	
Yalimo	70,06	64,81	58,15	70,44	56,02	40,82	59,42	61,91	53,27	45,93	
Tolikara	56,60	58,86	59,15	66,43	67,41	62,36	64,96	64,36	68,33	65,83	
Yahukimo	67,06	61,36	62,35	61,09	59,05	59,39	58,60	56,60	56,34	50,11	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

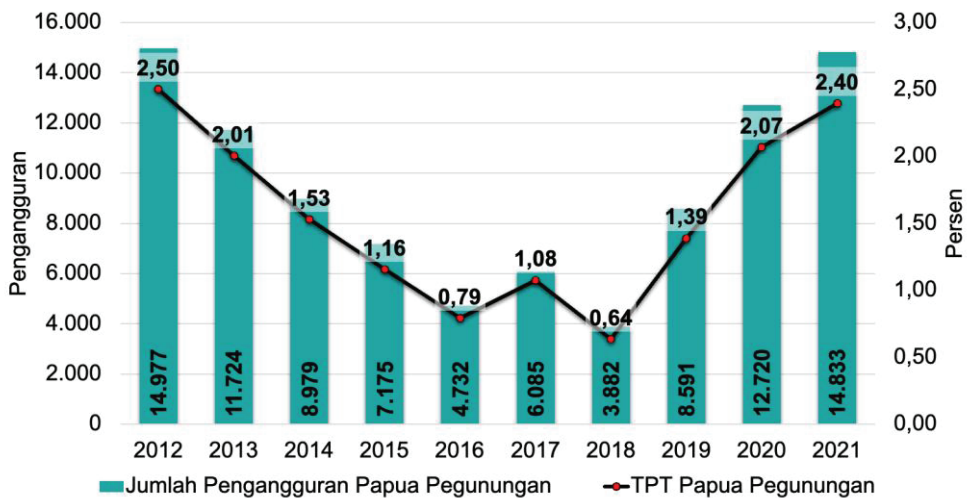
Tabel 3.17 Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021

Kabupaten	Jumlah Penduduk Usia Kerja										Tren Jumlah
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jayawijaya	130.594	134.888	129.598	133.436	132.938	140.906	137.197	136.768	139.265	140.315	
Lanny Jaya	105.921	107.298	108.924	109.902	111.404	113.106	111.113	111.133	113.579	114.408	
Mamberamo Tengah	28.507	28.860	30.269	31.101	31.982	31.028	31.976	30.761	32.410	32.820	
Nduga	53.064	53.829	58.030	59.344	61.827	57.504	57.451	61.100	61.801	62.697	
Pegunungan Bintang	45.626	45.661	45.472	45.619	45.542	44.707	42.707	46.491	44.634	45.542	
Yalimo	37.684	35.586	33.488	41.481	33.488	24.826	36.314	38.758	33.981	33.709	
Tolikara	69.556	73.772	75.435	87.241	90.181	85.165	89.443	89.530	95.949	98.929	
Yahukimo	115.087	107.441	111.111	110.766	108.778	111.065	110.800	108.033	108.526	108.113	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data diatas, dijelaskan jika berdasarkan persentase angkatan kerja (TPAK) didapat jika Kabupaten Tolikara memiliki persentase angkatan kerja yang tinggi dengan 65,83 persen pada tahun 2021 dan Kabupaten Yalimo memiliki persentase angkatan kerja yang paling rendah sebesar 45,93 persen. Berdasarkan jumlah riil angkatan kerja, Kabupaten Jayawijaya memiliki angkatan kerja paling tinggi di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan dengan 140 ribu angkatan kerja, sedangkan Kabupaten yang memiliki jumlah riil angkatan kerja terendah adalah Kabupaten Memberamo Tengah dengan 32,8 ribu angkatan kerja.

Selanjutnya untuk tingkat pengangguran, Wilayah Provinsi Papua Pegunungan memiliki persentase pengangguran sebesar 8,64 persen dari jumlah angkatan kerja atau sebesar 36,2 ribu pengangguran. Secara lebih detai tren tingkat pengangguran di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data diatas dijelaskan jika selama tahun 2012 hingga 2017 di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan mengalami tren persentase dan jumlah riil pengangguran terbuka yang menurun. Pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka berada pada level

2,5 persen dengan jumlah riil sebesar 14,9 ribu penduduk dan mengalami penurunan pada tahun 2016 pada level 0,79 atau sebanyak 7,1 ribu penduduk. Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan tingkat 1,08 persen atau sebesar 6,08 ribu jiwa dan meningkat hingga tahun 2021 hingga mencapai tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,4 persen atau sebesar 14,8 ribu penduduk. Selanjutnya berdasarkan Kabupaten/ Kota yang ada di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Tingkat Presentase Pengangguran Terbuka di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021

Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka										Tren Persentase
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jayawijaya	3,34	2,59	1,84	1,09	0,34	0,59	0,65	2,39	2,51	3,41	
Lanny Jaya	0,01	0,09	0,17	0,25	0,34	0,44	0,69	0,12	0,90	0,74	
Mamberamo Tengah	1,18	0,92	0,67	0,41	0,15	0,12	0,31	0,71	0,80	1,16	
Nduga	2,30	2,11	1,92	1,73	1,54	1,71	0,59	1,03	0,93	0,59	
Pegunungan Bintang	1,10	0,57	0,05	0,48	1,00	2,62	0,88	1,63	4,12	3,63	
Yalimo	5,74	5,12	4,50	3,88	3,26	3,87	0,84	0,64	0,86	0,76	
Tolikara	0,25	0,08	0,09	0,26	0,43	0,88	0,17	1,30	1,07	1,28	
Yahukimo	5,39	4,27	3,14	2,02	0,89	0,77	0,86	2,01	3,88	4,89	

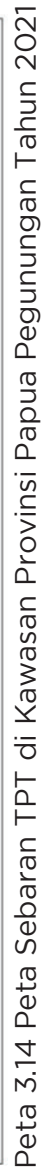
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Tabel 3.19 Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021

Kabupaten	Jumlah Pengangguran										Tren Jumlah
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jayawijaya	4.362	3.494	2.385	1.454	452	831	892	3.269	3.496	4.785	
Lanny Jaya	12	99	188	279	373	498	767	133	1.022	847	
Mamberamo Tengah	336	266	201	127	49	36	99	218	259	379	
Nduga	1.220	1.136	1.114	1.027	952	983	339	629	575	370	
Pegunungan Bintang	502	263	23	217	455	1.171	376	758	1.839	1.651	
Yalimo	2.163	1.822	1.506	1.608	1.090	961	305	248	292	255	
Tolikara	174	59	68	227	388	749	152	1.164	1.027	1.266	
Yahukimo	6.208	4.587	3.493	2.236	972	855	953	2.171	4.211	5.281	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

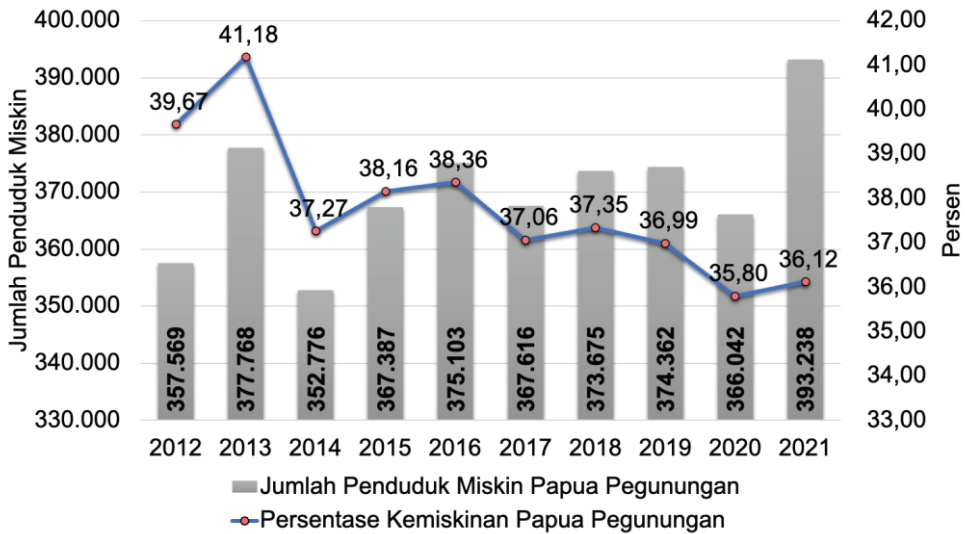
Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Nduga merupakan Kabupaten dengan tingkat persentase pengangguran terbuka paling rendah di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan dengan nilai 0,59 persen. Sedangkan untuk persentase tertinggi pada TPT adalah Kabupaten Yahukimo dengan 4,89 persen. Berikut sebaran nilai pengangguran terbuka dijelaskan pada gambar berikut.



Sumber: Hasil Analisis 2022

D. Profil Kemiskinan dan Ketimpangan di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan

Kondisi ekonomi dan sosial wilayah dapat dijelaskan pada tingkat kemiskinan. Pada Wilayah Provinsi Papua Pegunungan didapat persentase tingkat kemiskinan sebesar 17,84 persen atau 167 ribu penduduk miskin di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Secara lebih detail dijelaskan pada gambar berikut



Gambar 3.8 Tingkat Kemiskinan Wilayah Provinsi Papua Pegunungan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan gambar diatas didapat informasi jika persentase kemiskinan di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan mengalami tren menurun dari tahun 2013 hingga tahun 2021. Pada tahun 2012 memiliki persentase kemiskinan sebesar 39,67 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 41,18. Namun pada tahun setelahnya secara persentase mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 menjadi 36,12. Berdasarkan jumlah riil penduduk miskin selama 10 tahun relatif fluktuaktif, penurunan signifikan jumlah riil penduduk miskin di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan terjadi pada tahun 2013 dari 41,18 atau dengan jumlah 377 ribu penduduk dan relatif menurun hingga 366 ribu pada tahun 2020, namun meningkat secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 393 ribu penduduk. Penyebab terjadi peningkatan signifikan di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan disebabkan

dampak dari kebijakan pembatasan aktivitas karena Pandemi Covid-19. Selanjutnya berdasarkan kota/ kabupaten yang ada di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.20 Tingkat Presentase Kemiskinan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021

Kabupaten	Persentase Kemiskinan										Tren Persentase
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jayawijaya	39,05	41,81	39,60	39,48	39,66	38,62	38,66	38,33	37,22	37,09	
Lanny Jaya	42,33	43,79	39,26	41,97	41,68	39,60	40,06	39,52	38,13	38,73	
Mamberamo Tengah	42,84	39,59	35,47	35,54	38,36	36,38	37,02	36,93	36,41	36,76	
Nduga	38,14	39,69	35,89	35,89	38,47	37,29	38,13	38,24	36,72	37,18	
Pegunungan Bintang	35,63	37,23	32,78	31,55	31,52	30,60	30,75	30,51	30,15	30,46	
Yalimo	39,49	40,33	35,65	35,88	35,80	34,97	35,45	34,52	32,82	33,25	
Tolikara	36,30	38,00	33,27	34,00	33,63	32,73	33,14	32,90	32,04	32,60	
Yahukimo	41,98	43,27	39,02	41,26	40,62	39,33	39,25	38,82	37,34	37,64	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

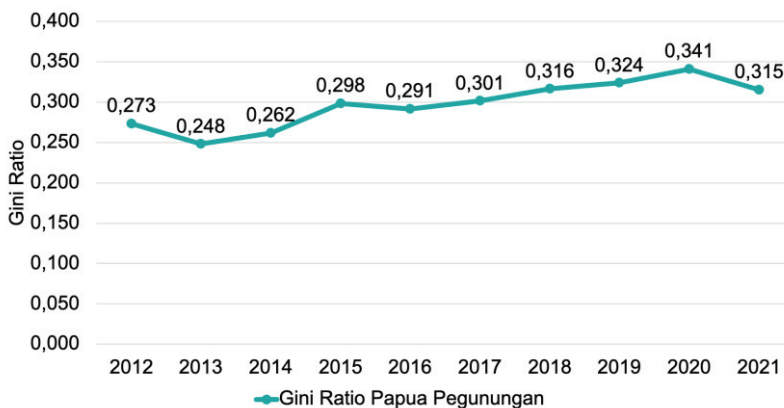
Tabel 3.21 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin										Tren Jumlah
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jayawijaya	78.529	84.910	80.828	81.455	83.377	82.188	83.117	83.516	81.926	82.819	
Lanny Jaya	66.848	70.536	66.973	72.451	72.849	69.968	71.179	70.739	68.750	73.078	
Mamberamo Tengah	17.947	16.900	16.103	16.462	17.913	17.276	17.803	17.801	17.772	18.806	
Nduga	32.149	34.091	33.209	33.799	36.887	36.176	37.183	37.703	36.653	40.125	
Pegunungan Bintang	24.200	25.802	23.174	22.625	22.855	22.483	22.877	23.123	23.091	23.813	
Yalimo	21.240	22.146	20.529	21.130	21.401	21.269	21.665	21.611	20.936	24.401	
Tolikara	44.609	47.624	42.428	44.650	44.992	44.701	45.632	45.768	44.988	48.989	
Yahukimo	72.046	75.760	69.531	74.815	74.829	73.555	74.219	74.102	71.927	81.207	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data dari tabel diatas didapat informasi jika secara persentase seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Papua Pegunungan mengalami tren menurun. Berdasarkan persentase, kemiskinan paling tinggi terdapat pada Kabupaten Lanny Jaya dengan 38,73 persen. Sedangkan Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan daerah dengan persentase kemiskinan paling rendah dengan 30,46 persen. Berdasarkan jumlah riil penduduk miskin didapat jika Kabupaten Jayawijaya dengan 82,8 ribu penduduk miskin sedangkan wilayah dengan penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Memberamo Tengah dengan 18,8 ribu penduduk miskin. Berdasarkan sebaran persentase penduduk miskin di wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut.

Selanjutnya berdasarkan tingkat ketimpangan pada wilayah Provinsi Papua Pegunungan didapat ketimpangan berdasarkan gini ratio sebesar 0,346 dengan tingkat fluktuaktif yang cukup tinggi. Tingkat ketimpangan wilayah Provinsi Papua Pegunungan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.9 Tingkat Ketimpangan di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data diatas tingkat ketimpangan mengalami tren meningkat dari 0,273 pada tahun 2012 menjadi 0,315 pada tahun 2021. Mengalami peningkatan hingga puncaknya pada tahun 2020 menjadi 0,3341 dan menurun kembali pada tahun 2021 menjadi 0,315. Selanjutnya tingkat ketimpangan per

kota/kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dapat dilihat sebagai berikut.

E. Rekap Profil Demografi Kawasan Provinsi Papua Pegunungan

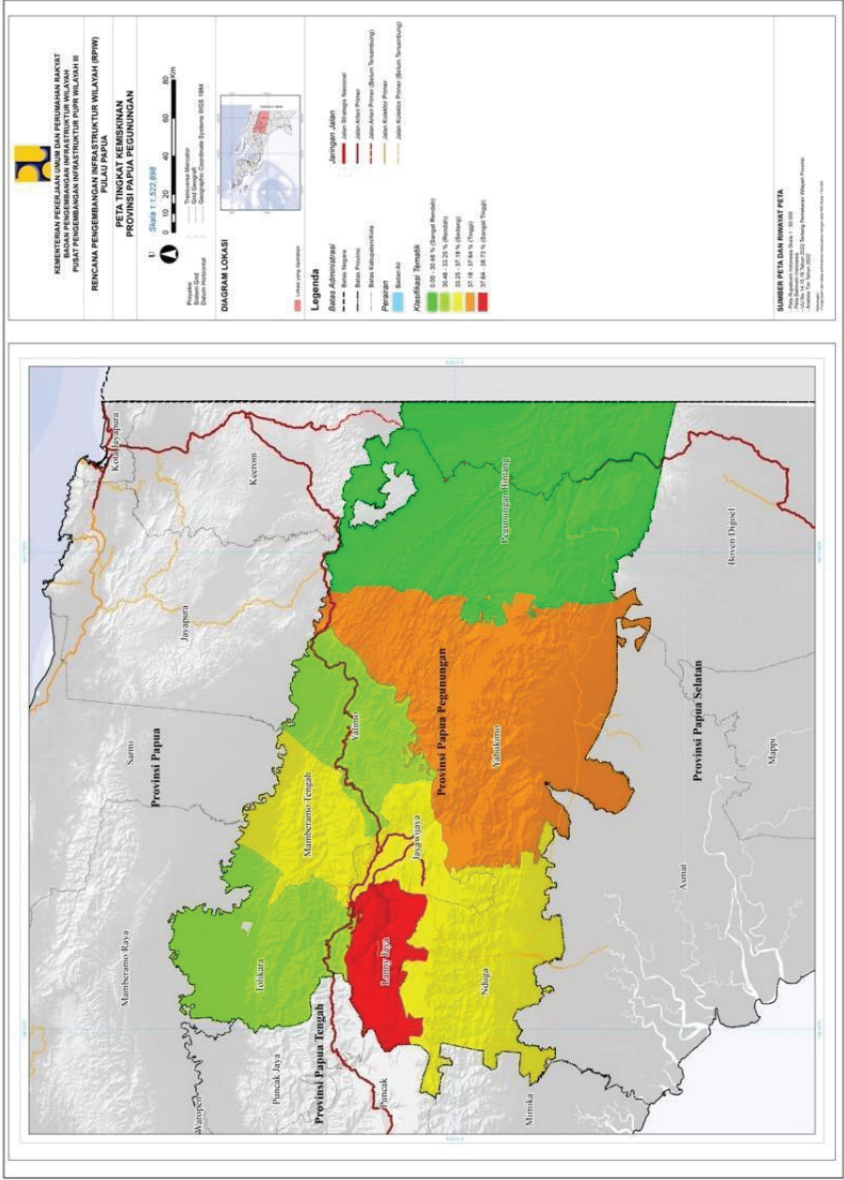
Tabel terlampir pada halaman berikutnya.

Tabel 3.22 Profil Demografi Provinsi Papua Pegunungan

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	IPM	Laju Pertumbuhan Penduduk	Jumlah Penduduk Usia Kerja	Jumlah Pengangguran
1.	Jayawijaya	222.465	38,9	58.67	3.23%	140.979	4.785
2.	Yalimo	65.261	47,7	49.01	7.22%	45.835	255
3.	Yahukimo	196.585	20,7	49.48	7.87%	127.216	5.281
4.	Pegunungan Bintang	77.760	14	46.28	1.76%	48.872	1.651
5.	Tolikara	144.158	21,9	49.60	7.55%	96.931	1.266
6.	Nduga	103.386	84,6	32.84	3.03%	71.648	370
7.	Lanny Jaya	185.757	158,6	48.68	2.83%	141.813	847
8.	Mamberamo Tengah	50.406	22,8	48.32	2.52%	37.969	379

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

RPRWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034



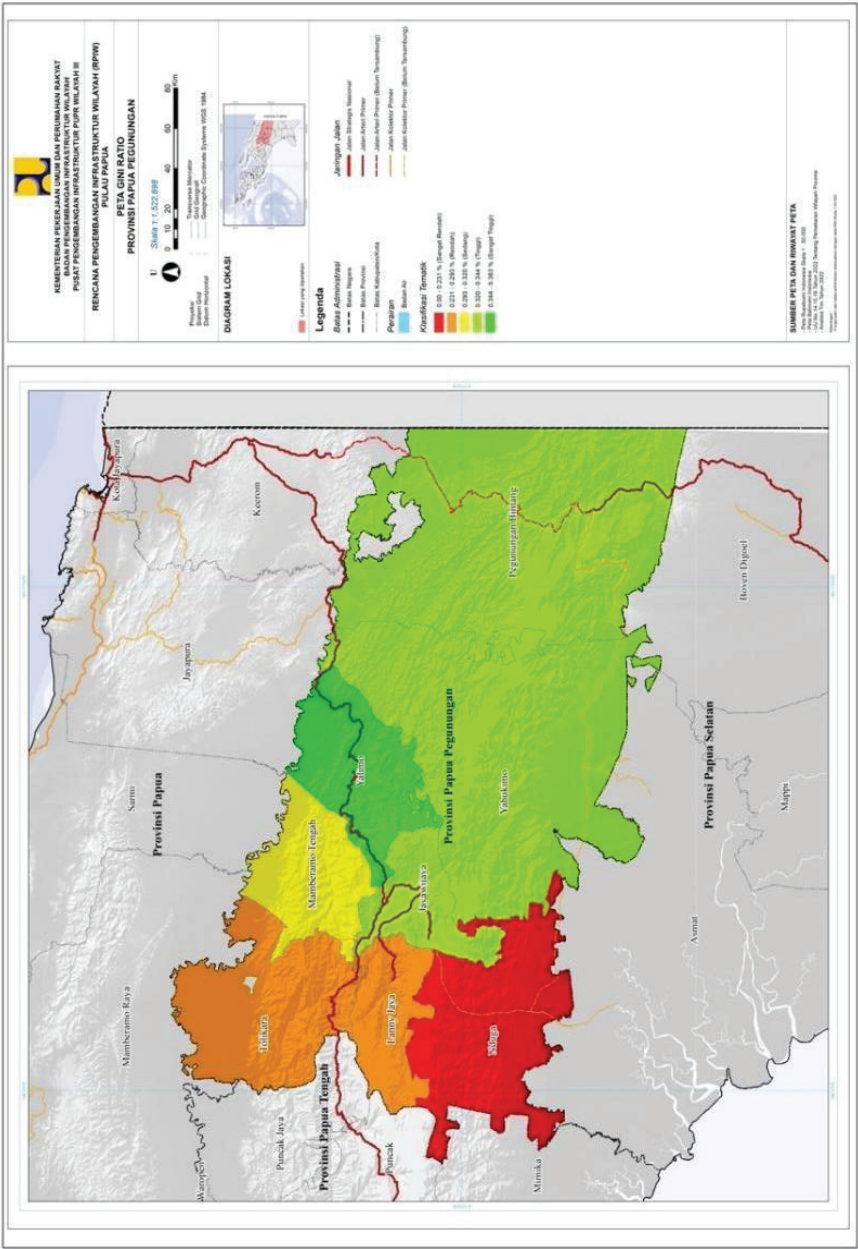
Peta 3.15 Peta Sebaran Tingkat Kemiskinan di Kawasan Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012 - 2021
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 3.23 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012 - 2021

Kabupaten	Gini Ratio										Tren
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jayawijaya	0,399	0,367	0,336	0,397	0,337	0,331	0,318	0,318	0,342	0,344	
Lanny Jaya	0,206	0,181	0,224	0,299	0,275	0,309	0,232	0,297	0,281	0,293	
Mamberamo Tengah	0,241	0,234	0,257	0,274	0,270	0,225	0,248	0,248	0,330	0,320	
Nduga	0,206	0,199	0,222	0,206	0,249	0,212	0,212	0,188	0,187	0,231	
Pegunungan Bintang	0,177	0,146	0,220	0,268	0,288	0,336	0,380	0,373	0,448	0,344	
Yalimo	0,275	0,259	0,212	0,135	0,193	0,247	0,337	0,320	0,362	0,363	
Tolikara	0,173	0,198	0,218	0,365	0,381	0,299	0,361	0,340	0,388	0,291	
Yahukimo	0,337	0,271	0,299	0,257	0,251	0,332	0,400	0,414	0,394	0,336	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel dijelaskan didapat jika Kabupaten Yalimo memiliki tingkat ketimpangan yang paling tinggi dengan 0,363 sedangkan wilayah dengan ketimpangan paling rendah adalah Kabupaten Nduga dengan 0,231. Berdasarkan sebaran ketimpangan wilayah didapat gambaran sebagai berikut.



Peta 3.16 Peta Sebaran Tingkat Ketimpangan di Kawasan Provinsi Papua Pegunungan

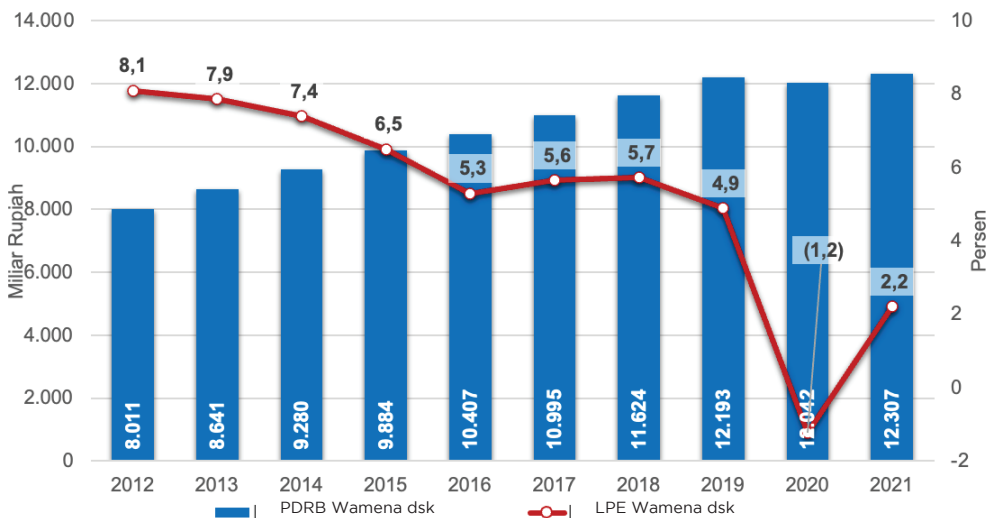
Sumber: Hasil Analisis, 2022

3.3 Profil Ekonomi Provinsi Papua Pegunungan

Berikut penjelasan profil ekonomi Provinsi Papua Pegunungan. Profil ekonomi yang akan dijelaskan adalah profil ekonomi berdasarkan PDRB, profil investasi, dan profil kapasitas fiskal.

A. Profil Ekonomi Kawasan Provinsi Papua Pegunungan Berdasarkan PDRB

Profil ekonomi Provinsi Papua Pegunungan dapat dilihat dari sisi PDRB atas dasar harga konstan dimana berdasarkan data tersebut wilayah Provinsi Papua Pegunungan Memiliki Nilai PDRB sebesar 12,3 triliun rupiah pada tahun 2021 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,2 persen. Secara lebih rinci tren PDRB wilayah Provinsi Papua Pegunungan selama 10 tahun adalah sebagai berikut:

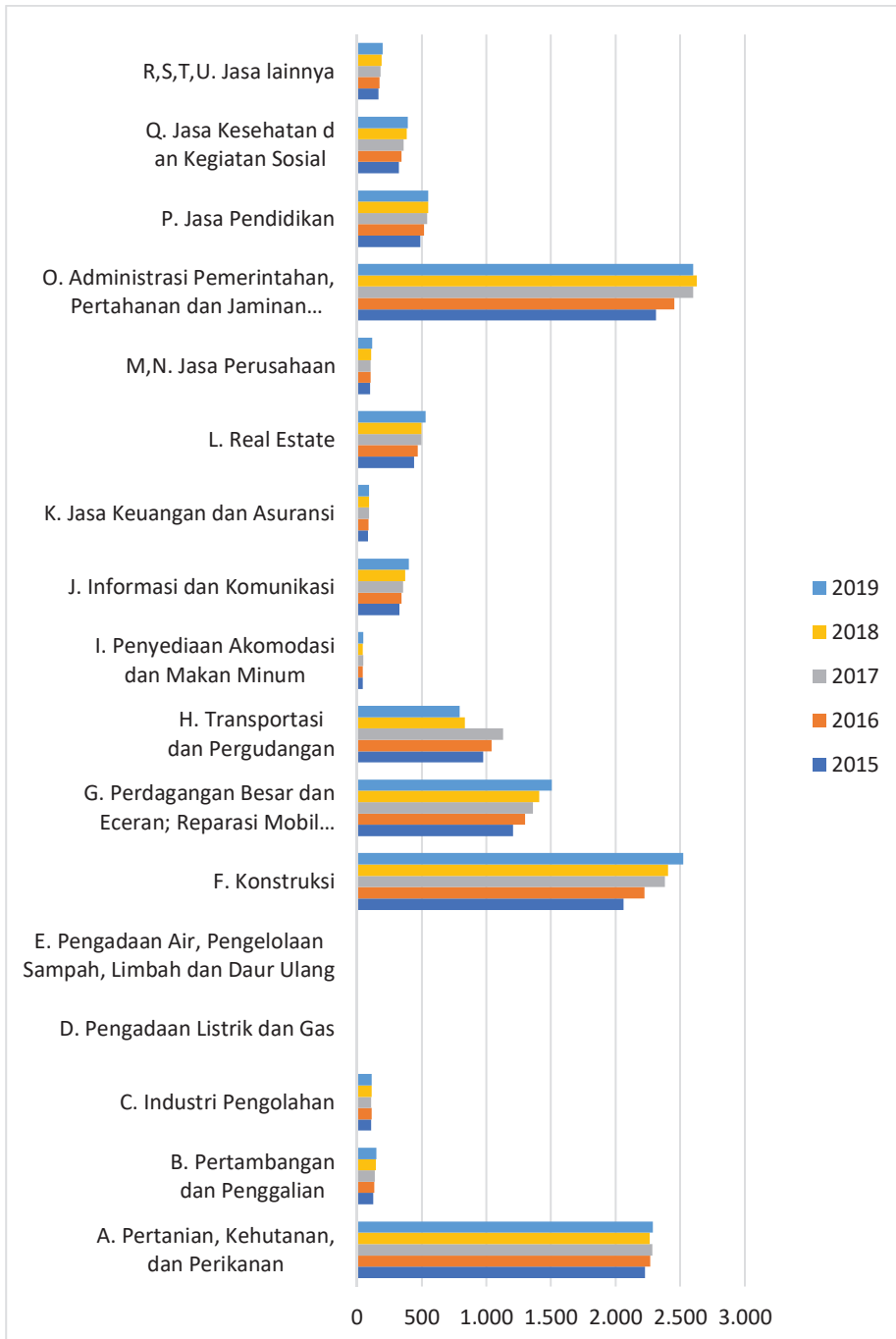


Gambar 3.10 PDRB dan LPE Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan gambar diatas didapat informasi jika secara PDRB Riil mengalami tren meningkat, namun sempat mengalami penurunan akibat dampak Pandemi Covid-19. Secara pertumbuhan relatif memiliki tren menurun. Dari 8,1 persen pada tahun 2013 yang merupakan angka pertumbuhan tertinggi

menjadi 4,9 persen pada tahun 2019. Terjadi pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebesar -1,2 persen dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 2,2 persen. Secara lebih detail porsi pertumbuhan PDRB di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut.



Gambar 3.11 PDRB Lapangan Usaha Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2017-2021

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Tabel 3.24 Distribusi Sektor PDRB Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2012 - 2021

Lapangan Usaha	Distribusi Papua Pegunungan									
	Tahun									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,2	22,7	22,3	21,8	20,9	20,3	19,5	18,7	18,8	18,6
B. Pertambangan dan Penggalian	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2
C. Industri Pengolahan	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F. Konstruksi	16,9	17,4	17,5	18,1	18,4	18,7	19,1	19,5	20,0	20,5
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,6	10,7	10,7	10,6	10,8	11,0	11,2	11,2	11,7	12,2
H. Transportasi dan Pergudangan	8,7	8,7	8,7	8,8	8,9	8,9	9,0	9,3	6,9	6,4
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
J. Informasi dan Komunikasi	3,3	3,2	3,2	3,1	3,0	3,0	2,9	2,9	3,1	3,2
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
L. Real Estate	3,8	3,9	4,0	3,9	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,3
M,N. Jasa Perusahaan	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20,4	20,1	20,3	20,6	20,9	21,0	21,1	21,3	21,8	21,1
P. Jasa Pendidikan	4,2	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,6	4,5
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,2	3,2
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
PDRB Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data diatas didapat informasi jika perekonomian di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan sebagian besar didominasi oleh Sektor pertanian, konstruksi, perdagangan dan administrasi Pemerintahan dengan masing-masing kontribusi dari 9 hingga 20 persen. Berikut adalah kontribusi masing-masing kota/kabupaten terhadap Wilayah Provinsi Papua Pegunungan dijelaskan sebagai berikut.

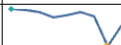
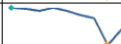
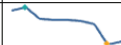
Tabel 3.25 Distribusi PDRB Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021

Kota/Kabupaten	Kontribusi Terhadap Papua Pegunungan										Tren
	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jayawijaya	39,4	39,2	39,0	39,0	38,7	38,7	38,9	38,9	37,8	37,9	
Pegunungan Bintang	11,8	11,6	11,5	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6	11,7	11,7	
Yahukimo	12,7	12,5	12,5	12,6	12,5	12,5	12,5	12,5	12,7	12,6	
Tolikara	9,3	9,2	9,1	9,0	8,9	8,8	8,7	8,6	8,8	8,7	
Memberamo Tengah	5,9	6,1	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3	6,3	
Yalimo	5,6	5,8	5,9	6,1	6,2	6,1	6,2	6,2	6,3	6,4	
Lanny Jaya	9,5	9,5	9,5	9,5	9,6	9,5	9,5	9,5	9,8	9,8	
Nduga	5,9	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

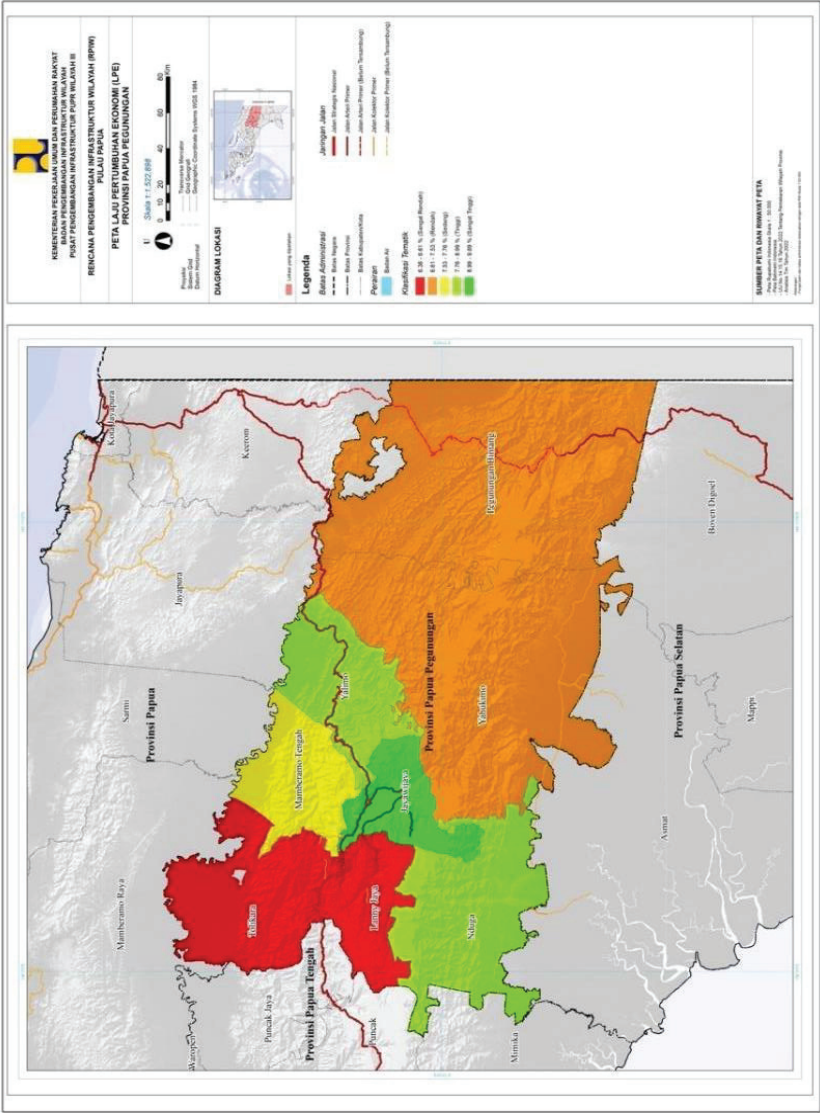
Berdasarkan distribusi kota/kabupaten, Kabupaten Jayawijaya memiliki tingkat kontribusi paling tinggi dengan 37,9 persen dari total PDRB Wilayah Provinsi Papua Pegunungan selanjutnya disusul Kabupaten Yahukimo dengan 12,6 persen. Selanjutnya tingkat pertumbuhan PDRB per kota/kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.26 Laju Pertumbuhan PDRB di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2012-2021

Kota/Kabupaten	LPE Papua Pegunungan									Tren
	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Jayawijaya	7,3	7,1	6,3	4,7	5,5	6,3	5,0	(4,1)	2,4	
Pegunungan Bintang	6,5	6,4	5,9	6,5	6,0	5,2	4,7	(0,1)	2,6	
Yahukimo	6,8	7,0	7,1	4,6	6,1	5,5	5,0	0,0	1,9	
Tolikara	6,2	6,7	4,9	4,6	4,6	4,5	3,9	0,5	0,9	
Memberamo Tengah	10,9	8,8	6,4	5,7	5,7	5,1	4,9	0,5	1,9	
Yalimo	12,3	9,8	8,9	6,8	5,2	6,5	5,5	1,0	3,4	
Lanny Jaya	8,3	7,4	6,6	5,8	5,4	5,3	5,2	1,8	1,8	
Nduga	11,3	9,5	7,7	6,7	7,2	5,7	4,8	0,7	2,7	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan tabel diatas seluruh kota/kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan mengalami tren menurun, terjadi penurunan drastis dan sebagian negatif pada tahun 2019-2020 sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 tercatat Kabupaten Yalimo dan Nduga memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi yaitu masing-masing 3,4 persen dan 2,7 persen. Gambaran pertumbuhan ekonomi Wilayah Provinsi Papua Pegunungan dapat dilihat sebagai berikut.



Peta 3.17 Peta Sebaran Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Papua Pegunungan
Sumber: Hasil Analisis, 2022

B. Profil Investasi Kawasan Provinsi Papua Pegunungan

Berdasarkan jumlah investasi yang masuk pada wilayah Provinsi Papua Pegunungan mengalami tren meningkat selama 10 tahun. Dengan nilai tertinggi pada investasi sebanyak 6,54 triliun rupiah pada tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3.12 Investasi Masuk Wilayah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2010 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Selanjutnya jumlah investasi dapat dilihat per Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Jumlah investasi terbesar berada di Kabupaten Jayawijaya dengan nilai 2,47 triliun rupiah. Sedangkan daerah dengan investasi terendah berada di Kabupaten Memeberamo Tengah dengan 419 miliar rupiah pada tahun 2021. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel Berikut.

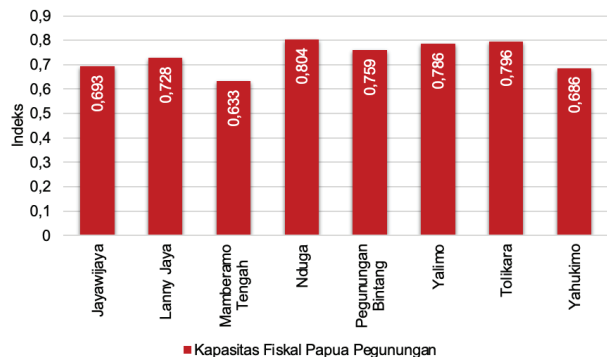
Tabel 3.27 Investasi di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2010 - 2021

Kabupaten /Kota	Investasi Masuk Per Kota/Kabupaten												Tren
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Kab. Jayawijaya	964	1.031	1.081	1.148	1.247	1.355	1.462	1.705	2.077	2.305	2.330	2.483	
Kab. Lanny Jaya	299	318	332	359	392	421	450	482	518	556	583	645	
Kab. Mamberamo Tengah	201	216	229	247	269	289	310	325	343	361	372	419	
Kab. Nduga	198	211	225	244	265	286	309	325	351	376	396	451	
Kab. Pegunungan Bintang	323	347	368	400	433	461	489	517	541	558	566	588	
Kab. Yalimo	205	219	233	251	272	296	320	345	370	393	410	456	
Kab. Tolikara	274	297	312	336	367	400	431	468	488	509	517	558	
Kab. Yahukimo	480	512	531	575	627	670	712	748	813	857	876	953	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

C. Profil Kapasitas fiskal Provinsi Papua Pegunungan

Selanjutnya adalah tingkat kapasitas fiskal untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah yang ada di masing-masing kabupaten. Dengan nilai kapasitas fiskal sebagai berikut.



Gambar 3.13 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data diatas Kabupaten Nduga merupakan daerah dengan kapasitas fiskal yang paling tinggi namun masih masuk kategori sedang diikuti Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yalimo. Kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang masih memiliki interpretasi sedang.

D. Rekap Profil Ekonomi Dasar Provinsi Papua Pegunungan

Berikut profil ekonomi dasar Kawasan Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 3.28 Ekonomi Dasar Provinsi Papua Pegunungan

No	Kabupaten/ Kota	Nilai PDRB (Miliar Rupiah)	Persentase PDRB terhadap wilayah	Pendapatan Perkapita (ribu rupiah)	Tingkat Kemiskinan	Kapasitas Fiskal
1.	Jayawijaya	9.166	37,9	7.545	37,09	0,693
2.	Yalimo	1.283	6,4	4.664	33,25	0,786
3.	Yahukimo	2.704	12,6	4.895	37,64	0,686
4	Pegunungan Bintang	2.202	11,7	5.429	30,46	0,759
5.	Tolikara	1.834	8,7	4.841	32,60	0,796
6.	Nduga	1.413	6,6	3.976	37,18	0,804
7..	Lanny Jaya	2.145	9,8	4.393	38,73	0,728
8	Mamberamo Tengah	1.287	6,3	4.487	36,76	0,683

Sumber: Hasil Analisis, 2023

E. Profil Sektor Unggulan Industri Provinsi Papua Pegunungan

Berikut terlampir profil sektor unggulan industri Kawasan Provinsi Papua Pegunungan, baik dari komoditas unggulan pertanian/perikanan, industri, pariwisata

Tabel 3.29 Komoditas Unggulan Pertanian di Provinsi Papua Pegunungan

N o.	Kabupaten/ Kota	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perikanan terhadap PDRB Kab/ Kota	Sub Sektor Unggulan Pertanian dan/ atau Perikanan	Komoditas Unggulan - cek policy brief	Lokasi Produksi	Lokasi Pengolahan	Lokasi Pemasaran	Besaran Produksi / tahun	Daerah Irigasi/ Sumber Air	Permasalahan	Keterangan
1	Jayawijaya	12,83%	Tanaman pangan dan perkebunan	Ubi jalar, Kopi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Belum terpenuhinya infrastruktur yang mendukung industri agropilitan dan kepariwisataan	n/a
2	Yalimo	23,39%	tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Sayuran, teh, kopi, kelapa sawit, karet	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Belum optimalnya pengolahan potensi sumber daya alam	n/a
3	Yahukimo	19,26%	Tanaman pangan dan hortikultura	Ubi jalar, Jagung	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Belum ada dukungan berupa pendampingan, pelatihan dan fasilitas infrastruktur dalam pengelolaan sumber daya alam.	n/a
4	Pegunungan Bintang	19,29%	tanaman pangan dan peternakan	Ubi jalar, madu lebah hutan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Transportasi logistik hanya melalui jalur udara/pesawat perintis.	n/a

N o.	Kabupaten/ Kota	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perikanan terhadap PDRB Kab/ Kota	Sub Sektor Unggulan Pertanian dan/ atau Perikanan	Komoditas Unggulan - cek policy brief	Lokasi Produksi	Lokasi Pengolahan	Lokasi Pemasaran	Besaran Produksi / tahun	Daerah Irigasi/ Sumber Air	Permasalahan	Keterangan
5	Tolikara	23,00%	tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Ubi jalar, kopi, nenas madu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Belum ada dukungan berupa pendampingan, pelatihan dan fasilitas infrastruktur dalam pengelolaan sumber daya alam.	n/a
6	Nduga	20,69%	tanaman pangan dan perkebunan	Ubi jalar, kopi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Wilayah	n/a
7	Lanny Jaya	18,68%	hortikultura dan perkebunan	Sayuran, kopi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Terbatasnya kualitas dan kuantitas dari sarana, prasarana, dan infrastruktur pendukung	n/a
8	Mamberamo Tengah	15,57%	tanaman pangan dan hortikultura	Sagu, ubi, buah-buahan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Keterbatasan sarana dan prasana pendukung kegiatan masyarakat serta aksesibilitas antar distrik	n/a

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Komoditas unggulan yang terdapat di Provinsi Papua Pegunungan sebagian besar masih skala kecil menengah, sehingga belum terdapat informasi yang lebih detail mengenai lokasi produksi, pengolahan, pemasaran, besaran produksi setiap tahun dan daerah irigasi/sumber air yang mendukung komoditas pertanian.

Tabel 3.30 Komoditas Unggulan Industri di Provinsi Papua Pegunungan

No.	Kabupaten/ Kota	Kontribusi Sektor Industri/ Perikanan terhadap PDRB Kab/ Kota	Lokasi Kawasan Industri	Jenis Industri	Besaran Produksi	Jumlah Tenaga Kerja	Asal Bahan Baku	Tujuan Pemasaran	Pengelolaan Limbah	Permasalahan
1	Jayawijaya	1,88	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Yalimo	0,08	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Yahukimo	0,94	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Pegunungan Bintang	0,08	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Tolikara	0,20	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6	Nduga	0,10	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Lanny Jaya	0,07	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Mamberamo Tengah	0,08	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Sektor industri bukan merupakan sektor unggulan di Provinsi Papua Pegunungan, hal ini berakibat minimnya data tentang sektor industri yang ada di Provinsi Papua Pegunungan.

Tabel 3.31 Komoditas Unggulan Pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan

No.	Kabupaten/ Kota	Kontribusi Sektor Pariwisata/ Perikanan terhadap PDRB Kab/ Kota	Objek Destinasi Tujuan Wisata			Jumlah Wisatawan		Lama Tinggal		Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	
			ODTW Unggulan	Lokasi	Jumlah Pengunjung/ tahun	Kondisi dan Permasalahan	M mancanegara	Domestik	M mancanegara	Domestik	Domestik
1	Jayawijaya	0,61	1. Objek Wisata Kurulu Mumi 2. Telaga Warna Maima 3. Museum Pilamo Adat	1. Distrik Kurulu 2. Distrik Maima 3. Distrik Wesaput	N/A	N/A	7	8.388	N/A	N/A	N/A
2	Yalimo	0,07	Desa wisata kampung sali	Kampung Sali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Yahukimo	0,39	1. Rumah Pohon Suku Momuna 2. Air Terjun Pinjong	1. Kampung Massi Distrik Soba	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Pegunungan Bintang	0,38	1. Puncak Mandal 2. Goa Emoktum	1. Kampung Mandala 2. Kampung Mandala	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Tolikara	0,35	Danau Biuk	Kampung Biuk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Nduga	0,07	Danau Habema	Distrik Asotipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Lanny Jaya	0,05	1. Centre Point	Kampung Genena	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RPWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

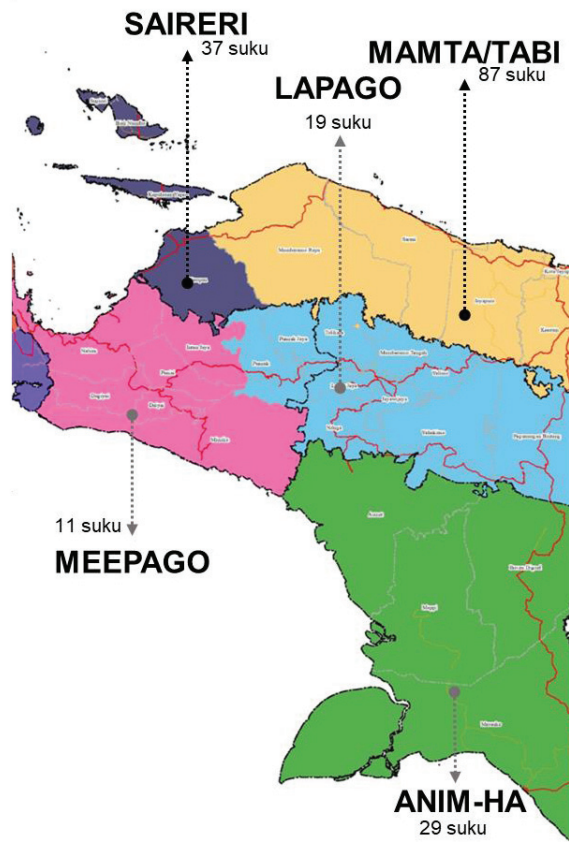
No.	Kabupaten/ Kota	Kontribusi Sektor Pariwisata/ Perikanan terhadap PDRB Kab/ Kota	Objek Destinasi Tujuan Wisata				Jumlah Wisatawan		Lama Tinggal		Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	
			ODTW Unggulan	Lokasi	Jumlah Pengunjung/ tahun	Kondisi dan permasalahan	Mancanegara	Domestik	Mancanegara	Domestik	Mancanegara	Domestik
			2. Kampung Genena									
8	Mamberamo Tengah	0,02	Pegunungan Foja	Mameramo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.4 Profil Sosial Budaya Provinsi Papua Pegunungan

Pada bagian profil sosial budaya akan dijelaskan mengenai kondisi suku, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi dan mata pencaharian, pakaian adat, kesenian khas.

Wilayah Wamena dsk termasuk dalam Wilayah Adat Laa Pago. Wilayah Adat Laa Pago terdiri dari Kabupaten Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Nduga, Jayawijaya, Yalimo, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. Arah pengembangan untuk Wilayah Adat Laa Pago di dalam RPJMN 2020-2024 adalah pengembangan ternak sapi, kopi, kakao, kacang tanah dan tanaman hortikultura. Wilayah adat yang ada di Wilayah Wamena dsk dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 3.14 Wilayah Adat Laa Pago di Provinsi Papua Pegunungan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

A. Sistem Kemasyarakatan dan Organisasi Sosial

Pada daerah-daerah Papua yang bervariasi topografinya terdapat ratusan kelompok etnik dengan budaya dan adat istiadat yang saling berbeda. Dengan mengacu pada perbedaan topografi dan adat istiadatnya maka secara alamnya. Pada umumnya masyarakat Papua hidup dalam sistem kekerabatan yang menganut garis ayah atau patrilineal.

Dalam perilaku sosial terdapat suatu falsafah masyarakat yang sangat unik, misalnya seperti yang ditunjukkan oleh budaya suku Komoro di Kabupaten Mimika, yang membuat genderang dengan menggunakan darah. Suku Dani di Kabupaten Jayawijaya yang gemar melakukan perang-perangan, yang dalam bahasa Dani

disebut Win. Budaya ini merupakan warisan turun-temurun dan di jadikan festival budaya lembah Baliem. Ada juga rumah tradisional Honai, yang didalamnya terdapat mummy yang di awetkan dengan ramuan tradisional. Terdapat tiga mummy di Wamena; Mummy Aikima berusia 350 tahun, mummy Jiwika 300 tahun, dan mummy Pumo berusia 250 tahun.

B. Sistem Ekonomi dan Mata Pencaharian

Penduduk di Pulau Papua dapat dibedakan menjadi kelompok besar yaitu:

- Penduduk daerah pantai dan kepulauan dengan ciri-ciri umum, rumah diatas tiang (rumah panggung), mata pencaharian menokok sagu dan menangkap ikan.
- Penduduk daerah pedalaman yang hidup pada daerah sungai, rawa, danau dan lembah serta kaki gunung. Pada umumnya bermata pencaharian menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan.
- Penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian berkebun beternak secara sederhana.
- Suku yang tidak termasuk penggolongan diatas di sekitar teluk Humboldt hidup dari perikanan, sedangkan pertaniannya merupakan pertanian campuran ubi dan sagu.

C. Suku di Wilayah Wamena dsb

Suku Hubula adalah salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia dan salah satu suku asli yang di Papua. Suku ini mendiami kawasan pegunungan tengah Papua, tepatnya di Lembah Baliem bersama suku-suku lainnya, namun ada pula yang mengatakan kalau Suku Hubula adalah gabungan dari tiga suku yang bermukim di Lembah Baliem, yakni Suku Dani, Suku Yali dan Suku Wamena.

Suku Hubula dikenal dekat dengan berbagai macam upacara adat dan ritual, salah satu yang paling terkenal adalah upacara Pesta Babi atau orang-orang di Suku Hubula menyebutnya sebagai *wam mawe*. Selain upacara *wam mawe*, Suku Hubula juga memiliki ritual memanah babi dengan menggunakan *sege* (sejenis tombak khas milik Suku Hubula). Dalam Festival Lembah Baliem, tradisi atau ritual melempar *sege* juga dilakukan oleh tokoh pemerintah daerah

atau instansi terkait sebagai penanda dibukanya festival, namun yang menjadi sasaran sege dalam festival bukanlah babi, melainkan batang pohon pisang.

Suku Hubula juga memiliki hukum adat sendiri yang diatur dalam hukum Honai (merujuk pada rumah adat honai dari kebanyakan suku-suku di Papua), hukum Honai juga tidak hanya mengatur tentang masalah sosial, namun juga masalah peperangan. Dalam sebuah peperangan, Suku Hubula biasanya melengkapi diri dengan senjata khas suku mereka, seperti *sege*, sementara untuk membedakan prajurit biasa dengan pemimpin atau panglima perang, pemimpin Suku Hubula dilengkapi dengan tongkat aksesoris yang terbuat dari bulu kasuari yang disebut sebagai *syuesi* dan *walemo* yang terbuat dari cangkang kerang. Tetapi sejak adanya modernisasi, hukum Honai yang menyangkut peperangan sudah jarang dan bahkan sudah tidak digunakan, sebagai gantinya masyarakat Suku Hubula menjadikan perang sebagai sebuah tarian saja, itupun biasanya hanya dilakukan dalam festival-festival.

D. Rumah Adat

Rumah suku Amungme yang hidup di lembah-lembah pegunungan bagian tengah di Papua, ada persamaan dengan suku di Provinsi Papua Barat dalam hal bentuk dan bahan material dari bangunan rumah walau ada sedikit perbedaan dalam hal penggunaan dan pemanfaatan ruangan. Sebelum masa pendudukan (sivilisasi) sebuah kampung suku Amungme yang cukup besar biasanya terdiri 15-20 buah rumah keluarga (Onggoi) dengan 5-8 buah rumah laki-laki (Itorei).

E. Ragam Bahasa

Di wilayah Jayapura-Biak dsk, Nabire- Mimika dsk, Wamena dsk, Merauke dsk, Sorong dsk dan Manokwari dsk tercatat ada 310 bahasa yang digunakan masyarakatnya. Bahasa-bahasa di Pulau Papua dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan besar yang oleh ahli linguistik disebut *phylum* (fila), yaitu fila bahasa-bahasa Melanesia dan fila bahas-bahasa non-Melanesia. Di seluruh Papua dapat digolongkan ke dalam bahasa-bahasa Melanesia. Sedangkan bahasa-bahasa non-Melanesia yang digunakan di Papua adalah khas Papua yang tidak mempunyai hubungan linguistik dengan bahasa-bahasa di luar Papua dan Papua Nugini, kecuali dengan beberapa bahasa di pulau Timor, Alor, Pantar dan Halmahera Utara (Koentjaraningrat, 1994).

Berdasarkan pembagian fil, bahasa-bahasa di Non-Melanesia di wilayah Jayapura-Biak dsk, Nabire- Mimika dsk, Wamena dsk, Merauke dsk, Sorong dsk dan Manokwari dsk terdiri dari 9 fil, yaitu: 1) fil Trans Papua, 2) fil Papua Barat, 3) fil Teluk Cendrawasih, 4) fil Kepala burung bagian Timur tingkat golongan, 5) fil Warnbori tingkat isolat, 6) fil Taurap (Borumeso) tingkat isolat, 7) fil Pauwi tingkat isolat, 8) fil Sko tingkat golongan, fil Kuomtari tingkat golongan. Persebaran fil bahasa-bahasa Melanesia, yaitu daerah bagian belakang leher burung dan pulau-pulau yang berhadapan dengan daerah pantai Waropen, Waropen Bawah dan Atas di sekitar Waren, daerah Yapen Timur dan Barat serta pulau-pulau sekitarnya, daerah kepulauan Biak-Suntori, Pulau Numfor daerah sekitar Manokwari, sebagian besar kepulauan Raja Ampat, sebagian daerah Fakfak dan Kaimana serta kepulauan kepulauan sekitar Kaimana.

Menurut ahli bahasa bernama C. Loukotka telah melakukan upaya untuk mengklasifikasikan kebhinekaan bahasa di Papua dan dimuat secara singkat oleh A.M. Moeliono dalam bab berjudul "Ragam bahasa di Irian Barat" dalam buku berjudul Penduduk Irian Barat (1963: hal. 33-35). Menurut klasifikasi Loukotka ada paling sedikit 31 golongan bahasa di Papua. Di dalamnya terdapat 234 bahasa yang masih diklasifikasikan juga secara geografis, yang mendekati pembagian administratif dan provinsi ke dalam 10 kabupaten.

F. Rekap Profil Sosial Budaya

Berikut terlampir tabel rekap profil sosial budaya Kawasan Wamena dsk

Tabel 3.32 Profil Sosial Budaya di Provinsi Papua Pegunungan

No	Kabupaten Kota	Nama Desa Adat	Komoditas Budaya yang bernilai Ekonomi	Besar Produksi Komoditas Unggulan	Tujuan Pemasaran Komoditas Unggulan Seni	Festival Perayaan/ Kegiatan Kemasyarakatan/ Keagamaan Desa	Frekuensi Pelaksanaan Perayaan	Potensi/ Hambatan Pembangunan Karena Budaya/ Adat Istiadat Setempat
1	Jayawijaya	Suku Dani, Suku Yali dan Suku Wamena	n/a	n/a	n/a	Festival Lembah Baliem	Setahun sekali	Proses pelepasan tanah dengan hak ulayat yang terkendala konflik social antar suku adat
2	Yalimo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	Yahukimo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	Pegunungan Bintang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Tolikara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Nduga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	Lanny Jaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	Mamberamo Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.5 Interaksi Antar Kawasan di dalam Kawasan Provinsi Papua Pegunungan

Interaksi antar kawasan merupakan keterkaitan fungsional kawasan yang tercipta dari adanya keterkaitan secara sosial budaya, ekonomi, pergerakan transportasi, dan keterjangkauan wilayah. Di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan interaksi antar kawasan eksisting terbentuk dari adanya pergerakan transportasi dan kegiatan ekonomi melalui utamanya pada transportasi darat. Kabupaten Jayawijaya sebagai hub utama di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan, menjadi penggerak perekonomian untuk kabupaten di sekitarnya, utamanya Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny Jaya dengan moda transportasi darat. Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Mamberamo Tengah dapat diakses dengan transportasi darat, namun belum ada interaksi antar kawasan yang terbentuk (pergerakan masih relatif kecil). Sedangkan moda transportasi udara menjadi modal utama pergerakan penumpang untuk menciptakan interaksi pada kawasan yang belum terjangkau jaringan jalan, seperti Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Nduga. Secara detail, interaksi antar kawasan di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Pola interaksi antar Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan:

- a. Kabupaten Jayawijaya sebagai ibukota DOB Provinsi Papua Pegunungan menjadi pusat pergerakan orang/penumpang di Provinsi Papua Pegunungan
- b. Interaksi antar kawasan di dalam DOB Provinsi Papua Pegunungan dari Kabupaten Jayawijaya menuju Kabupaten Tolikara (Karubaga) dan Kabupaten Jayawijaya menuju Kabupaten Lanny Jaya (Tiom).
- c. Kabupaten Mamberamo Tengah (Kobakma) dan Kabupaten Yalimo (Elelim) sudah terakses dengan jaringan jalan, namun belum ada interaksi antara Kabupaten Jayawijaya dengan kedua kabupaten tersebut.
- d. Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Nduga belum terakses dengan jaringan jalan.

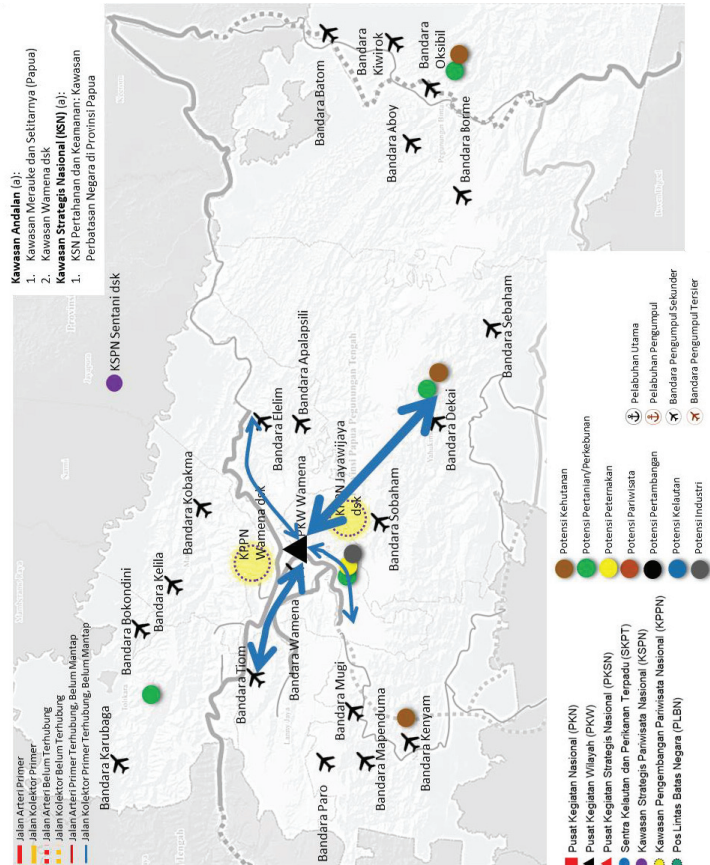
- e. Interaksi eksternal diwujudkan dari adanya pergerakan penumpang dan barang dari Kabupaten Jayawijaya menuju Kota Jayapura melalui transportasi udara.
- f. Interaksi antar kawasan strategis belum terjadi di DOB Provinsi Papua Pegunungan.

Terlampir pola interaksi antar kawasan di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan sebagai berikut.

Kawasan Strategis	Jarak (km)	Waktu Tempuh (jam)	Komoditas	Perggerakan
Jaya wilaya	84,7	2 jam 7 menit	Perggerakan penumpang & kebutuhan barang pokok dari Wamena – Tiom	Orang: 86 Barang: 86
Jaya wilaya	91,9	3 jam 2 menit	Perggerakan penumpang & kebutuhan barang pokok dari Wamena – Kobakina	Orang: 113 Barang: 172
Jaya wilaya	146,75	-	Belum ada pergerakan barang dan orang (belum tersambung)	Orang: 177 Barang: 252
Jaya wilaya	171,39	-	Belum ada pergerakan barang dan orang (belum tersambung)	Orang: 5.951 Barang: 8.496
Jaya wilaya	471,02	-	Belum ada pergerakan barang dan orang (belum tersambung)	Orang: 1.380 Barang: 1.630
Jaya wilaya	86,85	2 jam 17 menit	Perggerakan penumpang & kebutuhan barang pokok dari Wamena – Kautaga	Orang: 998 Barang: 1.527
Jaya wilaya	77,83	2 jam	Perggerakan penumpang & kebutuhan barang pokok dari Wamena – Elelim	Orang: 71 Barang: 94

- Kabupaten Jayawijaya menjadi pusat pergerakan orang/pemumpang di Papua bagian pegunungan
- Interaksi internal kawasan dari Kab. Jayawijaya menuju Kab. Tolikara (Karubaga), Kab. Jayawijaya menuju Kab. Lanny Jaya (Tiom), dan Kab. Jayawijaya menuju Yahukima (Desaki).
- Kab. Mamberamo Tengah (Kobakma) dan Kab. Yalimo (Elelim) sudah terakses dengan jaringan jalan, namun belum ada interaksi antara Kab. Jayawijaya dengan Mamberamo Tengah dan Yalimo
- Interaksi eksternal diwujudkan dari adanya pergerakan pemumpang dan barang dari Kab. Jayawijaya menuju Kota Jayapura melalui transportasi udara.

Sumber : Analisis Tim, 2022



Gambar 3.15 Interaksi Antar Kawasan di Provinsi Papua Pegunungan



BAB 4

PROFIL DAN KINERJA INFRASTRUKTUR



BAB IV PROFIL DAN KINERJA
INFRASTRUKTUR

4.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber
Daya Air

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membangun infrastruktur pengelolaan sumber daya air untuk mendayagunakan sumber daya air (pemanfaatan sumber daya air), pengendalian daya rusak air dan konservasi sumber daya air.

Infrastruktur pemanfaatan sumber daya air mencakup infrastruktur bendung, jaringan irigasi, intake dan jaringan air baku. Infrastruktur pengendalian daya rusak air mencakup tanggul pantai, tanggul sungai, jaringan drainase primer, sabo dan *check dam*. Sedangkan infrastruktur yang ditujukan untuk konservasi sumber daya air meliputi waduk/bendungan, embung, *long storage* dan tampungan air lainnya. Adapun uraian lebih rinci infrastruktur sumber daya air di Provinsi Papua Pegunungan diuraikan sebagai berikut:

4.1.1 Infrastruktur Bangunan Tampungan Air (Bendungan, Bendung, dan Embung)

Bangunan tampungan air yang terdapat di Provinsi Papua Pegunungan yaitu berupa bendung dan embung, sebagaimana tertera pada Tabel berikut:

Tabel 4.1 Bendung di Provinsi Papua Pegunungan

Lokasi	Bangunan Tampungan	Kapasitas Pengairan (Ha)
Kabupaten Yahukimo	Bendung Yahukimo	3.200

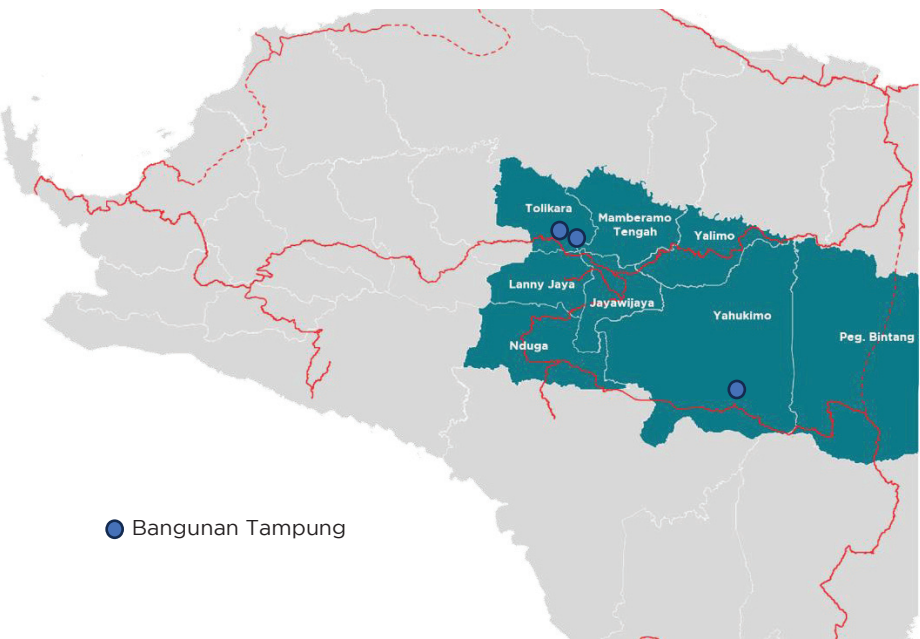
Sumber: Data Ditjen SDA, Kementerian PUPR Tahun 2019

Tabel 4.2 Embung di Provinsi Papua Pegunungan

Lokasi	Nama Infrastruktur	Kapasitas Volume (m ³)
Kabupaten Tolikara	Embung Karubaga	2.432
Kabupaten Tolikara	Embung Bokondini	38.254
Jumlah		40.686

Sumber: Studio Peta Kementerian PUPR, Oktober Tahun 2022

Sebaran Bangunan tampungan air di Provinsi Papua Pegunungan dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Peta sebaran bangunan tampungan air di Provinsi Papua Pegunungan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.1.2 Infrastruktur Irigasi

Pemerintah mengembangkan daerah irigasi yang dilengkapi dengan infrastruktur bendung dan jaringan irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan wilayah Papua. Status Daerah Irigasi (DI) di Indonesia telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2015. Luas daerah irigasi di Pulau Papua berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2015 adalah sebesar 103.975 Ha

dengan perincian 55.006 Ha DI kewenangan Pemerintah Pusat, 27.895 Ha DI Kewenangan Pemerintah Provinsi dan 21.074 Ha DI Kewenangan Kabupaten. Adapun daerah irigasi yang terdapat di Provinsi Papua Pegunungan yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.3 Daerah Irigasi di Provinsi Papua Pegunungan

Lokasi	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Kewenangan
Kabupaten Yahukimo	Yahukimo	3.200	Pemerintah Pusat

Sumber: Peraturan Menteri PUPR No 14/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi

Tabel 4.3 di atas menyatakan luas Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu **3.200 hektare**.

4.1.3 Infrastruktur Air Baku

Sistem penyediaan air bersih di Provinsi Papua Pegunungan diselenggarakan pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai Papua Merauke. Saat ini telah dan sedang mengembangkan sistem jaringan air baku yang meliputi bangunan pengambil (*intake*) dan jaringan transmisi air baku. Kinerja Sumber Air Baku di Provinsi Papua Pegunungan

Tabel 4.4 Kinerja Sumber Air Baku di Provinsi Papua Pegunungan

Kabupaten/Kota	Peruntukan	Kebutuhan Tahun 2021 (liter/detik)	Asumsi Air Baku Eksisting Tahun 2021 (liter/detik)	Kinerja Tahun 2021 (%)
Jayawijaya	Domestik	203	48	23
	PKW Wamena			
	KPPN Jayawijaya			
	KPPN Provinsi Papua Pegunungan			
	Perkotaan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan			
Yalimo	Domestik	59	39	65
Yahukimo	Domestik	180	91	50
	Perkotaan Sumohai			
Pegunungan Bintang	Domestik	71	77	108
	KSN Perbatasan Papua			
	Perkotaan Oksibil (usulan baru)			
	PLBN Batom			
Tolikara	Domestik	132	66	49
Nduga	Domestik	94	18	18
Lanny Jaya	Domestik	170	54	31
	Perkotaan Tiom			
Mamberamo Tengah	Domestik	46	67	145
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN		955	460	49

Sumber: Ditjen SDA Tahun 2022, diolah Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, sumber air baku yang dimanfaatkan di Provinsi Papua Pegunungan sebesar **955 liter/detik**. Sedangkan hasil identifikasi kebutuhan pelayanan air baku tahun 2021 di Provinsi Papua sebesar **460 liter/detik**, dengan demikian kinerja layanan sumber air baku di Provinsi Papua secara agregat sebesar **49%**.

4.1.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas

Infrastruktur Sumber Daya Air Prioritas di Provinsi Papua terdiri dari 1 (satu) infrastruktur yang terletak di Kab. Jayawijaya. Berikut untuk profil dan kinerja infrastruktur Sumber Daya Air tersebut.

Air Baku Sungai Wasi Kab. Jayawijaya

Tabel 4.5 Tabel Profil dan Kinerja Infrastruktur Air Baku Sungai Wasi

Informasi Umum	
Ditjen	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Nama Proyek	Pembangunan Air Baku SA Sungai Wasi Wamena
Lokasi Proyek	Kampung Welesi, Distrik Welesi, Kab. Jayawijaya
Tagging	Peta objek infrastruktur: SKEMA PEMBANGUNAN AIR BAKU SA SUNGAI WASI WAMENA KAB. JAYAWIJAYA TA 2021-2022 Yang dibangun TA 2021 - Bendung dan Intake - Pipa GSP 400 mm dan jalan inspeksi - Bak Pengumpul Sedimentasi - Pipa HDPE 350 mm Eksisting - Bak Pelepas Tekan 1 - Pipa HDPE 350 mm Eksisting - Bak Pelepas Tekan Eksisting - Pipa HDPE 350 mm - Bak Pelepas Tekan 2 - Pipa HDPE 350 mm - Bak Pelepas Tekan 3 - Pipa HDPE 350 mm - Reservoir Yang dibangun TA 2022 - Pipa GSP 400 mm dan jalan inspeksi - Bak Pengumpul Sedimentasi - Pipa HDPE 350 mm Eksisting - Bak Pelepas Tekan 1 - Pipa HDPE 350 mm Eksisting - Bak Pelepas Tekan Eksisting - Pipa HDPE 350 mm - Bak Pelepas Tekan 2 - Pipa HDPE 350 mm - Bak Pelepas Tekan 3 - Pipa HDPE 350 mm - Reservoir Pembangunan Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan antara lain; - Bendung dan Intake : 1 Unit - Jalan Inspeksi : 100 m - Jaringan Pipa Transmisi : 380 m Pembangunan Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan antara lain; - Bak Sedimentasi : 1 Unit - Bak Pelepas Tekan : 3 Unit - Reservoir : 1 Unit - Jaringan Pipa Transmisi : 2400 m Panjang Jaringan yang dibangun sebesar 2780 m dan panjang jaringan eksisting 3300 m sehingga panjang keseluruhan sebesar 6080 m, dengan Outcome sebesar 150 liter / detik
	Peta area manfaat:
Dokumentasi	Objek infrastruktur:

		
	Area manfaat	
		
Hasil Temuan/Realisasi Pekerjaan		
Aspek	Rencana	Realisasi
Output	Untuk memenuhi kebutuhan air baku di Wamena, Kab. Jayawijaya	Untuk memenuhi kebutuhan air baku di Wamena, Kab. Jayawijaya
Volume	Jumlah bangunan yang dibangun dalam Pembangunan Air Baku SA Sungai Wasi Wamena Kab. Jayawijaya T.A. 2021-2022 Pembangunan Tahun Anggaran 2021 Bendung dan Intake : 1 Unit Jalan Inspeksi : 100 m Jaringan Pipa Transmisi : 380 m Pembangunan Tahun Anggaran 2022 Bak Sedimentasi : 1 Unit	Jumlah bangunan yang dibangun dalam Pembangunan Air Baku SA Sungai Wasi Wamena Kab. Jayawijaya T.A. 2021-2022 Pembangunan Tahun Anggaran 2021 Bendung dan Intake : 1 Unit Jalan Inspeksi : 100 m Jaringan Pipa Transmisi : 380 m Pembangunan Tahun Anggaran 2022 Bak Sedimentasi : 1 Unit Bak Pelepas Tekan : 3 Unit Reservoir : 1 Unit Jaringan Pipa Transmisi : 2400 m

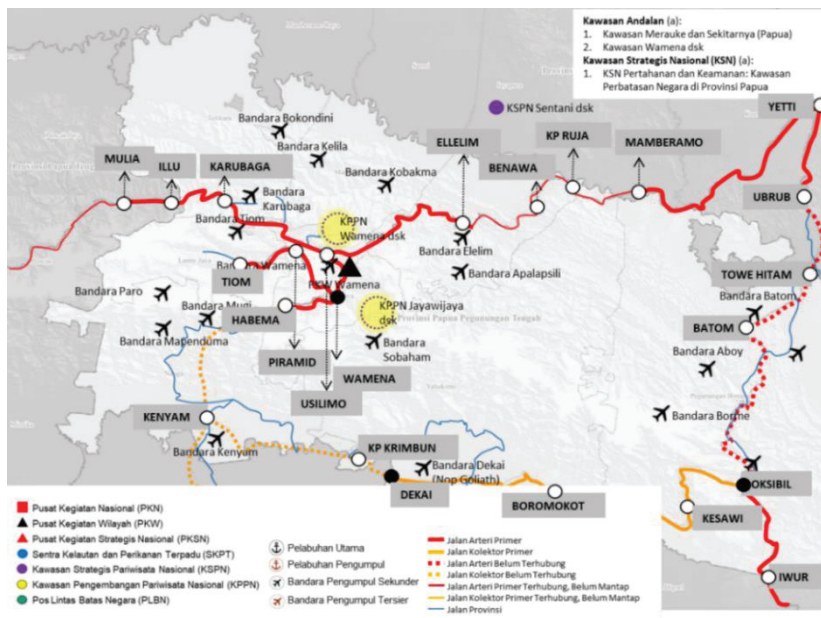
	Bak Pelepas Tekan : 3 Unit Reservoir : 1 Unit Jaringan Pipa Transmisi : 2400 m	
Biaya (Rp)	Tahun Anggaran 2021 : Rp.6.168.800.000,- Tahun Anggaran 2022 : Rp.16.561.797.000,-	Tahun Anggaran 2021 : Rp.6.168.800.000,- Tahun Anggaran 2022 : Rp.16.561.797.000,-
Tahun Pelaksanaan	2021 -2022	2021 -2022
Analisis Kesesuaian Lokasi	Lokasi pembangunan di Kampung Welesi, Distrik Welesi, Kab. Jayawijaya	Lokasi pembangunan di Kampung Welesi, Distrik Welesi, Kab. Jayawijaya
Area Layanan/ Penerima Manfaat	Penerima manfaat: 1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Wamena 2. Pembangunan Air baku dibangun untuk melayani kebutuhan air baku masyarakat terutama untuk masyarakat yang ada di pusat Kab. Jayawijaya	Penerima manfaat: 1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Wamena 2. Pembangunan Air baku dibangun untuk melayani kebutuhan air baku masyarakat terutama untuk masyarakat yang ada di pusat Kab. Jayawijaya

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan

4.2.1 Infrastruktur Jaringan Jalan

Jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur PUPR yang menjadi *backbone* dalam pengembangan wilayah. Dengan adanya infrastruktur jalan dan jembatan dapat membuka keterisolasian wilayah, menurunkan waktu tempuh, menurunkan biaya transportasi, dan dalam rangka pemerataan wilayah. Sistem jaringan jalan dan jembatan di Provinsi Papua Pegunungan dan persentase pembangunannya dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini



Gambar 4.2 Sistem Jaringan Jalan dan Konektivitasnya dengan Kawasan Strategis di Provinsi Papua Pegunungan
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Sistem jaringan diatas adalah sistem jaringan jalan untuk bagian pegunungan Provinsi Papua dengan pusat kegiatan perkotaan berada di PKW Wamena. Konektivitas antara PKW Wamena dengan kawasan strategis di Provinsi Papua Pegunungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **PKW Wamena - KPPN Wamena dsk** -> Jl. Usilimo – Elelim
- **PKW Wamena - KPPN Jayawijaya dsk** -> Jl. Usilimo – Wamena

Konektivitas dengan bandara dan Pelabuhan di Provinsi Papua
Pegunungan antara lain:

- Pengumpul Tersier Wamena -> Jl. Trikora (Akses Bandara Wamena)
- Pengumpan sudah terakses jalan -> karubaga, Kelila, Kobakma, Tiom, Paro, Mapenduma, Kenyam, Mugi, Sobaham, Nop Goliath Dekai, Bokondini, Oksibil, Borme, Aboy, Batora, Kiwirok, Elelim, Apalapsili

Tingkat pelayanan jalan di Provinsi Papua Pegunungan dapat dilihat dari kemantapan jalan, IRI (*International Roughness Index*), dan VCR (*Volume Capacity Ratio*) sebagai berikut

Tabel 4.6 Tingkat Pelayanan Jalan di Provinsi Papua Pegunungan

No	Ruas Jalan	Target (km)	Terbangun	Perkerasan Jalan		Kemantapan Jalan		IRI	VCR
				Aspal	Tanah	km	%		
1	Oksibil - Seredala	126	126	126	0	94.39	74.91	7.87	0.11
2	Seredala - Dekai	99.3	99.3	99.3	0	88.75	89.38	10.93	0.19
3	Wamena - Habema	35.48	35.48	35.48	0	23.55	66.38	5.11	0.13
4	Usilimo - Karubaga	70.1	70.1	70.1	0	41.16	58.71	9.53	0.64
5	Karubaga - Ilu - Mulia	85	83.28	83.28	0	33.98	39.98	12.11	0.15
6	Elelim - Pasvaley- Bts. Kota Wamena	128.25	128.25	128.25	0	109.48	85.37	6.74	0.02
7	Jln. Trikora (Wamena)	0.9	0.9	0.9	0	0.9	100	3.97	0
8	Jln. Hom-hom (Wamena)	1.82	1.82	1.82	0	1.82	100	3.79	0
9	Jln. Pike (Wamena)	2.6	2.6	2.6	0	2.6	100	4.09	0.12
10	Bts. Kota Wamena - Piramid	27.63	27.63	27.63	0	23.83	86.25	6.87	0.22
11	Jln. Yos Sudarso (Wamena)	2.12	2.12	2.12	0	2.12	100	3.8	0.13
12	Jln. Piramid (Wamena)	1.45	1.45	1.45	0	1.45	100	6.68	0.04
13	Piramid - Tiom	44.13	44.13	44.13	0	21.67	49.11	7.18	0.37

Sumber: Kemantapan Jalan Bina Marga, 2022

Dilihat dari kemantapan jalan, sesuai dengan target bina marga bahwa kemantapan jalan pada Tahun 2024 adalah sebesar 97%, maka terdapat beberapa ruas yang memerlukan peningkatan jalan, diantaranya:

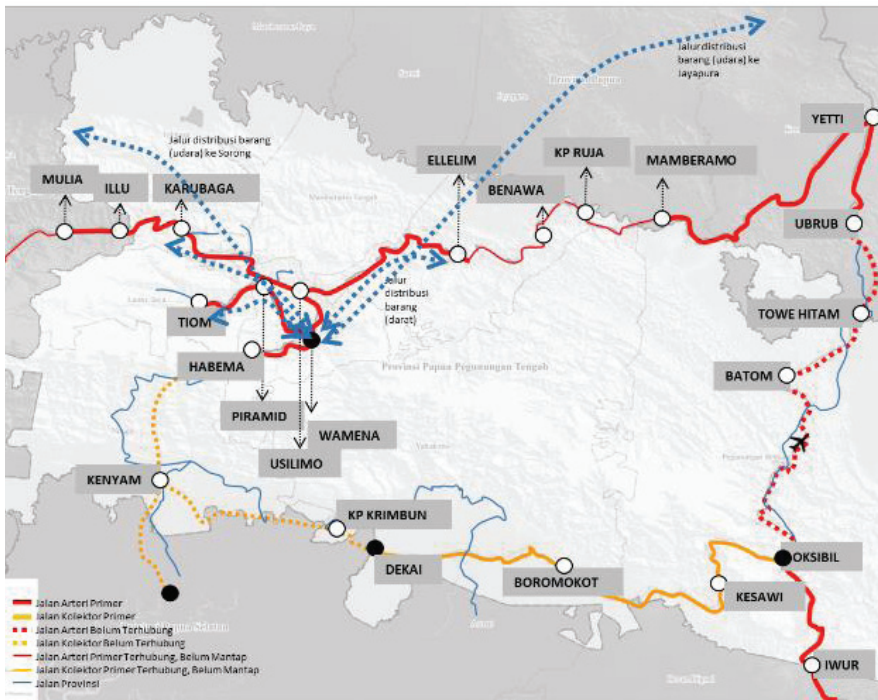
1. Oksibil - Seredala
2. Serendala - Dekai
3. Wamena - Habema
4. Usilimo - Karubaga
5. Karubaga - Ilaga - Mulia
6. Elelim - Pasvaley- Bts. Kota Wamena
7. Bts. Kota Wamena - Piramid
8. Piramid - Tiom

Apabila Nilai IRI > 8 berarti kondisi jalan dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan, beberapa ruas yang memerlukan perbaikan antara lain:

1. Seredala - Dekai

2. Usilimo – Karubaga
3. Karubaga – Ilaga – Mulia

Konektivitas jalan dan jembatan juga berfungsi untuk mendukung hilirisasi produk unggulan dari sentra produksi menuju ke outlet yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Jalur distribusi komoditas unggulan di Provinsi Papua Pegunungan terletak di outlet utama, yaitu Wamena. Berikut pembahasan mengenai distribusi komoditas unggulan pada Provinsi Papua Pegunungan.



Gambar 4.3 Jalur Distribusi Komoditas Unggulan di Provinsi Papua Pegunungan
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Jalur distribusi komoditas unggulan di Provinsi Papua Pegunungan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Jalur distribusi kebutuhan barang pokok dari **Wamena** menuju ke **Tiom, Habema, Karubaga, dan Kobakma**
2. Suplai **kebutuhan pokok** sebagian besar terpenuhi dari **Kota Jayapura, Kota Sorong, dan/atau Pulau Jawa** via transportasi udara

3. Aliran barang dari **Jayawijaya ke Yahukimo (Dekai)** melalui transportasi udara sebesar **8.496 unit/tahun** menjadi **potensi pengembangan transportasi darat**
4. **Ekspor kopi wamena** (Distrik Walesi, Kurulu, Hubertus dan Pyramid) ke Wamena kemudian melalui **transportasi udara menuju ke Jayapura**
5. **Wamena** sebagai sentra pengolahan dan produksi kopi
6. **Ekspor kopi arabika Kab. Pegunungan Bintang** melalui transportasi udara

Kebutuhan pembangunan jalan untuk distribusi barang:

- a. Pembangunan jalan dari **Wamena - Yahukimo (Habema - Kenyam - Dekai)** untuk menurunkan biaya transportasi
- b. Peningkatan kualitas jalan Jayapura - Towe Hitam untuk menurunkan biaya transportasi (karena Peg. Bintang lebih dekat secara geografis dengan Kota Jayapura)
- c. Pembangunan jalan **Towe Hitam - Oksibil (Kab. Peg. Bintang)** untuk menurunkan biaya transportasi (karena Peg. Bintang lebih dekat secara geografis dengan Kota Jayapura).

4.2.2 Infrastruktur Jembatan

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jalan, kondisi kemantapan jembatan yang sudah terbangun di Provinsi Papua Pegunungan sebagian besar sudah dalam kondisi mantap. Kemantapan jembatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Jumlah dan Kondisi Kemantapan Jembatan di Provinsi Papua Pegunungan

N o	Ruas Jalan	Jumlah Jembatan	Total Panjang Jembatan (m)	Kondisi
1	Oksibil - Seredala	1	20	Mantap
2	Seredala - Dekai	21	227.9	Mantap
3	Wamena - Habema	-	-	-
4	Usilimo - Karubaga	5	87.3	Mantap
5	Karubaga - Ilu - Mulia	4	32	Mantap
6	Elelim - Pasvaley- Bts. Kota Wamena	6	90.7	Mantap
7	Jln. Trikora (Wamena)	-	-	-
8	Jln. Hom-hom (Wamena)	-	-	-
9	Jln. Pike (Wamena)	-	-	-
10	Bts. Kota Wamena - Piramid	2	13	Mantap
11	Jln. Yos Sudarso (Wamena)	-	-	-

N o	Ruas Jalan	Jumlah Jembatan	Total Panjang Jembatan (m)	Kondisi
12	Jln. Piramid (Wamena)	-	-	-
13	Piramid – Tiom	8	148	Mantap
Total		47	618,9	Mantap

Sumber: Kemantapan Jalan Nasional, 2022

4.2.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas

Infrastruktur Jalan dan Jembatan Prioritas di Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari 2 (dua) infrastruktur yang tersebar di Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Jayawijaya, dan Kab. Yalimo.

a. Jalan Perbatasan Ruas Towe Hitam – Oksibil

Tabel 4.8 Profil dan Kinerja Jalan Perbatasan Ruas Towe Hitam - Oksibil

Ditjen	Direktorat Jenderal Bina Marga
Nama Proyek	Pembangunan Jalan Towe Hitam - Oksibil (MYC)
Lokasi Proyek	Kampung Towe Hitam, Distrik Towe, Kabupaten Keerom
Tagging	Objek Infrastruktur: 3°57'04.5"S 140°50'45.2"E Area Manfaat: 3°54'11.72"S 140°45'47.11"E, Peta objek infrastruktur: 
	Peta area manfaat: 

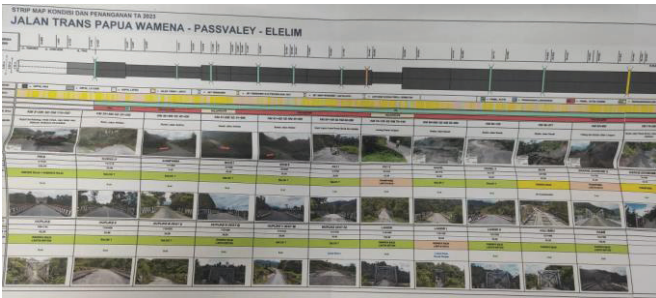
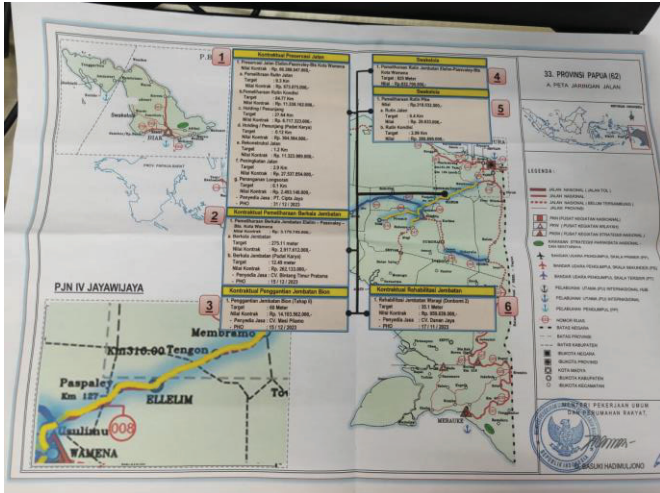
Dokumentasi	Objek infrastruktur:  Area manfaat  

		
Aspek	Rencana	Realisasi
Output	Jalan menghubungkan jalan paralel perbatasan dari Kota Jayapura menuju Kab. Merauke	Jalan paralel perbatasan belum terhubung karena masih terhalang hutan di ruas Towe Hitam - Oksibil
Volume	Panjang jalan 2.9 Km	Panjang jalan 2.9 Km
Biaya (Rp)	Rp. 83.080.721.000 ,-	Rp. 40.393.196.000 ,- (MYC lanjut di tahun 2023)
Tahun Pelaksanaan	2022	2023 (MYC masih On Going)
Analisis Kesesuaian Lokasi	Lokasi pembangunan di Kampung Towe hitam, Distrik Towe, Kab. Keerom, Provinsi Papua	Lokasi pembangunan di Kampung Towe hitam, Distrik Towe, Kab. Keerom, Provinsi Papua
Area Layanan/ Penerima Manfaat	Penerima manfaat: 1. Kawasan PKN Jayapura dengan PKN Merauke 2. Jalan dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan akses dari Kota Jayapura menuju Kab. Merauke dan sekitarnya	Penerima manfaat: 1. Kawasan PKN Jayapura dengan PKN Merauke 2. Jalan dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan akses dari Kota Jayapura menuju Kab. Merauke dan sekitarnya

Sumber: Hasil Analisis, 2023

b. Jalan Ruas Wamena – Usilimo – Passvaley – Elelim - Bts.Prov Papua

Tabel 4.9 Profil dan Kinerja Jalan Ruas Wamena-Usilimo-Passvaley-Elelim-Bts. Provinsi Papua

Ditjen	Direktorat Jenderal Bina Marga
Nama Proyek	Preservasi Jalan Elelim-Passvaley-Bts. Kota Wamena
Lokasi Proyek	Kampung Wamena Kota, Distrik Wamena, Kab. Jayawijaya - Kampung Elelim, Distrik Elelim, Kab. Yalimo
	Objek Infrastruktur: 3°51'20.17"S 139°06'30.62"E Peta objek infrastruktur:
	 Peta area manfaat: 
Dokumentasi	Objek infrastruktur:

				
				
				
Aspek	Rencana		Realisasi	
Output	Menghubungkan jalan antara Kota Jayapura, Provinsi Papua - Kab. Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan (sisi ruas Wamena-Elelim)		Menghubungkan jalan antara Kota Jayapura, Provinsi Papua - Kab. Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan (sisi ruas Wamena-Elelim)	
Volume	Total panjang jalan ruas Wamena-Elilim 134 Km Penanganan tahun 2023 sebagai berikut: Pemeliharaan rutin jalan= 9.3 km Pemeliharaan rutin kondisi = 84.77 Km Holding/penunjang = 27.64 Km Rekonstruksi jalan = 1.2 km		Total panjang jalan ruas Wamena-Elilim 134 km Penanganan tahun 2023 sebagai berikut: Pemeliharaan rutin jalan= on going Pemeliharaan rutin kondisi = on going Holding/penunjang = on going Rekonstruksi jalan = on going Peningkatan jalan = on going	

	Peningkatan jalan = 2.9 Km Penanganan longsor = 0.1 Km	Penanganan longsor = on going
Biaya (Rp)	Rp. 60.388.047.000,-	Rp. 60.388.047.000,- (masih on going)
Tahun Pelaksanaan	2023	31 Desember 2023 (masih on going)
Analisis Kesesuaian Lokasi	Lokasi pembangunan di Kampung Wamena Kota, Distrik Wamena, Kab. Jayawijaya - Kampung Elelim, Distrik Elelim, Kab. Yalimo	Lokasi pembangunan di Kampung Wamena Kota, Distrik Wamena, Kab. Jayawijaya - Kampung Elelim, Distrik Elelim, Kab. Yalimo
Area Layanan/ Penerima Manfaat	Penerima manfaat: 1. Kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jayapura dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Wamena 2. Jalan dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat yang melakukan perjalanan dari Kab. Jayawijaya menuju Kota Jayapura termasuk angkutan barang antar Provinsi	Penerima manfaat: 1. Kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jayapura dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Wamena 2. Jalan dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat yang melakukan perjalanan dari Kota Jayapura menuju Kab. Jayawijaya termasuk angkutan barang antar Provinsi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Permukiman

4.3.1 Sistem Penyediaan Air Minum

Pengelolaan air bersih di Pulau Papua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak PDAM. Beberapa wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat, pengelolaan air bersih telah dilakukan oleh PDAM sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Tingkat keterlayanan air bersih di beberapa wilayah masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan air minum saat ini antara lain masih rendahnya cakupan pelayanan air minum.

Persentase keterlayanan akses air minum layak di Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2022 berada pada nilai 4%, sedangkan target Pemerintah nasional sebesar 100% sehingga masih terdapat GAP sebesar 96%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keterlayanan masyarakat di Provinsi Papua masih harus ditingkatkan kembali demi terpenuhinya target dari Pemerintah Provinsi dan target nasional dapat terpenuhi.

Tabel 4.10 Presentase Akses Air Minum Layak Di Provinsi Papua Pegunungan

No	Nama Kabupaten	Akses Air Minum		GAP Target Renstra PUPR (Akses Layak 95,90%)
		Akses Layak (%)	Tidak Akses Layak (%)	
1	Jayawijaya	6	93	-88
2	Yahukimo	0	99	-95
3	Pegunungan Bintang	1	98	-94
4	Tolikara	4	95	-91
5	Nduga	0	100	-85
6	Lanny Jaya	0	99	-95
7	Mamberamo Tengah	13	86	-82
8	Yalimo	0	99	-95
Provinsi Papua Pegunungan		4	96	-92

Sumber : SIMSPAM PUPR, 2022 (diakses 19-10-2022)

Tabel 4.11 Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Jaringan Perpipaan di Provinsi Papua Pegunungan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2021(jiwa)	Kapasitas (ltr/detik)	Pelayanan (unit)				Pelayanan (jiwa)				Pelayanan (presentase)			
				SR	HU	KU	PAH	SR	HU	KU	PAH	Total	SR	HU	Total
1	Kabupaten Jayawijaya	223,291	40	752	26	12	19	3.008	1.040	240	76	4.364	1	0	1
2	Kabupaten Tolikara	150,272	55	1,993	0	193	0	7.972	0	3860	0	11.832	5	0	7
3	Kabupaten Yahukimo	215,746	75	310	22	99	10	1.240	880	1980	40	4.140	0	0	1
4	Kabupaten Yalimo	73,387	32	1,625	0	32	0	6.500	0	640	0	7.140	8	0	9
5	Kabupaten Lanny Jaya	188,686	45	0	19	4	20	0	760	80	80	920	0	0	0
6	Kabupaten Pegunungan Bintang	78,178	64	964	8	41	6	3.856	320	820	24	5.020	4	0	6
7	Kabupaten Mamberamo Tengah	51,160	56	625	0	4	0	2.500	0	80	0	2.580	4	0	5
8	Kabupaten Nduga	107,921	15	1.100	0	8	20	4.400	0	160	80	4.640	4	0	4
Provinsi Papua Pegunungan		1.088.641	382	7.369	75	393	75	29.476	3.000	7.860	300	40.636			

Sumber : Laporan Akhir Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan SPAM Tahun 2021 BPPW Papua 2021 (diolah)

Asumsi:

- 1 SR = 1 KK = 4 Jiwa
- 1 KU = 5 KK = 20 Jiwa
- 1 hu = 10 kk = 40 Jiwa
- 1 PAH = 1 KK = 4 Jiwa

Analisis terhadap tabel di atas memberikan gambaran bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan air bersih antara wilayah kabupaten sehingga berpengaruh terhadap cakupan pelayanan tingkat propinsi. Peningkatan kapasitas produksi air bersih di harus segera ditingkatkan di wilayah pelayanan pada masing-masing kabupaten, dimana kebutuhan air rata-rata akan terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk sehingga melebihi kapasitas produksi. Jika tidak dilakukan peningkatan kapasitas SPAM, maka defisit air akan semakin tinggi. Upaya untuk mendorong pengembangan SPAM sangat penting mengingat air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar yang akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di Papua.

Potensi air baku pada Pulau Papua sangat berlimpah dan jauh melebihi potensi permintaan air, hanya saja untuk pengembangan sistem dibutuhkan upaya lebih dikarenakan sumber air baku khususnya sungai terkadang lokasinya berjauhan dari kawasan permukiman sehingga kurang ekonomis apabila harus dikembangkan jaringan air baku dan sistem air minum perpipaan dalam skala luas. Pengembangan sistem air bersih membutuhkan dukungan keterpaduan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam penyediaan sistem air baku yang meliputi bangunan intake dan bangunan jaringan air baku menuju instalasi pengolahan air.

Pemerintah dalam rentang beberapa terakhir sudah berupaya keras untuk meningkatkan pasokan air bersih masyarakat di Papua melalui pengembangan SPAM perdesaan maupun SPAM IKK (distrik). Hingga 2020 belum semua distrik dapat menikmati layanan SPAM yang dikembangkan oleh pemerintah.

Rencana pengembangan selanjutnya adalah untuk masing-masing kabupaten/ kota akan mengembangkan cakupan wilayah pelayanan terutama untuk kawasan perkotaan dan lokasi-lokasi strategis.

4.3.2 Sistem Sanitasi Pengolahan Air Limbah Domestik dan Persampahan

A. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu

kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Sedangkan SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pertimbangan kebutuhan sistem penyehatan lingkungan didasari pada potensi produksi air limbah dan NSPK bidang penyehatan lingkungan permukiman. Potensi produksi limbah cair rumah tangga diperkirakan sebesar 80% dari konsumsi domestik, sedangkan potensi produksi lumpur tinja diperkirakan sebesar 0.5 gram orang per hari.

Tabel 4.12 Akses Sanitasi Provinsi Papua Pegunungan

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk 2021 (Jiwa)	Akses Layak Sanitasi (%)	Tidak Ada Akses (%)	Gap Renstra PUPR 2022 (82,07)	Gap Visum 2030 (100% Akses Layak)
1	Kabupaten Jayawijaya	222.465	44	55	-37	-55
2	Kabupaten Yalimo	65.261	0	99	-81	-99
3	Kabupaten Yahukimo	196.585	18	81	-63	-81
4	Kabupaten Pegunungan Bintang	77.760	43	56	-38	-56
5	Kabupaten Tolikara	144.158	0	100	-82	-100
6	Kabupaten Nduga	103.386	2	97	-79	-97
7	Kabupaten Lanny Jaya	185.757	2	97	-80	-97
8	Kabupaten Membrano Tengah	50.406	0	99	-81	-99
Provinsi Papua Pegunungan		1.045.778	14	86	-68	-86

Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua 2021 data Susenas 2021, diolah

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa akses sanitasi layak Provinsi Papua Pegunungan masih 14%, atau masih kurang 68% apabila dibandingkan dengan target Renstra PUPR 2020-2024 sebesar 82,07 %. Artinya masih diperlukan

pembangunan sarana prasarana sanitasi untuk mengejar target RPJMN, baik yang bersifat individual maupun komunal.

Rendahnya akses sanitasi tidak terlepas dari faktor budaya masyarakat dan pengetahuan hidup bersih dan sehat yang masih belum menjadi gaya hidup masyarakat. Secara kultur kondisi ini masih dipengaruhi oleh pandangan bahwa alam adalah penyedia kebutuhan manusia termasuk kebutuhan untuk mengolah limbah manusia. Anggapan ini untuk kondisi masa lalu mungkin masih relevan mengingat kondisi alam yang masih bagus dan kemampuan alam untuk menyerap limbah manusia juga masih sangat bagus serta angka kepadatan penduduk yang masih sangat-sangat rendah.

Beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan yaitu kurangnya pasokan lumpur tinja yang dibuang ke IPLT, yang menjadi indikator bahwa Tangki Septik yang dibangun masyarakat apakah sudah sesuai dengan Standar SNI atau belum, selain itu belum terdapatnya Truk Tinja di Kabupaten/Kota juga menjadi permasalahan lain belum beroperasinya IPLT. sedangkan permasalahan non teknis adalah belum adanya lembaga pengelola air limbah, belum adanya peraturan (PERDA ataupun PERKADA) tentang pengelolaan air limbah ataupun yang khusus menangani IPLT. Belum terdapatnya anggaran pengelolaan dan operasional infrastruktur air limbah juga menjadi hal yang mempengaruhi tingkat pelayanan air limbah di suatu kabupaten/kota di Provinsi Papua Pegunungan.

Hingga saat ini infrastruktur pengolahan limbah pada masing-masing kabupaten/kota masih sangat terbatas dan belum beroperasi dikarenakan keterbatasan sumber daya. Mengingat potensi limbah cair cukup besar dan apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat maka dalam jangka waktu 10-20 tahun mendatang perlu dilakukan pengembangan sistem pengolahan limbah domestik. Mengingat karakter permukiman yang menyebar maka pilihan sistem pengolahan limbah domestik adalah menggunakan sistem pengolahan air limbah skala komunal dan pengembangan sistem instalasi pengolahan lumpur tinja.

Upaya pengelolaan air limbah di kabupaten/kota memerlukan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*), baik dari aspek kelembagaan (regulasi/peraturan dan institusi layanan),

pendanaan, teknis, dan peran serta masyarakat. Untuk aspek regulasi, satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah tersedia/tidaknya regulasi/peraturan perundang-undangan tentang air limbah domestik yang dimanfaatkan sebagai pijakan pemerintah daerah melaksanakan implementasi pengelolaan air limbah.

B. Sistem Pengelolaan Persampahan

Sampah merupakan semua buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan hewan yang berbentuk padat, lumpur, cair maupun gas yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak diinginkan lagi (Damanhuri dan Padmi, 2004). Dalam konteks infrastruktur permukiman, sampah diartikan sebagai buangan yang bersifat padat yang terdiri atas zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan yang dihasilkan oleh aktivitas rumah tangga, aktivitas ekonomi dan sosial pada suatu wilayah (SNI 19-2454-2002).

Pertumbuhan kawasan yang ditandai dengan penambahan penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi, memberikan dampak yang besar bagi semua sektor kehidupan. Salah satunya adalah peningkatan pencemaran lingkungan sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk serta bertambah dan beraneka ragamnya industri yang berimbas pada semakin tingginya potensi timbunan sampah. Disatu sisi prasarana untuk mengolah sampah tidak berkembang sepesat pertumbuhan sampah, semakin besar timbunan maka akan berimbas pada besaran biaya untuk penanganan sampah (pewadahan-pengumpulan-pengangkutan-pengolahan akhir).

Untuk penanganan sampah kawasan perdesaan didorong dengan sistem setempat dengan pembangunan TPST yang melayani skala komunal. Kondisi ini tidak terlepas dari karakter permukiman yang menyebar dan lokasi yang berjauhan sehingga pengembangan sampah secara terpusat menjadi tidak efisien. Kondisi penanganan sistem persampahan di wilayah provinsi Papua bisa dikatakan masih rendah, hal ini dapat dilihat dari belum semua Kabupaten memiliki Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dalam sistem pengelolaan persampahannya

C. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

- metode lahan urug terkendali;
- metode lahan urug saniter; dan/atau
- teknologi ramah lingkungan.

Pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:

- penimbunan/pemadatan;
- penutupan tanah;
- pengolahan lindi; dan
- penanganan gas

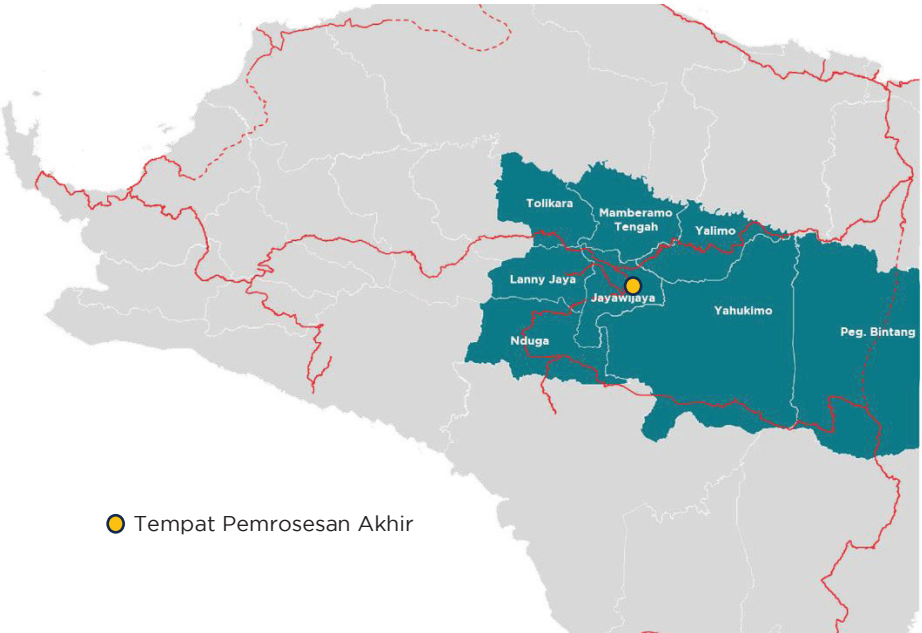
Pemrosesan akhir sampah di TPA harus memperhatikan :

- a. sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu
- b. limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi :
 - limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 - limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundangundangan; dan
 - limbah medis dari pelayanan kesehatan
- c. residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun
- d. atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- e. dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- f. Dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA

Persyaratan TPA meliputi penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial. Pemilihan lokasi TPA paling sedikit memenuhi kriteria aspek :

- a. geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung;
- b. hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.
- c. kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).
- d. jarak dari lapangan terbang, yaitu berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain;
- e. jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;
- f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
- g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun

Selain pengembangan TPA, dilakukan pula upaya pembangunan TPS 3R pada wilayah-wilayah permukiman/kampung. Namun sayangnya, karena kapasitas SDM yang masih belum menyadari pentingnya lingkungan bersih dan sehat menjadikan TPS yang ada mangkrak.



Gambar 4.4 Sebaran TPA di Provinsi Papua Pegunungan
Sumber: Hasil Analisis,2022

Tabel 4.13 Lokasi dan cakupan Pelayanan di TPA di Provinsi Papua Pegunungan

Nama TPA	Kab/ Kota	Jumlah Penduduk 2021 (Jiwa)	Timbulan Sampah 2021 (m ³ /hari)	Tahun Pembangunan	Keberfungsian	Cakupan Pelayanan (Jiwa)	Volume Sampah Masuk TPA (ton/hari)	Presentase Pelayanan (%)	Gap Target Renstra PUPR 2020-2024 (84,41%)
TPA Pisugi	Jayawijaya	224.944	562	2016	Berfungsi Belum Optimal	22.011	5	9	-74

Sumber : Dit Sanitasi Kementerian PUPR, 2022, diolah

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa di Provinsi Papua Pegunungan baru terdapat 1 TPA.

Masih diperlukan upaya-upaya peningkatan pelayanan persampahan terutama untuk kabupaten/ kota yang belum memiliki infrastruktur pengelolaan persampahan ataupun belum terdapatnya sistem pengelolaan persampahan yang baik. Target pelayanan dapat diprioritaskan untuk melayani kawasan perkotaan dari satu kabupaten/ kota ataupun lokasi - lokasi strategis yang berpotensi memberikan timbunan sampah yang besar seperti pasar tradisional, kawasan pariwisata ataupun kawasan perkantoran.

4.3.3 Sistem Drainase

Drainase lingkungan permukiman sangat penting perannya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada kawasan-kawasan permukiman perkotaan di Pulau Papua kondisi drainase lingkungan masih minim dan masih tergabung dengan sistem drainase jalan.

Kondisi ini menyebabkan beban drainase jalan menjadi berlebih dan menimbulkan genangan pada badan jalan saat musim hujan. Penilaian kinerja drainase pada kawasan permukiman biasanya dinilai berdasarkan pada perbandingan antara luasan kejadian genangan dibandingkan dengan luasan kawasan yang rawan terjadi genangan. Mengingat keterbatasan informasi luas daerah tergenang dan ketiadaan informasi daerah rawan genangan pada masing-masing kabupaten/ kota, maka penilaian kinerja didasari pada kejadian genangan setiap terjadi hujan pada wilayah-wilayah permukiman di Pulau Papua.

Faktor penyebab timbulnya genangan pada setiap hujan pada lokasi-lokasi tersebut disebabkan karena kapasitas saluran drainase yang dipenuhi oleh sedimen baik berupa lumpur ataupun sampah yang dibuang oleh warga. Upaya penanganan saluran drainase dengan cara perbaikan saluran ataupun peningkatan kapasitas saluran tidak akan efektif tanpa ada satu upaya untuk mendorong peran serta masyarakat untuk menjaga fungsi saluran drainase.

Tabel 4.14 Data Penanganan Drainase Lingkungan di Provinsi Papua Pegunungan

Kota/ Kab	Infrastruktur	Nama Infrastruktur	Tahun Pembangunan Terakhir	Keberfungsian (B/TB)
Jayawijaya	Drainase Lingkungan	Pembangunan Saluran Drainase Kab Jaya Wijaya	2006	Berfungsi

Sumber : Direktorat Santasi, DJCK PUPR, 2022

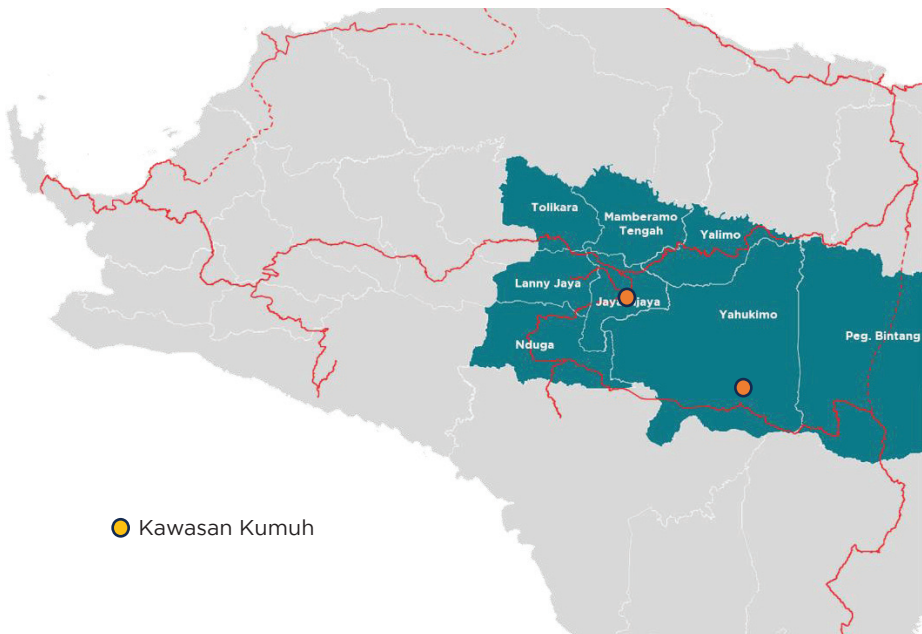
4.3.4 Kawasan Kumuh Perkotaan Provinsi Papua Pegunungan

Problem kekumuhan juga menghantui pusat-pusat permukiman di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan hasil SK Bupati yang menetapkan kawasan kumuh di daerahnya. Di Provinsi Papua Pegunungan teridentifikasi terdapat kawasan kumuh seluas 111 Hektar, yang telah tertangani seluas 44 Hektar atau sekitar 39,63 % dan sisanya 67 Hektar belum tertangani.

Tabel 4.15 Lokasi dan Luasan Kawasan Kumuh di Provinsi Papua Pegunungan

No	Kabupaten/Kota	Luasan Kumuh (Ha)	Kumuh Tertangani (Ha)	Kumuh Belum Tertangani (Ha)	Selisih terhadap Target Renstra PUPR (0 Ha)	Persentase Tertangani (%)
1	Kab. Jayawijaya	23	0	23	0	0
2	Kab. Yahukimo	88	44	44	55	49

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, 2022 diolah



Gambar 4.5 Sebaran Kawasan Kumuh di Provinsi Papua Pegunungan

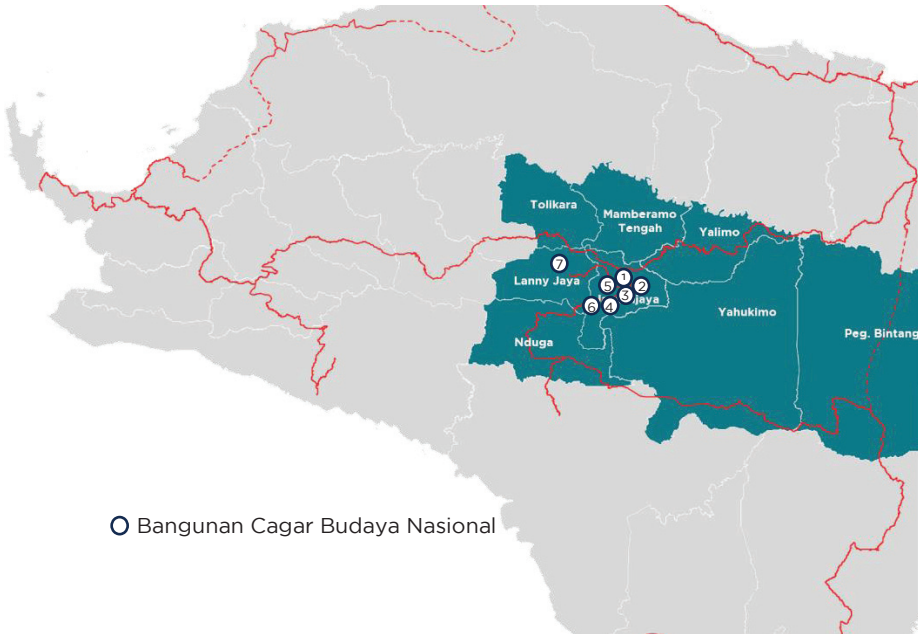
Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.3.5 Bangunan Cagar Budaya Nasional

Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu provinsi yang memiliki adat istiadat yang sangat kuat. Sehingga di Provinsi Papua Pegunungan terdapat banyak bangunan cagar budaya yang mayoritas berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan upacara adat untuk suku - suku yang masih banyak terdapat di pedalaman Pulau Papua. Berikut daftar bangunan cagar budaya nasional dan tempat bersejarah yang terdapat di Provinsi Papua.

1. Permukiman Tradisional Pugima -> Kab. Jayawijaya
2. Akima Mumi -> Kab. Jayawijaya
3. Permukiman Tradisional Hitegima -> Kab. Jayawijaya
4. Kampung Wisata Suroba -> Kab. Jayawijaya
5. Lembah Baliem, Mumi Baliem -> Kab. Jayawijaya
6. Goa Kontilola di Jiwia Distrik Kurulu -> Kab. Jayawijaya
7. Goa Pietriver di Distrik Tiom -> Kab. Lanny Jaya

Berikut peta sebaran bangunan cagar budaya nasional dan tempat bersejarah di Provinsi Papua Pegunungan.



Gambar 4.6 Peta Sebaran Bangunan Cagar Budaya Nasional dan Tempat Bersejarah di Provinsi Papua Pegunungan
Sumber: Hasil Analisis, 2022

4.4 Profil dan Kinerja Infrastruktur Perumahan

Infrastruktur perumahan merupakan dasar fisik lingkungan serta menjadi fasilitas penunjang untuk pelayanan lingkungan dan menjadi bagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan. Infrastruktur perumahan di dalam Kementerian PUPR terdiri dari rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial. Kondisi kepemilikan rumah berdasarkan status penguasaan rumah tinggal di Provinsi Papua (pra DOB, 2022) pada Tahun 2019 adalah 84,37% rumah milik sendiri/pribadi, 6,02% adalah rumah sewa/kontrak, 5,55% rumah bebas sewa, 4,00% rumah dinas atau rumah lainnya. Pada Tahun 2019, *backlog* untuk pemenuhan perumahan adalah sebesar 16,88%. Untuk lebih jelasnya kepemilikan rumah berdasarkan status penguasaan rumah tinggal dan *backlog* pemenuhan perumahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.16 Persentase Jumlah rumah berdasarkan status penguasaan rumah tinggal di Provinsi Papua Pegunungan

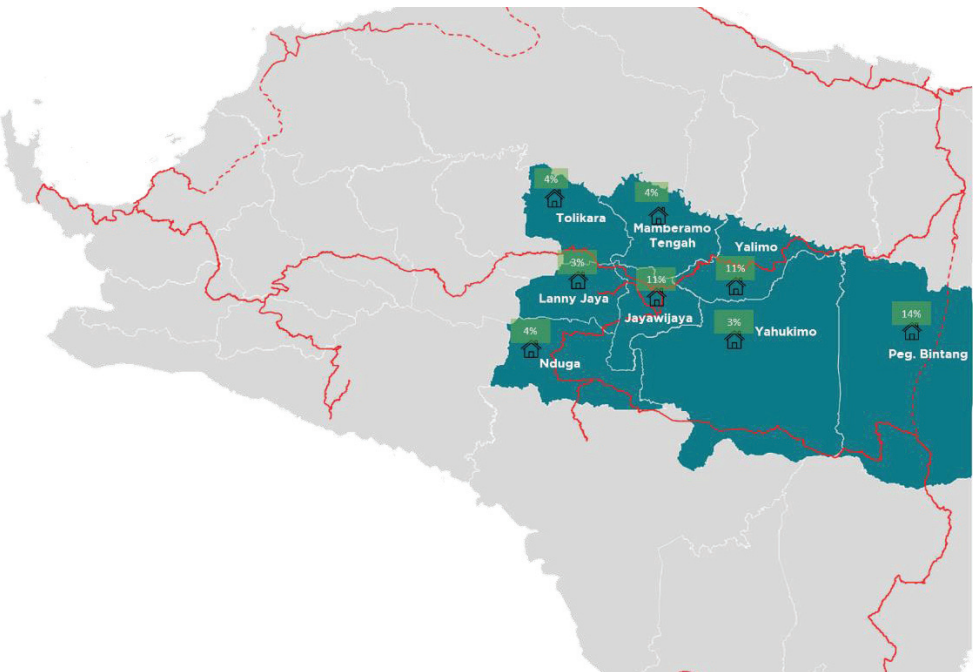
Kabupaten/ Kota	Milik Sendiri			Kontrak/ Sewa			Bebas Sewa			Dinas/ Lainnya		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Mamberamo Tengah	100	100	99	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Tolikara	97	97	98	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Pegunungan Bintang	81	93	86	2	4	6	0	2	2	6	9	4
Yalimo	99	99	91	0	0	0	0	0	8	0	0	0
Nduga	99	97	98	0	0	0	0	2	1	0	0	0
Lanny Jaya	99	100	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yahukimo	97	97	98	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Jayawijaya	86	86	89	2	7	7	0	1	0	2	4	2
Provinsi Papua Pegunungan	758	769	758	4	12	13	0	5	12	9	14	6

Sumber: Papua dalam Angka 2022, diolah

Tabel 4.17 Backlog Pemenuhan Perumahan Provinsi Papua Pegunungan

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 2021	KK	Persentase Kepemilikan Rumah	Backlog	Persentase Backlog
Mamberamo Tengah	50.406	12.087	12.602	515	4
Tolikara	144.158	34.499	36.040	1.541	4
Pegunungan Bintang	77.760	16.552	19.440	2.888	14
Yalimo	65.261	14.520	16.315	1.795	11
Nduga	103.386	24.680	25.847	1.167	4
Lanny Jaya	185.757	44.666	46.439	1.773	3
Yahukimo	196.585	47.232	49.146	1.914	3
Jayawijaya	222.465	49.250	55.616	6.366	11
Provinsi Papua Pegunungan	1.045.778	243.486	261.445	17.959	7

Sumber: Papua dalam Angka 2022, diolah



Gambar 4.7 Backlog Perumahan di Provinsi Papua Pegunungan
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Rumah tidak layak huni yang masih ada di Provinsi Papua Pegunungan, menjadi penting untuk diselesaikan permasalahannya mengingat pentingnya memenuhi kebutuhan dasar berupa rumah yang sehat dan aman (secara konstruksi) yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Di Provinsi Papua Pegunungan, kondisi rumah tidak layak huni masih terdapat di semua kabupaten/kota di Provinsi Papua Pegunungan untuk lebih lengkapnya, jumlah rumah tidak layak huni dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.18 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Pegunungan

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Tanah			Jumlah
	Milik Sendiri	Tanah Negara	Bukan Milik Sendiri	
Tolikara	50	0	0	50
Pegunungan Bintang	57	0	0	57
Mamberamo Tengah	23	0	0	23

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Tanah			
	Milik Sendiri	Tanah Negara	Bukan Milik Sendiri	Jumlah
Nduga	213	0	0	213
Lanny Jaya	1.086	1	1	1.088
Jayawijaya	1.438	0	0	1.438
Yalimo	126	0	0	126
Yahukimo	725	0	476	1.201
Jumlah	3.718	1	477	4.196

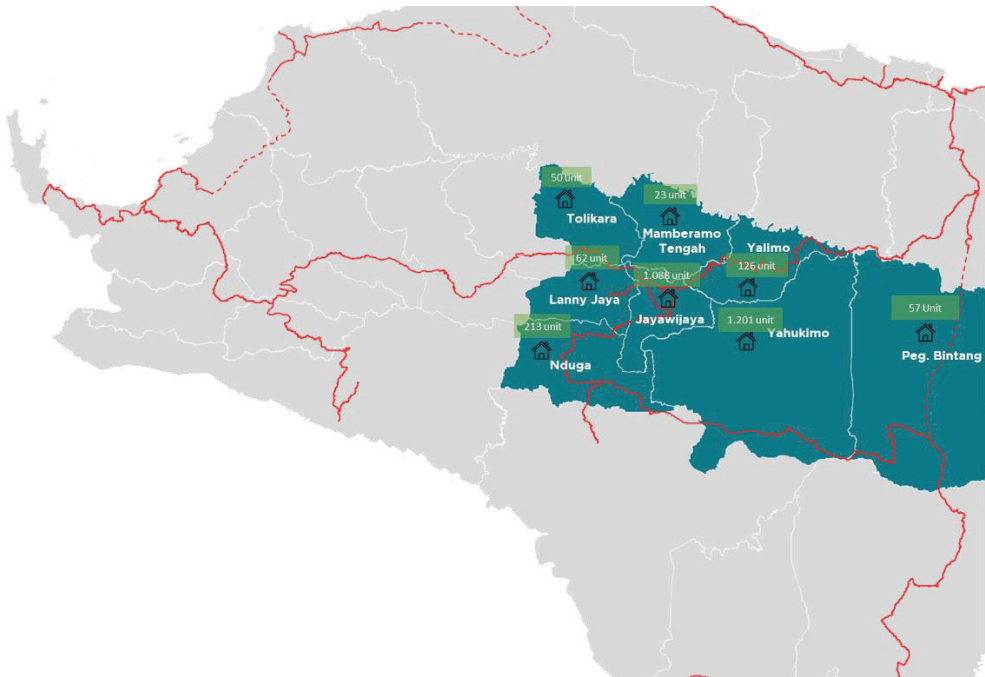
Sumber: e-rtlh.pupr.go.id, 2022

Hingga pada Tahun 2021, penanganan rumah tidak layak huni yang telah dilakukan Ditjen Perumahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.19 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Pegunungan 2017 - 2022

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mamberamo Tengah	0	150	125	610	0	0
Tolikara	0	352	1125	1000	0	0
Pegunungan Bintang	0	80	100	0	0	0
Yalimo	0	300	250	400	0	0
Nduga	0	0	0	0	0	0
Lanny Jaya	0	0	175	100	0	0
Yahukimo	0	105	685	0	0	0
Jayawijaya	0	40	100	100	0	0
Jumlah	0	1.027	2.560	2.210	0	0

Sumber: e-rtlh.pupr.go.id, 2022



Gambar 4.8 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2022

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan pada kondisi eksisting diatas, kemudian dirumuskan kinerja infrastruktur perumahan sesuai dengan target capaian visium PUPR Tahun 2030 Program pembangunan perumahan dapat dilakukan dengan pembangunan rumah swadaya, rumah khusus, maupun rumah susun.

Selain pembangunan rumah untuk pemenuhan backlog perumahan, pengurangan rumah tidak layak huni juga diperlukan sebagai dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Penyelesaian rumah tidak layak huni dapat menggunakan bantuan stimulan untuk rumah swadaya (BSPS).

4.5 Profil dan Kinerja Infrastruktur Non-PUPR

4.5.1 Profil dan Kinerja Infrastruktur Perhubungan Provinsi Papua Pegunungan

Infrastruktur perhubungan yang terdapat di Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari perhubungan darat, udara, dan laut. Pembahasan masing-masing infrastruktur perhubungan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

A. Infrastruktur Perhubungan Darat

Berdasarkan fungsi pelayanannya, terminal penumpang diklasifikasikan kedalam tiga tipe terminal yaitu:

1. Terminal penumpang Tipe A, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).
2. Terminal penumpang Tipe B, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).
3. Terminal penumpang Tipe C, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES).

Terdapat beberapa infrastruktur perhubungan darat berupa terminal tipe B di Provinsi Papua Pegunungan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.20 Terminal di Provinsi Papua Pegunungan

No	Nama Terminal	Tipe Terminal	Lokasi Kab/kota
1	Wamena	B	Kabupaten Jayawijaya
2	Oksibil	B	Kabupaten Pegunungan Bintang
3	Dekai	B	Kabupaten Yahukimo
4	Elelim	B	Kabupaten Yalimo

Sumber: Perda Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang RTRWP Papua 2013 - 2033 & Hasil Identifikasi Tahun 2022

B. Infrastruktur Perhubungan Udara

Berdasarkan hirarkinya bandar udara terdiri atas:

a. Bandar Udara Pengumpul (Hub)

Merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Macam-macam bandar udara pengumpul:

1. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang pertahun;
2. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang pertahun;
3. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta) orang pertahun.

b. Bandar Udara Pengumpan (Spoke)

Bandar Udara Pengumpan merupakan:

1. Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal;
2. Bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul;
3. Bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.

Adapun bandar udara yang terdapat di Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional, yaitu sebagai berikut

Tabel 4.21 Bandar Udara di Provinsi Papua Pegunungan

Nama	Lokasi	Hierarki
Wamena	Kab. Jayawijaya	Pengumpnan

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 166 Tahun 2019 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional

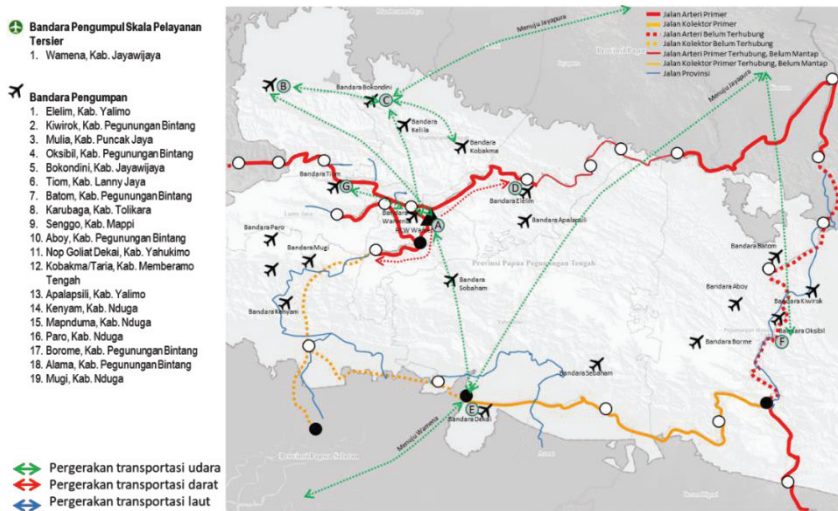
C. Infrastruktur Perhubungan Laut

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, yang kemudian terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2021, bahwa hirarkinya pelabuhan terdiri atas:

- Pelabuhan Utama** (PU) adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
- Pelabuhan Pengumpul** (PP) adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
- Pelabuhan Pengumpan** adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi (PR/pengumpan regional) atau dalam kabupaten (PL/pengumpan lokal).

- d. **Terminal Umum** adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerjasama lainnya. Lokasi terminal yang merupakan rencana lokasi pengembangan pelabuhan harus terdapat dalam Rencana Induk Pelabuhan yang ditetapkan oleh Menteri.
- e. **Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul** adalah pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas melayani penumpang dalam jumlah besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara regional atau berbagai kabupaten, berperan dalam transportasi antar propinsi atau antar kabupaten, dan memiliki fasilitas pelabuhan yang memadai, serta dapat memberikan pelayanan minimal sesuai dengan standar nasional.
- f. **Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan** adalah pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas, berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam propinsi atau dalam kabupaten.

Profil dan kinerja infrastruktur perhubungan akan membahas mengenai jalur transportasi yang sudah terbentuk di Provinsi Papua Pegunungan dan aliran barang dan orang antar pusat kegiatan. Berikut profil dan kinerja infrastruktur perhubungan di Provinsi Papua Pegunungan.



Gambar 4.9 Sistem Transportasi Darat, Laut, dan Udara di Provinsi Papua Pegunungan
Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pergerakan barang dan orang di Provinsi Papua Pegunungan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.22 Pergerakan Penumpang di Provinsi Papua Pegunungan

Asal	Pergerakan (unit/tahun)
Jayawijaya	Peg. Bintang (1380), Yahukimo (5951), Tolikara (998), Mamberamo Tengah (113), Yalimo (71), Lanny Jaya (56), Nduga (177)
Peg. Bintang	Jayawijaya (1119), Yahukimo (1627), Tolikara (441), Mamberamo Tengah (383), Yalimo (418), Lanny Jaya (328), Nduga (1352)
Yahukimo	Jayawijaya (5028), Peg. Bintang (1695), Tolikara (1664), Mamberamo Tengah (1721), Yalimo (1876), Lanny Jaya (1474), Nduga (6075)
Tolikara	Jayawijaya (1097), Peg. Bintang (598), Yahukimo (2164), Mamberamo Tengah (375), Yalimo (409), Lanny Jaya (321), Nduga (1325)
Mamberamo Tengah	Jayawijaya (202), Peg. Bintang (462), Yahukimo (1994), Tolikara (334), Yalimo (41), Lanny Jaya (21), Nduga (10)
Yalimo	Jayawijaya (222), Peg. Bintang (508), Yahukimo (2190), Tolikara (367), Mamberamo Tengah (41), Lanny Jaya (16), Nduga (8)
Lanny Jaya	Jayawijaya (178), Peg. Bintang (407), Yahukimo (1755), Tolikara (294), Mamberamo Tengah (33), Yalimo (17), Nduga (34)
Nduga	Jayawijaya (742), Peg. Bintang (1700), Yahukimo (7331), Tolikara (1230), Mamberamo Tengah (139), Yalimo (69), Lanny Jaya (35)

Sumber: Matriks Origin Destination Antar Kabupaten/Kota Indonesia, 2011

4.5.2 Profil dan Kinerja Infrastruktur Energi/ Kelistrikan Provinsi Papua Pegunungan

Infrastruktur energi/ kelistrikan Provinsi Papua Pegunungan sebagian besar masih menggunakan sistem 20 kV dan masih *isolated*, sebagian lagi menggunakan jaringan tegangan rendah 220 Volt langsung ke beban. Selain itu, masih terdapat ibukota kabupaten yang belum mendapatkan layanan listrik dari PLN di Provinsi Papua Pegunungan, yaitu Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Mamberamo Tengah. Selain itu, terdapat sistem tenaga listrik *isolated* dengan beban puncak kurang dari 2 MW merupakan listrik perdesaan yang berada secara tersebar.

Kebutuhan sistem tenaga listrik Provinsi Papua Pegunungan dipasok dari pembangkit-pembangkit jenis PLTA, PLTU, PLTMG, dan PLTD. Energi listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV dan 70 kV, jaringan tegangan menengah (JTM) 20 kV dan jaringan tegangan rendah (JTR) 400/220 Volt. Rincian pembangkit terpasang dan beban puncak sistem tenaga listrik di Provinsi Papua Pegunungan yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.23 Kapasitas Pembangkit Listrik Terpasang di Provinsi Papua Pegunungan

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir (MW)
PLN					
PLT M	Wamena	11	4,5	3,9	3,9
PLTMG	Wamena	7	4,2	3,6	3,6
Jumlah PLN		18	8,7	7,5	7,5
Sewa					
PLTD	Wamena	1	2,0	2,0	2,0
Jumlah Sewa		1	2,0	2,0	2,0
Total		19	10,7	9,5	9,5

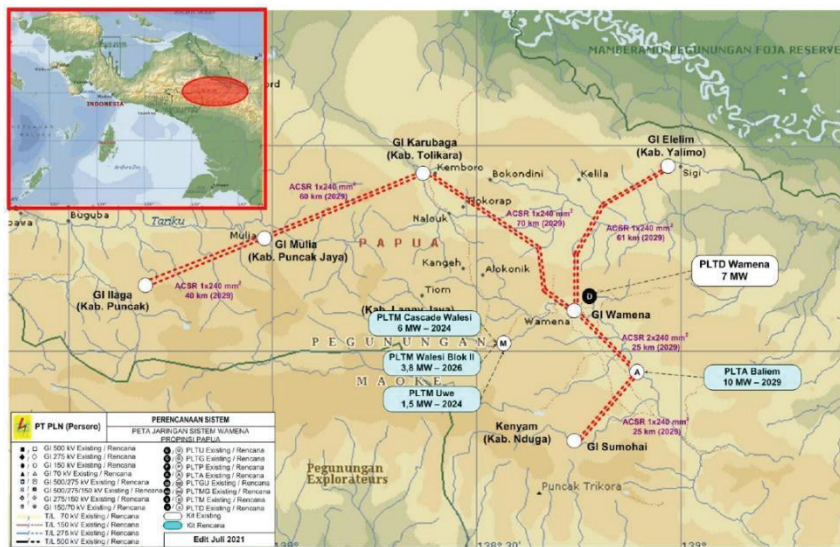
Sumber: RUPTL PLN Tahun 2021-2030

Adapun rencana pembangunan jaringan kelistrikan di Provinsi Papua Pegunungan disajikan dalam Tabel dan Gambar berikut

Tabel 4.24 Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik di Provinsi Papua Pegunungan

No	Sistem	Jenis	Lokasi/Nama Pembangkit	KAP (MW)	Target COD	Status	Pengembang
1	<i>Isolated</i> Tersebar	PLTS Baterai +	Dedieselisasi	0,05	2023	Rencana	IPP
2	<i>Isolated</i> Tersebar	PLTS Baterai +	Dedieselisasi	113,8	2025	Rencana	IPP
3	<i>Isolated</i> Tersebar	PLTS	Lisdes	3,80	2021	Rencana	PLN
4	<i>Isolated</i> Tersebar	PLTS	Lisdes	7,73	2022	Rencana	PLN
5	<i>Isolated</i> Tersebar	PLTS	Lisdes	0,71	2023	Rencana	PLN
6	<i>Isolated</i> Tersebar	PLTS	Lisdes	0,97	2024	Rencana	PLN
7	<i>Isolated</i> Tersebar	PLTS	Lisdes	1,57	2025	Rencana	PLN
8	<i>Isolated</i> Tersebar	PLTS	Lisdes	1,68	2026	Rencana	PLN
9	<i>Isolated</i> Tersebar	PLTS	Lisdes	1,70	2027	Rencana	PLN
10	<i>Isolated</i> Tersebar	PLTS	Lisdes	2,06	2028	Rencana	PLN
11	<i>Isolated</i> Tersebar	PLTS	Lisdes	2,29	2029	Rencana	PLN
12	<i>Isolated</i> Tersebar	PLTS	Lisdes	1,62	2030	Rencana	PLN
13	Oksibil	PLTM	Digoel	3	2029	Rencana	PLN
14	Wamena	PLTM	Cascade Walesi	6	2024	Rencana	PLN
15	Wamena	PLTM	Uwe	1,5	2024	Rencana	PLN
16	Wamena	PLTM	Walesi Blok II	3,8	2026	Rencana	PLN
17	Wamena	PLTA	Baliem	10	2029	Rencana	PLN
Jumlah				162,28			

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2021-2030



Gambar 4.10 Peta Rencana Pengembangan Sistem Interkoneksi
150 kV Wamena

Sumber: RUPTL PLN Tahun 2021-2030

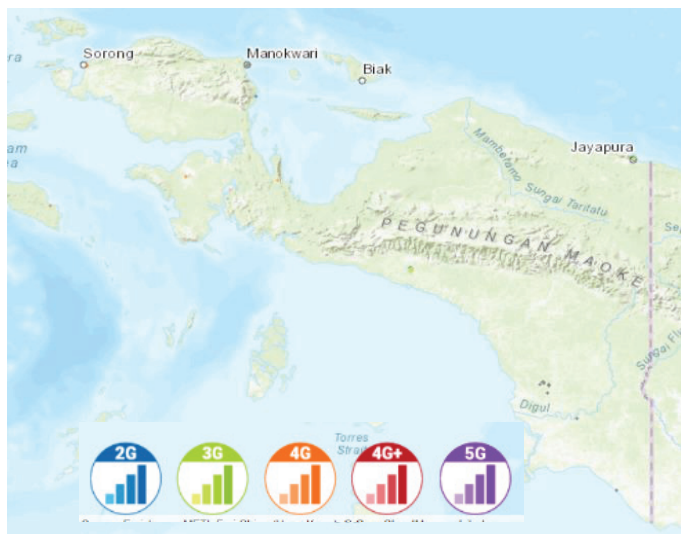
4.5.3 Profil dan Kinerja Infrastruktur Telekomunikasi

Sektor telekomunikasi merupakan salah satu masalah krusial di Provinsi Papua Pegunungan, hal ini disebabkan masih banyak daerah yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi sama sekali. Daerah yang tidak terjangkau sinyal adalah daerah yang terletak di pegunungan atau pulau – pulau terpencil. Hal ini tentu sangat menyusahkan dan merugikan untuk masyarakat setempat karena komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Kebutuhan komunikasi di masa kini sudah masuk ke kategori kebutuhan primer masyarakat. Berikut profil dan kinerja sektor telekomunikasi di Pulau Papua berdasarkan provider telekomunikasi terkemuka di Indonesia.



Gambar 4.11 Sebaran Cakupan Jaringan Data Seluler Provider Telkomsel di Pulau Papua

Sumber: Peta cakupan 3G / 4G / 5G Telkomsel di Indonesia nperf.com,2023



Gambar 4.12 Sebaran Cakupan Jaringan Data Seluler Provider XL Axiata di Pulau Papua

Sumber: Peta cakupan 3G / 4G / 5G XL di Indonesia nperf.com,2023



Gambar 4.13 Sebaran Cakupan Jaringan Data Seluler Provider Indosat di Pulau Papua

Sumber: Peta cakupan 3G / 4G / 5G XL di Indonesia nperf.com,2023

Dari peta sebaran tersebut dapat terlihat bahwa cakupan sinyal di Pulau Papua tepatnya di Provinsi Papua masih sangat rendah, hanya provider Telkomsel yang sudah memiliki cakupan layanan yang cukup luas. Provider lain seperti XL Axiata dan Im3 masih sangat terbatas cakupan sinyalnya hanya terdapat di Kab/kota besar seperti Nabire, Mimika, Jayapura dan Merauke. Hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat untuk dapat memperluas cakupan layanan di Provinsi Papua Pegunungan.



BAB 5

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



BAB V PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan tentang potensi dan tantangan pengembangan wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang dirumuskan menjadi isu strategis berdasarkan konteks perencanaan makro (tinjauan nasional), meso (tinjauan regional wilayah Sulawesi – Maluku – Papua), dan mikro (tinjauan wilayah Provinsi Papua Pegunungan). Penetapan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan fokus kebijakan sebagai baseline, tren pengembangan di masa yang akan datang dan masalah utama yang dihadapi untuk mencapai kondisi tersebut. Permasalahan dan isu strategis menjadi masukan dalam menyusun skenario pengembangan wilayah (Bab 6).

5.1 Sektor Pariwisata Sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional

Landasan hukum untuk sektor pariwisata termuat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional, RIPPARNAS diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di pusat maupun di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun. Perwilayahan Pembangunan DPN adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN).

Sektor pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan didorong sebagai prioritas Pemerintah Daerah dan Pusat. Provinsi Papua Pegunungan memiliki keanekaragaman jenis pariwisata, seperti wisata *ecotourism* sebagai wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa di

pegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain. Untuk jenis wisata *adventourism* sebagai sebuah perjalanan rekreasi ke tempat-tempat terpencil atau eksotis dengan tujuan untuk menjelajahi atau terlibat dengan berbagai kegiatan petualangan. Selain itu ada satu jenis wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan yaitu pariwisata budaya (Cultural Tourism). Hal ini didukung adat istiadat yang masih sangat kental seperti rumah tradisional, festival masyarakat adat dan keberagaman suku serta masyarakat adat.

Tantangan yang dihadapi oleh sektor pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan ialah dalam (1) keterbatasan akses transportasi yang sulit terjangkau dan menelan biaya yang mahal, (2) kurang menariknya pengemasan produk yang ditawarkan dan minimnya amenities di lokasi destinasi wisata, (3) belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan sektor pariwisata karena keterbatasan bandwidth sinyal telekomunikasi, maupun (4) belum adanya sinergitas antara pemerintah dengan stakeholders pariwisata di daerah mengakibatkan daya tarik pariwisata menjadi rendah.

Permasalahan utama terkait pengembangan kawasan pariwisata kaitannya dengan unsur pertimbangan peningkatan seluruh aspek dalam sektor pariwisata untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Pegunungan, yaitu (1) Pemeliharaan infrastruktur destinasi pariwisata yang rawan konflik tidak maksimal sehingga kurang terawat, (2) Prioritas pembangunan infrastruktur PUPR yang terbagi karena banyak kawasan lain ditangani, keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan pekerjaan dan (3) Peran Pemerintah Daerah yang masih minim untuk meningkatkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor utama pemenuhan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan.

Berikut terlampir tabel yang menjelaskan mengenai rumusan isu strategis fokus Kawasan Pariwisata.

Tabel 5.1 Isu Strategis Fokus Pariwisata

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Makro: Skala Nasional	Memaksimalkan potensi sektor pariwisata di Kawasan Timur Indonesia (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Pulau Papua)	Potensi pariwisata di kawasan timur Indonesia (Sulmapa) melimpah dan potensial namun masih banyak yang tersembunyi (Hidden Gem)	Sesuai RPJMN 2020 - 2024 pengembangan destinasi pariwisata melalui perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas (3A)	1. KPPN Jayawijaya 2. KPPN Wamena	Pengembangan kawasan pariwisata dengan perencanaan jangka panjang dengan rencana aksi yang terukur untuk seluruh kawasan pariwisata di wilayah timur	Keterbatasan akses menuju potensi pariwisata yang ada di Sulmapa serta minimnya arah pengembangan pariwisata di Sulmapa	Belum maksimalnya pengembangan kawasan pariwisata di sektor infrastruktur pendukung destinasi pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan
		Bandara (jalur udara) dan pelabuhan (jalur laut) merupakan akses eksisting utama menuju destinasi pariwisata di Sulmapa			Penambahan rute internasional antara Provinsi Papua dengan kawasan timur untuk meningkatkan kunjungan wisata di kawasan timur Indonesia		

RPTW Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meso: Sulawesi, Maluku, Papua	Terhubungnya antar destinasi pariwisata di Kawasan Timur Indonesia	Pelabuhan Biak yang merupakan salah satu pelabuhan utama penghubung sektor pariwisata di kawasan timur dalam kondisi baik namun diperlukan optimalisasi dan pemeliharaan secara berkala	Rencana pengembangan kepelabuhan dan bandara yang disusun oleh Kementerian Perhubungan untuk mendukung pengembangan kawasan pariwisata di Provinsi Papua		Penambahan rute nasional dan internasional yang melewati Pelabuhan Biak terutama rute untuk Kapal Pesiar	Penambahan rute yang berpotensi kurang efektif dalam sisi pengembangan pariwisata	
		KSPN Sentani membutuhkan dukungan pembangunan sisi aksesibilitas (Bandara / Pelabuhan dan jalan akses pelabuhan Depapre) agar dapat terhubung ke destinasi wisata lain yang terdapat di Kawasan Timur Indonesia	Rencana pengembangan kepelabuhan dan bandara yang disusun oleh Kementerian Perhubungan untuk mendukung pengembangan kawasan pariwisata di Provinsi Papua		Penyelesaian jalan akses menuju Pelabuhan Depapre dan Penataan kawasan pariwisata di sekitar KSPN Sentani Penataan Kawasan Pariwisata KSPN Sentani dan memantapkan jalan akses menuju KSPN Sentani	Pelabuhan Depapre yang sudah lama tidak beroperasi sebelum pembangunan jalan akses, perlu intervensi dari Kementerian Perhubungan agar Pelabuhan Depapre dapat beroperasi kembali setelah jalan akses telah selesai terbangun	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mikro: Provinsi Papua Pegunungan	Peningkatan seluruh aspek dalam sektor pariwisata untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Pegunungan	KPPN Wamena dan KPPN Jayawijaya merupakan destinasi pariwisata paling potensial yang terdapat di Provinsi Papua Pegunungan namun masih kekurangan dalam infrastruktur pendukung pariwisata	Arah kebijakan untuk pengembangan kawasan pariwisata tidak hanya infrastruktur PUPR pendukung namun sektor lain seperti perhubungan dan peningkatan atraksi untuk kepariwisataan (pp No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025)		terutama akses menuju Danau Sentani		
		Objek pariwisata yang dapat diakses oleh wisatawan masih sangat terbatas hanya di sekitar Kab. Jayawijaya, hal ini dikarenakan akses transportasi yang susah dicapai serta konflik antar masyarakat yang mengakibatkan kondisi tidak kondusif			Penataan Kawasan pariwisata di KPPN Wamena dan KPPN Jayawijaya.	Pemeliharaan infrastruktur destinasi pariwisata yang kurang maksimal sehingga tidak terawat	
					Peningkatan pengelolaan Destinasi pariwisata di KPPN Wamena dan KPPN Jayawijaya	Sumber daya manusia di sektor pariwisata masih rendah / belum mampu untuk mengelola destinasi pariwisata di KPPN Jayawijaya dan KPPN Wamena	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

5.2 Kawasan Perkotaan Provinsi Papua Pegunungan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Kegiatan Wilayah Hinterland

PP No. 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan mendefinisikan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan di Provinsi Papua Pegunungan masih memerlukan dukungan infrastruktur dasar serta konektivitas antar wilayah yang memadai untuk mendukung kegiatan ekonomi di PKW dan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan. Prioritas pembangunan kawasan perkotaan di Provinsi Papua Pegunungan diantaranya Kota Baru Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, pengembangan PKW Wamena yang diharapkan dapat berkembang menjadi PKN karena sudah menjadi Ibukota Provinsi dan Perkotaan Oksibil di Kab. Pegunungan Bintang (usulan baru).

Kawasan perkotaan di Provinsi Papua Pegunungan memiliki kendala dalam pengembangannya, di antaranya masih rendahnya intensitas interaksi antar pusat-pusat perkotaan secara meso di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua serta secara mikro yaitu belum tersambungannya dengan jalur darat antara wilayah PKN dengan PKW (PKN Merauke – PKW Wamena, PKW Bade – PKW Wamena, dst). Selain itu pergerakan antar PKN/ PKW di Pulau Papua relatif masih lebih sedikit daripada pergerakan keluar Pulau Papua (Makassar, Surabaya, Manado, Ambon). Ketergantungan kawasan hinterland di luar PKN/ PKW masih relatif tinggi karena daerah hinterland merupakan kawasan pedalaman dan pegunungan yang sulit dijangkau melalui transportasi darat. Kawasan perkotaan yang direncanakan menjadi pusat pemerintahan Provinsi DOB Provinsi Papua Pegunungan masih menghadapi kendala terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar sebagai pusat kegiatan wilayah

(PKW). Berikut terlampir tabel rumusan isu strategis fokus Kawasan Perkotaan

Tabel 5.2 Isu Strategis Fokus Kawasan Perkotaan

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Makro: Skala Nasional	Konstelasi ekonomi antar kawasan perkotaan di wilayah Indonesia timur (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua)	Rendahnya intensitas interaksi antar pusat-pusat perkotaan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua	Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan sektor ekonomi lokal di wilayah perkotaan	• PKW Wamena • Perkotaan DOB Provinsi Papua • Pegunungan Perkotaan Oksibil, Kab. Pegunungan Bintang	Pusat-pusat perkotaan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua dapat saling berkolaborasi dalam aktivitas rantai pasok sehingga mengurangi ketergantungan dengan pusat kegiatan di Jawa dsk	Terbatasnya dukungan infrastruktur dasar dalam menunjang kegiatan ekonomi kawasan perkotaan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua	Peningkatan kapabilitas kawasan perkotaan di Provinsi Papua Pegunungan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kegiatan terhadap wilayah di sekitarnya.
	Meso: Sulawesi, Maluku, Papua	Terdapat PKN dan PKW antara Prov. Papua dengan Prov. Papua Barat yang belum tersambung melalui jalur darat sehingga berdampak pada mahal biaya pergerakan orang/barang (PKW Nabire-PKW Manokwari, PKW Nabire-PKW Fakfak,	Pembangunan dukungan konektivitas terpadu PKN dan PKW agar terhubung melalui jalur darat, laut dan udara di Pulau Papua		Pembangunan konektivitas darat untuk menghubungkan antar PKN - PKN, PKN - PKW. Jika tidak bisa menggunakan jalur darat (misal wilayah kepulauan) maka bisa dimaksimalkan di jalur laut dan jalur udara	Pergerakan barang dan orang antar kawasan pusat perkotaan di Pulau Papua terkendala oleh keterbatasan dukungan akses darat dan tergantung pada akses udara serta laut yang relatif lebih mahal dan lama	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
		Pergerakan antar PKN/PKW di Pulau Papua masih lebih sedikit daripada pergerakan keluar Pulau Papua (Makassar, Surabaya, Manado, Ambon)			Diversifikasi sektor ekonomi unggulan di pusat-pusat kawasan perkotaan yang memunculkan dependensi dan interaksi internal Pulau Papua yang meningkatkan pergerakan antar pusat kawasan perkotaan PKN/PKW		
		PKN PKW mempunyai SDM yang tinggi dan infrastruktur pendukung yang relatif lebih lengkap	Memaksimalkan potensi - potensi PKN / Ibu Kota Baru sebagai growth center yang mempunyai skenario pengembangan baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi		Kawasan-kawasan perkotaan di Pulau Papua saling terhubung sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan yang memiliki sektor ekonomi basis masing-masing		
Mikro: Provinsi Papua Pegunungan	Pemenuhan infrastruktur pendukung dan pelayanan di kawasan perkotaan terutama Daerah	Ketergantungan kawasan di luar PKN/PKW (hinterland) yang sangat tinggi karena daerah pedalaman dan	Pemerataan pembangunan dukungan infrastruktur ke wilayah sekitar (hinterland) dari PKW Wamena		Pengembangan kawasan perkotaan Ibukota DOB Provinsi Papua Pegunungan dapat	Keterbatasan kapasitas pelayanan infrastruktur kawasan perkotaan yang dapat diakses	

RPIWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
	Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan	pegunungan yang tidak terjangkau			diselenggarakan dengan lancar dan didukung oleh pelayanan infrastruktur dasar serta konektivitas antar wilayah yang memadai guna menunjang sektor ekonomi masing-masing pusat perkotaan	oleh masyarakat ditambah dengan adanya kebutuhan penyediaan infrastruktur pendukung baru pada pusat perkotaan Ibukota DOB Provinsi Papua Pegunungan	
		Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan sebagai pusat kegiatan, khususnya pada Ibukota DOB Provinsi Papua Pegunungan	Pemenuhan standar pelayanan minimum pada pusat-pusat perkotaan Provinsi Papua Pegunungan				
		Pusat perkotaan Ibukota DOB Provinsi Papua Pegunungan dalam masa transisi persiapan kegiatan pemerintahan provinsi	Percepatan pembentukan pemerintahan baru di DOB Provinsi Papua Pegunungan				

Sumber: Hasil Analisis, 2023

5.3 Kawasan Perbatasan Sebagai Perwujudan Aktivitas Perekonomian yang Inklusif

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua menjelaskan bahwa Kawasan Perbatasan Negara adalah Kawasan Strategis Nasional yang berada di bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia di Provinsi Papua dengan Negara Papua Nugini, Australia, dan Palau, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

Provinsi Papua Pegunungan sebagai salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Papua Nugini memiliki prioritas pengembangan kawasan perbatasan.

Pengembangan kawasan perbatasan negara dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dukungan Kementerian PUPR dalam pengembangan kawasan perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Sasaran nasional dalam pengembangan kawasan perbatasan di Provinsi Papua Pegunungan yaitu peningkatan layanan dan aktivitas kawasan perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Kondisi kawasan perbatasan di Provinsi Papua Pegunungan masih memiliki beberapa permasalahan, di antaranya kegiatan ekonomi para pelintas batas masih belum optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, belum optimalnya dukungan infrastruktur karena masih ada beberapa infrastruktur yang belum terbangun atau belum memenuhi standar pelayanan minimal terutama terkait konektivitas yaitu jalan paralel perbatasan yang belum tersambung untuk ruas Twoe Hitam – Oksibil yang terletak di Kab. Pegunungan Bintang, dan serta masih rendahnya *Supply & demand* pergerakan barang dan orang di kawasan perbatasan.

Pembangunan kawasan perbatasan bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat karena kawasan perbatasan sebenarnya memiliki potensi kekayaan sumber daya

alam, keanekaragaman hayati dan budaya yang kaya namun belum dikelola secara maksimal. Pembangunan kawasan perbatasan harus mempertimbangkan wilayah adat dan melibatkan berbagai sektor baik Pemerintah Daerah maupun Pusat.

Pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Papua Pegunungan erat hubungannya dengan kerjasama Indonesia dengan Papua Nugini (PNG). Permasalahan utama dalam pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Papua Nugini (PNG) adalah belum seimbangnya pengembangan kawasan perbatasan di wilayah Papua Nugini, sehingga volume pelintas batas dan transaksi komoditas masih relatif rendah.

Pengembangan PLBN telah membuka peluang investasi melalui proses transaksi jual-beli komoditas unggulan antar kawasan perbatasan yang berada di Provinsi Papua Pegunungan dengan kawasan di Negara Papua Nugini. Salah satu upaya untuk meningkatkan transaksi ekonomi antar kawasan adalah dengan membangun pasar komoditas serta terminal antar kawasan perbatasan kedua negara. Berikut terlampir tabel rumusan isu strategis fokus Kawasan Perbatasan.

Tabel 5.3 Isu Strategis Fokus Kawasan Perbatasan

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
Makro: Skala Nasional	Penguatan kawasan perbatasan di kawasan timur Indonesia (Sulawesi, Maluku dan Papua)	Laju ekspor ke kawasan pasifik selatan yang perbatasan langsung masih jauh tertinggal dengan kawasan asia	Kebijakan kerjasama perdagangan dengan kawasan pasifik selatan	1. Lokasi Prioritas Perbatasan Kab. Pegunungan Bintang	Meningkatnya kerjasama yang berdampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang yang menuju kawasan pasifik selatan	Masih minimnya kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan kawasan perbatasan yang mengakibatkan rendahnya lalu lintas barang dan orang	Konflik Ekuaitas Dalam Perwujudan Aktivitas Pasar Perbatasan di Provinsi Papua Pegunungan
	Hubungan antar kawasan di wilayah Papua dengan potensi perdagangan lintas negara (RI-PNG) dan kawasan di Pasifik Selatan	Konektivitas antar kawasan dalam provinsi relatif sudah terbangun akan tetapi biaya distribusi masih terbilang mahal untuk kegiatan perdagangan yang menuju kawasan perbatasan	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk serta menekan biaya distribusi ke kawasan perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan pada kawasan perbatasan		Meningkatkan jumlah kunjungan/pelintas batas/ perjalanan orang dan barang/komoditas dari kawasan perbatasan produksi menuju kawasan perbatasan sehingga menimbulkan	Kawasan perbatasan masih menjadi pasar yang eksklusif, belum menjadi pasar yang menarik karena mahalnnya biasa distribusi dan tingginya permintaan kualitas	

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
		Potensi perdagangan komoditas unggulan seperti (kopi/ roti abon/beras) yang sudah diekspor ke luar pulau papua (lokal) tapi belum mencapai ke kawasan pasifik selatan			dampak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dikawasan perbatasan		
Mikro: Provinsi Papua Pegunungan	Dukungan Infrastruktur pendukung pada kawasan perbatasan di Provinsi Papua Pegunungan	Kegiatan Pelintasan batas sudah berjalan secara tradisional dan kegiatan lain yang dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan Kab. Pegunungan Bintang belum optimal Dukungan infrastruktur pelayanan minimum yang belum selesai terbangun terutama di sektor konektivitas di perbatasan	Pemenuhan dukungan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pelintas batas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan		Terbangunnya infrastruktur yang handal pada kawasan perbatasan yang mendukung tidak hanya kegiatan perlintasan batas, juga kegiatan perdagangan, pendidikan, dan pertanian	Masih sedikitnya kontribusi daerah pada kawasan perbatasan Provinsi Papua Pegunungan	

RPIWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

KONTEKS PERENCANAAN		BASELINE		KAWASAN PRIORITAS	SKENARIO		ISU STRATEGIS
LOKUS	UNSUR/ PERTIMBANGAN	KONDISI EKSISTING	FOKUS KEBIJAKAN		OPSI MASA DEPAN	MASALAH UTAMA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)
		Demand akan pergerakan barang dan orang yang masih rendah pada kawasan perbatasan Provinsi Papua Pegunungan					

Sumber: Hasil Analisis, 2023



BAB 6

SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH



BAB VI SKENARIO PENGEMBANGAN WILAYAH

Bab skenario pengembangan wilayah merumuskan proyeksi pertumbuhan, skenario pengembangan, serta justifikasi kawasan prioritas. Tujuan dari skenario pengembangan wilayah yaitu untuk menganalisis kebutuhan pengembangan infrastruktur wilayah.

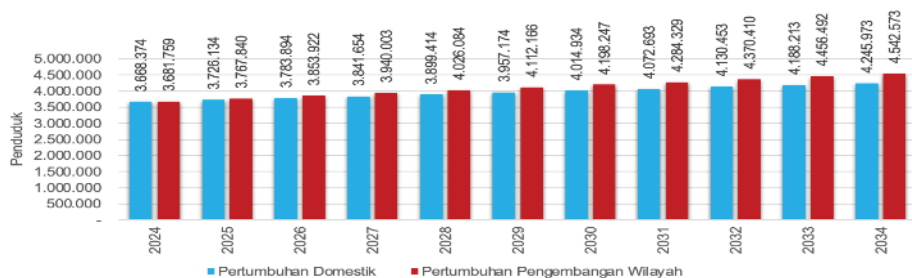
6.1 Proyeksi Pertumbuhan

Sub bab ini menjelaskan perkiraan kondisi atau perkembangan wilayah perencanaan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kecenderungan perkembangannya.

6.1.1 Proyeksi Demografi

Metode yang digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan penduduk menggunakan model eksponensial dimana jumlah penduduk akan terus meningkat setiap tahunnya. Alasan penggunaan model eksponensial adalah untuk mendapatkan jumlah proyeksi penduduk yang maksimal, terkait perhitungan optimal kebutuhan infrastruktur.

Skenario pertumbuhan Provinsi Papua (pra DOB, 2022) berdasarkan data profil kependudukan dengan skenario per tahun 2034 didapat sebagai berikut.



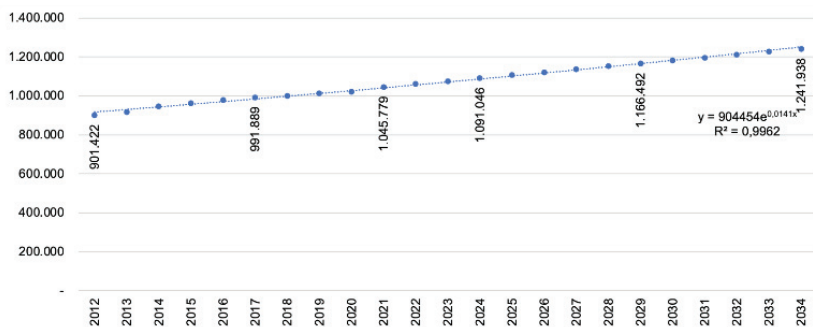
Gambar 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Provinsi Papua (pra DOB, 2022)

Sumber: BPS diolah BPIW, 2022

Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua (pra DOB, 2022) hasil proyeksi menunjukkan pertumbuhan penduduk tahun 2034 didasarkan pada tren pertumbuhan penduduk berdasarkan data tahun sebelumnya. Hasil proyeksi alami menunjukkan jumlah penduduk di Provinsi Papua (pra DOB, 2022) diperkirakan mencapai 4.456.492 jiwa pada tahun 2034. Sementara untuk hasil dengan pertumbuhan pengembangan wilayah terdapat faktor lain yang mendorong pertumbuhan penduduk seperti pengembangan kawasan strategis tertentu yang mengakibatkan tumbuhnya permukiman baru di sekitar kawasan tersebut yang secara otomatis akan mendorong penambahan jumlah penduduk. Proyeksi penduduk berdasarkan pertumbuhan pengembangan wilayah di Provinsi Papua (pra DOB, 2022) mencapai 4.542.573 jiwa. Sedikit lebih banyak dibandingkan pertumbuhan penduduk alami.

A. Skenario Pertumbuhan Penduduk Alamiah

Selanjutnya skenario pertumbuhan akan di jelaskan pada wilayah baru yang menjadi acuan pengembangan Provinsi Papua Pegunungan. Skenario pertumbuhan yang dimaksud juga terbagi dua yaitu pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk dengan pengembangan wilayah.



Gambar 6.2 Proyeksi Pertumbuhan Alamiah Provinsi Papua Pegunungan

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Perhitungan proyeksi penduduk alamiah Provinsi Papua Pegunungan dilakukan pendekatan analisis *trendline* didapat dengan *trendline equation* ($y=904454e0,0141x$) dengan nilai determinasi yang tinggi sebesar $R^2=0,9962$ sehingga didapat

jumlah penduduk Provinsi Papua Pegunungan pada tahun 2034 sebesar 1.241.938 penduduk.

B. Skenario Pertumbuhan Penduduk dengan Pengembangan Kawasan

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi pengembangan kawasan, hal ini berlaku juga dengan pengembangan kawasan di wilayah Papua Pegunungan. Beberapa kawasan strategis yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan jumlah penduduk antara lain Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, PKW Wamena, Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) Jayawijaya dan Wamena, dan lokasi prioritas perbatasan Kab. Pegunungan Bintang. Pertumbuhan penduduk di sekitar kawasan strategis baru secara simultan akan menambah pertumbuhan ekonomi tidak hanya di kawasan strategis tersebut tapi juga di daerah yang ada di sekitar kawasan tersebut. Terlebih lagi jika itu adalah kawasan perkotaan baru, dipastikan akan tumbuh daerah-daerah pertumbuhan baru yang akan menjadi *hinterland* baru yang akan saling berkoneksi dengan kawasan strategis tersebut dan kawasan strategis lainnya. Rantai kawasan strategis ini yang akan menghasilkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Papua Pegunungan.

RPWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

Tabel 6.1 Proyeksi Pertumbuhan Provinsi Papua Pegunungan Dengan Skenario Pengembangan Wilayah

Wilayah	Kawasan	Proyeksi Penduduk										
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Jayawijaya	Domestik, PKW Wamena	229.901	232.380	234.858	237.337	239.815	242.294	244.773	247.251	249.730	252.208	254.687
	KPPN Jayawijaya		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
	KPPN Wamena		50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
	Perkotaan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	1.846	2.462	3.077	3.692	4.308	4.923	5.538	6.154	6.769	7.385	8.000
	Total	231.747	234.991	238.235	241.479	244.723	247.967	251.211	254.455	257.699	260.943	264.187
Lanny Jaya	Domestik, Perkotaan Kiom	193.834	196.526	199.218	201.911	204.603	207.295	209.987	212.680	215.372	218.064	220.756
Mamberamo Tengah	Total	52.945	53.791	54.637	55.483	56.329	57.175	58.021	58.867	59.713	60.559	61.405
Nduga	Total	109.037	110.920	112.804	114.687	116.571	118.454	120.338	122.221	124.105	125.989	127.872
Pegunungan Bintang	Domestik, KSN Perbatasan Papua-PNG	80.924	81.979	83.033	84.088	85.143	86.197	87.252	88.306	89.361	90.416	91.470
	Perkotaan Oksibil (usulan baru)		500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
	Total	80.924	82.479	84.033	85.588	87.143	88.697	90.252	91.806	93.361	94.916	96.470
	Total	68.865	70.067	71.268	72.470	73.671	74.873	76.074	77.276	78.477	79.679	80.880
	Total	151.010	153.294	155.578	157.861	160.145	162.429	164.713	166.997	169.281	171.565	173.849
Yahukimo	Domestik, Perkotaan Sumbal	204.531	207.180	209.828	212.477	215.126	217.775	220.423	223.072	225.721	228.369	231.018
Total	Domestik	1.091.047	1.106.137	1.121.224	1.136.314	1.151.403	1.166.492	1.181.581	1.196.670	1.211.760	1.226.849	1.241.937
	Pengembangan Wilayah	1.092.893	1.109.248	1.125.601	1.141.956	1.158.311	1.174.665	1.191.019	1.207.374	1.223.729	1.240.084	1.256.437

Sumber: BPS diolah BPiW, 2022

6.1.2 Skenario Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua (pra DOB, 2022)

Selama 10 tahun tren Provinsi Papua (pra DOB, 2022) mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan menuju ke arah positif. Namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 – 2021 dikarenakan pandemi Covid-19 yang melumpuhkan perekonomian di Provinsi Papua yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

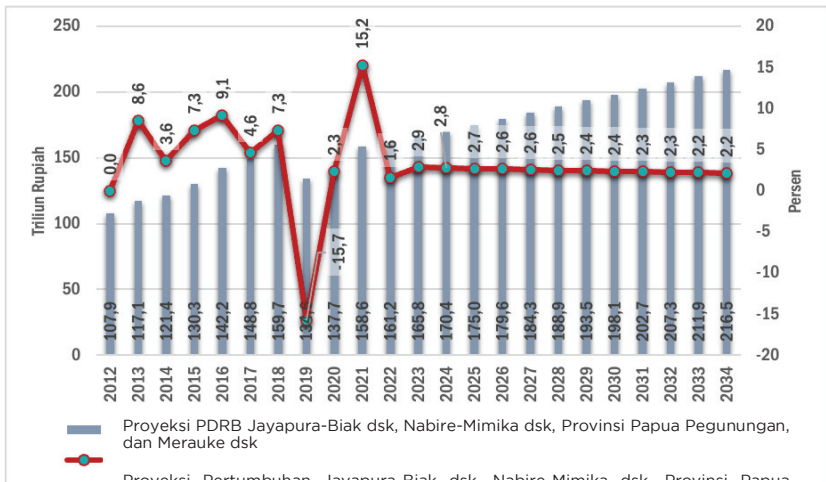
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua (pra DOB, 2022) sempat turun cukup signifikan disebabkan pandemi Covid-19. PDRB pada tahun 2019 mengalami penurunan dari Rp. 159 Triliun menjadi Rp.134 triliun. Setelah mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2021, pada tahun 2022 PDRB Provinsi Papua naik mencapai Rp. 172 Triliun.

Sementara untuk pertumbuhan ekonomi sangat fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi berada di angka 7,32% namun saat pandemi Covid menyerang pertumbuhan ekonomi anjlok hingga menyentuh -15,7%. Hal ini sangat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Setelah pandemi Covid berangsur terkendali pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 – 2021 langsung meningkat mencapai 15,16% dan pada tahun 2022 kembali menurun ke 8,97%.

Penurunan pada tahun 2022 ini bukan merupakan hal yang buruk karena sebelum pandemi angka pertumbuhan penduduk juga ada dalam kisaran 7-8%. Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi mulai kembali normal sesuai kondisi sebelum pandemi covid.

Proyeksi ekonomi di Provinsi Papua (pra DOB, 2022) akan dinilai berdasarkan pertumbuhan dengan asumsi *business as usual* (BaU) dengan hasil sebagai berikut.

RPIW Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034



Gambar 6.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi *Business as Usual*
Sumber: BPS diolah BPIW, 2022

Berdasarkan Hasil Provinsi Papua (pra DOB, 2022) pada tahun 2034 adalah sebesar 216,5 triliun rupiah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi ini didapatkan dari perhitungan dokumen Provinsi Papua dalam angka yang terdapat dalam dokumen Badan Pusat Statistik (BPS). Terdapat asumsi dan skenario dalam proyeksi ekonomi Provinsi Papua (pra DOB, 2022) adanya integrasi dan konektivitas antar kawasan yang mulai terhubung serta kawasan strategis yang mulai berjalan:

1. 2029 Akan terhubung Jalan Trans Papua
2. 2034 Akan Terhubungnya Koridor Utara Papua
3. 2029 Akan terhubung Jalan Paralel Perbatasan Papua
4. 2034 Akan Terhubungnya Antar Perkotaan di Papua

Tabel 6.2 Asumsi *Multiplier* terhadap proyeksi pertumbuhan

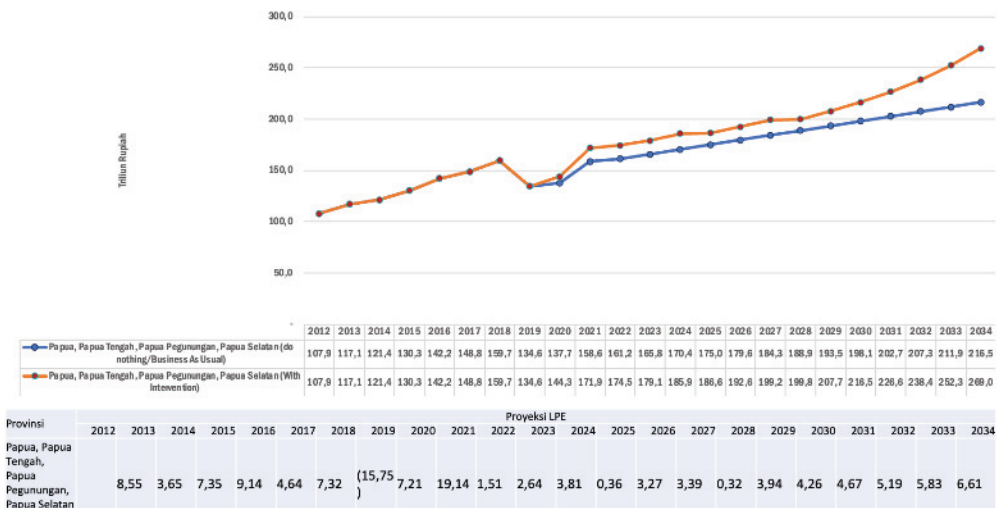
Asumsi Multiplier	Indirect	Direct
Pengembangan PKN Jayapura	2,63	1,09
Pengembangan SKPT Biak Numfor	1,68	1,72
Pengembangan KSPN Ekowisata Danau Sentani	1,39	1,03
Jalan Trans Papua dan Jalan Koridor Utara	1,39	1,09
SKPT Mimka	2,63	1,09
DPP Teluk Bay	1,86	1,54
PKN Wamena, KPPN Wamena	1,63	1,09
KPPN Jawawijaya,	1,86	1,54
Food Estate Merauke	2,63	1,09

Asumsi Multiplier	Indirect	Direct
Jalan Parallel Perbatasan	1,39	1,03
Jalan Koridor Selatan Papua	1,39	1,03

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Asumsi *multiplier* dari pengembangan wilayah yang baru akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan *business as Usual* (tidak ada pembangunan/pengembangan kawasan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi). Seperti yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Proyeksi untuk Provinsi Papua (pra DOB, 2022) didapat sebagai berikut:



Gambar 6.4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dengan Strategi Pengembangan di Provinsi Papua (pra DOB, 2022)

Sumber: BPS diolah BPIW, 2022

Dalam proyeksi untuk Provinsi Papua (pra DOB, 2022) dapat terlihat mulai tahun 2022 ke atas terdapat perbedaan antara proyeksi pertumbuhan *business as usual* dan proyeksi dengan pengembangan wilayah. Proyeksi dengan pengembangan wilayah mengalami peningkatan dalam nilai PDRB nya. Pada proyeksi tahun 2034 proyeksi pertumbuhan ekonomi *business as Usual* sebesar Rp.216 triliun dan proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan pengembangan wilayah mencapai Rp.269 triliun. Perbedaan 54 triliun atau sekitar 27% dari pertumbuhan ekonomi *business as usual* menunjukkan perbedaan yang signifikan yang

berdampak terhadap ketidakmampuan suatu daerah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang ada di Kabupaten/ Kota tersebut.

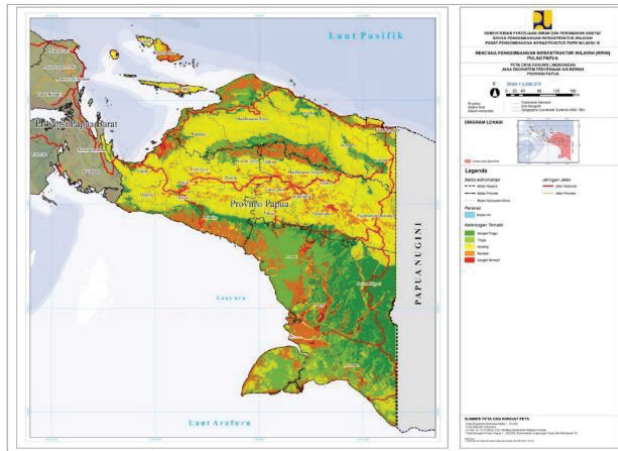
Untuk proyeksi kedepan pada tahun 2034 beberapa Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua (pra DOB, 2022) masih didominasi oleh wilayah yang melampaui kemampuan penyediaan pangan. Masih terdapat 20 dari 29 Kabupaten/ Kota yang melampaui penyediaan pangan.

Secara keseluruhan untuk Provinsi Papua (pra DOB, 2022) sudah hampir mencapai kapasitas maksimal dalam penyediaan pangan pada tahun 2022 mencapai 67%. Kemudian penyediaan pangan Provinsi Papua Pegunungan di tahun 2034 berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk sudah melampaui kemampuan penyediaan pangan dengan presentase mencapai 55%. Hal ini menunjukkan perlu adanya penanganan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pangan di Provinsi Papua Pegunungan di masa mendatang.

Tabel 6.3 Kemampuan Penyediaan Pangan Provinsi Papua Pegunungan

No	Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pangan	Jumlah Penduduk			
			2022	%	2034	%
1	Jayawijaya	170.081	222.465	131%	254.687	150%
2	Lanny Jaya	26.799	185.757	693%	254.687	950%
3	Mamberamo Tengah	33.135	50.406	152%	61.405	185%
4	Nduga	76.809	103.386	135%	127.872	166%
5	Pegunungan Bintang	170.825	77.760	46%	91.470	54%
6	Yalimo	41.283	65.261	158%	80.880	196%
7	Tolikara	37.816	144.158	381%	173.849	460%
8	Yahukimo	144.958	196.585	136%	231.018	159%
Jumlah		701.706	1.045.778		1.275.868	

Sumber: Hasil Analisis, 2022



Peta 6.2 Peta Jasa ekosistem penyediaan air bersih Papua

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Jasa ekosistem penyediaan air bersih di Provinsi Papua Pegunungan didominasi oleh klasifikasi sedang dan rendah. Salah satu sektor pemenuhan SPM adalah sektor air bersih. Saat penyediaan airnya sudah dalam kondisi sedang sampai rendah maka diperlukan penanganan lebih lanjut agar kebutuhan air di wilayah tersebut tetap terpenuhi terutama saat infrastruktur pendukung air bersih sudah masuk ke dalam wilayah yang membutuhkan air bersih dan air minum. Kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi dengan mengetahui kondisi penyediaan air masih didominasi klasifikasi sedang maka diperlukan tindakan untuk melestarikan air yang akan menjadi kebutuhan utama untuk masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan.

6.2 Visi dan Strategi

6.2.1 Perumusan Visi Wilayah

Visi wilayah dirumuskan dari hasil analisis arah kebijakan di Bab II, dengan meninjau kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur di Bab III dan IV, serta menjawab permasalahan dan isu strategis di Bab V. Fokus pengembangan wilayah di Provinsi Papua Pegunungan meliputi pengembangan sektor pariwisata, perkotaan, dan perbatasan.

Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan sangat strategis dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Potensi yang sudah sangat baik didukung dengan kesempatan yang luas membuat sektor pariwisata menjadi sektor yang penting di Provinsi Papua Pegunungan.

Pengembangan kawasan perbatasan sangat potensial karena Provinsi Papua Pegunungan berbatasan langsung melalui jalur darat dengan Negara Papua Nugini. Daerah perbatasan ini penting untuk dikembangkan di Provinsi Papua Pegunungan. Jika pengembangan perbatasan dapat dimaksimalkan maka pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan perbatasan akan berkembang dan berpengaruh untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Kawasan perkotaan sangat potensial karena berkaitan dengan Pusat Pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan sehingga pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan Pusat Pemerintahan akan berkembang secara pesat sehingga dibutuhkan perencanaan yang baik agar pertumbuhan Kawasan dan bertumbuh sesuai dengan target yang dicapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pertumbuhan Kawasan perkotaan.

Visi/tujuan dalam pengembangan infrastruktur wilayah di Provinsi Papua Pegunungan yaitu

“Prov. Papua Pegunungan sejahtera dengan memaksimalkan potensi pusat pertumbuhan baru berbasis pariwisata dan Perkebunan serta pertumbuhan di Kawasan perbatasan”

Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 3 misi (*grand strategy*) yang akan dilakukan. Ketiga misi tersebut sekaligus akan menjawab permasalahan dan isu strategis dalam pengembangan Provinsi Papua Pegunungan. Ketiga misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pariwisata melalui peningkatan SDM pariwisata dan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata;
2. Memaksimalkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan, ekonomi dan wilayah terhadap wilayah hinterland disekitarnya;

3. Peningkatan pelayanan kawasan perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perbatasan.

6.2.2 Analisis Penyusunan Strategi

Dari 3 *grand strategy* yang dirumuskan untuk mencapai visi di atas akan menghasilkan strategi yang lebih detail yang menjadi dasar untuk menentukan program dan rencana aksi. Metode untuk mendapatkan strategi lebih detail menggunakan metode *PESTLE* (Makro), *5 Forces* (Meso) dan *SWOT* untuk masing-masing *grand strategy*.

Sub bab ini menjelaskan tentang analisis setiap fokus perencanaan baik di tingkat makro (skala nasional) yang disebut dengan Analisis *PESTLE* maupun tingkat meso (skala regional wilayah Provinsi Papua Pegunungan) yang disebut dengan Analisis *5 Forces*. Kedua analisis tersebut menghasilkan peluang dan tantangan yang dibobotkan berdasarkan tingkat signifikansinya terhadap pengembangan setiap fokus perencanaan. Hasil dari tahap analisis ini akan menjadi masukan terhadap tahap analisis berikutnya (IFAS, EFAS, dan *SWOT*).

A. Analisis *PESTLE* (Makro)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di provinsi Papua Pegunungan, didapatkan peluang dan tantangan di level makro yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *political* (politik), *economic* (ekonomi), *sociological* (sosial), *technological* (teknologi), *legal* (kebijakan), dan *environment* (lingkungan).

Tabel 6.4 Analisis *PESTLE* (Makro) Fokus Kawasan Pariwisata

Belum maksimalnya pengembangan kawasan pariwisata di sektor infrastruktur pendukung destinasi pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan				
Parameter	Opportunities	Threat	Signifikansi (1-5)	Bobot Pengaruh
<i>Political</i>	Dukungan pemerintah Pusat dan daerah untuk berkolaborasi memaksimalkan potensi pariwisata	Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak adaptif/ tidak akomodatif terhadap pengembangan kawasan pariwisata khususnya di Sulmapa	2	11%
<i>Economic</i>	Peluang pengembangan	Mahalnya biaya perjalanan dan terbatasnya pilihan	5	26%

Belum maksimalnya pengembangan kawasan pariwisata di sektor infrastruktur pendukung destinasi pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan				
Parameter	Opportunities	Threat	Signifikansi (1-5)	Bobot Pengaruh
	Kawasan Pariwisata di Sulmapa dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta (KPBU)	moda transportasi menuju destinasi pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan berakibat terbatasnya jumlah wisatawan yang berkunjung		
<i>Sociological</i>	Potensi jumlah wisatawan lintas pulau yang besar di kawasan timur Indonesia	Kondisi destinasi wisata di kawasan timur yang tidak mudah diakses karena banyak faktor (jarak, biaya, keamanan, fasilitas pendukung) menyebabkan keraguan wisatawan untuk berkunjung	4	21%
<i>Technological</i>	Promosi pariwisata menggunakan sosial media memudahkan wisatawan mendapatkan informasi lengkap lokasi pariwisata yang akan dituju	Beberapa lokasi di Provinsi Papua Pegunungan belum terjangkau sinyal yang menyulitkan pemanfaatan teknologi untuk promosi pariwisata	3	16%
<i>Legal</i>	Terdapat 2 Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) di Provinsi Papua Pegunungan yang tercantum di PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Ripparnas Tahun 2010 - 2025)	Dokumen RIPARNAS yang akan berakhir masa berlakunya pada tahun 2025, sehingga dibutuhkan dokumen baru untuk mendukung pengembangan kepariwisataan di Provinsi Papua Pegunungan	2	11%
<i>Environment</i>	Kondisi geografis di kawasan Sulmapa yang sudah secara alami memancarkan pesona alam yang indah	Destinasi pariwisata di kawasan Sulmapa yang rawan dieksploitasi kondisi alamnya sehingga merusak kawasan pariwisata itu sendiri	3	16%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari analisis *PESTLE* tersebut untuk sektor pariwisata parameter yang paling berpengaruh adalah parameter ekonomi. Hal ini disebabkan fokus pariwisata sangat bergantung pada kondisi ekonomi suatu kawasan tersebut. Jika kondisi ekonomi pada suatu kawasan belum dalam kondisi baik maka sektor pariwisata belum menjadi prioritas untuk dikembangkan.

Terdapat beberapa wilayah yang masuk ke dalam klasterisasi kawasan pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan. Delineasi untuk KPPN dan KSPN telah diatur pada PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Fungsi dari kawasan prioritas dalam sektor pariwisata agar potensi-potensi pariwisata yang sudah tereksplor dapat terus dikembangkan dan menjadi sektor unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di sekitar Kawasan tersebut.

Tabel 6.5 Analisis *PESTLE* (Makro) Kawasan Perkotaan

Peningkatan kapabilitas kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kegiatan terhadap wilayah di sekitarnya.				
Parameter	Opportunities	Threat	Signifikansi (1-5)	Bobot Pengaruh
<i>Political</i>	Pemerataan pembangunan ke wilayah timur Indonesia (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua) memiliki kecenderungan tinggi untuk selalu menjadi prioritas nasional	Pergantian kepemimpinan dalam periode tertentu yang berdampak pada proses penyesuaian tata kelola pemerintahan, pergeseran prioritas pembangunan, dan ketidakpastian kapabilitas pemerintahan	3	15%
<i>Economic</i>	Kawasan perkotaan pada PKN/ PKW di wilayah timur Indonesia menjadi titik pusat potensial masuknya investasi ekonomi dalam rangka pemerataan pembangunan	Homogenitas sektor ekonomi kawasan pusat perkotaan di wilayah timur Indonesia memunculkan persaingan yang berpengaruh pada penurunan interaksi dan kolaborasi antar pusat perkotaan	4	20%
<i>Sociological</i>	Antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat khususnya dalam rangka pemerataan pembangunan kawasan perkotaan wilayah timur Indonesia (Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua)	Rendahnya kapasitas SDM lokal di wilayah Indonesia timur yang rentan tidak mampu bersaing dengan SDM pendatang dan memicu adanya konflik sosial	3	15%
<i>Technological</i>	Investasi teknologi tinggi berpotensi mendukung pembangunan kawasan perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, khususnya di wilayah timur Indonesia yang relatif dalam kondisi belum tereksplorasi	Jika teknologi tinggi yang diinvestasikan di wilayah timur Indonesia tidak diimbangi dengan dukungan peningkatan kapasitas SDM akan berdampak pada ketidakberlanjutan operasionalisasi teknologi	2	10%

Peningkatan kapabilitas kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kegiatan terhadap wilayah di sekitarnya.				
Parameter	Opportunities	Threat	Signifikansi (1-5)	Bobot Pengaruh
<i>Legal</i>	Tingginya dukungan kebijakan dari skala nasional, provinsi, dan daerah dalam memberikan arahan pemerataan pembangunan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua	Ketidakpastian implementasi dan realisasi kebijakan strategis skala nasional di wilayah Indonesia Timur karena pertimbangan politik, hukum adat, ketersediaan infrastruktur, dan komitmen pemerintah	5	25%
<i>Environment</i>	Sumber daya alam dan lingkungan di wilayah timur Indonesia yang memiliki potensi tinggi untuk dieksplorasi dan diolah menjadi basis perekonomian pembangunan kawasan perkotaan	Kerentanan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan di wilayah timur Indonesia yang tidak terkendali berdampak pada kualitas alam (air, tanah, udara, dsb) yang menunjang aktivitas kawasan perkotaan	3	15%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kawasan Perkotaan sangat berkaitan dengan peraturan yang berlaku. Karena itu parameter *Legal* menjadi sektor yang paling berpengaruh dalam pengembangan kawasan perkotaan. Dukungan kebijakan yang tepat sasaran akan mempercepat pengembangan suatu kawasan perkotaan.

Kawasan perkotaan sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan RTRW Provinsi. Sehingga klasterisasi Kawasan perkotaan mengikuti klasterisasi yang sudah terdapat dalam peraturan tersebut. Fungsi Kawasan perkotaan sebagai pusat seluruh kegiatan masyarakat terutama kegiatan ekonomi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6.6 Analisis *PESTLE* (Makro) Kawasan Perbatasan

Konflik Ekuualitas Dalam Perwujudan Aktivitas Pasar Inklusif di Kawasan Perbatasan				
Parameter	Opportunities	Threat	Signifikansi (1-5)	Bobot Pengaruh
<i>Political</i>	Terdapat perjanjian kerjasama dengan negara pasifik serta tergabungnya Indonesia termasuk dalam Pasific Island Forum	Adanya dukungan dari negara di pasifik selatan kepada gerakan <i>free west papua</i> (Pembebasan	3	19%

Konflik Ekualitas Dalam Perwujudan Aktivitas Pasar Inklusif di Kawasan Perbatasan				
Parameter	Opportunities	Threat	Signifikansi (1-5)	Bobot Pengaruh
		Papua Barat) dan mengakibatkan hubungan kerjasama tidak terjalin dengan erat		
<i>Economic</i>	Peluang ekspor dengan komoditas unggulan yang berlimpah untuk pemenuhan lokal dan internasional (PNG, Australia dan Asia Pasifik) dan ketergantungan negara sekitar terhadap bahan baku serta Masih sedikitnya jumlah export menuju kawasan pasifik selatan dan mempunyai trend yang menurun (2018 : \$3,5 Jt - 2022: \$0,6 Jt)	Persaingan kualitas produk dengan negara Australia dan New Zealand yang punya teknologi lebih tinggi pada masyarakat papua sebagai pangsa pasar	5	31%
<i>Sociological</i>	Kedekatan budaya dan karakter yang sama (Identitas melanesia) masyarakat papua dengan pasifik selatan yang sama memudahkan dalam menimbulkan kepercayaan dalam hubungan kerjasama perdagangan	Histori isu sosial masyarakat papua dengan pemerintah pusat Indonesia dapat mempengaruhi kerjasama dengan masyarakat melanesia di kawasan pasifik selatan	2	13%
<i>Technological</i>	Penggunaan teknologi pada pengolahan komoditas unggulan untuk peningkatan hasil produksi dan distribusi barang pada kawasan perbatasan	Persaingan teknologi tinggi dalam mendukung kegiatan di lintas batas	1	6%
<i>Legal</i>	Kegiatan kawasan perbatasan mendapat perhatian khusus dari seluruh Kementerian/ Lembaga	Banyaknya kebijakan dan program pembangunan sering kali tidak sinkron satu sama lainnya	4	25%
<i>Environment</i>	Potensi permintaan Sumber Daya Alam yang menjadi komoditas unggulan di Provinsi Papua Pegunungan	Kondisi geografi pusat pertumbuhan di kawasan pasifik selatan relatif jauh dan dibutuhkan biaya yang lebih untuk menjangkau pasar di kawasan perbatasan	1	6%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pengembangan kawasan perbatasan terkait dengan peningkatan ekonomi di sekitar kawasan perbatasan tersebut sehingga parameter ekonomi terpilih menjadi parameter yang paling berpengaruh di fokus perbatasan. Tolak ukur kesuksesan pengembangan perbatasan terletak pada upaya secara terpadu

pengembangan kawasan perbatasan dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada di kawasan tersebut.

Klasterisasi Kawasan perbatasan ditentukan berdasarkan beberapa peraturan yaitu RPJMN 2020 - 2024, RTRWN dan dukungan inpres yang berhubungan dengan perbatasan. Fungsi Kawasan perbatasan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat di perbatasan agar Kawasan perbatasan dapat berkembang dan tidak tertinggal dengan Kawasan lainnya.

B. Analisis 5 Force (Meso)

Berdasarkan isu strategis yang telah dirumuskan di provinsi Papua Pegunungan, didapatkan peluang dan tantangan di level meso yang dijabarkan berdasarkan beberapa parameter yaitu *rivalry among existing competitor* (Persaingan Antar Kompetitor Eksisting), *bargaining power of customers* (Daya Tawar Pelanggan), *bargaining power of suppliers* (Daya Tawar Pemasok), *threat of new entrants* (Ancaman Pendatang Baru), dan *threat of substitutes* (Ancaman Produk Pengganti).

Dari kelima parameter tersebut masih terbagi menjadi beberapa sub parameter yang akan menentukan mana yang akan dipakai untuk menjadi Efas yang akan diturunkan ke grand strategi.

Parameter Rivalry among Existing Competitor merupakan salah satu parameter dalam 5 Forces yang berkaitan dengan saingan. Jumlah saingan yang banyak akan menurunkan kekuatan di suatu kawasan. Ini sangat berbanding terbalik bila jumlah pesaing dalam satu sektor tidak terlalu banyak. Kekuatan sektor tersebut akan semakin tinggi. Parameter ini terbagi menjadi 3 sub parameter yaitu Konversi *Threat Menjadi Opportunity*, Kualitas yang diinginkan dan inovasi. Hal ini berhubungan dengan penanganan menangani persaingan di suatu kawasan yang meliputi bagaimana memaksimalkan ancaman menjadi peluang, meningkatkan kualitas suatu kawasan agar bisa semakin bersaing serta meningkatkan inovasi yang bisa dikembangkan di kawasan tersebut.

Parameter *Bargaining Power of Customers* berkaitan dengan bagaimana orang – orang terlibat di pengembangan suatu sektor tersebut. Karena pembangunan suatu sektor sangat bergantung dengan konsumen yang dituju (dalam hal ini pengguna yang langsung berkecimpung dalam sektor tersebut). Parameter ini

terbagi menjadi 3 sub parameter yaitu sensitivitas target, tren eksisting dan penciptaan nilai. Ketiga sub parameter ini berkaitan langsung dengan pelanggan atau manusia yang langsung berhubungan dengan pengembangan kawasan tersebut. Dimana dalam sisi manusia dalam 5 *forces* ini sangat fluktuatif contohnya trend eksisting yang selalu berganti dan keinginan tiap *customers* yang berbeda - beda.

Bargaining Power of Suppliers berkaitan dengan pemasok kebutuhan untuk suatu kawasan. Semakin banyak pemasok maka semakin baik untuk pengembangan kawasan tersebut begitu pula dengan sebaliknya. Parameter ini terbagi menjadi 3 sub parameter yaitu ketergantungan saat ini, kualifikasi yang dibutuhkan dan daya dukung eksisting. Ketiga sub parameter ini berkaitan dengan *supply* yang ada di kawasan prioritas tersebut seperti seberapa bergantungnya suatu kawasan terhadap *suppliernya*, kualifikasi pemasok yang dibutuhkan serta daya dukung untuk mendukung pengembangan kawasan prioritas tersebut seperti apa.

Threat of New Entrants berkaitan dengan pendatang baru dalam kawasan strategis tersebut dalam hal ini pendatang baru pesaing untuk sektor yang serupa namun di luar Provinsi Papua Pegunungan. Terdapat 3 sub parameter dalam parameter ini yaitu tantangan yang dihadapi, strategi untuk memenangkan kompetisi, dan ancaman terhadap *Legacy*. Seperti yang terlihat di sub parameter karena semuanya berbicara tentang pesaing baru bagaimana cara untuk memenangkan kompetensi dengan pesaing baru, tantangan apa yang harus dihadapi hingga seberapa besar ancaman dari pesaing baru tersebut terhadap kelangsungan suatu sektor tersebut.

Threat of Substitutes berkaitan dengan pengganti yang bisa menggantikan kawasan strategis ini. Sub parameter dari parameter ini adalah *trend Analisis PESTLE*, trend yang mengganggu dan peralihan *Cost*. Untuk fokus dari ketiga sub parameter tersebut berfokus ke penggantian dari suatu kawasan strategis atau sektor yang ada.

Tabel 6.7 Analisis 5 Force (Meso) Fokus Kawasan Pariwisata

Belum Maksimalnya Pengembangan Kawasan Pariwisata di Sektor Infrastruktur Pendukung Destinasi Pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan			
Parameter	Hipotesa Strategi	Opportunities	Threat
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
Inovasi	44%	Pengadaan event pariwisata Nasional dan Internasional secara berkala untuk memperkenalkan potensi pariwisata Papua ke Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Persaingan antar destinasi wisata di Indonesia Timur yang sudah lebih berkembang dan memiliki keindahan alam yang tidak kalah menarik dari Provinsi Papua
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			
Trend Eksisting	44%	Keindahan pariwisata di Papua menawarkan berbagai jenis pariwisata, seperti Taman Nasional Lorentz yang merupakan wisata adventure dan wisata warisan UNESCO, KPPN Jayawijaya yang menawarkan keindahan alam dan kultur masyarakat asli Papua	Lokasi yang sulit dijangkau serta konflik sosial yang rawan terjadi membatasi jumlah wisatawan yang datang
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
Ketergantungan Saat ini	50%	Optimalisasi infrastruktur pendukung pariwisata di sektor perhubungan (Bandara, pelabuhan dan pelabuhan penyebrangan)	Pariwisata masih sangat tergantung dengan angkutan laut/kapal pesiar/pesawat antar kabupaten/Kota, karena akses darat masih ada yang belum terkoneksi
THREAT OF NEW ENTRANTS			
Tantangan yang Dihadapi	44%	Banyaknya potensi objek wisata baru di Pulau Papua yang masih tersembunyi (Hidden Gem)	Rata - rata kesejahteraan masyarakat di Pulau Papua masih rendah mengakibatkan pengembangan sektor pariwisata belum menjadi prioritas utama
THREAT OF SUBSTITUTES			
Trend Analisis PESTLE	50%	Peluang pengembangan Kawasan Pariwisata di Sulmapa dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta (KPBU)	Mahalnya biaya perjalanan dan terbatasnya pilihan moda transportasi menuju destinasi pariwisata di Provinsi Papua berakibat terbatasnya jumlah wisatawan yang berkunjung

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Fokus pariwisata nilai hipotesa strategi yang paling tinggi adalah *Bargaining Power of Supplies* dan tren analisis *PESTLE*. Hal ini berkaitan langsung dikarenakan sukses atau tidaknya suatu kawasan pariwisata berasal dari internal pariwisata itu sendiri. Jika dari internal sudah berpotensi maka akan lebih mudah untuk mengembangkan kawasan pariwisata tersebut.

Tabel 6.8 Analisis 5 Force (Meso) Fokus Kawasan Perkotaan

Peningkatan kapabilitas kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kegiatan terhadap wilayah di sekitarnya			
Parameter	Hipotesa Strategi	Opportunities	Threat
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
Inovasi	40%	Dukungan legalitas pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pusat perkotaan dan pemerataan pelayanan terhadap wilayah di sekitarnya	Ketidakmampuan pemerintahan transisi DOB di Pulau Papua dalam mengelola pembangunan akan berdampak pada terhambatnya penyediaan pelayanan fasilitas di kawasan pusat perkotaan dan wilayah di sekitarnya
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			
Tren Eksisting	40%	Tingginya potensi investasi berdasarkan dukungan kebijakan serta tren positif pertumbuhan PDRB dan nilai IPM di pusat-pusat perkotaan Pulau Papua	Kerentanan konflik sosial yang kompleks di kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan jika tidak didukung dengan penyelenggaraan kebijakan yang berpihak pada masyarakat setempat serta memperhatikan hukum adat, hak ulayat, dsb
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
Ketergantungan Saat ini	40%	Tingginya perhatian pemerintah pusat dengan adanya dukungan kebijakan-kebijakan strategis di Pulau Papua dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah dapat menjadi momentum untuk pengembangan kawasan perkotaan terutama untuk Ibukota Provinsi Baru	Tingginya ketergantungan terhadap peran pemerintah pusat, investor, dan kawasan perkotaan lainnya di Pulau Papua dapat berdampak pada lambatnya perkembangan daerah untuk mandiri

Peningkatan kapabilitas kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kegiatan terhadap wilayah di sekitarnya			
Parameter	Hipotesa Strategi	Opportunities	Threat
THREAT OF NEW ENTRANTS			
Tantangan yang Dihadapi	40%	Kebijakan investasi di Pulau Papua dapat memicu munculnya sektor ekonomi baru untuk kawasan-kawasan perkotaan dan pemerataan pembangunan pada pusat-pusat kegiatan	Rentan adanya kesenjangan sosial jika pengembangan perkotaan tidak diimbangi dengan kebijakan dukungan pemberdayaan SDM lokal
THREAT OF SUBSTITUTES			
Trend Analisis PESTLE	50%	Tingginya dukungan kebijakan dari skala nasional, provinsi, dan daerah dalam memberikan arahan pemerataan pembangunan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua	Ketidakpastian implementasi dan realisasi kebijakan strategis skala nasional di wilayah Indonesia Timur karena pertimbangan politik, hukum adat, ketersediaan infrastruktur, dan komitmen pemerintah

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kawasan perkotaan parameter yang paling berpengaruh adalah Tren Analisis *PESTLE* yang masuk ke dalam sektor *legal* (kebijakan). Sektor kebijakan merupakan sektor terpenting di kawasan perkotaan dikarenakan pembangunan kawasan perkotaan selalu berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan perkotaan tersebut serta keputusan dan kebijakan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Tabel 6.9 Analisis 5 *Force* (Meso) Fokus Kawasan Perbatasan

Konflik Ekualitas Dalam Perwujudan Aktivitas Pasar Inklusif di Kawasan Perbatasan			
Parameter	Hipotesa Strategi	Opportunities	Threat
RIVALRY AMONG EXISTING COMPETITOR			
Inovasi	45%	Peningkatan peluang ekspor komoditas unggulan dengan diversifikasi produk untuk pemenuhan kebutuhan lokal dan ekspor domestik	Mahalnya investasi dan biaya operasional produksi, upah tenaga kerja di Provinsi Papua pada bahan yang berpotensi untuk export (UMP: Rp. 3,8 Jt) sedangkan SDM di Papua masih rendah (IPM: 61,39)
BARGAINING POWER OF CUSTOMERS			

Konflik Ekualitas Dalam Perwujudan Aktivitas Pasar Inklusif di Kawasan Perbatasan			
Parameter	Hipotesa Strategi	Opportunities	Threat
Trend Eksisting	44%	Semakin tinggi pertukaran informasi dan tingginya teknologi membuka kesempatan bagi pengusaha OAP dalam berkerjasama ke kawasan pasifik selatan	Komoditas dari Australia dan New Zealand lebih mudah masuk karena kerjasama dan jalur distribusi sudah terjalin
BARGAINING POWER OF SUPPLIERS			
Ketergantungan Saat ini	50%	Banyaknya potensi komoditas lokal/pertanian yang belum termanfaatkan karena akses dan jalur distribusi belum terbentuk	Banyak barang modal (<i>tools</i>) didatangkan dari luar negeri perlu transit ke P. Jawa yang mengakibatkan biaya logistik alat modal menjadi tinggi
THREAT OF NEW ENTRANTS			
Tantangan yang Dihadapi	44%	Pemasaran produk dari papua masih tradisional sehingga jangkauan pasar masih terbatas	Komoditas unggulan Provinsi Papua Pegunungan relatif punya karakteristik sama dengan Provinsi lainnya di Pulau Papua artinya belum punya keunggulan kompetitif dan komparatif yang jelas
THREAT OF SUBSTITUTES			
Tren Analisis PESTLE	57%	Masih sedikitnya jumlah export menuju kawasan pasifik selatan dan mempunyai trend yang menurun (2018: \$3,5 Jt - 2022: \$0,6 Jt) Import menuju Provinsi Papua juga lebih banyak daripada impor dan didominasi oleh barang konsumsi	Persaingan kualitas produk dengan negara Australia dan New Zealand yang punya teknologi lebih tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Kawasan perbatasan berkaitan erat dengan sektor ekonomi yang masuk ke parameter Tren analisis *PESTLE*. Perbatasan dan ekonomi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena pengembangan kawasan perbatasan akan langsung berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di sekitar kawasan perbatasan tersebut.

C. Analisis SWOT

Tiga *grand strategy* yang telah dirumuskan akan menghasilkan strategi yang lebih detail menggunakan metode SWOT terhadap masing-masing *grand strategy*. Analisis SWOT dilakukan dengan meninjau faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) pada setiap fokus pengembangan di Provinsi Papua Pegunungan.

Pariwisata

Analisis SWOT untuk fokus pariwisata ditampilkan pada tabel berikut.

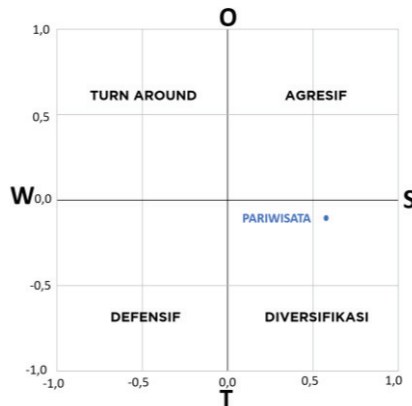
Tabel 6.10 Analisis SWOT Fokus Pariwisata

Strength	Weakness
Potensi wisata terutama wisata alam yang sangat potensial untuk dikembangkan di Provinsi Pariwisata	Pengelolaan pariwisata di KPPN Provinsi Papua Pegunungan yang belum maksimal masih banyak lokasi pariwisata yang belum ada pengelolanya resminya
Keunikan sosial budaya masyarakat asli Papua Pegunungan menjadi daya tarik tersendiri dalam pengembangan pariwisata di destinasi pariwisata	Peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata di kawasan pariwisata masih belum maksimal
Potensi sumber daya manusia yang bisa dikembangkan untuk mendalami sektor pariwisata pendukung destinasi pariwisata	Jumlah wisatawan yang masih sedikit karena destinasi wisata di KPPN Jayawijaya dan Wamena belum terkenal seperti di KSPN Biak
Infrastruktur pendukung baik sektor PUPR/ non PUPR eksisting mendukung pengembangan KPPN Jayawijaya dan KPPN Wamena	Pengembangan pariwisata di KPPN Jayawijaya dan Wamena belum maksimal dikarenakan lebih diprioritaskan untuk pemenuhan standar pelayanan minimum terlebih dahulu
Seluruh KSPN di Provinsi Papua didukung dengan beberapa kawasan pengembangan pariwisata (KPPN) salah satunya di Provinsi Papua Pegunungan sehingga sudah terbentuk kluster pengembangan potensi pariwisata	Wisatawan lokal yang kurang berminat untuk berwisata di Provinsi Papua Pegunungan
Opportunities	Threats
Pengadaan <i>event</i> pariwisata Nasional seperti Festival Budaya Lembah Baliem secara berkala untuk memperkenalkan potensi pariwisata Papua Pegunungan ke	Persaingan antar destinasi wisata di Indonesia Timur yang sudah lebih berkembang dan memiliki keindahan alam yang tidak kalah

Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	menarik dari Provinsi Papua Pegunungan
Keindahan pariwisata di Papua Pegunungan menawarkan berbagai jenis pariwisata, seperti Taman Nasional Lorentz yang merupakan wisata adventure dan wisata warisan UNESCO.	Lokasi yang sulit dijangkau serta konflik sosial yang rawan terjadi membatasi jumlah wisatawan yang datang
Optimalisasi infrastruktur pendukung pariwisata di sektor perhubungan (Bandara dan jalur darat)	Pariwisata masih sangat tergantung dengan angkutan pesawat antar kabupaten/Kota.
Banyaknya potensi objek wisata baru di Provinsi Papua Pegunungan yang masih tersembunyi (<i>Hidden Gem</i>)	Rata-rata kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan masih rendah mengakibatkan pengembangan sektor pariwisata belum menjadi prioritas utama
Peluang pengembangan Kawasan Pariwisata di Sulmapa dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah dengan swasta (KPBU)	Mahalnya biaya perjalanan dan terbatasnya pilihan moda transportasi menuju destinasi pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan berakibat terbatasnya jumlah wisatawan yang berkunjung

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil pembobotan untuk sektor pariwisata didapatkan skor untuk faktor internal (*Strength & Weakness*) sebesar 0,65 dan faktor eksternal (*Opportunity & Threat*) sebesar -0,21 Skor tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus pariwisata berada pada kuadran diversifikasi, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strengths*) dan menjawab tantangan (*threats*).



Gambar 6.5 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Pariwisata

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Fokus pariwisata masuk ke kuadran diversifikasi sudah sesuai dengan kondisi pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan. Kondisi internal pariwisata tersebut sudah sangat kuat didukung kondisi sumber daya alam yang mendukung namun terkendala banyak hal dari luar sektor pariwisata tersebut seperti ancaman keamanan, infrastruktur perhubungan pendukung pariwisata yang masih belum mumpuni dan persaingan dengan destinasi pariwisata lain yang sudah lebih berkembang dari destinasi pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan.

Dari hasil pembobotan *strengths*, *weaknesses*, *opportunities* dan *threats*, fokus Pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan dikembangkan dengan strategi diversifikasi, yakni strategi:

1. Penyediaan dan optimalisasi infrastruktur pendukung pariwisata untuk membuka potensi wisata baru dan meningkatkan kualitas pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan (S1-S4-T1-T2-T5);
2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pengembangan potensi sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan yang kompeten (S2-S3-T2-T4);
3. Peningkatan fasilitas perhubungan (bandara) yang mendukung kawasan pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan (S4-T3-T5).

Kawasan Perkotaan

Analisis SWOT untuk fokus kawasan perkotaan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6.11 Analisis SWOT Fokus Kawasan Perkotaan

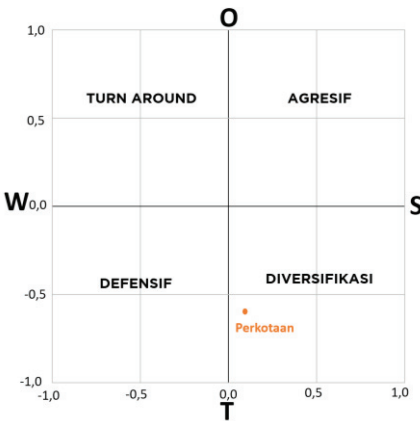
Strength	Weakness
Perkembangan sektor ekonomi wilayah yang berpotensi ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dengan tren positif yaitu 15,16% (2022) dan 2,39% (2021)	Terbatas dan belum meratanya pelayanan infrastruktur penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi di PKN/ PKW Prov. Papua
Sebaran PKN/ PKW yang berperan sebagai titik pusat pelayanan wilayah di sekitarnya, seperti 1. PKN Jayapura dengan Kab. Keerom, Kab. Jayapura 2. PKN Merauke dengan Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi 3. PKN Timika dengan Kab. Asmat, Kab. Intan Jaya, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya 4. PKW Nabire dengan Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai 5. PKW Wamena dengan Kab. Lanny Jaya, Kab. Tolikara 6. PKW Biak dengan Kab. Supiori, Kab. Kep. Yapen	Tingginya jumlah penduduk miskin Prov. Papua mencapai 920.440 jiwa atau 27,38%
Nilai IPM yang bertumbuh di Prov. Papua, yaitu 60,44 (2020) dan 60,62 (2021)	Terbatasnya aksesibilitas moda darat antar pusat kegiatan wilayah perkotaan yaitu antara 1. PKW Nabire-PKN Timika 2. PKW Wamena-PKN Merauke 3. PKW Sarmi-PKW Nabire 4. PKN Jayapura-PKN Merauke
Pendistribusian sektor perekonomian PDRB yang bervariasi di Prov. Papua seperti Pertambangan 38,60%; Pertanian 10,30%; Konstruksi 13,75%; Perdagangan 9,20%; Administrasi Pemerintahan 8,53% dengan distribusi di wilayah perkotaan: 1. PKN Jayapura 13,51%	Tidak tersedianya infrastruktur memadai dalam mendukung kegiatan pemerintahan Ibukota DOB seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan sanitasi, bangunan/gedung pemerintahan, hunian pegawai, dan penyediaan listrik

2. PKN Merauke 6,61% 3. PKN Timika 42,11% 4. PKW Nabire 4,84% 5. PKW Wamena 3,5% 6. PKW Biak 2,24%	
Luasnya lahan yang belum terbangun di perkotaan PKN/ PKW dan Ibukota DOB yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan, pusat kegiatan, dan pelayanan	Terbatasnya pelayanan rute moda transportasi (darat/ laut/ udara) untuk orang/ barang antar wilayah dalam mendukung kegiatan perekonomian di PKN/ PKW dengan <i>hinterland</i> di sekitarnya
Opportunities	Threats
Dukungan legalitas pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pusat perkotaan dan pemerataan pelayanan terhadap wilayah di sekitarnya	Ketidakmampuan pemerintahan transisi DOB di Pulau Papua dalam mengelola pembangunan akan berdampak pada terhambatnya penyediaan pelayanan fasilitas di kawasan pusat perkotaan dan wilayah di sekitarnya
Tingginya potensi investasi berdasarkan dukungan kebijakan serta tren positif pertumbuhan PDRB dan nilai IPM di pusat-pusat perkotaan Pulau Papua	Kerentanan konflik sosial yang kompleks di kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan jika tidak didukung dengan penyelenggaraan kebijakan yang berpihak pada masyarakat setempat serta memperhatikan hukum adat, hak ulayat, dsb
Tingginya perhatian pemerintah pusat dengan adanya dukungan kebijakan-kebijakan strategis di Pulau Papua dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah dapat menjadi momentum untuk pengembangan kawasan perkotaan terutama untuk Ibukota Provinsi Baru	Tingginya ketergantungan terhadap peran pemerintah pusat, investor, dan kawasan perkotaan lainnya di Pulau Papua dapat berdampak pada lambatnya perkembangan daerah untuk mandiri
Kebijakan investasi di Pulau Papua dapat memicu munculnya sektor ekonomi baru untuk kawasan-kawasan perkotaan dan pemerataan pembangunan pada pusat-pusat kegiatan	Rentan adanya kesenjangan sosial jika pengembangan perkotaan tidak diimbangi dengan kebijakan dukungan pemberdayaan SDM lokal
Tingginya dukungan kebijakan dari skala nasional, provinsi, dan daerah dalam memberikan	Ketidakpastian implementasi dan realisasi kebijakan strategis skala nasional di wilayah

arahan pembangunan perkotaan sebagai pusat pelayanan di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua	pemerataan kawasan sebagai pusat Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan	Indonesia Timur karena pertimbangan politik, hukum adat, ketersediaan infrastruktur, dan komitmen pemerintah
---	--	--

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil pembobotan untuk sektor perkotaan didapatkan skor untuk faktor internal sebesar 0,11 dan faktor eksternal sebesar -0,57. Skor tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus perkotaan berada pada kuadran diversifikasi, yang berarti bahwa strategi pengembangan dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strengths*) dan menjawab tantangan (*threats*).



Gambar 6.6 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Perkotaan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Fokus kawasan perkotaan masuk ke kuadran diversifikasi. Kondisi ini sudah sesuai dikarenakan kawasan perkotaan termasuk sektor yang paling penting karena kegiatan masyarakat berpusat di pusat perkotaan tersebut mengolah komoditas-komoditas yang diproduksi di hinterland kawasan tersebut. Namun tantangan yang ada juga sangat kompleks karena langsung bersinggungan dengan pemerintah dan peraturan-peraturan yang akan berpengaruh langsung ke kawasan perkotaan tersebut.

Hasil pembobotan *strengths*, *weaknesses*, *opportunities* dan *threats*, fokus kawasan perkotaan di Provinsi Papua (pra DOB, 2022) dikembangkan dengan strategi diversifikasi, yakni strategi:

1. Peningkatkan kapasitas SDM lokal dalam kegiatan ekonomi perkotaan yang bervariasi di Prov. Papua (pra DOB, 2022) (S3-S4-T4);
2. Meningkatkan peran dan keterlibatan stakeholder pentahelix (pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat) dalam membangun kawasan perkotaan PKN/PKW Prov. Papua (pra DOB, 2022) (S1-T5);
3. Meningkatkan kapasitas pelayanan infrastruktur dan fasilitas publik dari perkotaan PKN/PKW melalui pemanfaatan investasi untuk mendukung wilayah hinterland di sekitarnya (S2-S5-T3).

Perbatasan

Analisis SWOT untuk fokus perbatasan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 6.12 Analisis SWOT Fokus Perbatasan

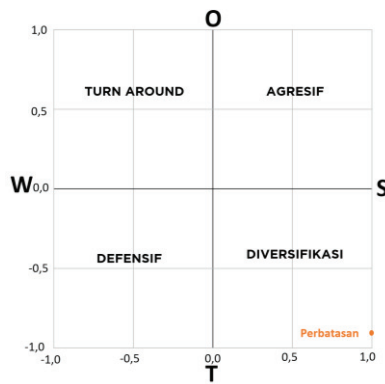
Strength	Weakness
Terdapat Infrastruktur perlintasan batas sudah terbangun dengan baik	Masih terdapat perlintasan ilegal, mengakibatkan banyak perdagangan ilegal yang merugikan negara
Akses dari kawasan perbatasan menuju kawasan perkotaan di provinsi Papua Pegunungan sudah terdapat jalan nasional (masih proses pembangunan di ruas Towe Hitam- Oksibil)	Belum ada transportasi umum yang secara rutin untuk melayani kawasan perbatasan/PLBN
Didukung penuh oleh pemerintah pusat lewat program dari Kementerian dan Lembaga	Terbatasnya aktivitas yang dapat dilakukan pada kawasan perbatasan
Pemenuhan kebutuhan dan Kemudahan perdagangan Masyarakat RI-Papua New Guinea menggunakan rupiah/ kina dalam bertransaksi dengan pedagang Indonesia	Ketergantungan dengan dukungan pemerintah pusat
Menjadi tempat pertukaran budaya antar dua negara (RI-PNG)	Belum maksimalnya hasil produk unggulan lokal diperdagangkan, dan masih mengandalkan pemenuhan komoditas yang dimpor pula dari pulau jawa bukan hasil

	komoditas asli dari papua (sabun, shampoo, onderdil motor, oli, elektronik)
Opportunities	Threats
Peningkatan peluang ekspor komoditas unggulan dengan diversifikasi produk untuk pemenuhan kebutuhan lokal dan ekspor domestik	Mahalnya investasi dan biaya operasional produksi, upah tenaga kerja di Provinsi Papua pada bahan yang berpotensi untuk export (UMP : Rp. 3,8 Jt) sedangkan SDM di Papua masih rendah (IPM: 61,39)
Semakin tinggi pertukaran informasi dan tingginya teknologi membuka kesempatan bagi pengusaha OAP dalam berkerjasama ke kawasan pasifik selatan	Komoditas dari Australia dan New Zealand lebih mudah masuk karena kerjasama dan jalur distribusi sudah terjalin
Banyaknya potensi komoditas lokal/pertanian yang belum termanfaatkan karena akses dan jalur distribusi belum terbentuk	Banyak barang modal (tools) didatangkan dari luar negeri perlu transit ke P. Jawa yang mengakibatkan biaya logistik alat modal menjadi tinggi
Pemasaran produk dari papua Pegunungan masih tradisional sehingga jangkauan pasar masih terbatas	Komoditas unggulan Provinsi Papua Pegunungan relatif punya karakteristik sama dengan Provinsi Papua Barat artinya belum punya keunggulan kompetitif dan komparatif yang jelas
Masih sedikitnya jumlah export menuju kawasan pasifik selatan dan mempunyai trend yang menurun (2018 : \$3,5 Jt - 2022: \$0,6 Jt) Import menuju Provinsi Papua juga lebih banyak daripada impor dan didominasi oleh barang konsumsi	Persaingan kualitas produk dengan negara Australia dan New Zealand yang punya teknologi lebih tinggi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Hasil pembobotan untuk sektor perbatasan didapatkan skor untuk faktor internal sebesar 1,05 dan faktor eksternal sebesar - 0,8. Skor tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem koordinat kartesius untuk menentukan strategi pengembangan. Pengembangan fokus perbatasan berada pada kuadran diversifikasi, yang berarti bahwa strategi pengembangan

dilakukan dengan memperkuat faktor kekuatan (*strength*) dan menjawab tantangan (*threat*).



Gambar 6.7 Kuadran Kartesius Penentuan Strategi Fokus Perbatasan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Fokus kawasan perbatasan masuk ke kuadran diversifikasi. *Strength* dalam fokus perbatasan sangat kuat dikarenakan Provinsi Papua (pra DOB, 2022) langsung berbatasan dengan Negara Papua Nugini. Sehingga perlu untuk dikembangkan lebih baik. Walau *strength*nya sangat kuat namun ancamannya juga besar terkait dengan keamanan di daerah perbatasan negara, kondisi diplomatik dari kedua negara yang berbatasan hingga susahny kondisi geografis di perbatasan negara untuk mengembangkan kawasan di sekitar perbatasan negara tersebut.

Dari hasil pembobotan *strengths*, *weaknesses*, *opportunities* dan *threats*, fokus Perbatasan di Provinsi Papua Pegunungan dikembangkan dengan strategi diversifikasi, yakni strategi:

1. Peningkatan SDM melalui peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan;
2. Pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan daerah perbatasan;
3. intervensi terkait pengadaan barang modal yang dapat menurunkan biaya produksi seperti peningkatan aksesibilitas di darat lewat jalan perbatasan;
4. Galeri pemasaran produk ataupun peningkatan peran serta kelembagaan pada kawasan perbatasan untuk meningkatkan kepercayaan dan sebagai sumber informasi resmi pada kawasan perbatasan;

5. Pengadaan sarana transportasi umum darat untuk meningkatkan konektivitas darat di kawasan perbatasan.

6.3 Skenario Pengembangan

Sub bab ini menjelaskan bagaimana proses dari penentuan kawasan prioritas serta tahapan penanganannya yang didasari pada potensi permasalahan kawasan, isu strategis, dan strategi pengembangan wilayah. Adapun prioritas dan pentahapan pengembangan dilakukan untuk mengoptimalkan isu strategis dan grand strategi pada masing-masing sektor.

A. Pariwisata

Penilaian dan penentuan prioritisasi kawasan pariwisata didasari oleh 5 kriteria yaitu (I) Kawasan yang masuk dalam RPJMN 2020 - 2024, (II) Kawasan yang masuk dalam PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Nasional, (III) Terdapat Bandara Pelabuhan di sekitar kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan pariwisata, (IV) Kesiapan Pemda untuk mengembangkan kawasan pariwisata di daerah tersebut, (V) Sudah memenuhi aspek amenities dan atraksi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.13 Parameter Penilaian Fokus Pariwisata

No	Parameter	Penilaian	
1	Kawasan yang masuk dalam RPJMN 2020 - 2024	3: Masuk dalam narasi RPJMN dan menjadi prioritas 2: Masuk dalam narasi RPJMN namun bukan prioritas 1 Tidak masuk dalam narasi RPJMN	1,2,3
2	Kawasan yang masuk dalam PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional	3:Masuk dalam peraturan dan menjadi prioritas 2:Masuk dalam peraturan namun bukan prioritas 1: Tidak masuk dalam peraturan	1,2,3
3	Terdapat Bandara/ Pelabuhan di sekitar kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan pariwisata	3 : Terdapat bandara atau Pelabuhan yang mendukung pariwisata 2: Terdapat bandara atau pelabuhan namun tidak langsung mendukung pariwisata	1,2,3

No	Parameter	Penilaian	
		1 : Tidak terdapat bandara atau pelabuhan disekitar kawasan tersebut	
4	Kesiapan pemda untuk mengembangkan kawasan pariwisata di daerah tersebut	3: Pemda siap memprioritaskan sektor pariwisata 2:Sektor pariwisata tidak menjadi prioritas utama 1: Masih fokus ke pemenuhan SPM	1,2,3
5	Sudah memenuhi aspek amenities dan atraksi	3: sudah memenuhi kedua aspek tersebut (amenitas dan atraksi) 2: Memenuhi salah satu dari aspek tersebut 1: Tidak memenuhi kedua aspek tersebut	1,2,3

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selanjutnya dilakukan penilaian untuk penentuan kawasan prioritas berdasarkan kriteria dan parameter yang telah ditentukan. Hasil perhitungan kawasan prioritas untuk fokus pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 6.14 Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Pariwisata

Kawasan Perkotaan								
No	Indikasi Kawasan	Pemilihan Kawasan Prioritas					Total Point	Prioritas
		I	II	III	IV	V		
1	Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) Wamena	1	3	2	2	2	10	1
2	Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) Jayawijaya	1	3	2	1	1	8	2

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa prioritas sektor kawasan pariwisata yaitu Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional (KPPN) Wamena.

B. Kawasan Perkotaan

Penilaian dan penentuan prioritisasi Kawasan Perkotaan didasari oleh 5 kriteria yaitu (I) Kawasan terdapat di RTRWN PP No.13 Tahun 2017, (II) Kawasan terdapat di RTRW Provinsi Papua, (III) Kawasan berkaitan dengan pengembangan DOB Baru Provinsi Papua, (IV) Kesiapan pemda untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan tersebut, (V) Kawasan dalam Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW) karena PKN sudah pasti menjadi perhatian pemerintah pusat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.15 Parameter Penilaian Fokus Kawasan Perkotaan

No	Parameter	Penilaian	
1	Terdapat di RTRWN PP No. 13 Tahun 2017	1: Kawasan terdapat di dokumen RTRWN 0: tidak masuk dalam dokumen RTRWN	1,0
2	Terdapat di RTRW Provinsi Papua	1: kawasan terdapat di dokumen RTRW Prov. Papua 0: Tidak masuk dalam dokumen RTRW	1,0
3	Berkaitan untuk pengembangan DOB Baru Provinsi Papua	1: Kawasan berkaitan dengan pengembangan DOB 0: Tidak berkaitan dengan pengembangan DOB	1,0
4	Kesiapan pemda untuk mendukung pengembangan kawasan perkotaan tersebut	1: Pemda siap mendukung 0: Pemda tidak siap mendukung	1,0
5	Termasuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), karena PKN sudah pasti menjadi perhatian pemerintah pusat	1: Kawasan merupakan PKW 0: Kawasan bukan merupakan PKW	1,0

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selanjutnya dilakukan penilaian untuk penentuan kawasan prioritas berdasarkan kriteria dan parameter yang telah ditentukan. Hasil perhitungan kawasan prioritas untuk fokus perkotaan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.16 Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Perkotaan

Kawasan Perkotaan								
No	Indikasi Kawasan	Pemilihan Kawasan Prioritas					Total Point	Prioritas
		I	II	III	IV	V		
1	PKW Wamena	1	1	1	1	1	5	1
2	Kota Baru Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	0	0	1	1	0	2	2
3	Perkotaan Oksibil (usulan baru)	0	0	0	0	0	0	3

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa prioritas sektor kawasan perkotaan yaitu PKW Wamena.

C. Perbatasan

Penilaian dan penentuan prioritisasi perbatasan didasari oleh 4 kriteria yaitu (I) Kawasan terdapat di PP No.13 Tahun 2017 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (II) PLBN yang sudah terbangun di PKSN tersebut, (III) Kawasan terdapat di RPJMN 2020 - 2024, (IV) Kawasan terdapat di Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020 - 2024 Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.17 Parameter Penilaian Fokus Perbatasan

No	Parameter	Penilaian	
1	Kawasan terdapat di PP No.13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	3: masuk dalam narasi RTRWN dan menjadi prioritas 1: Tidak masuk dalam narasi RTRWN 2017	3,1
2	PLBN yang sudah terbangun di PKSN tersebut	3: Sudah terbangun PLBN 1: Belum ada PLBN yang terbangun	3,1
3	Kawasan Terdapat di RPJMN 2020 - 2024	3: Masuk dalam narasi RPJMN dan menjadi prioritas 2: Masuk dalam narasi RPJMN namun bukan prioritas 1: Tidak masuk dalam narasi RPJMN	3,2,1
4	Kawasan terdapat di Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024	3: Terdapat dukungan instruksi Presiden 1: belum terdapat instruksi Presiden	3,1

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Selanjutnya dilakukan penilaian untuk penentuan kawasan prioritas berdasarkan kriteria dan parameter yang telah ditentukan. Hasil perhitungan kawasan prioritas untuk fokus Perbatasan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.18 Penentuan Kawasan Prioritas Sektor Perbatasan

Kawasan Perbatasan							
No	Indikasi Kawasan	Pemilihan Kawasan Prioritas				Total Point	Prioritas
		I	II	III	IV		
1	Lokasi Prioritas Perbatasan Kab. Pegunungan Bintang	1	1	2	3	7	1

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa prioritas sektor kawasan perbatasan yaitu Lokasi Prioritas Perbatasan Kab. Pegunungan Bintang.



BAB 7

ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR



BAB VII ANALISIS KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR

7.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Wilayah di Provinsi Papua Pegunungan

7.1.1 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi Papua Pegunungan

A. Analisis Kebutuhan Air Baku

Provinsi Papua Pegunungan dilalui oleh banyak sungai, yang tercakup dalam 2 (dua) wilayah sungai (WS) kewenangan nasional, yaitu WS Einlanden-Dogoel-Bikuma, WS Mamberamo-Tami-Apauvar, Keberadaan WS tersebut mampu mencukupi kebutuhan domestik maupun non domestik di Provinsi Papua Pegunungan apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

Dari hasil analisis, untuk tahun 2034 diperlukan sekitar 1.160 liter/detik untuk memenuhi kebutuhan domestik dan kawasan-kawasan prioritas nasional di Provinsi Papua, dengan perhitungan menggunakan asumsi sebagai berikut:

- Kebutuhan domestik untuk Kota 150 ltr/org/hari; untuk Kabupaten 60 ltr/org/hari;
- Kebutuhan Kawasan Industri dan Pelabuhan 50 ltr/org/hari;
- Kebutuhan SKPT: 50 ltr/org/hari;
- Kebutuhan wisatawan diasumsikan pada hari maksimal;
- Kebutuhan air untuk wisatawan: menggunakan asumsi 60 ltr/org/hari;
- Kebutuhan proses produksi pada Kawasan Industri maupun Sentra Produksi 0,55-0,75 liter/detik/Ha; dan
- Kebutuhan irigasi 1,6 liter/detik/ha.

Adapun analisis lebih rinci mengenai kebutuhan infrastruktur sumber daya air di Provinsi Papua Pegunungan diuraikan pada halaman selanjutnya.

Tabel 7.1 Kebutuhan Air Baku di Provinsi Papua Pegunungan

Kabupaten/Kota	Peruntukan	Kebutuhan (litr/dtk)		Air Baku Eksisting (*asumsi) (litr/detik) Tahun 2021	GAP (litr/detik)	
		Tahun 2021	Tahun 2034		Tahun 2021	Tahun 2034
Jayawijaya	Domestik		233			
	PKW Wamena					
	KPPN Jayawijaya	204	2	48	156	203
	KPPN Wamena dsk		1			
	Perkotaan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan		15			
Yalimo	Domestik	60	74	39	20	35
Yahukimo	Domestik	180	212	91	89	121
	Perkotaan Sumohai					
Pegunungan Bintang	Domestik		84			
	KSN Perbatasan Papua	71	5	77	0	12
	Perkotaan Oksibil (usulan baru)					
	PLBN Batom		0,46			
Tolikara	Domestik	132	159	66	66	93
Nduga	Domestik	95	117	18	77	99
Lanny Jaya	Domestik	170	202	54	116	148
	Perkotaan Tiom					
Mamberamo Tengah	Domestik	46	56	67	0	0
Provinsi Papua Pegunungan		958	1.160	460	524	711

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

B. Analisis Kebutuhan Irigasi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.14/PRT/M/2015 menyatakan luas daerah irigasi kewenangan pusat di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 3.200 hektare. Selain itu, untuk kebutuhan irigasi sampai dengan tahun 2034 terdapat penambahan kebutuhan irigasi untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian

Adapun rincian kebutuhan irigasi yang terdapat di Provinsi Papua Pegunungan yaitu sebagai berikut:

Tabel 7.2 Daerah Irigasi di Provinsi Papua Pegunungan

Lokasi	Nama Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Kewenangan
Kabupaten Yahukimo	Yahukimo	3.200	Pemerintah Pusat

Sumber: Permen PUPR No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi

*Rencana Penambahan Hingga Tahun 2029

7.1.2 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua Pegunungan

Analisis kesenjangan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Papua Pegunungan merupakan kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah. Berikut analisis kebutuhan pembangunan jaringan jalan di Provinsi Papua Pegunungan.

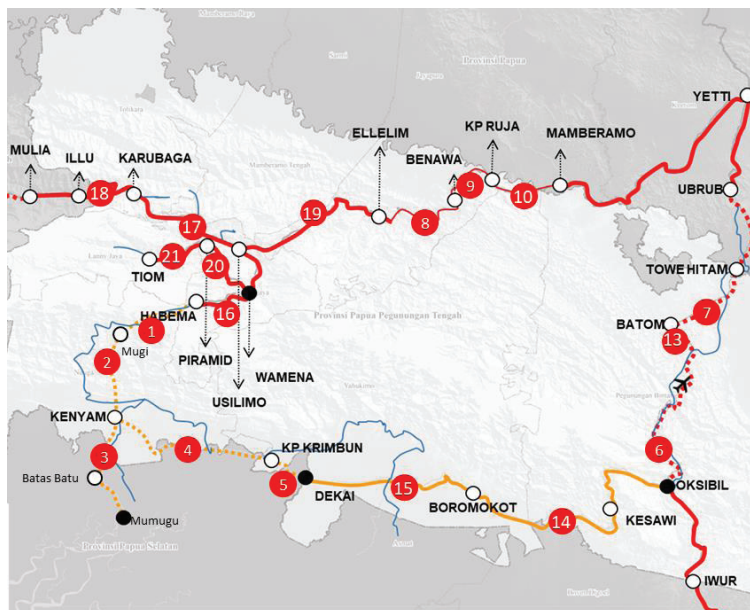
Tabel 7.3 Analisis Pembangunan dan Penanganan Jalan di Provinsi Papua Pegunungan

No	Kebutuhan Jalan	Indikasi Panjang Jalan (km)	Analisis Konektivitas
1	Pembangunan Jalan Habema – Mugi	67	• Meningkatkan konektivitas ke Kab. Nduga • Membuka keterisolasian Kab. Nduga agar terhubung dengan ibukota Provinsi Papua Pegunungan
2	Pembangunan Jalan Mugi – Kenyam	52	• Meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan wilayah
3	Pembangunan Jalan Kenyam – Batas Batu	23	
4	Pembangunan Jalan Kenyam – Kp. Rimbun	51	▪ Meningkatkan konektivitas ke Kab. Nduga

No	Kebutuhan Jalan	Indikasi Panjang Jalan (km)	Analisis Konektivitas
			▪ Membuka keterisolasian Kab. Nduga agar terhubung dengan ibukota Provinsi Papua Pegunungan ▪ Meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan wilayah
5	Pembangunan Jalan Kp. Rimbun - Dekai	77	
6	Pembangunan Jalan Oksibil - Batom	65	▪ Mendukung pertahanan dan keamanan negara ▪ Peningkatan hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan wilayah
7	Pembangunan Jalan Batom - Towe Hitam	64	▪ Meningkatkan akses perbatasan negara
8	Pembangunan Jalan Elelim - Benawa	57	▪ Penghubung dengan PKN Jayapura dan PKN Merauke ▪ Meningkatkan konektivitas dalam pengembangan wilayah ▪ Meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan (kopi wamena menuju ke Kota Jayapura sebagai pusat pertumbuhan)
9	Pembangunan Jalan Benawa - Kp. Ruja	49	
10	Pembangunan Jalan Kp. Ruja - Mamberamo Tengah	92	
11	Pembangunan Jalan Akses Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	Lokasi Belum Definitif	▪ Mendukung perwujudan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan ▪ Menciptakan pusat pertumbuhan baru
12	Pembangunan Jalan Akses Perkotaan Oksibil (Peg. Bintang)	Lokasi Belum Definitif	▪ Mendorong pengembangan wilayah di provinsi baru ▪ Mendukung pertahanan dan keamanan
13	Pembangunan Jalan Akses PLB Batom	Lokasi belum definitif	▪ Mendukung pertahanan dan keamanan negara ▪ Pengembangan kawasan pegunungan tengah Papua
14	Peningkatan Jalan Oksibil - Sersedala	32	Kemantapan jalan 74,91% dari 126,00 km

No	Kebutuhan Jalan	Indikasi Panjang Jalan (km)	Analisis Konektivitas
15	Peningkatan Jalan Seredala - Dekai	11	Kemantapan jalan 89,38% dari 99,30 km
16	Peningkatan Jalan Wamena - Habema	12	Kemantapan jalan 66,38% dari 35,48 km
17	Peningkatan Jalan Usilimo - Karubaga	29	Kemantapan jalan 58,71% dari 70,10 km
18	Peningkatan Jalan Karubaga - Illu - Mulia	51	Kemantapan jalan 39,98% dari 85,00 km
19	Peningkatan Jalan Elelim - Pasvaley-Bts. Kota Wamena	19	Kemantapan jalan 85,37% dari 128,25 km
20	Peningkatan Jalan Bts. Kota Wamena - Piramid	4	Kemantapan jalan 86,25% dari 27,63 km
21	Peningkatan Jalan Piramid - Tiom	22	Kemantapan jalan 49,11% dari 44,13 km

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023



Gambar 7.1 Kebutuhan Pembangunan dan Penanganan Jalan di Provinsi Papua Pegunungan

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

7.1.3 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Permukiman di Provinsi Papua Pegunungan

A. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Sektor Air Minum di Provinsi Papua Pegunungan

Ketersediaan air minum ini menjadi salah satu tolak ukur tingkat kesehatan yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat suatu daerah, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan akan air minum dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Pengelolaan air bersih di Provinsi Papua Pegunungan pada umumnya diselenggarakan oleh PDAM, namun belum semua Kabupaten dan Kota memiliki PDAM, sehingga pengelolaannya dilakukan oleh UPTD ataupun Dinas terkait. Sedangkan untuk kelompok masyarakat lainnya dipenuhi oleh sistem penyediaan air minum pedesaan (PAMSIMAS), serta sistem Penampungan Air Hujan (SPAH) ataupun pemenuhan secara mandiri.

Penyediaan air bersih direncanakan untuk dapat melayani kebutuhan non domestik seperti layanan komersil kegiatan pariwisata. Berikut ini disajikan perhitungan kebutuhan masing-masing peruntukan.

Tabel 7.4 Jumlah dan Kapasitas SPAM Terpasang di Provinsi Papua Pegunungan

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2021 (jiwa)	Kapasitas Terpasang (ltr/detik)*	Pengelola	Pelayanan (unit)			
					SR	HU*	KU*	PAH*
1	Kabupaten Jayawijaya	222.465	40	PDAM	752	26	12	19
2	Kabupaten Yalimo	65.261	33		1.625	0	32	0
3	Kabupaten Yahukimo	196.585	76	UPTD	310	22	99	10
4	Kabupaten Pegunungan Bintang	77.760	64	UPTD	964	8	41	6
5	Kabupaten Tolikara	144.158	55	Proses UPTD	1.993	0	193	0

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Tahun 2021 (jiwa)	Kapasitas Terpasang (ltr/detik)*	Pengelola	Pelayanan (unit)			
					SR	HU*	KU*	PAH*
6	Kabupaten Nduga	103.386	15	-	1.100	0	8	20
7	Kabupaten Lanny Jaya	185.757	45	-	0	19	4	20
8	Kabupaten Mamberamo Tengah	50.406	56	-	625	0	4	0
Jumlah		1.045.778	384		7.369	75	393	75

Sumber: Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Kelembagaan
SPAM Prov. Papua, 2021

* Keterangan: SR = sambungan rumah
HU = hidran umum
KU = kran umum
PAH = penampungan air hujan

Perhitungan Kebutuhan Air

Dalam perencanaan perhitungan kebutuhan sektor air minum, terdapat beberapa dasar dan asumsi yang digunakan, yaitu :

1. Infrastruktur air minum harus mampu melayani kebutuhan harian untuk populasi (domestik), wisatawan untuk kawasan pariwisata, kebutuhan domestik di kawasan industri, kawasan pertanian maupun kawasan peternakan dan amenities lainnya
2. Data proyeksi populasi mengacu pada perhitungan dari analisis demografi
3. Perhitungan pemenuhan kebutuhan air minum dihitung sebagai kegiatan non domestik juga memperkirakan adanya kebocoran air
4. Perhitungan proyeksi kebutuhan air minum dilakukan untuk semua Kabupaten/ Kota yang ada di Pulau Papua
5. Proyeksi Penambahan penduduk untuk kawasan-kawasan pengembangan baru dilakukan berdasarkan asumsi dan standar sesuai dengan rencana pengembangan kawasan.
6. Kebutuhan air bersih untuk Kabupaten/ Kota dengan Status PKN/ PKW, kebutuhan air menggunakan standar sebesar 150 ltr/ org/ hari, sedangkan untuk diluar PKN dan PKW standar kebutuhan air menggunakan 60 ltr/ orng/ hari.

RPWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

Tabel 7.5 Kebutuhan Air Minum di Provinsi Papua Pegunungan untuk Kegiatan Domestik

Kabupaten/ Kota	Kebutuhan Air Bersih Domestik (lt/detik)				Kebutuhan Air Bersih Non Domestik 10% dari Kebutuhan Domestik (lt/detik)				Kehilangan Air 20% dari Kebutuhan Domestik dan Kebutuhan Non Domestik (lt/detik)				Grand Total Kebutuhan Air Bersih (lt/detik)			
	2022	2029	2034		2022	2029	2034		2022	2029	2034		2022	2029	2034	
Jayawijaya	156	168	177		16	17	18		34	37	39		206	222	233	
Yalimo	46	52	56		5	5	6		10	11	12		61	69	74	
Yahukimo	138	151	160		14	15	16		30	33	35		183	200	212	
Pegunungan Bintang	55	60	64		5	6	6		12	13	14		72	79	84	
Tolikara	102	113	121		10	11	12		22	25	27		134	149	159	
Nduga	73	82	89		7	8	9		16	18	20		97	109	117	
Lanny Jaya	131	144	153		13	14	15		29	32	34		173	190	202	
Mamberamo Tengah	36	40	43		4	4	4		8	9	9		47	52	56	
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	737	810	863		74	80	86		161	178	190		973	1.070	1.137	

Catatan: **AaBbCc...**(**Bold**): Ibu Kota Provinsi
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berikutnya dilakukan perhitungan kebutuhan air minum dengan mempertimbangkan penambahan jumlah penduduk sesuai dengan skenario pengembangan wilayah yang dijelaskan pada Bab 6.

Tabel 7.6 Kebutuhan Air Minum di Provinsi Papua Pegunungan Sesuai dengan Rencana Pengembangan Kawasan Tahun 2034

Kabupaten	Kawasan Pengembangan	Jumlah Penduduk 2021 (jiwa)	Kebutuhan 2021 (l/dt)	Kapasitas Produksi l/dt	GAP 2021 l/dt	Jumlah Penduduk 2034 (jiwa)	Kebutuhan 2034 (l/dt)	Gap 2034 (l/dt)
Jayawijaya	Domestik					254.687	234	- 211
	PKW Wamena						2	
	KPPN Jayawijaya					1.000		
	KPPN Wamena dsk	222.465	204	40	-164	500	1	251
	Perkotaan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan					8.000	15	
Yalimo	Domestik	65.261	59,82	32,88	-27	80.880	74	- 41
Yahukimo	Domestik	196.585	180,20	75,88	-104	231.018	212	- 136
Pegunungan Bintang	Domestik					91.470	84	- 25
	KSN Perbatasan Papua							
	Perkotaan Oksibil (usulan baru)	77.760	71	64	-7	96.470	5	
	PLBN Batom					500	0,46	
	Domestik	144.158	132	55	-77	173.849	159	- 104
Tolikara	Domestik	103.386	95	15	-80	127.872	117	- 102
Nduga	Domestik	185.757	170	45	- 125	220.756	202	- 157
Lanny Jaya	Domestik							
Mamberamo Tengah	Perkotaan Tiom	50.406	46	56	10	61.405	56	- 0,29
TOTAL		1.045.778	958	384	-574	1.175.492	1.160	-776

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampai dengan tahun 2034, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih berdasarkan skenario pengembangan wilayah yang direncanakan, memerlukan penambahan debit air minum sebesar 776 ltr/ detik.

Pemenuhan kebutuhan Infrastruktur penyediaan air minum ini akan menjadi tugas dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi sampai dengan tugas dari pemerintah pusat.

B. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Air Limbah di Provinsi Papua Pegunungan

Pengembangan SPAL di Provinsi Papua Pegunungan masih menggunakan sistem setempat, baik individual maupun komunal yaitu berupa Tangki Septik Individual ataupun komunal. Berdasarkan data BPS di Provinsi Papua (pra DOB, 2022) Akses Sanitasi Layak Provinsi Papua mencapai 45,54%; masih terdapat GAP 36,53% dengan Renstra PUPR untuk tahun 2022 yaitu 82,07%.

Proyeksi dan perhitungan kebutuhan Instalasi pengolahan limbah (IPAL atau IPLT) sesuai dengan rencana/skenario pengembangan wilayah dan kawasan prioritas. Asumsi timbulan air limbah adalah 80% dari kebutuhan air minum, sedangkan untuk pengelolaan skenario yang direncanakan pada akhir tahun perencanaan (2029) Akses Aman 20%, Akses Layak 80 dan Babs 0%

Tabel 7.7 Perhitungan Kebutuhan Penanganan Air Limbah Domestik di Provinsi Papua Pegunungan Sesuai dengan Rencana Pengembangan Kawasan

Kabupaten	Kawasan Pengembangan	Jumlah Penduduk 2021 (jiwa)	Jumlah Penduduk 2034 (jiwa)	Akses Aman 2021	Akses Dasar 2021	Tidak Ada Akses 2021	Akses Aman 20% (jiwa)	Gap 2034 (l/dt)
Jayawijaya	Domestik	254.687			79.322	123.312	50.937	-33.006
	PKW Wamena							
	KPPN Jayawijaya	1.000					200	
	KPPN Wamena dsk	222.465	264.187	19.831			100	52.837
Yalimo	Perkotaan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan		8.000				1.600	
	Domestik	65.261	80.880	50	205	65.006	16.176	-16.126
Yahukimo	Domestik	196.585	231.018	7.230	28.922	160.433	46.203	-38.974
	Perkotaan Sumohai						46.204	
Pegunungan Bintang	Domestik	91.470			27.179	43.787	18.294	-12.599
	KSN Perbatasan Papua		96.470					
	Perkotaan Oksibil (usulan baru)	77.760		6.795			1.000	
	PLBN Batom		500				100	
Tolikara	Domestik	144.158	173.849	-			34.769	-34.770
	Nduga	103.386	127.872	-			25.574	-25.574
Lanny Jaya	Domestik	185.757	220.756	1.092	84.318	100.347	44.151	-43.059
	Perkotaan Tiom							
Mamberamo Tengah	Domestik	50.406	61.405	45	181	50.179	12.281	-12.236
TOTAL		1.045.778	1.256.437	35.043	220.127	543.064	251.387	-216.344

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Perhitungan Kebutuhan Infrastruktur IPLT :

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk dengan akses sanitasi aman yang harus dilayani adalah sebesar 251.387 jiwa atau setara dengan 62.846 KK (1 kk= 4 jiwa). Dengan Asumsi 1 IPLT melayani 10.000 KK; maka sampai tahun 2034 diperlukan **7 Unit IPLT**;;

C. Analisis Kesenjangan Infrastruktur Persampahan di Provinsi Papua Pegunungan

Pertumbuhan kawasan yang ditandai dengan penambahan penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi, memberikan dampak yang besar bagi semua sektor kehidupan. Salah satunya adalah peningkatan pencemaran lingkungan sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk serta bertambah dan beraneka ragamnya industri yang berimbas pada semakin tingginya potensi timbulan sampah. Disatu sisi prasarana untuk mengolah sampah tidak berkembang sepesat pertumbuhan sampah, semakin besar timbulan maka akan berimbas pada besaran biaya untuk penanganan sampah (pewadahan-pengumpulan-pengangkutan-pengolahan akhir).

Penanganan sampah kawasan perdesaan didorong dengan sistem setempat dengan pembangunan TPST yang melayani skala komunal. Kondisi ini tidak terlepas dari karakter permukiman yang menyebar dan lokasi yang berjauhan sehingga pengembangan sampah secara terpusat menjadi tidak efisien.

Kondisi Eksisting pengelolaan persampahan di Provinsi Papua (pra DOB, 2022) adalah sebesar 11,86% atau ada selisih sebesar 72,6 %. dibandingkan dengan target Renstra PUPR untuk tahun 2022 (84,41%).

Tabel 7.8 Perhitungan Kebutuhan Penanganan Persampahan Provinsi Papua Pegunungan Sesuai dengan Rencana Pengembangan Kawasan

Kabupaten/ Kota	2034			Target 70% Penanganan di Perkotaan (m3/hari)		Target 30% Pengurangan (m3/hari)	Kebutuhan TPA (asumsi Cakupan 1 TPA melayani 10.000 KK)	TPA Eksisting 2021	Kebutuhan Tambahhan (asumsi Cakupan 1 TPA melayani 10.000 KK)
	Penduduk (jiwa)	KK	Timbul- an Sampah (m3/hari)	KK	Timbulan				
Jayawijaya	254.687	63.672	637	44.570	446	191	4	1	3
Yalimo	80.880	20.220	202	14.154	142	61	1	0	1
Yahukimo	231.018	57.755	578	40.428	404	173	4	0	4
Pegunungan Bintang	91.470	22.868	229	16.007	160	69	2	0	2
Tolikara	173.849	43.462	435	30.424	304	130	3	0	3
Nduga	127.872	31.968	320	22.378	224	96	2	0	2
Lanny Jaya	220.756	55.189	552	38.632	386	166	4	0	4
Mamberamo Tengah	61.405	15.351	154	10.746	107	46	1	0	1
Jumlah	1.241.937	310.485	3.107	217.339	2.173	932	21	1	20

Sumber: Hasil Analisis, 2022
Asumsi
Timbulan Sampah = 2,5 Ltr/org/hari
1 KK = 4 jiwa dan 1 TPA = Melayani 10.000 KK

- Target Penanganan= 70 % (menggunakan asumsi perhitungan pelayanan terhadap jumlah KK. Tahun 2034 Prov Papua Pegunungan memiliki 310.485 KK, dengan Pelayanan 70 % maka KK yang harus ditangani = 217.339 KK
- Upaya penanganan sampah sebagaimana tabel di atas adalah penanganan sampah kawasan perkotaan. Untuk penanganan sampah kawasan perdesaan didorong dengan sistem setempat dengan pembangunan TPST yang melayani skala komunal. Kondisi ini tidak terlepas dari karakter permukiman yang menyebar dan lokasi yang berjauhan sehingga pengembangan sampah secara terpusat menjadi tidak efisien.

D. Analisis Kesenjangan Kawasan Kumuh Perkotaan di Provinsi Papua Pegunungan

Program penanganan kawasan kumuh pada kawasan-kawasan pusat aktivitas pada masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Papua Pegunungan dapat dilakukan dengan model peremajaan kawasan melalui konsolidasi lahan. Dalam rangka melakukan upaya ini tentu dibutuhkan kesediaan masyarakat untuk merelakan lahan yang ditinggali (jika merupakan hak milik) untuk ditata ulang.

Terkait dengan kebutuhan penanganan kawasan kumuh di Pulau Papua, tentu akan efektif apabila pemerintah memberikan peran lebih besar dalam proses penanganan kawasan. Peran ini dapat diawali dengan inisiasi penyusunan rencana program penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan. Melakukan inisiasi untuk melibatkan peran serta swasta (CSR) dalam penanganan kawasan kumuh perkotaan di masing-masing kabupaten/kota.

Melakukan sinergi dan integrasi pelaksanaan pembangunan antar sektor terkait dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis kawasan.

Tabel 7.9 Kebutuhan Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Papua Pegunungan

Kabupaten/Kota	Luasan Kumuh (Ha)	Kumuh Tertangani (Ha)	Kumuh Belum Tertangani (Ha)	Kebutuhan Penanganan Kawasan Kumuh 2034 (0 % Kumuh) (Ha)
Kab. Jayawijaya	23	0	23	23
Kab. Yahukimo	88	44	44	44
Total	111	44	67	67

Sumber: Hasil Analisis 2022, data Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, 2022

7.1.4 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Perumahan di Provinsi Papua Pegunungan

Analisis kesenjangan infrastruktur perumahan merupakan gap kebutuhan perumahan berdasarkan backlog kepemilikan rumah dan rumah tidak layak huni. Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai kinerja backlog dan rumah tidak layak huni di Provinsi Papua. Berikut hasil analisis backlog kepemilikan rumah dan rumah tidak layak huni yang perlu untuk dilakukan penanganan dalam jangka waktu 10 tahun kedepan.

Tabel 7.10 Analisis Kesenjangan Backlog Kepemilikan Rumah di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Tahun 2019					Tahun 2034				
	Kepemilikan Rumah Tahun 2019	Jumlah Penduduk 2019	KK/ Kebutuhan Rumah	Back log	Persentase Backlog	Jumlah Penduduk 2029	KK/ Kebutuhan Rumah	Back log	Persentase Backlog	
Mamberamo Tengah	12,087	48,811	12,203	116	0.95	61,405	15,351	3,264	21.27	
Tolikara	34,499	140,413	35,103	604	1.72	173,849	43,462	8,963	20.62	
Pegunungan Bintang	16,552	76,586	19,147	2,594	13.55	91,470	22,868	6,315	27.62	
Yalimo	14,520	63,789	15,947	1,427	8.95	80,880	20,220	5,700	28.19	
Nduga	24,680	99,817	24,954	274	1.10	127,872	31,968	7,288	22.80	
Lanny Jaya	44,666	180,305	45,076	410	0.91	220,756	55,189	10,523	19.07	
Yahukimo	47,232	192,627	48,157	925	1.91	231,018	57,755	10,522	18.22	
Jayawijaya	49,250	220,112	55,028	5,778	2.86	254,687	63,672	14,422	22.65	
Total	243.486	1.022.460	255.615	12.128		1.150.467	310.485	66.997		

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Secara umum, kebutuhan pemenuhan kebutuhan perumahan di Provinsi Papua Pegunungan pada Tahun 2019 adalah sebesar 12.128 unit dengan persentase sebesar 3,99%. Sedangkan hingga Tahun 2034, diperkirakan kebutuhan pemenuhan perumahan adalah sebesar 66.997 unit dengan persentase sebesar 22,55%.

Kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Papua Pegunungan hingga Tahun 2022 adalah sebesar 4.196 unit sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.11 Kebutuhan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Kepemilikan Tanah			Total
	Milik Sendiri	Tanah Negara	Bukan Milik Sendiri	
Mamberamo Tengah	23	0	0	23
Tolikara	50	0	0	50
Pegunungan Bintang	57	0	0	57
Yalimo	126	0	0	126
Nduga	213	0	0	213
Lanny Jaya	1.086	1	1	1.088
Yahukimo	725	0	476	1.201
Jayawijaya	1.438	0	0	1.438
Jumlah	3.718	1	477	4.196

Sumber: e-rtlh.perumahan.pupr.go.id

7.1.5 Analisis Kesenjangan Infrastruktur Perhubungan

Kebutuhan pembangunan infrastruktur perhubungan dalam rangka pengembangan wilayah di Provinsi Papua (pra DOB, 2022) antara lain:

- Pengembangan kapasitas penumpang dan barang di Bandara Towe Hitam untuk mendukung hilirisasi komoditas unggulan dan menurunkan tingkat keterisolasian wilayah
- Pengembangan kapasitas kargo untuk hilirisasi komoditas unggulan di Papua
- Pembangunan jalan pada bandara pengumpan Towe Hitam
- Pengembangan kapasitas penumpang dan barang di Bandara Karubaga, Bokondini, Kobakma, Kenyam, Oksibil untuk mendukung peningkatan akses menuju wilayah terpencil dan hilirisasi produk unggulan

- Pengembangan kapasitas kargo untuk hilirisasi komoditas unggulan di Papua Pegunungan (Bandara Wamena dan Bandara Dekai)
- Penyediaan sarana dan prasarana transportasi darat pasca pembangunan Jalan Trans Papua
- Pembangunan jalan pada bandara pengumpan Bandara Pengumpan Karubaga, Kelila, Paro, Mapenduma, Kenyam, Mugi, Sobaham, Sebaham, Bokondini, Borme, Aboy, Batora, Kiwirok, Apalapsili
- Pergerakan barang dan orang melalui transportasi darat hanya berasal dari Wamena – Tiom, Wamena – Karubaga, Wamena – Kobakma, Wamena – Habema
- Pergerakan barang dan orang melalui transportasi darat pada bagian selatan Papua Pegunungan masih belum terbentuk dan hanya dapat menggunakan transportasi udara

7.2 Analisis Prioritas Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Pegunungan

Analisis Prioritas Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Pegunungan

Prioritisasi pembangunan merupakan analisis yang ditujukan untuk menentukan rencana yang akan dilaksanakan sebagai rencana prioritas dengan kriteria pertimbangan berupa kesesuaian dengan kebijakan nasional, kriteria daya ungkit sesuai dengan tujuan pengembangan wilayah, dan kriteria *quick yield*. Untuk lebih jelasnya kriteria dalam prioritasi pembangunan ini antara lain:

Kriteria Kesesuaian Dengan Kebijakan Nasional (Maksimal 30%)

- (1) Kegiatan mendukung kebijakan strategis (prioritas nasional/sesuai dengan RPJMN) (30%);
- (2) Kegiatan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah (diluar RPJMN tetapi merupakan agenda nasional) (20%).

Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah (Maksimal 40%)

- (3) Kegiatan dengan kriteria memberi dampak besar namun effort minimal (*quick wins*) (40%); *Quick wins* yaitu kegiatan yang memberikan dampak ekonomi yang besar sesuai tujuan pengembangan wilayah, tetapi membutuhkan biaya minimal. Sebagai contoh, untuk tema pengembangan wilayah sektor basis pertanian, maka kegiatan yang langsung mendukung aktivitas pertanian seperti pembangunan irigasi dan konektivitas (logistik pertanian) mendapatkan skor maksimal.
- (4) Kegiatan dengan kriteria memberi dampak besar dan effort besar (*major project*) (30%); *Major project* yaitu kegiatan yang memberikan dampak ekonomi yang besar sesuai tujuan pengembangan wilayah dan membutuhkan biaya yang besar. Sebagai contoh: untuk tema pengembangan wilayah sektor basis pertanian, maka kegiatan yang langsung mendukung aktivitas pertanian seperti bendungan.
- (5) Kegiatan dengan kriteria memberi dampak kecil namun effort minimal (*Fill in*) (20%); *Fill in* yaitu kegiatan yang memberikan dampak ekonomi yang minimal sesuai tujuan pengembangan

wilayah dan membutuhkan biaya yang kecil. Sebagai contoh kegiatan rehabilitasi irigasi.

(6) Kegiatan dengan kriteria afirmatif (10%);

Kriteria Quick Yield (Maksimal 30%)

(7) Kegiatan dengan kriteria cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (30%);

(8) Kegiatan dengan kriteria menyerap tenaga kerja besar (20%).

Hasil tabel priotisasi pembangunan di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.12 Prioritas Pembangunan Infrastruktur PUPR di Provinsi Papua Pegunungan

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kriteria								Total Nilai	Ranking
			Kesesuaian dengan kebijakan nasional	Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah				Kriteria Quick Yield				
				(Maksimal 40%)								
				(Maksimal 30%)								
				Mendukung kebijakan strategis nasional/sesuai RPJMN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)			Fill In		
A	SUMBER DAYA AIR		30%	20%			20%	10%				
1	Sumber Daya Air	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Jayawijaya	30		40				30		100	1
2	Sumber Daya Air	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Yalimo		20				10	30		60	2
3	Sumber Daya Air	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Yahukimo		20				10	30		60	2
4	Sumber Daya Air	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Pegunungan Bintang		20				10	30		60	2
5	Sumber Daya Air	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Tolikara		20				10	30		60	2

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kriteria								Total Nilai	Ranking	
			Kesesuaian dengan kebijakan nasional	Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah					Kriteria Quick Yield				
			(Maksimal 30%)		(Maksimal 40%)			(Maksimal 30%)					
			Mendukung kebijakan strategis nasional/sesuai RPJMN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In	Affirmatif	Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)			
			30%	20%			20%	10%					
			20			10	30		60	2			
6	Sumber Daya Air	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Lanny Jaya									60	2	
B	BINA MARGA												
1	Bina Marga	Jalan Akses Kantor Gubernur Yogora-Walesa STA 0+525 - STA 2+840		20	40					30		90	1
2	Bina Marga	Jalan Akses Kantor Gubernur Yogora-Walesi STA 0+000 - STA 0+525		20	40					30		90	1
3	Bina Marga	Pembangunan Jalan Habema - Mugi	30			30				30		90	1
4	Bina Marga	Pembangunan Jalan Mugi - Kenyam	30			30				30		90	1
5	Bina Marga	Pembangunan Jalan Kenyam - Dekai	30			30				30		90	1
6	Bina Marga	Pembangunan Jalan Oksibil - Batom	30			30				30		90	1
7	Bina Marga	Pembangunan Jalan Batom - Towe Hitam	30			30				30		90	1

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kriteria								Total Nilai	Ranking			
			Kesesuaian dengan kebijakan nasional	Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah					Kriteria Quick Yield						
				(Maksimal 40%)						(Maksimal 30%)					
				(Maksimal 30%)		Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In					Affirmatif		
			Mendukung kebijakan strategis nasional/sesuai RPJMN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMN) tapi agenda nasional	30%	20%									
8	Bina Marga	Pembangunan Jalan Elelim – Benawa	30				30					Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)	90	1
9	Bina Marga	Pembangunan Jalan Benawa – Kp. Ruja	30				30					30		90	1
10	Bina Marga	Pembangunan Jalan Kp. Ruja – Mamberamo Tengah	30				30					30		90	1
C CIPTA KARYA															
1	Cipta Karya	Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan		20			30					30		80	1
2	Cipta Karya	Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Papua Pegunungan		20			30					30		80	1
3	Cipta Karya	Pembangunan Gedung MRP Provinsi Papua Pegunungan		20			30					30		80	1
4	Cipta Karya	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Yos Sudarso Kab. Jayawijaya		20				20				30		70	1

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kriteria								Total Nilai	Ranking
			Kesesuaian dengan kebijakan nasional	Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah				Kriteria Quick Yield				
				(Maksimal 40%)								
				Mendukung kebijakan strategis nasional/sesuai RPJMN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In	Affirmatif	Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)	
			30%	20%				20%	10%			
5	Cipta Karya	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Tolikara Kab. Jayawijaya	20				20		30		70	1
6	Cipta Karya	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Jibama Kab. Jayawijaya	20				20		30		70	1
7	Cipta Karya	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Bambu Kuning, Kab. Yahukimo	20				20		30		70	1
8	Cipta Karya	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Paradiso, Kab. Yahukimo	20				20		30		70	1
9	Cipta Karya	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Ballem, Kab. Yahukimo	20				20		30		70	1
10	Cipta Karya	Pembangunan SPAM Jayawijaya	20				20		30		70	1

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kriteria								Total Nilai	Ranking
			Kesesuaian dengan kebijakan nasional	Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah					Kriteria Quick Yield			
(Maksimal 30%)			(Maksimal 40%)					(Maksimal 30%)				
Mendukung kebijakan strategis nasional/sesuai RPJMN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In	Affirmatif	Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)					
								30%	20%	20%	10%	
11	Cipta Karya	Pembangunan SPAM Oksibil Pegunungan Bintang		20		20		30		70	1	
12	Cipta Karya	Pembangunan SPAM Tolikara		20		20		30		70	1	
13	Cipta Karya	Pembangunan SPAM Nduga		20		20		30		70	1	
14	Cipta Karya	Pembangunan SPAM Lanny Jaya		20		20		30		70	1	
15	Cipta Karya	Pembangunan SPAM Yahukimo		20		20		30		70	1	
16	Cipta Karya	Pembangunan SPAM Elelim, Kab. Yalimo		20		20		30		70	1	
17	Cipta Karya	Peningkatan Kapasitas SPAM Kobagma, Kab. Mamberamo Tengah		20			20	30		70	1	
18	Cipta Karya	Pembangunan TPST Pegunungan Bintang		20			20	30		70	1	
19	Cipta Karya	Pembangunan TPST Tolikara		20			20	30		70	1	

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kriteria								Total Nilai	Ranking
			Kesesuaian dengan kebijakan nasional	Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah					Kriteria Quick Yield			
				(Maksimal 30%)		(Maksimal 40%)				(Maksimal 30%)		
				Mendukung kebijakan strategis nasional/sesuai RPJMN	Mendukung ekonomi wilayah (di luar RPJMN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In			Affirmatif	
			30%	20%			20%	10%	Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)		
20	Cipta Karya	Pembangunan TPST Yalimo		20			20		30		70	1
21	Cipta Karya	Pembangunan TPST Nduga		20			20		30		70	1
22	Cipta Karya	Pembangunan TPST Lanny Jaya		20			20		30		70	1
23	Cipta Karya	Pembangunan TPST Yahukimo		20			20		30		70	1
24	Cipta Karya	Pembangunan TPST Mamberamo Tengah		20			20		30		70	1
25	Cipta Karya	Pembangunan IPLT Jayawijaya		20				10	30		60	2
26	Cipta Karya	Pembangunan IPLT Yalimo		20				10	30		60	2
27	Cipta Karya	Pembangunan IPLT Yahukimo		20				10	30		60	2
28	Cipta Karya	Pembangunan IPLT Pegunungan Bintang		20				10	30		60	2
29	Cipta Karya	Pembangunan IPLT Nduga		20				10	30		60	2
30	Cipta Karya	Pembangunan IPLT Lanny Jaya		20				10	30		60	2

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kriteria								Total Nilai	Ranking		
			Kesesuaian dengan kebijakan nasional	Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah					Kriteria Quick Yield					
				(Maksimal 40%)										
			Mendukung kebijakan strategis nasional/sesuai RPJMN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In	Affirmatif	Cepat dirasakan manfaat oleh masyarakat (30%)	Menyerap tenaga kerja besar (20%)				
											30%	20%	20%	10%
31	Cipta Karya	Pembangunan IPLT Mamberamo Tengah		20					10	30		60	2	
D. PERUMAHAN														
1	Perumahan	Rumah Susun ASN Pemprov (1 Tower, 3 Lantai, T.36)		20	40					30		90	1	
2	Perumahan	Rumah Khusus ASN		20	40					30		90	1	
3	Perumahan	Bantuan PSU untuk Rumah Milik		20	40					30		90	1	
4	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Yahukimo		20		30				30		80	2	
5	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Lanny Jaya		20		30				30		80	2	
6	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Nduga		20		30				30		80	2	

No	Unor	Kebutuhan Infrastruktur	Kriteria								Total Nilai	Ranking
			Kesesuaian dengan kebijakan nasional	Kriteria Daya Ungkit Sesuai Dengan Tujuan Pengembangan Wilayah					Kriteria Quick Yield			
				(Maksimal 40%)								
				(Maksimal 30%)								
				Mendukung kebijakan strategis nasional/sesuai RPJMN	Mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah (di luar RPJMN) tapi agenda nasional	Quick wins (40%)	Major Projects (30%)	Fill In				
			30%	20%			20%	10%				
7	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Yalimo		20		30			30		80	2
8	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pegunungan Bintang		20		30			30		80	2
9	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Tolikara		20		30			30		80	2
10	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Mamberamo Tengah		20		30			30		80	2
11	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Jayawijaya		20		30			30		80	2

Sumber: Hasil Analisis, 2023

7.3 Analisis Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Provinsi Papua Pegunungan

Analisis keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah merupakan analisis dukungan infrastruktur wilayah terhadap kawasan-kawasan yang akan didorong pengembangannya dalam 10 tahun ke depan. Berikut hasil analisis keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah.

Tabel 7.13 Analisis Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah di Provinsi Papua Pegunungan

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur Non PUPR
			Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan			
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
1	PKW Wamena	Kawasan pusat pemerintahan	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Jayawijaya	2025	-	-	Pembangunan IPLT Jayawijaya	2025	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Jayawijaya	2025	- Keterpaduan antara pembangunan jaringan air baku Kab. Jayawijaya (SDA) dan pembangunan IPLT Jayawijaya serta peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Jayawijaya	-
2	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	Kawasan pusat pemerintahan	Pembangunan SPAM Jayawijaya	2025	Pembangunan Jalan Habema – Mugi	2025	Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan	2025	Bantuan PSU untuk Rumah Milik	2025	- Keterpaduan antara pembangunan SPAM Jayawijaya dengan pembangunan jalan Habema – Mugi, jalan akses menuju Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, Pembangunan kantor gubernur,	-

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur Non PUPR
			Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan			
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
3	KPPN Jayawijaya dsk dan KPPN Wamena dsk	Kawasan Pariwisata	-	-	Jalan Akses Kantor Gubernur Yogora-Walesi STA 0+000 – STA 0+525	2025	Pembangunan Gedung MRP Provinsi Papua Pegunungan	2025	Rumah Khusus ASN	2025	DPRD dan MRP serta pembangunan rumah khusus dan rumah susun ASN	- keterpaduan antara pembangunan jaringan air baku kab. Jayawijaya, pembangunan jalan Habema-Mugi, pembangunan IPLT Jayawijaya dan pemugaran permukiman Kawasan kumuh dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni kab. Jayawijaya
			-	-	-	-	Pembangunan SPAM Jayawijaya	2027	-	-		
			Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Jayawijaya	2025	Pembangunan Jalan Habema – Mugi	2025	Pembangunan IPLT Jayawijaya	2025	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Jayawijaya	2025		
			-	-	-	-	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Jibama	2025	-	-		
			-	-	-	-	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Yos Sudarso	2026	-	-		
4	Lokasi Prioritas Perbatasan	Kawasan Perbatasan	-	-	-	-	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Tolikara	2026	-	-	Keterpaduan antara pemangunan	
			Pembangunan Jaringan Air Baku Kab.	2025	Pembangunan Jalan Oksibil – Batom	2025	Pembangunan SPAM Oksibil	2026	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak	2025		

No	Kawasan Prioritas	Tematik Pengembangan Kawasan	Infrastruktur PUPR								Keterpaduan antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan dengan Infrastruktur Non PUPR
			Sumber Daya Air		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan			
			Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu	Jenis Penanganan	Waktu		
	Kab. Pegunungan Bintang		Pegunungan Bintang				Pegunungan Bintang		Huni Kab. Pegunungan Bintang		jaringan air baku Kab. Pegunungan Bintang dengan pembangunan jalan oksibil - batom - Towe Hitam, pembangunan SPAM Oksibil, pembangunan IPLT Pegunungan Bintang, pembangunan TPST Pegunungan Bintang dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni kab. pegunungan bintang	
					Pembangunan Jalan Batom - Towe Hitam	2025	Pembangunan IPLT Pegunungan Bintang	2025	-			
			-	-					2025	-		

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 7.14 Analisis Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Prioritas di Provinsi Papua Pegunungan

No.	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Antar Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
1	Pembangunan Air Baku Sungai Wasi Wamena Kab.Jaya wijaya Tahap II	Penyediaan air baku	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Jayawijaya	2025	Pembangunan Jalan Habema - Mugi	2025	Pembangunan Kawasanan Permukiman Kab. Jayawijaya	2025	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Jayawijaya	2025	Keterpaduan pembangunan jaringan air baku di Kab. Jayawijaya dengan pembangunan jalan habema - mugi, pembangunan SPAM serta peningkatan kualitas rumah Tidak Layak Huni di Kab. Jayawijaya	Keterpaduan pembangunan jaringan air baku di Kab. Jayawijaya dengan pembangunan jalan habema - mugi, pembangunan SPAM serta peningkatan kualitas rumah Tidak Layak Huni di Kab. Jayawijaya	Keterpaduan dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (DOB) dan Pemerintah daerah Kab. Jayawijaya

RPWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

N o.	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Antar Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
2	Jalan Perbatasan Ruas Towe Hitam - Oksibil	Konektivitas perbatasan	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Pegunungan Bintang	2025	Pembangunan Jalan Oksibil - Batom	2025	Pembangunan SPAM Pegunungan Bintang	2025	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pegunungan Bintang	2025	Keterpaduan pembangunan jaringan air baku di kab. Pegunungan Bintang dengan pembangunan jalan Oksibil-Batom. [Pembangunan SPAM serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kab. Pegunungan Bintang		

**RPIW Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034**

No.	Infrastruktur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpaduan Antar Infrastruktur PUPR	Keterpaduan Antar Infrastruktur Non-PUPR	Keterpaduan Antar Lintas Administrasi Pemerintahan
			Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional	Jenis Penanganan	Waktu Operasional			
3	Jalan Ruas Wamena-Uslimo-Passavaley-Elelim-Bts, Prov Papua	Konektivitas antar provinsi	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Yalimo	2026	Pembangunan Jalan Elelim - Benawa	2025	Pembangunan SPAM Yalimo	2027	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Yalimo	2025	Keterpaduan pembangunan jaringan air baku Kab. Yalimo dengan pembangunan SPAM, peningkatan rumah tidak layak huni Kab. Yalimo serta pembangunan jalan Elelim - Benawa		Keterpaduan dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan (DOB)
			-	-	Pembangunan Jalan Benawa - Kp. Ruja	2025	Pembangunan SPAM Mamberamo Tengah	2027	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Mamberamo Tengah	2025	Keterpaduan pembangunan jalan Elelim - Benawa		
			-	-	-	-	Pembangunan IPLT Yalimo	2027	-	-	Keterpaduan pembangunan SPAM di Kab. Mamberamo Tengah dengan peningkatan		

RPRWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

N o.	Infrastruk tur Prioritas	Fungsi	SDA		Bina Marga		Cipta Karya		Perumahan		Keterpad uan Antar Infrastruk tur PUPR	Keterpa duan Antar Infrastruk tur Non- PUPR	Keterpa duan Antar Lintas Administ rasi Pemerint ahan
			Jenis Penangan an	Waktu Operasi onal	Jenis Penangan an	Waktu Operasi onal	Jenis Penangan an	Waktu Operasi onal	Jenis Penangan an	Waktu Operasi onal			
			-	-	-	-	Pemban gunan TPST Kab. Yalimo	2027	-	-	an rumah tidak layak hunikaB. Mambera mo Tengah		
			-	-	-	-	Pemban gunan TPST Kab. Mambera mo Tengah	2028	-	-			

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Bab selanjutnya akan membahas rencana aksi pembangunan infrastruktur PUPR yang merupakan hasil dari pembahasan analisis kesenjangan infrastruktur PUPR yang sudah dibahas pada bab 7 ini. Rencana aksi yang disusun merupakan rencana aksi pembangunan infrastruktur PUPR yang diprogramkan pada tahap pertama yaitu untuk jangka waktu 5 tahun (2025-2029) mengikuti periode Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Sehingga terdapat perbedaan tahun pembahasan, analisis kesenjangan infrastruktur PUPR jangka waktunya 10 tahun (2025-2034) sementara untuk rencana aksi pembangunan infrastruktur PUPR jangka waktunya 5 tahun (2025-2029).



BAB 8

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



BAB VIII RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

8.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR Provinsi Papua Pegunungan

8.1.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air

Rencana aksi pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air di Pulau Papua pada periode tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel rencana aksi pembangunan infrastruktur Sumber Daya air berikut:

Tabel 8.1 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di Provinsi Papua Pegunungan

No	Unor	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mula	Selesai
1	SDA	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Jayawijaya	PKW Wamena	Kab. Jayawijaya	- Terbangunnya Intake dan Jaringan Pipa Transmisi yang dapat mencukupi kebutuhan penduduk dan kawasan prioritas nasional	Agar dipersiapkan	202,88	Liter/detik	50.000.000	APBN	2025	2029
2	SDA	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Lanny Jaya	Non Kawasan	Kab. Lanny Jaya	- Terbangunnya Intake dan Jaringan Pipa Transmisi yang dapat mencukupi kebutuhan penduduk dan kawasan prioritas nasional	Agar dipersiapkan	148,36	Liter/detik	40.000.000	APBN	2026	2029
3	SDA	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Yahukimo	Non Kawasan	Kab. Yahukimo	- Terbangunnya Intake dan Jaringan Pipa Transmisi yang dapat mencukupi kebutuhan penduduk dan kawasan prioritas nasional	Agar dipersiapkan	120,71	Liter/detik	40.000.000	APBN	2025	2029
4	SDA	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Tolikara	Non Kawasan	Kab. Tolikara	- Terbangunnya Intake dan Jaringan Pipa Transmisi yang dapat mencukupi kebutuhan penduduk	Agar dipersiapkan	93,36	Liter/detik	40.000.000	APBN	2025	2029

**RPIW Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034**

No	Unor	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan		Mula	Selesai
5	SDA	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab.Yalimo	Non Kawasan	Kab. Yalimo	- Terbangunnya Intake dan Jaringan Pipa Transmisi yang dapat mencukupi kebutuhan penduduk	Agar dipersiapkan	34,68	Liter/detik	APBN	2026	2029
6	SDA	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Pegunungan Bintang	Non Kawasan	Kab. Pegunungan Bintang	- Terbangunnya Intake dan Jaringan Pipa Transmisi yang dapat mencukupi kebutuhan penduduk dan kawasan prioritas nasional	Agar dipersiapkan	11,81	Liter/detik	APBN	2025	2029

Sumber: Hasil Analisis,2023

8.1.2 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Rencana aksi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Papua Pegunungan untuk periode tahun 2025-2029 terdiri dari pembangunan jalan Trans Papua, pembangunan jalan untuk mendukung kawasan strategis, dan peningkatan jalan menuju standar. Berikut rencana aksi pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Papua Pegunungan.

Tabel 8.2 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua Pegunungan

No	Unor	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesimpulan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mula	Selesai
1	BM	Pembangunan Jalan Kp. Ruja - Mamberamo Tengah	Non Kawasan	Kab. Yalimo	- Penghubung dengan PKN Jayapura dan PKN Merauke - Meningkatkan konektivitas dalam pengembangan wilayah - Meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan (kopi wamena menuju ke Kota Jayapura sebagai pusat pertumbuhan)	Agar dipersiapkan	92,15	Km	1.290.100.000	APBN/KP BU	2025	2029
2	BM	Pembangunan Jalan Elelim - Benawa	Non Kawasan	Kab. Yalimo	- Penghubung dengan PKN Jayapura dan PKN Merauke - Meningkatkan konektivitas dalam pengembangan wilayah - Meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan (kopi wamena menuju ke Kota Jayapura sebagai pusat pertumbuhan)	Agar dipersiapkan	57,21	Km	800.940.000	APBN/KP BU	2025	2029

RPIW Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

No	Unor	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesimpulan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mula	Selesai
3	BM	Pembangunan Jalan Benawa – Kp. Ruja	Non Kawasan	Kab. Yalimo	- Menghubungkan PKN Jayapura dan PKN Merauke - Meningkatkan konektivitas dalam pengembangan wilayah - Meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan (kopi wamena menuju ke Kota Jayapura sebagai pusat pertumbuhan) - Meningkatkan konektivitas ke Kab. Nduga - Membuka keterisolasian Kab. Nduga agar terhubung dengan ibukota Provinsi Papua Pegunungan - Meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan wilayah	Agar dipersiapkan	49,11	Km	687.540.000	APBN/KP BU	2025	2029
4	BM	Pembangunan Jalan Mugi – Kenyam	Non Kawasan	Kab. Nduga	- Meningkatkan konektivitas ke Kab. Nduga - Membuka keterisolasian Kab. Nduga agar terhubung dengan ibukota Provinsi Papua Pegunungan - Meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan wilayah	Agar dipersiapkan	51,17	Km	716.380.000	APBN/KP BU	2028	2029
5	BM	Pembangunan Jalan Habema – Mugi	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	- Meningkatkan konektivitas ke Kab. Nduga - Membuka keterisolasian Kab. Nduga agar terhubung dengan ibukota Provinsi Papua Pegunungan - Meningkatkan hilirisasi komoditas	Agar dipersiapkan	67,63	Km	946.820.000	APBN/KP BU	2025	2027

RPWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

No	Unor	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesimpulan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mula	Selesai
					unggulan dan pengembangan wilayah							
6	BM	Jalan Akses Kantor Gubernur Yogora-Walesa STA O+525 - STA 2+840	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	Mendukung pengembangan pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Pegunungan, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar dipersiapkan	2,315	Km	132.446.160	APBN	2023	2025
7	BM	Jalan Akses Kantor Gubernur Yogora-Walesa STA O+000 - STA O+525	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	Mendukung pengembangan pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Pegunungan, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar dipersiapkan	0,525	Km	16.224.166	APBN	2023	2025
8	BM	Pembangunan Jalan Kenyam - Dekai	Non Kawasan	Kab. Nduga	- Meningkatkan konektivitas ke Kab. Nduga - Membuka keterisolasian Kab. Nduga agar terhubung dengan ibukota Provinsi Papua Pegunungan - Meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan wilayah	Agar dipersiapkan	50,99	Km	713.860.000	APBN/KP BU	2025	2029
9	BM	Pembangunan Jalan Oksibil - Batom	Non Kawasan	Kab. Pegunungan Bintang	- Mendukung pertahanan dan keamanan negara - Peningkatan hilirisasi komoditas unggulan	Agar dipersiapkan	65,04	Km	910.560.000	APBN/KP BU	2025	2029

**RPIW Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034**

No	Unor	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesimpulan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mula	Selesai
					dan pengembangan wilayah - Meningkatkan akses perbatasan negara - Mendukung pertahanan dan keamanan negara - Peningkatan hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan wilayah - Meningkatkan akses perbatasan negara							
10	BM	Pembangunan Jalan Batom – Towe Hitam	Non Kawasan	Kab. Pegunungan Bintang	- Menghubungkan dengan PKN Jayapura dan PKN Merauke - Meningkatkan konektivitas dalam pengembangan wilayah - Meningkatkan hilirisasi komoditas unggulan (kopi wamena menuju ke Kota Jayapura)	Agar dipersiapkan	64,23	Km	899.220.000	APBN/KP BU	2025	2029
11	BM	Pembangunan Jalan Kp. Ruja – Mamberamo Tengah	Non Kawasan	Kab. Yalimo		Agar dipersiapkan	92,15	Km	1.290.100.000	APBN/KP BU	2025	2029

Sumber: Hasil Analisis, 2023

8.1.3 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan

Rencana aksi pembangunan infrastruktur Cipta Karya di Provinsi Papua Pegunungan untuk periode tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.3 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Cipta Karya di Provinsi Papua Pegunungan

No	Unor	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mula	Selesai
1	CK	Pembangunan IPLT Yalimo	Non Kawasan	Kab. Yalimo	Penanganan Pelayanan Dasar: Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat pemerintahan	Agar dipersiapkan	16.126	Jiwa	N/A	APBN	2027	2029
2	CK	Pembangunan IPLT Yahukimo	Non Kawasan	Kab. Yahukimo	Penanganan Pelayanan Dasar : Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat pemerintahan	Agar dipersiapkan	38.974	Jiwa	N/A	APBN	2029	2029
3	CK	Pembangunan IPLT Nduga	Non Kawasan	Kab. Nduga	Penanganan Pelayanan Dasar : Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat pemerintahan	Agar dipersiapkan	25.574	Jiwa	N/A	APBN	2029	2029
4	CK	Pembangunan IPLT Lanny Jaya	Non Kawasan	Kab. Lanny Jaya	Penanganan Pelayanan Dasar : Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat pemerintahan	Agar dipersiapkan	43.059	Jiwa	N/A	APBN	2029	2029

RPIWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

No	Unor	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mula	Selesai
5	CK	Pembangunan IPLT Mamberamo Tengah	Non Kawasan	Kab. Mamberamo Tengah	Penanganan Dasar : Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat pemerintahan	Agar dipersiapkan	12.236	Jiwa	N/A	APBN	2029	2029
6	CK	Pembangunan IPLT Pegunungan Bintang	Non Kawasan	Kab. Pegunungan Bintang	Penanganan Pelayanan Dasar	Agar dipersiapkan	12.599	Jiwa	N/A	APBN	2027	2029
7	CK	Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	Dukungan perkantoran pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Pegunungan, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar Dipersiapkan	1	Unit	553.960.000	APBN	2024	2025
8	CK	Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Papua Pegunungan	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	Dukungan perkantoran pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Pegunungan, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar Dipersiapkan	1	Unit	517.696.000	APBN	2024	2025
9	CK	Pembangunan Gedung MRP Provinsi Papua Pegunungan	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	Dukungan perkantoran pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Pegunungan, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar Dipersiapkan	1	Unit	415.423.000	APBN	2024	2025

RPM Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

No	Unor	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mula	Selesai
10	CK	Pembangunan SPAM Lanny Jaya	Non Kawasan	Kab. Lanny Jaya	Penanganan Pelayanan Dasar : Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat perkotaan	Agar dipersiapkan	145,02	Liter/detik	130.107.600	APBN	2028	2029
11	CK	Pembangunan SPAM Jayawijaya	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	Penanganan Pelayanan Dasar: Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pemerintahan, pusat perkotaan dan kawasan pariwisata nasional	Agar dipersiapkan	192,55	Liter/detik	175.232.400	APBN	2027	2029
12	CK	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Ballem	Non Kawasan	Kab. Yahukimo	Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan	Agar dipersiapkan	23,2	Ha	44.080.000	APBN	2027	2029
13	CK	Pembangunan SPAM Nduga	Non Kawasan	Kab. Nduga	Penanganan Pelayanan Dasar : Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat perkotaan	Agar dipersiapkan	93,58	Liter/detik	84.411.600	APBN	2028	2029
14	CK	Pembangunan IPLT Jayawijaya	PKW Wamena	Kab. Jayawijaya	Penanganan Pelayanan Dasar: Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pemerintahan, pusat perkotaan dan kawasan pariwisata nasional	Agar dipersiapkan	33,006	Jiwa	44.000.000	APBN	2025	2027

RPIWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

No	Unor	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mula	Selesai
15	CK	Pembangunan TPST Pegunungan Bintang	Non Kawasan	Kab. Pegunungan Bintang	Penanganan Pelayanan Dasar: Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat perkotaan dan perbatasan negara	Agar dipersiapkan	17.382	KK	21.000.000	APBN	2025	2029
16	CK	Pembangunan SPAM Elelim, Kab. Yalimo	Non Kawasan	Kab. Yalimo	Penanganan Pelayanan Dasar : Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat pemerintahan	Agar dipersiapkan	35,75	Liter/detik	33.734.400	APBN	2028	2029
17	CK	Pembangunan TPST Tolikara	Non Kawasan	Kab. Tolikara	Penanganan Pelayanan Dasar	Agar dipersiapkan	38,63 ₂	KK	21.000.000	APBN	2028	2028
18	CK	Pembangunan TPST Yalimo	Non Kawasan	Kab. Yalimo	Penanganan Pelayanan Dasar	Agar dipersiapkan	40,42 ₈	KK	21.000.000	APBN	2027	2029
19	CK	Pembangunan TPST Nduga	Non Kawasan	Kab. Nduga	Penanganan Pelayanan Dasar	Agar dipersiapkan	46,23 ₃	KK	21.000.000	APBN	2028	2028
20	CK	Pembangunan TPST Lanny Jaya	Non Kawasan	Kab. Lanny Jaya	Penanganan Pelayanan Dasar	Agar dipersiapkan	38,63 ₂	KK	21.000.000	APBN	2028	2028
21	CK	Pembangunan TPST Yahukimo	Non Kawasan	Kab. Yahukimo	Penanganan Pelayanan Dasar	Agar dipersiapkan	40,42 ₈	KK	21.000.000	APBN	2027	2029
22	CK	Pembangunan TPST Mamberamo Tengah	Non Kawasan	Kab. Mamberamo Tengah	Penanganan Pelayanan Dasar	Agar dipersiapkan	46,23 ₃	KK	21.000.000	APBN	2028	2028
23	CK	Pembangunan SPAM Yahukimo	Non Kawasan	Kab. Yahukimo	Penanganan Pelayanan Dasar : Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan	Agar dipersiapkan	123,75	Liter/detik	112.106.400	APBN	2028	2029

RPIWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

No	Unor	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mula	Selesai
					kawasan pusat perkotaan, kawasan pariwisata							
					Penanganan Pelayanan Dasar: Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat perkotaan, kawasan pariwisata							
24	CK	Pembangunan SPAM Tolikara	Non Kawasan	Kab. Tolikara	Agar dipersiapkan	Agar dipersiapkan	93,89	Liter/detik	85.906.800	APBN	2028	2029
25	CK	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Jibama	PKW Wamena	Kab. Jayawijaya	Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan	Agar dipersiapkan	23,49	Ha	44.631.000	APBN	2025	2027
26	CK	Peningkatan Kapasitas SPAM Kobagma, Kab. Mamberamo Tengah	Non Kawasan	Kab. Mamberamo Tengah	Penanganan Pelayanan Dasar : Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat pemerintahan	Agar dipersiapkan	3,59	Liter/detik	1.680.000	APBN	2028	2029
27	CK	Pembangunan SPAM Oksibil Pegunungan Bintang	Non Kawasan	Kab. Pegunungan Bintang	Penanganan Pelayanan Dasar: Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan pusat perkotaan dan perbatasan negara	Agar dipersiapkan	17,81	Liter/detik	19.899.600	APBN	2028	2029
28	CK	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Yos Sudarso	PKW Wamena	Kab. Jayawijaya	Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan	Agar dipersiapkan	16,5	Ha	31.350.000	APBN	2026	2028
29	CK	Pemugaran Permukiman Kumuh	PKW Wamena	Kab. Jayawijaya	Keterpaduan infrastruktur dalam	Agar dipersiapkan	19,7	Ha	37.430.000	APBN	2026	2028

RPIW Provinsi Papua Regunungan
Tahun 2025-2034

No	Unor	Program/kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mula	Selesai
		Kawasan Tolikara			pengembangan kawasan							
30	CK	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Bambu Kuning	Non Kawasan	Kab. Yahukimo	Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan	Agar dipersiapkan	44,6	Ha	84.740.000	APBN	2027	2029
31	CK	Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Paradiso	Non Kawasan	Kab. Yahukimo	Keterpaduan infrastruktur dalam pengembangan kawasan	Agar dipersiapkan	20,8	Ha	39.520.000	APBN	2027	2029

Sumber: Hasil Analisis,2023

8.1.4 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Perumahan

Rencana aksi pembangunan infrastruktur permukiman di Provinsi Papua Pegunungan terdiri dari pembangunan rumah khusus untuk mendukung Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dan peningkatan kualitas rumah swadaya. Berikut rencana aksi pembangunan infrastruktur perumahan di Provinsi Papua Pegunungan untuk periode tahun 2025-2029.

Tabel 8.4 Rencana Pengembangan Infrastruktur Perumahan di Provinsi Papua Pegunungan

No	Unor	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan		Mula	Selesai
1	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Yahukimo	Non Kawasan	Kab. Yahukimo	· Pengurangan RTLH di Kab. Yahukimo sebesar 1201 Unit · Dukungan perbaikan rumah untuk kesehatan masyarakat	Agar dipersiapkan	1.201	Unit	APBN	2025	2029
2	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Lanny Jaya	Non Kawasan	Kab. Lanny Jaya	· Pengurangan RTLH di Kab. Lanny Jaya sebesar 1088 Unit · Dukungan perbaikan rumah untuk kesehatan masyarakat	Agar dipersiapkan	1.088	Unit	APBN	2025	2029
3	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Nduga	Non Kawasan	Kab. Nduga	· Pengurangan RTLH di Kab. Nduga sebesar 213 Unit · Dukungan perbaikan rumah untuk kesehatan masyarakat	Agar dipersiapkan	213	Unit	APBN	2025	2029
4	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Non Kawasan	Kab. Yalimo	· Pengurangan RTLH di Kab. Yalimo sebesar 126 Unit	Agar dipersiapkan	126	Unit	APBN	2025	2029

RPIW Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

No	Unor	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mula	Selesai
		Layak Huni Kab. Yalimo			Unit · Dukungan perbaikan rumah untuk kesehatan masyarakat · Pengurangan RTLH di Kab. Pegunungan Bintang sebesar 57 Unit · Dukungan perbaikan rumah untuk kesehatan masyarakat							
5	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Pegunungan Bintang	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	· Pengurangan RTLH di Kab. Tolikara sebesar 50 Unit · Dukungan perbaikan rumah untuk kesehatan masyarakat	Agar dipersiapkan	57	Unit	2.280.000	APBN	2025	2029
6	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Tolikara	Non Kawasan	Kab. Tolikara	· Pengurangan RTLH di Kab. Mamberamo Tengah sebesar 23 Unit · Dukungan perbaikan rumah untuk kesehatan masyarakat	Agar dipersiapkan	50	Unit	2.000.000	APBN	2025	2029
7	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Mamberamo Tengah	Non Kawasan	Kab. Mamberamo Tengah	Dukungan tempat tinggal ASN pada pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB	Agar dipersiapkan	23	Unit	920.000	APBN	2025	2029
8	PR	Rumah Khusus ASN	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya		Agar dipersiapkan	300	Unit	423.539.588	APBN	2025	2026

RPWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

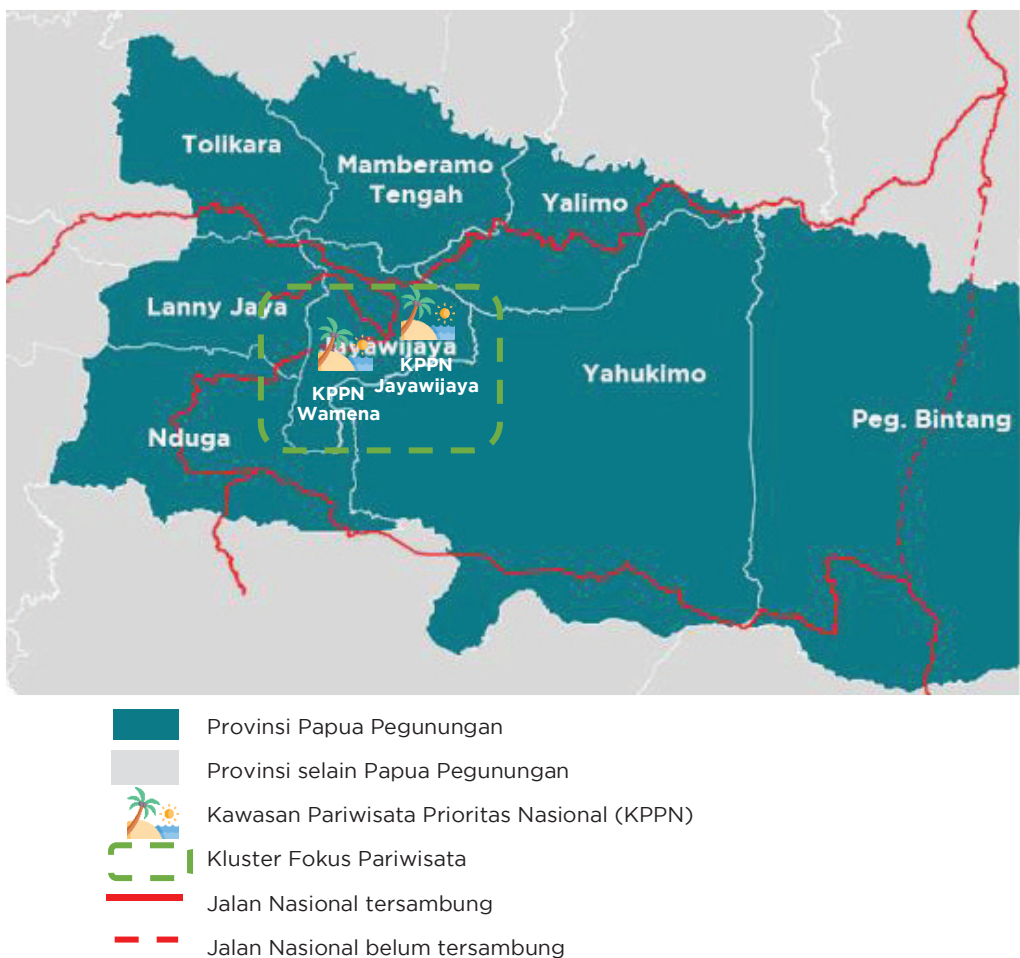
No	Unor	Program/Kegiatan	Cakupan Kerja		Justifikasi/Tujuan dan Deskripsi Kegiatan	Kesiapan RC	Indikasi Kebutuhan		Perkiraan Biaya (Rp Ribu)	Sumber Pendanaan	Tahun Rencana	
			Kawasan Prioritas	Lokasi Spesifik			Volume	Satuan			Mula	Selesai
					Expose Jayapura 10 Oktober 2023							
9	PR	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Jayawijaya	PKW Wamena	Kab. Jayawijaya	· Pengurangan RTLH di Kab. Jayawijaya sebesar 1438 Unit · Dukungan perbaikan rumah untuk kesehatan masyarakat	Agar dipersiapkan	1.438	Unit	57.520.000	APBN	2025	2029
10	PR	Rumah Susun ASN Pemprov (1 Tower, 3 Lantai, T.36)	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	Dukungan tempat tinggal ASN pada pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar dipersiapkan	44	Unit	52.674.888	APBN	2025	2026
11	PR	Bantuan PSU untuk Rumah Milik	Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	Dukungan tempat tinggal ASN pada pusat pemerintahan baru Provinsi Papua Barat Daya, List Kebutuhan Anggaran DOB Expose Jayapura 10 Oktober 2023	Agar dipersiapkan	500	Unit	14.150.000	APBN	2025	2026

Sumber: Hasil Analisis,2023

8.2 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Provinsi Papua Pegunungan

8.2.1 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan lainnya di Provinsi Papua Pegunungan, karena keindahan alam yang masih asli dan keunikan sosial budaya masyarakat asli Papua yang menjadi daya tarik tersendiri. Pengembangan pariwisata di Provinsi Papua Pegunungan memerlukan keterpaduan seluruh sektor terkait termasuk infrastruktur PUPR. Berikut rencana aksi keterpaduan infrastruktur PUPR dan non PUPR sektor pariwisata.



Gambar 8.1 Peta Keterpaduan Sektor Pariwisata Provinsi Papua Pegunungan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 8.5 Rencana Aksi Sektor Pariwisata

TRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD & SOFT)	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	TAHUN				
							2025	2026	2027	2028	2029
Penyediaan dan optimalisasi infrastruktur pendukung pariwisata untuk membuka potensi wisata baru dan meningkatkan kualitas pariwisata di Provinsi Papua	Program Penunjang amenities pariwisata	Penginapan/Homestay	Penyediaan homestay di destinasi pariwisata KPPN Jayawijaya dan KPPN Wamena*	Kab. Jayawijaya	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*	TBD	x	x	x	x	x
		Ketersediaan Pengelola pariwisata yang kompeten	Pembentukan pengelola pariwisata resmi di destinasi pariwisata KPPN Jayawijaya dan KPPN Wamena*	Kab. Jayawijaya	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*	TBD	x	x			
	Program Penunjang pengembangan pariwisata	Pelatihan bidang pariwisata untuk SDM pengelola pariwisata	Pelatihan bidang pariwisata untuk SDM KPPN Jayawijaya dan KPPN Wamena	Kab. Jayawijaya	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*	TBD	x	x			
		Pengembangan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif untuk mendukung atraksi pariwisata di KPPN Jayawijaya dan KPPN Wamena*	Kab. Jayawijaya	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*	TBD	x	x	x		
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk meningkatkan kesejahteraan	Program kajian untuk mendukung pengembangan pariwisata	Perencanaan Pariwisata jangka panjang di KPPN Provinsi Papua	Rencana jangka panjang pariwisata di Provinsi Papua KPPN Jayawijaya dan KPPN Wamena*	Kab. Jayawijaya	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*	TBD	x	x			
		Pemenuhan air bersih	Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Jayawijaya	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Sumber Daya Air	x	x	x	x	x
	Program Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sektor PUPR	Pemenuhan konektivitas	Pembangunan Jalan Habema – Mugi	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Bina Marga	x	x	x		

TRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD & SOFT)	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	TAHUN				
							2025	2026	2027	2028	2029
masyarakat yang akan berdampak pengembangan potensi sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan yang kompeten		Pemenuhan sanitasi	Pembangunan IPL T Jayawijaya	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Cipta Karya	x	x			
			Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Jibama	Distrik, Jibama, Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Cipta Karya	x		x		
			Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Yos Sudarso	Distrik Yos Sudarso, Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Cipta Karya		x	x	X	
			Pemugaran Permukiman Kumuh Kawasan Tolikara	Distrik Tolikara, Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Cipta Karya		X	x	x	
			Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Jayawijaya	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Perumahan	x	x	x	x	x
			penambahan titik layanan akses internet**	Kab. Jayawijaya	Kementerian Komunikasi dan Informatika**	TBD	x	x	x	x	x
		Kesediaan telekomunikasi	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan broadband di wilayah**	Kab. Jayawijaya	Kementerian Komunikasi dan Informatika**	TBD	x		x	x	x

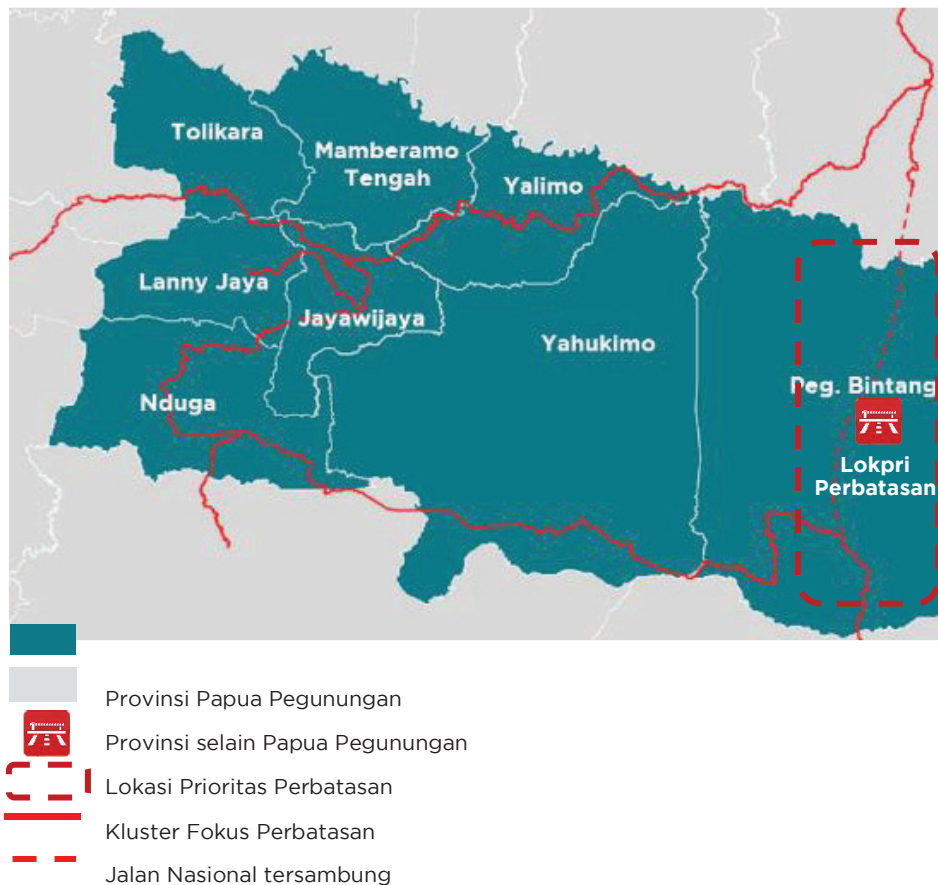
RPIW Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

TRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD & SOFT)	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	TAHUN				
							2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan fasilitas perhubungan (bandara, pelabuhan, penyeberangan) yang mendukung kawasan pariwisata di Provinsi Papua	Pemenuhan fasilitas Bandara	Fasilitas pendukung bandara (Hard/Soft)	Peningkatan kompetensi SDM pendukung bandara Kab. Jayawijaya	Kab. Jayawijaya	Kementerian Perhubungan***	TBD	x	x	x	x	x
			Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana Bandara Jayawijaya	Kab. Jayawijaya	Kementerian Perhubungan***	TBD	x	x	x	x	x
			Penambahan jumlah rute penerbangan dari dan menuju Jayawijaya	Kab. Jayawijaya	Kementerian Perhubungan***	TBD	x	x	x	x	x
			Proses kerjasama pemerintah swasta dalam penyediaan infrastruktur pelayanan transportasi udara***	Kab. Jayawijaya	Kementerian Perhubungan***	TBD	x	x	x	x	x

Sumber: Hasil Analisis,2023

8.2.2 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Perbatasan

Pemenuhan dukungan infrastruktur di perbatasan juga menjadi isu yang penting di Provinsi Papua Pegunungan, karena kegiatan pelintas batas berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Saat ini, terdapat potensi perdagangan komoditas unggulan Provinsi Papua Pegunungan antara lain kopi dan beras yang sudah diekspor melalui perbatasan. Dengan penyediaan infrastruktur handal, diharapkan jumlah pelintas batas baik orang maupun barang dapat meningkat sehingga menimbulkan dampak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Rencana aksi keterpaduan infrastruktur PUPR dan non PUPR sektor perbatasan adalah sebagai berikut.



Gambar 8.2 Peta Keterpaduan Sektor Perbatasan Provinsi Papua Pegunungan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 8.6 Rencana Aksi Sektor Perbatasan

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	TAHUN						
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Peningkatan SDM melalui peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan	Peningkatan layanan kesehatan	Infrastruktur	Rumah sakit	Pembangunan Puskesmas	Kab. Jayawijaya	Kementerian Kesehatan	TBD	x						
	peningkatan layanan perumahan dan Cipta Karya	Infrastruktur	Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Kab. Pegunungan Bintang	Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian PUPR	Perumahan	x	x	x	x	x	x	x
				Pembangunan IPLT Pegunungan Bintang	Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian PUPR	Cipta Karya	x	x	x	x	x	x	x
				Pembangunan TPST Pegunungan Bintang	Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian PUPR	Cipta Karya	x	x	x	x	x	x	x
Pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan daerah perbatasan	Peningkatan komoditas unggulan	Infrastruktur	Pendukung Komoditas Unggulan	Pembangunan SPAM Oksibil Pegunungan Bintang	Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian PUPR	Cipta Karya				x		x	
				Pembangunan Jaringan Air Baku Kab. Pegunungan Bintang	Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian PUPR	Sumber Daya Air	x	x	x	x	x	x	x
intervensi terkait pengadaan barang modal yang dapat menurunkan	Dukungan aksesibilitas pada kawasan perbatasan	Infrastruktur	Aksesibilitas	Pembangunan Jalan Oksibil - Batom	Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian PUPR	Bina Marga	x	x	x	x	x	x	x
				Pembangunan Jalan Batom - Towe Hitam	Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian PUPR	Bina Marga	x	x	x	x	x	x	x

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	TAHUN							
								2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
biaya produksi seperti peningkatan aksesibilitas di darat lewat jalan perbatasan	Dukungan Kelembagaan	Pelatihan	Kewirausahaan	Jumlah pelatihan kewirausahaan *	Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian Koperasi dan UMKM	TBD	x							
Pengadaan sarana transportasi umum darat untuk meningkatkan konektivitas darat di kawasan perbatasan	Dukungan Kendaraan umum kawasan perbatasan	Pengadaan sarana transportasi dara	Transportasi Darat	Pengadaan Sarana Transportasi Darat *	Kab. Pegunungan Bintang	Kementerian Perhubungan/ Kementerian Desa*	TBD	x							

Sumber: Hasil Analisis,2023

8.2.3 Rencana Aksi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan Non PUPR Sektor Perkotaan

Fokus berikutnya dalam pengembangan Provinsi Papua Pegunungan yakni pemenuhan infrastruktur pendukung dan pelayanan di kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kegiatan. Saat ini rendahnya aksesibilitas daerah pedalaman dan pegunungan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap PKN dan PKW, sehingga kawasan perkotaan perlu didorong sebagai *growth centre* dengan memanfaatkan potensi SDM yang tinggi dan infrastruktur pendukung yang relatif lebih lengkap. Provinsi Papua Pegunungan menjadi momentum diperlukannya dukungan infrastruktur dasar dan konektivitas di Kawasan perkotaan.



Gambar 8.3 Peta Keterpaduan Sektor Perbatasan Provinsi Papua Pegunungan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 8.7 Rencana Aksi Sektor Perkotaan

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	TAHUN							
							2025	2026	2027	2028	2029			
Peningkatkan kapasitas SDM lokal dalam kegiatan ekonomi perkotaan yang inovatif di Prov. Papua	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan Dasar dan Menengah	Program Pendidikan Anak Usia Dini*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x				
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x		x	x				
			Program Pendidikan Menengah Atas*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x				
			Program Pendidikan Luar Biasa*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x				
			Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x				
	Pendidikan Tinggi		Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x				
			Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Mahasiswa*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x				
			Program Pendidikan Kedisnasan*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x				
			Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x				
			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x				
Pendidikan dan Pelatihan Non-formal	Kelembagaan	Program Peningkatan Kesempatan Kerja*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x					
		Program Pendidikan Non Formal*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x					
	Kejuruan, Pelatihan, dan Sertifikasi	Program Pendidikan Kejuruan*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x					
		Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x					

RPIWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	TAHUN							
							2025	2026	2027	2028	2029			
Meningkatkan peran dan keterlibatan stakeholder pentahelix (pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat) dalam membangun kawasan perkotaan PKN/PKW Prov. Papua	Dukungan Regulasi	Kebijakan Strategis	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x				
			Program Dokumentasi dan Informasi Hukum*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x				
		Kebijakan Sektoral	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
			Program Peningkatan Kinerja BUMD *	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
	Peningkatan Peran dan Keterlibatan Pemerintah	Kapasitas SDM Pemerintah	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
		Reformasi Birokrasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
	Peningkatan Peran dan Keterlibatan Swasta	Kemudahan Investasi	Pembagian Kewenangan (Nasional, Provinsi, Kab/kota)	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x			
				Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x			
				Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x			
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x			

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	TAHUN							
							2025	2026	2027	2028	2029			
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi *	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
			Program Peningkatan Daya Saling Investasi*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
		Jaminan Keamanan	Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Kesbangpol)*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
			Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
			Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
	Dukungan Fasilitas		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
			Program Pengawasan Ketenagakerjaan*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
	Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja Asing	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
		Tenaga Kerja Lokal	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				

RPWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	TAHUN							
							2025	2026	2027	2028	2029			
Peningkatan Peran dan Keterlibatan Akademisi			Program Transmigrasi Lokal*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
		Lembaga Riset	Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
	Riset	Pemanfaaaan Riset	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
		Pengembangan Riset	Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
		Pendampingan Penggunaan Teknologi	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
	Teknologi	Pemanfaatan Teknologi	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
		Pengembangan Teknologi	Program Penelitian dan Pengembangan IPEK*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
			Program Penataan penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
				Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x			
	Peningkatan Peran dan Keterlibatan Media	Pemanfaatan Media	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
			Program Pelayanan Informasi*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				

RPW Provinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	TAHUN							
								2025	2026	2027	2028	2029			
	Peningkatan Peran dan Keterlibatan Masyarakat	Kualitas Media	SDM	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
			Sarana dan Prasarana	Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
				Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
				Program Fasilitasi Organisasi Masyarakat*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
		Kemitraan	Komunitas Sektoral	Program Peningkatan Kinerja Organisasi*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
				Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan (urusan pemberdayaan masyarakat desa) *	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				
				Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x				

**RPIWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034**

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)		RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	TAHUN				
								2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatkan kapasitas pelayanan infrastruktur dan fasilitas publik dari perkotaan PKN/PKW melalui pemanfaatan investasi untuk mendukung wilayah			Konsultasi dan Pendampingan	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat (Kesbangpol)*)	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x	
				Program Pendidikan Politik Masyarakat*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x	
				Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (Satpol pp*)	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x	
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x	
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x	
	Infrastruktur Konektivitas Perkotaan	Infrastruktur dan Fasilitas di Kawasan Perkotaan Kegiatan/Pelayanan	Jalan dan Jembatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x	
				Jalan Akses Kantor Gubernur Yogora-Walesi STA 0+000 – STA 0+525	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Bina Marga	x	x			
				Jalan Akses Kantor Gubernur Yogora-Walesi STA 0+525 – STA 2+840	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Bina Marga	x	x			
				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x	
			Infrastruktur Konektivitas Perkotaan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x	
			Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x	x		

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	TAHUN							
							2025	2026	2027	2028	2029			
hinterland di sekitarnya			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x					
			Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x					
			Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x					
			Program Pengendalian pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua	TBD	x	x	x					
		Bangunan Gedung	Pembangunan Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Cipta Karya	x	x						
			Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Cipta Karya	x	x						
			Pembangunan Gedung MRP Provinsi Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Cipta Karya	x	x						
		Permukiman	Pembangunan SPAM Jayawijaya	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Cipta Karya			X	x			x	
			Rumah Khusus ASN	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Perumahan	x	x						
	Infrastruktur Perumahan Pusat Perkotaan		Bantuan PSU untuk Rumah Milik	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Perumahan	x	x						
			Rumah Susun ASN Pemprov (1 Tower, 3 Lantai, T.36)	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR	Perumahan	x	x						
			Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kab. Jayawijaya	Kab. Jayawijaya	Kementerian PUPR/ Dinas Perkim Provinsi Papua/ Swasta	Perumahan	x	x	X	x			x	
		Sarana dan Prasarana		Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	X	x			

RPWProvinsi Papua Pegunungan
Tahun 2025-2034

GRAND STRATEGY	PROGRAM	KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR (HARD AND SOFT)	RENCANA AKSI	LOKASI SPESIFIK	K/L	UNOR	TAHUN							
							2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
		Pendukung Wilayah <i>Hinterland</i> Prasarana Umum Energi	Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG)*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x				
			Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x				
			Program Pengembangan ESDM*	Prov. Papua	Pemerintah Prov. Papua*	TBD	x	x	x	x				

Keterangan:

*Peraturan Daerah Provinsi Papua No.3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 Provinsi Papua

Sumber: Hasil Analisis,2023



BAB 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPIW



BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pada bab ini terkait evaluasi pelaksanaan yaitu terkait kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW digunakan sebagai klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW selanjutnya.

9.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Kementerian PUPR dalam menyiapkan dokumen Rencana pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat menggunakan pendekatan berdasarkan pengembangan wilayah dalam hal ini disebut dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah (RPIW). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan infrastruktur dalam hal ini dokumen RPIW.

Pemantauan pelaksanaan Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi pelaksanaan RPIW dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Pemilihan jenis evaluasi disesuaikan dengan tujuan evaluasi tersebut: 1) Evaluasi

Pelaksanaan RPIW, dan 2) Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi di wilayah Provinsi Papua Pegunungan akan berbeda dengan wilayah lainnya. Kaitannya dengan pemantauan dan evaluasi akan terkait dalam pengambilan data primer. Pengambilan data primer di Provinsi Papua Pegunungan harus mempertimbangkan keterbatasan ketersediaan pilihan moda transportasi menuju lokasi, kondisi akses menuju lokasi infrastruktur, wilayah yang relatif terlalu besar sehingga jarak antar wilayah jauh dan butuh waktu tempuh yang lama, dan wilayahnya rentan keamanan.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW sebagai tindakan korektif/akselerasi/klarifikasi atas pelaksanaan program dari dokumen RPIW dan memberikan rekomendasi bagi keberlanjutan dokumen RPIW disesuaikan dengan dinamika perubahan lingkungan strategi yang terus berkembang (*living document*).

9.2 Tujuan

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW bertujuan:

- Pemantauan dilakukan untuk melihat perkembangan implementasi dokumen RPIW, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- Evaluasi merupakan tindakan untuk mengetahui pencapaian/implementasi hasil, kemajuan, dan kendala dari dokumen RPIW berdasarkan output (infrastruktur terbangun), *outcome* (keberfungsian dari infrastruktur yang terbangun), *benefit* (manfaat dari berfungsinya infrastruktur), *impact* (dampak dari terimplementasikannya dokumen RPIW), dan rekomendasi (keberlanjutan dari dokumen RPIW).

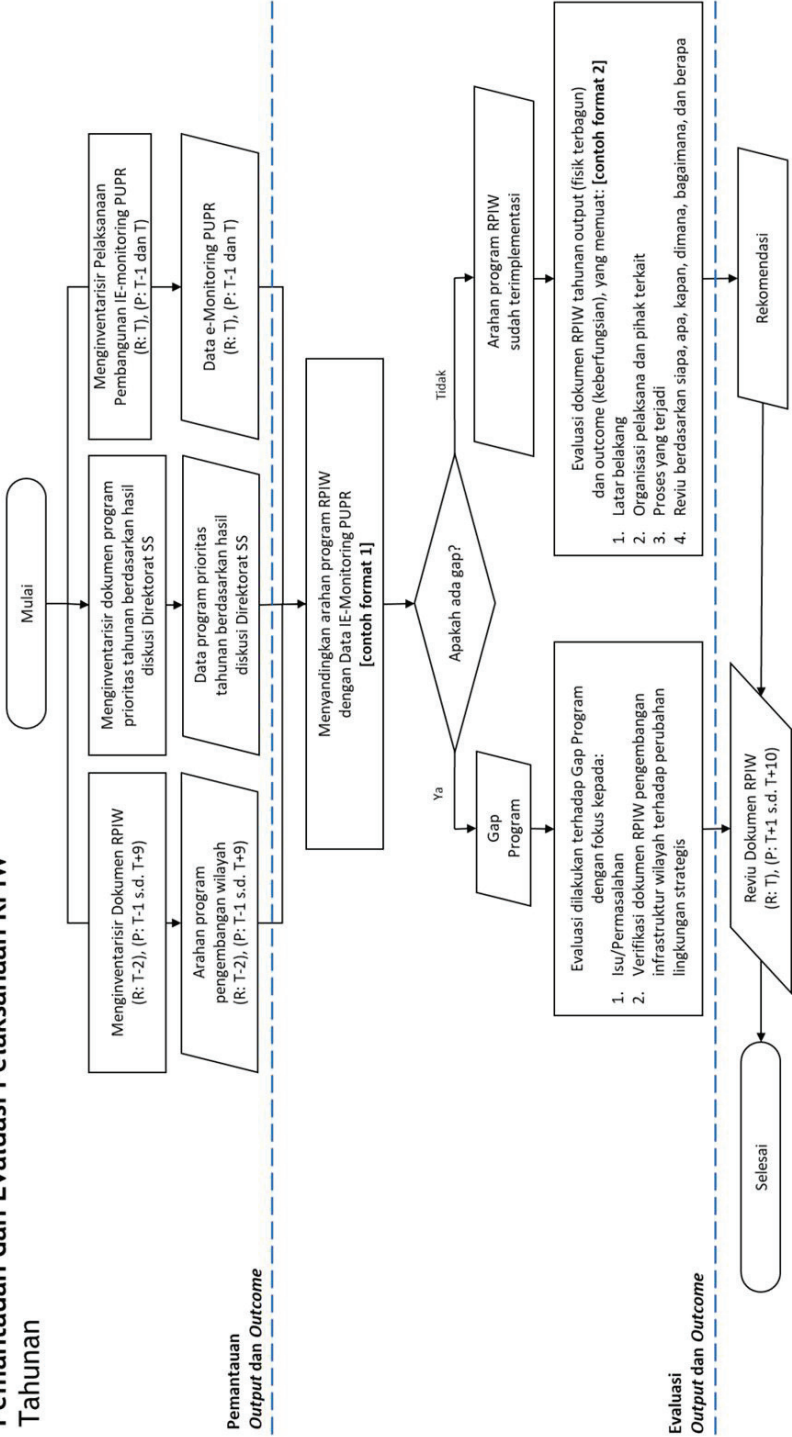
9.3 Jenis Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Pelaksanaan RPIW
 - a. Pemantauan Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW pada Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR per tahun.
 - b. Pemantauan Lima (5) Tahunan mengamati perkembangan pelaksanaan dari dokumen RPIW pada Bab 8 Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur PUPR per 5 tahun).
2. Evaluasi Pelaksanaan RPIW
 - a. Evaluasi Tahunan (output dan outcome) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.
 - b. Evaluasi Lima (5) Tahunan (benefit, impact, dan keberlanjutan) mengeluarkan rekomendasi keberlanjutan program pengembangan wilayah.

Tahapan dan proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPIW dapat dilihat pada Gambar 9.1, Gambar 9.2 dan Tabel 9.1.

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW
Tahunan



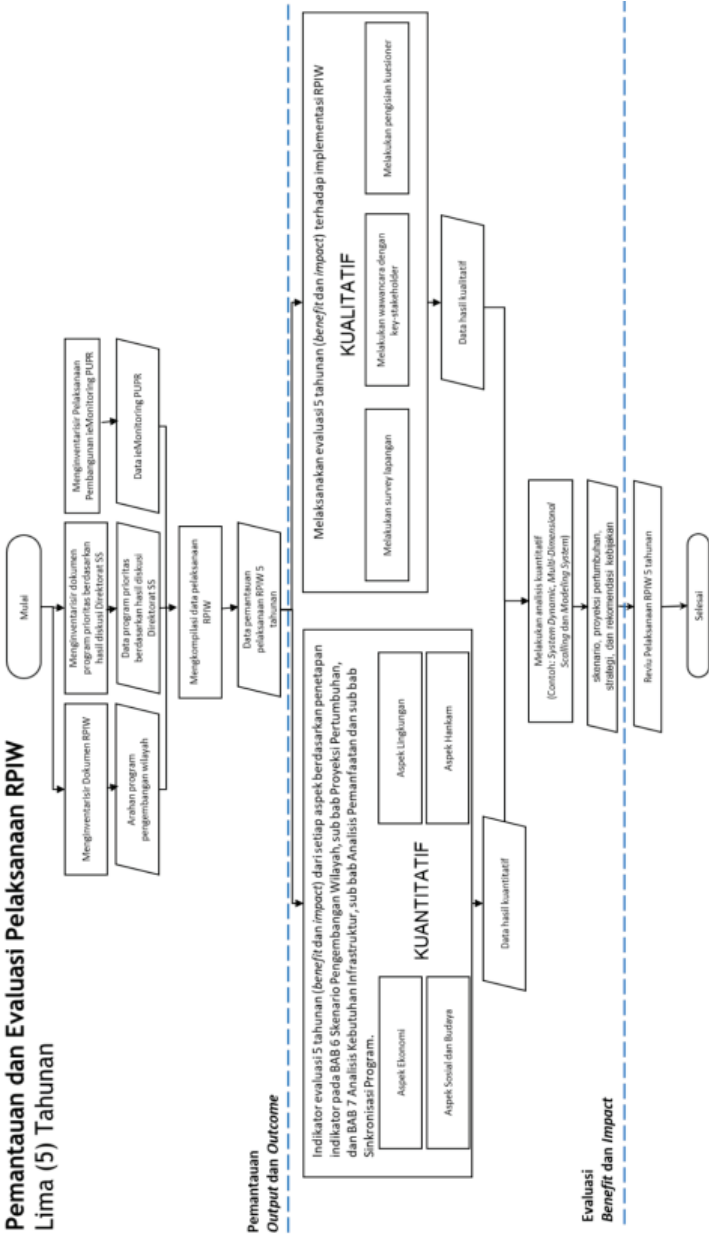
Gambar 9.1 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW Dalam Tahunan

Sumber: Pedoman Muatan RPIW, 2021

Tabel 9.1 Contoh Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW

Dukungan Perencanaan	Infrastruktur	Pembiayaan (Cost Effectiveness)	Readines Kriteria	Wilayah yang dikembangkan	Keterbangunan infrastruktur (Output)	Keberfungsian Infrastruktur (Outcome)	Manfaat Infrastruktur	Dampak pembangunan Infrastruktur	Isu Pemmasalahan yang dihadapi dengan terangnya infrastruktur

Sumber: Pedoman Muatan RPIW, 2021



Gambar 9.2 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RPIW Dalam Lima (5) Tahunan

Sumber: Pedoman Muatan RPIW, 2021



www.pu.go.id